



PKN 2022

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI LITERASI BERBASIS DIGITAL

SARJAYADI, SS

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REGIONAL BUKITTINGGI**



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

Judul : Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara melalui Literasi Berbasis Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi

Nama : SARJAYADI, SS
NIP : 197003041993061001

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi

Instansi : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi

Kelas/Kelompok : V
Nomor Absen : 26/PKN II-XXVIII/2022
Angkatan : XXVIII

Disetujui diseminarkan pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, 6 Desember 2022

Coach

Mentor

Dra. HARTINI, MM
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 195902011985032001

Dr. SUGENG HARIYONO, M Pd.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196610171992031001

Mengetahui:
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

MOHAMMAD RIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

**BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 11.00 - 11.45
Tempat : BPSDM Kemendagri

Telah diseminarkan Laporan Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

Judul : Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara melalui Literasi Berbasis Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi
Disusun Oleh : SARJAYADI, SS
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi
Kelas/Kelompok : V
Nomor Absen : 26/PKN II-XXVIII/2022

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari *Penguji, Mentor, dan Coach.*

Coach

Dra. HARTINI, MM
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 195902011985032001

Evaluator

Prof. Dr. NURLIAH NURDIN, S.Sos., MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197207101998032001

Peserta

SARJAYADI, SS
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 1970030419960311001

Mentor

Dr. SUGENG HARIYONO, M Pd.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196610171992031001

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETESI PEMERINTAHAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI LITERASI BERBASIS DIGITAL
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

**OLEH
SARJAYADI, SS
(NDH 40)**

Coach

Dra. HARTINI, MM
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 195902011985032001

Evaluator

Prof. Dr. NURLIAH NURDIN, S.Sos., MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197207101998032001

Peserta

SARJAYADI, SS
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 1970030419960311001

Mentor

Dr. SUGENG HARIYONO, M Pd.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196610171992031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT sehingga pada kesempatan ini penulis bisa menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan yang dalam tahapan ini peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Tahun 2022 pada Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, telah melaksanakan kegiatan/program perubahan selama 2 (dua) bulan di instansi masing-masing peserta.

Dalam laporan ini, kami telah melaksanakan Proyek Perubahan dengan judul Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Berbasis Digital Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah pada wilayah kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi.

Pada kesempatan ini sekaligus juga kami menyampaikan terimakasih kepada Coach, Mentor dan pihak panitia penyelenggara yang telah memberikan bimbingan dan saran terkait proyek perubahan yang akan dilaksanakan.

Semoga nantinya perubahan ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sehingga dapat membantu dalam mewujudkan tata kelola pengembangan kompetensi pemerintahan yang sesuai regulasi.

Jakarta, 6 Desember 2022

SARJAYADI, SS

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 1970030419960311001

DAFTAR ISI

Cover	
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Berita Acara Seminar	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
<i>Executive Summary</i>	ix
I RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	1
A. Deskripsi Proyek Perubahan	1
B. Latar Belakang	2
C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan	11
D. Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil)	13
E. Tahapan Perubahan Rencana Strategis	13
F. Rencana Strategi Marketing	20
II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	28
A. Capaian Tahapan Rencana Strategis	28
B. Implementasi Strategi Marketing	48
C. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran... ..	54
III PENUTUP	56
A. Lesson Learnt.....	56
B. Kesimpulan ..	57
C. Saran	59
D. Hasil Implementasi Rencana Pengembangan Diri	59
E. Rencana Tindak Lanjut	62
Profil Peserta	63
Daftar Pustaka	64
Lampiran	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir	10
Gambar 1.2 <i>Road Map</i> Penyelesaian Proyek Perubahan	17
Gambar 1.3 Kuadran <i>Stakeholder</i>	21
Gambar 2.4 Membangun Komitmen dengan Kepala BPSDM Kemendagri	31
Gambar 2.5 Membangun Komitmen dengan Bupati Dharmasraya ...	33
Gambar 2.6 Membentuk Tim Efektif	34
Gambar 2.7 Koordinasi ke Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota	36
Gambar 2.8 Koordinasi ke Pemerintah Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung	36
Gambar 2.9 Koordinasi ke Pemerintah Kota Padang dan BPSDM Provinsi Sumatera Barat	37
Gambar 2.10 Koordinasi dengan Walikota Solok	37
Gambar 2.11 Rapat Persiapan <i>Focus Group Discussion</i>	38
Gambar 2.12 Dokumentasi Narasumber Utama FGD	39
Gambar 2.13 Dokumentasi Pelaksanaan FGD	39
Gambar 2.14 Rapat Persiapan <i>Focus Group Discussion</i>	39
Gambar 2.15 Rapat persiapan Penyusunan materi literasi kompetensi pemerintahan	40
Gambar 2.16 Tampilan <i>Learning Management System</i> (Sikuat.layanan.go.id).....	42
Gambar 2.17 Rapat Persiapan Literasi Kompetensi Pemerintahan	43
Gambar 2.18 Rapat Pelaksanaan Literasi Kompetensi Pemerintahan	44
Gambar 2.19 Laporan Penggunaan <i>Learning Management System</i> (Sikuat.layanan.go.id)	47
Gambar 2.20 Peta <i>Stakeholder</i>	49
Gambar 2.21 Dokumentasi Promosi pada Aplikasi Instragram	53
Gambar 2.22 Dokumentasi Promosi pada LMS (Sikuat.layanan.go.id)	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018 – 2021 ...	5
Tabel 1.2 Perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan	15
Tabel 1.3 Analisis Pembobotan Prioritas Area Perubahan	16
Tabel 1.4 <i>Milestones</i> Proyek Perubahan	18
Tabel 1.5 Analisa <i>Stakeholder</i>	22
Tabel 1.6 Strategi Komunikasi <i>Stakeholder</i> Proyek Perubahan	25
Tabel 1.7 Tingkatan Produk Proyek Perubahan	26
Tabel 2.8 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan	29
Tabel 2.9 Daftar Koordinasi dengan Pimpinan Daerah	34
Tabel 2.10 Data Peserta Literasi Kompetensi Pemerintahan.....	45
Tabel 2.11 Peranan <i>Stakeholder</i> Internal	48
Tabel 2.12 Peranan <i>Stakeholder</i> Eksternal	48
Tabel 2.13 Strategi Komunikasi	50
Tabel 2.14 Strategi Pengembangan Diri	62

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCECUTIVE SUMMARY)

Mengacu kepada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 233 ; 2, selain memenuhi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan sosio kultural, Aparatur Sipil Negara harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Berdasarkan realisasi capaian kegiatan tahun 2018 s.d 2021 di PPSDM Regional Bukittinggi, masih belum ada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang berkaitan langsung dengan pengembangan kompetensi pemerintahan. Ini juga menjadi perhatian bagi bagi Kementerian Dalam Negeri khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan UPT-nya untuk lebih serius merancang dan melaksanakan pengembangan kompetensi pemerintahan.

Proyek Perubahan “Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara melalui Literasi Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi” merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan pengembangan kompetensi pemerintahan ideal.

Implementasi Proyek Perubahan ini melaksanakan target yang telah direncanakan pada milestone jangka pendek melalui inovasi dengan tahapan kegiatan berupa:

1. Membangun Komitmen Proyek Perubahan;
2. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;
3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan *stakeholders* wilayah kerja terpilih;
4. Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi berbasis digital; dan
5. Melaksanakan Literasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan berbasis digital.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pada milestone jangka pendek antara lain:

1. Terbentuknya komitmen antara para *stakeholder* baik internal maupun eksternal untuk mendukung terlaksananya pengembangan kompetensi pemerintahan bagi para Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja PPSDM Regional Bukittinggi Kemendagri.

2. Terbentuknya tim efektif proyek perubahan yang dibagi dalam 2 kelompok tim yaitu; 1) Tim Teknis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi ASN melalui Literasi berbasis Digital dan 2) Tim Penyusun Materi Pembelajaran Literasi Pemerintahan
3. Terlaksananya kegiatan *Focus Group Discussion* yang dihadiri oleh 25 dari 42 orang narasumber yang diundang yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM di Instansi Pemerintah se-Sematera Barat. Sedangkan yang menjadi Narasumber utama kegiatan FGD adalah Walikota Solok dan Kepala BPSDM Kemendagri.
4. Terbuatnya konten pembelajaran yang akan diakses pada *Learning Management System* dan ditayangkan pada kegiatan Literasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital.
5. Terlaksananya kegiatan Literasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dengan keikutsertaan peserta sebagai berikut:
 - a. Jumlah Peserta registrasi LMS sebanyak 1224
 - b. Jumlah Peserta berhasil Login LMS sebanyak 881
 - c. Jumlah Peserta mengikuti Literasi Kompetensi Pemerintahan secara synchronous sebanyak 467
 - d. Jumlah Peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat 383 orang.

Peserta pelatihan secara pengetahuan menunjukkan peningkatan sebesar 7.45 poin dari skor rata-rata tes kemampuan awal sebesar 72, 55 menjadi 80 pada rata-rata Skor tes kemampuan akhir.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan jangka pendek, dinilai berhasil mewujudkan langkah awal yang menjanjikan dalam pencapaian peningkatan kompetensi pemerintahan di daerah khususnya wilayah kerja PPSDM Regional Bukittinggi. Strategi dengan pembentukan forum *Focus Group Discussion* memiliki peran yang sangat besar terhadap penyamaan persepsi para *stakeholder* eksternal terkait pentingnya pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah. Kedepannya, keterlibatan *stakeholder eksternal* pun akan terus dipertahankan agar PPSDM Regional Bukittinggi dapat menjalin Kerjasama dalam peningkatan kompetensi pemerintahan bagi para ASN di instansi daerah.

Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara akan terus disempurnakan pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang dengan target akhir terlaksananya penyebaran literasi kompetensi Pemerintahan kepada ASN Seluruh Indonesia.

BAB I

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Deskripsi Proyek Perubahan

Proyek Perubahan “Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi” merupakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan pengembangan kompetensi pemerintahan ideal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa aturan-aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan adanya proyek perubahan ini, diharapkan pengembangan kompetensi pemerintahan bagi aparatur pemerintah pada pemerintahan daerah semakin mendorong bagi penyelenggara pemerintahan untuk semakin menguasai kompetensi pemerintahan sehingga memberikan dampak kepada pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan. Karena pemangku kepentingan yang berada wilayah kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi cukup besar dari segi jumlah dan sebaran wilayah, diharapkan produk dari proyek perubahan ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi permasalahan dan kendala-kendala yang selama ini dihadapi, khususnya terkait kemampuan aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemerintahan pada level pemerintah daerah. Pengembangan kompetensi pemerintahan melalui literasi berbasis digital akan menjadi hal yang mendasari Proyek Perubahan ini, dan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai inovasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait kompetensi dan integritasnya.

B. Latar Belakang

1. Urgensi

Sebagaimana diketahui bersama bahwa persaingan global memberikan tekanan untuk selalu produktif untuk dapat bertahan dan era globalisasi yang merupakan era tanpa batas disertai dengan persaingan yang ketat, berat, cepat dan rumit, memberikan dampak yang nyata kepada seluruh sector kehidupan di dunia. Hal ini hanya dapat diatasi dengan strategi tepat oleh manusia yang berkualitas dengan strategi yang efisien, efektif dan produktivitasnya berhasil dalam persaingan global. Strategi yang harus dilakukan dapat berupa menerapkan fungsi-fungsi manajemen pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk menyelesaikan permasalahan dan menjawab isu-isu strategis lainnya.

Dalam hal pengembangan kompetensi aparatur sipil negara terdapat beberapa tantangan dalam rangka mewujudkan komponen kompetensi aparatur sipil negara yang profesional dan berkualitas sesuai konsep yang disampaikan sebelumnya. Tantangan tersebut berupa kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang terbatas, perencanaan dan penganggaran, disain pengembangan kompetensi yang belum sesuai target dan dan hasil (*competency mismatch*). Mengacu kepada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 233 ; 2, selain memenuhi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan sosio kultural, harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Selanjutnya bahwa aparatur sipil negara harus memiliki 4 (empat) kompetensi dalam mendukung tugas pokok dan jabatannya selaku penyelenggara birokrasi. Kompetensi tersebut berupa kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural serta kompetensi pemerintahan. Kemudian merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintah dijelaskan bahwa kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas

pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kemendagri dan Pemda secara professional. Selanjutnya juga ditegaskan bahwa kompetensi pemerintahan diwujudkan ke dalam penguasaan standar kompetensi itu sendiri dengan melakukan uji kompetensi bagi pegawai aparatur sipil negara.

Selaku penyelenggara pemerintahan, aparatur sipil negara didorong untuk menguasai kompetensi pemerintahan yang meliputi tujuh komponen utama yaitu memahami *kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta etika pemerintahan*. Dengan demikian aparatur pemerintahan didorong dan diarahkan untuk selalu mengembangkan kompetensi pemerintahan dalam bentuk apapun. Konsep pengembangan kompetensi pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai strategi untuk menjawab tantangan diatas salah satunya dengan melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri juga dijelaskan bahwa pelatihan ini merupakan jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan dalam negeri pada setiap jenjang organisasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya kebijakan tentang pengembangan kompetensi pemerintahan tersebut masih ditemui kendala-kendala dalam implementasinya di lapangan. Kendala tersebut berupa *political will* dari pengambilan kebijakan yang masih terbatas pentingnya penguasaan kompetensi pemeritahan, hal ini juga disebabkan oleh pelatihan ini bukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan dan diikuti oleh pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pengembangan kompetensi pegawai ASN merupakan isu strategis dalam penningkatan kapasitas aparatur sipil negara untuk menjawab

tantangan masa depan dapat berupa *overstaff* dan *understaff*, budaya kerja dan produktivitas yang rendah, belum menjiwai profesi sebagai Aparatur Sipil Negara, penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, kesempatan untuk mengembangkan diri masih terbatas, pengembangan kompetensi belum sesuai tugas pokok dan jabatan, masih rendahnya tingkat literasi aparatur sipil negara terutama literasi pemerintahan.

Dilansir dari *wikipedia*, istilah literasi dalam bahasa latin disebut sebagai *literatorus*, yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa, mengutip pada buku yang ditulis oleh Ni Nyoman Padmadewi dan Luh Putu Artini, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan berbahasa mencakup kemampuan dalam menulis, berbicara, menyimak, dan kemampuan berpikir lainnya. Konsep dasar dari literasi berupa literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Pengertian pemerintah dapat dijelaskan dalam arti sempit, yaitu suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan di suatu negara. Sedangkan pemerintahan organisasi bagi orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur urusan negara. Bisa juga pemerintahan diartikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang terpilih untuk memimpin suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Literasi pemerintahan dapat diartikan yaitu kemampuan dari aparatur pemerintah dalam menjelaskan dan memahami kebijakan-kebijakan dalam mengelola, mengatur jalannya system pemerintahan. Literasi pemerintahan merupakan suatu yang harus dipahami oleh aparatur yang menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan, hal ini juga berhubungan dengan beberapa kompetensi pemerintahan yang harus dikuasai dan dipahami oleh aparatur.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur sipil Negara, Pusat Pengembang Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pengembangan kompetensi, khusus untuk pengembangan kompetensi pemerintahan. Berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang sudah dilaksanakan dari tahun 2018 sampai 2021 ini. Beberapa masalah yang sering dihadapi saat pra dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan fungsi pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri dimana belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang sudah ada. Dalam hal menjalankan fungsi sebagai pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan, kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan belum bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Dari realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan belum ada kegiatan pengembangan kompetensi aparatur bidang pemerintahan, sebagai mana terlihat pada data berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018 - 2021

No	Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
		Angk	Alumni	Angk	Alumni	Angk	Alumni	Angk	Alumni
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	12	469	5	201	3	81	1	40
2	Pelatihan Dasar CPNS	11	432	79	2.741	16	618	45	1.793
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/Diklatpim TK IV	7	258	6	201	0	0	3	90
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator/Diklatpim TK III	4	154	4	152	0	0	4	155
5	Pendidikan dan Pelatihan P2UPD	0	0	0	0	2	60	4	135
6	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Prioritas Nasional	2	59	4	120	0	0	4	120
7	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lainnya	2	58	0	0	0	0	0	0
8	Orientasi Anggota DPRD	0	0	4	240	0	0	0	0
	Jumlah	38	1.430	102	3.655	21	759	61	2.333

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa, selama beberapa tahun belakangan kegiatan yang dilaksanakan masih belum ada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang berkaitan langsung

dengan pengembangan kompetensi pemerintahan. Ini juga menjadi perhatian bagi bagi Kementerian Dalam Negeri khusus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan UPT-nya untuk lebih serius merancang dan melaksanakan pengembangan kompetensi pemerintahan.

Kemudian, dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pada masa era transformasi digital dan era revolusi industri 4.0 sekarang ini harus sejalan dengan strategi pembangunan aparatur sipil negara ke depan dalam mewujudkan *SMART ASN*. Dalam konsep *SMART ASN* juga dijelaskan ruang lingkupnya yaitu literasi digital dalam berbagai hal. Ada empat ruang lingkup literasi digital yaitu *digital skill*, *digital culture*, *digital ethic* dan *digital safety*. Dengan adanya acuan literasi digital tersebut kepada ASN didorong untuk menyesuaikan implementasinya di setiap lini penyelenggara birokrasi tidak terkecuali dalam pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi pada saat sekarang tidak lagi dilaksanakan secara konvensional tapi sudah beralih dari metode pengembangan secara hybrid dengan pemanfaatan teknologi informasi. Metode penyelenggaraan pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*daring*) melalui *platform video conference*. Konsep penyelenggaraan pengembangan kompetensi pemerintah melalui literasi digital juga mengadopsi dengan konsep penggunaan *platform video conference*.

Melalui pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis literasi digital nantinya, berbagai kebijakan bidang pemerintahan mulai dari level pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diterjemahkan dengan baik. Ini didukung dengan kompetensi aparatur menguasai kompetensi-kompetensi pemerintahan. Melalui pengembangan kompetensi dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna dan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Suatu organisasi akan mencapai kualitas terbaiknya jika diperkuat oleh sumber daya yang berkualitas, visioner dan mampu menyelesaikan masalahnya (Sedarmayanti dkk, Tata Kelola Organisasi Dinamis, hal 341). Kemudian

pembangunan modal manusia (*human capital*) yang efektif dapat dilakukan melalui investasi dengan senantiasa memperbaharui strategi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi tepat sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan era digitilisasi. Secara konseptual, aparatur yang berpendidikan dan berpengetahuan memiliki kompetensi yang memadai, lebih mampu memecahkan masalah sendiri.

2. Penelitian Kepustakaan

Sumber daya manusia merupakan factor yang paling penting dan paling menentukan dalam setiap organisasi. Sumber daya manusia merupakan penentu jalan-tidaknya ataupun maju mundurnya organisasi. Sebaik apapun system yang telah disusun atau dilengkapi dan apapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam organisasi, tanpa didukung oleh keberadaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak akan berarti banyak bagi keberadaan organisasi. Dengan sumberdaya manusia pula, sistem sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi dapat terus disempurnakan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan bagi percepatan penyelesaian tugas. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (pasal 70) ditegaskan : (1) setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, seminar, dan penataran; (2) Dalam pengembangan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Secara konsep pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja (Hasibuan: 2002: 69). Pengembangan

didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kariernya. Persiapan karir jangka panjang dari seorang pegawai untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan pegawai. pengembangan meliputi seluruh aspek peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang umum organisasi. Hasilnya bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki prestasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan.

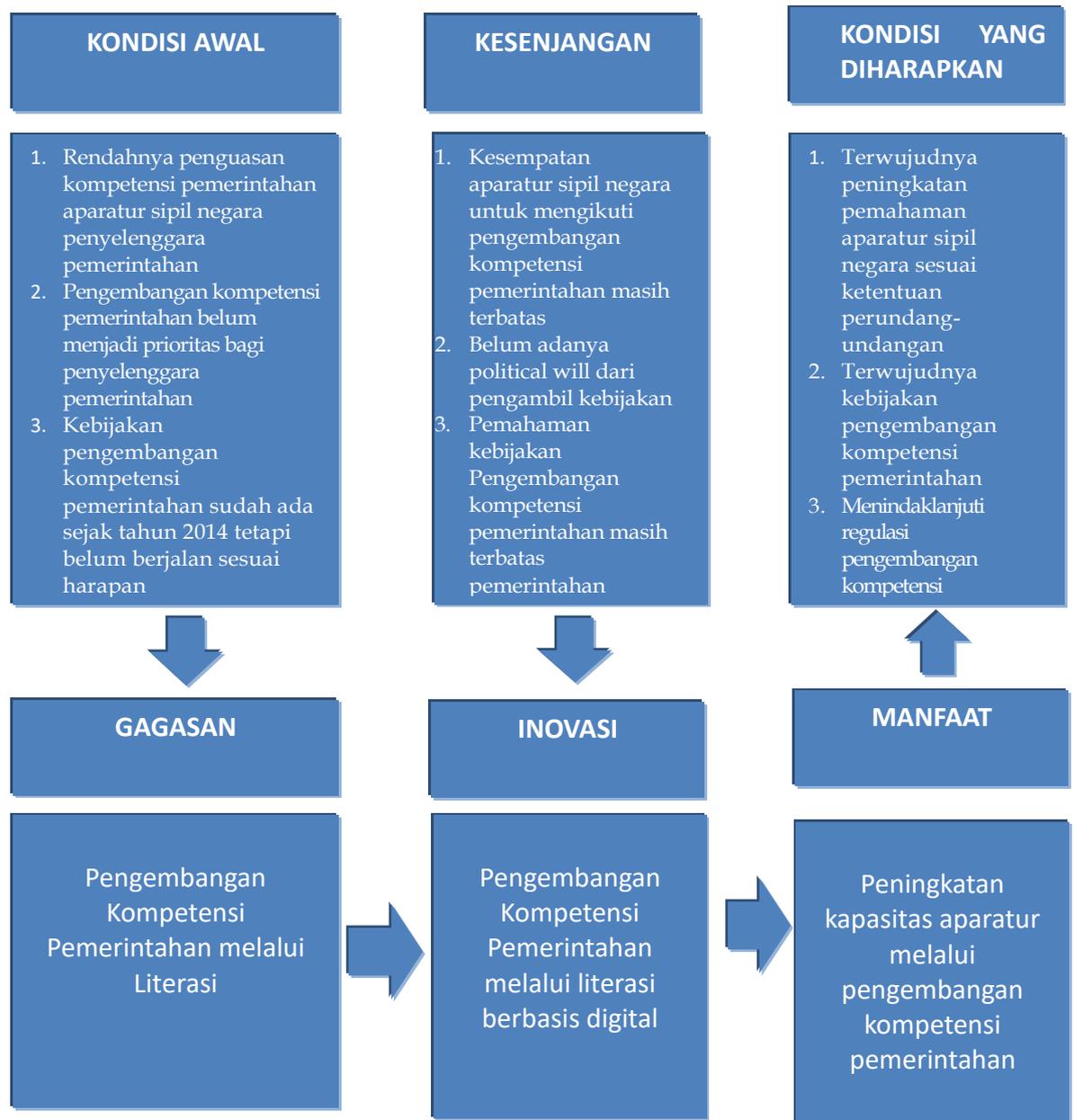
Dalam tahap pengembangan pegawai, Simamora (1997:342) mengungkapkan dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki pegawai agar dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan dipandang sebagai awal pengembangan pegawai yaitu dengan diadakannya proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dijelaskan bahwa bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan (Pasal 63 Ayat 4).

Aparatur Sipil Negara merupakan Sumber Daya Manusia yang memegang peranan penting dan sangat menentukan, sebab Aparatur sipil negara sebagai pelaksana pemerintahan yang merumuskan kebijaksanaan Negara dalam rangka kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut dikatakan oleh Kartasasmitha (2006:10) bahwa "Manusia adalah Sumber Daya Pembangunan yang paling utama diantara Sumber Daya lain yang harus terus menerus dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai

pelaksana dan penggerak pembangunan” Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, pembangunan aparatur Negara sangatlah dibutuhkan. Pada era globalisasi dan transformasi digital sekarang ini Aparatur Sipil Negara memiliki peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, perhatian kita perlu diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang digalakkan. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dapat dilakukan melalui memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengikuti pengembangan kompetensinya.

Spencer dan Spencer (Sudarmanto, 2009) menyebutkan komponen-komponen dari kompetensi mencakup beberapa hal berikut : 1. *Motives* (motif), yaitu sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan seseorang yang menyebabkan tindakan. 2. *Traits* (sifat), yaitu karakteristik-karakteristik fisik dan repons-respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. 3. *Self concept* (konsep diri), yaitu sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. 4. *Knowledge* (pengetahuan), yaitu pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang spesifik tertentu. 5. *Skill* (keahlian), yaitu kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu.

3. Alur Pikir



Gambar 1.1 Alur Pikir

C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

Proyek Perubahan ini dilaksanakan dengan sejumlah tujuan dan manfaat yang akan didapatkan oleh organisasi adaptif. Tujuan dan manfaat dalam Proyek Perubahan ini antara lain ;

1. Tujuan Proyek Perubahan

a. Jangka Pendek (2 Bulan)

- 1) Terbentuknya Tim Efektif
- 2) Terlaksananya *focus group discussion stakeholders* pemerintahan wilayah kerja terpilih
- 3) Terbentuknya Tim Penyusun Desain Pembalejaran Pengembangan Kompetensi Pemerintahan melalkui Litaerasi berbasis Digital
- 4) Tersusunnya disain pengembangan kompetensi literasi pemerintahan berbasis teknologi/digital
- 5) Terwujudnya Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota tentang Pelaksanaan pengembangan kompetensi Pemerintahan melalui Literasi Berbasis Digital (3-4 kab/kota di Sumatrera Barat)
- 6) Terlaksananya pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi berbasis digital percontohan
- 7) Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan melalui Literasi Berbasis Digital Percontohan

b. Tujuan Jangka Menengah (1 Tahun)

- 1) Menyempurnakan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi Berbasis Digital
- 2) Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Melalui Literasi Berbasis Digital kab/kota se Sumatera Barat
- 3) Membangun komitmen pengembangan kompetensi Pemerintahan melalui literasi pemerintahan berdigital dengan pemerintah daerah wilayah kerja

- 4) Melakukan koordinasi dengan Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi BPSDM Kemendagri dalam menindaklanjuti sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.
 - 5) Melakukan Koordinasi dengan BPSDM Provinsi Sewilayah kerja dalam proses pengembangan dan sertifikasi kompetensi pemerintahan.
- c. Tujuan Jangka Panjang
- 1) Melaksanakan program pengembangan kompetensi literasi pemerintahan regular tahunan sewilyah kerja
 - 2) Mengajukan *Policy Brief* kepada BPSDM Kemendagri terkait penyebarluasan literasi kompetensi Pemerintahan kepada ASN Seluruh Indonesia

2. Manfaat Proyek Perubahan

- a. Manfaat Bagi Internal Organisasi
- 1) Terlaksana tugas dan fungsi sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia di wilayah kerja
 - 2) Tersedianya disain pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis digital sebagai dokumen pengembangan kompetensi aparatur sipil negara
 - 3) Wujud dukungan pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Manfaat Bagi Eksternal Organisasi/Pemerintah Daerah
- 1) Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penguasaan kompetensi pemerintahan
 - 2) Tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki penguasaan kompetensi pemerintahan
- c. Manfaat Bagi Masyarakat
- Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik.

D. Output dan Outcome

1. *Output* kunci yang akan dihasilkan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini antara lain :
 - a. Laporan Pelaksanaan *focus group discussion stakeholders* pemerintahan pada wilayah kerja terpilih
 - b. Berita Acara *Focus Group Discussion*
 - c. SK Tim Penyusun Desain Pengembangan Kompetensi
 - d. Naskah disain pengembangan kompetensi literasi pemerintahan berbasis digital
 - e. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota tentang Pelaksanaan pengembangan kompetensi Pemerintahan melalui Literasi Berbasis Digital
 - f. Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui literasi pemerintahan berbasis digital percontohan
2. *Outcome* merupakan hasil jangka panjang yang didapatkan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini antara lain :
 - a. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Kompetensi Pemerintahan
 - b. Terlaksananya sertifikasi kompetensi Pemerintahan bagi ASN se-Wilayah Kerja

E. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

1. Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat menghasilkan manfaat yang efektif dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi literasi pemerintahan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, dan mempunyai nilai tambah bagi organisasi, diperlukan standar yang memadai mulai dari perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, evaluasi pengembangan kompetensi dan pembiayaan pengembangan kompetensi pemerintahan.

- a. Identifikasi Masalah

Beberapa identifikasi permasalahan dalam pengembangan kompetensi pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya penguasaan aparatur sipil negara terhadap kompetensi pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan
- 2) Belum tersedianya disain pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis teknologi
- 3) Pengembangan kompetensi pemerintahan belum menjadi prioritas bagi penyelenggara pemerintahan.
- 4) Pengembangan kompetensi pemerintahan masih sebatas regulasi yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya
- 5) Keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi pemerintahan

b. Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, dirumuskan permasalahan pengembangan kompetensi pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya penguasaan aparatur sipil negara terhadap kompetensi pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan
- 2) Pengembangan kompetensi pemerintahan belum menjadi prioritas bagi penyelenggara pemerintahan
- 3) Kebijakan pengembangan kompetensi pemerintahan sudah ada sejak tahun 2014 tetapi belum berjalan sebagai harapan.

c. Faktor Penyebab Masalah

Faktor penyebab masalah yang terjadi dalam pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan permasalahan tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

- 1) Kesempatan aparatur sipil negara untuk mengikuti pengembangan kompetensi pemerintahan masih terbatas;
- 2) Belum adanya political will dari pengambil kebijakan; dan

- 3) Pemahaman kebijakan Pengembangan kompetensi pemerintahan masih terbatas

d. Lingkup Perubahan

Ruang lingkup perubahan yang dilakukan salah satunya yaitu melakukan perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan sehingga muncul kesenjangan (GAP) sebagai fokus pemikiran gagasan perubahan dalam upaya menciptakan terobosan yang akan dilakukan.

- 1) Perbandingan kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan

Tabel 1.2 Perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan

No	Kondisi Saat Ini	GAP	Kondisi Yang Diharapkan
1	Rendahnya penguasaan kompetensi pemerintahan aparatur sipil negara penyelenggara pemerintahan	Kesempatan ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi pemerintahan masih terbatas	Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur sipil negara sesuai ketentuan perundang-undangan
2	Pengembangan kompetensi pemerintahan belum menjadi prioritas bagi penyelenggara	Belum adanya political will dari pengambil kebijakan	Terwujudnya kebijakan pengembangan kompetensi pemerintahan
3	Kebijakan pengembangan kompetensi pemerintahan sudah ada sejak tahun 2014	Pemahaman kebijakan Pengembangan kompetensi pemerintahan masih terbatas	Menindaklanjuti regulasi pengembangan kompetensi pemerintahan dengan melakukan penyesuaian

Dari hasil perbandingan kondisi di atas maka perlu disusun analisis sederhana berdasarkan kesenjangan (GAP) dan pertimbangan teknis dan kondisi lapangan. Berikut hasil analisis untuk kategori tingkat kemendesakan (*Urgency*), keseriusan dampak (*Seriousness*) dan perkembangan masalah (*Growth*).

Tabel 1.3. Analisis Pembobotan Prioritas Area Perubahan

No	Pembobotan Prioritas	Urgency	Seriousness	Growth	Jumlah	Rank
1.	Masih terbatasnya pemahaman aparatur sipil negara terhadap kompetensi pemerintahan	5	5	5	15	1
2.	Pengembangan kompetensi pemerintahan belum menjadi prioritas bagi penyelenggara pemerintahan	4	3	3	10	2
3	Pengembangan kompetensi pemerintahan masih sebatas regulasi yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya	3	3	3	9	3

Keterangan: Nilai pembobotan berdasarkan skala (1= Sangat tidak penting, 2 = Tidak Penting, 3 = Sedang, 4 = Penting, dan 5= Sangat Penting).

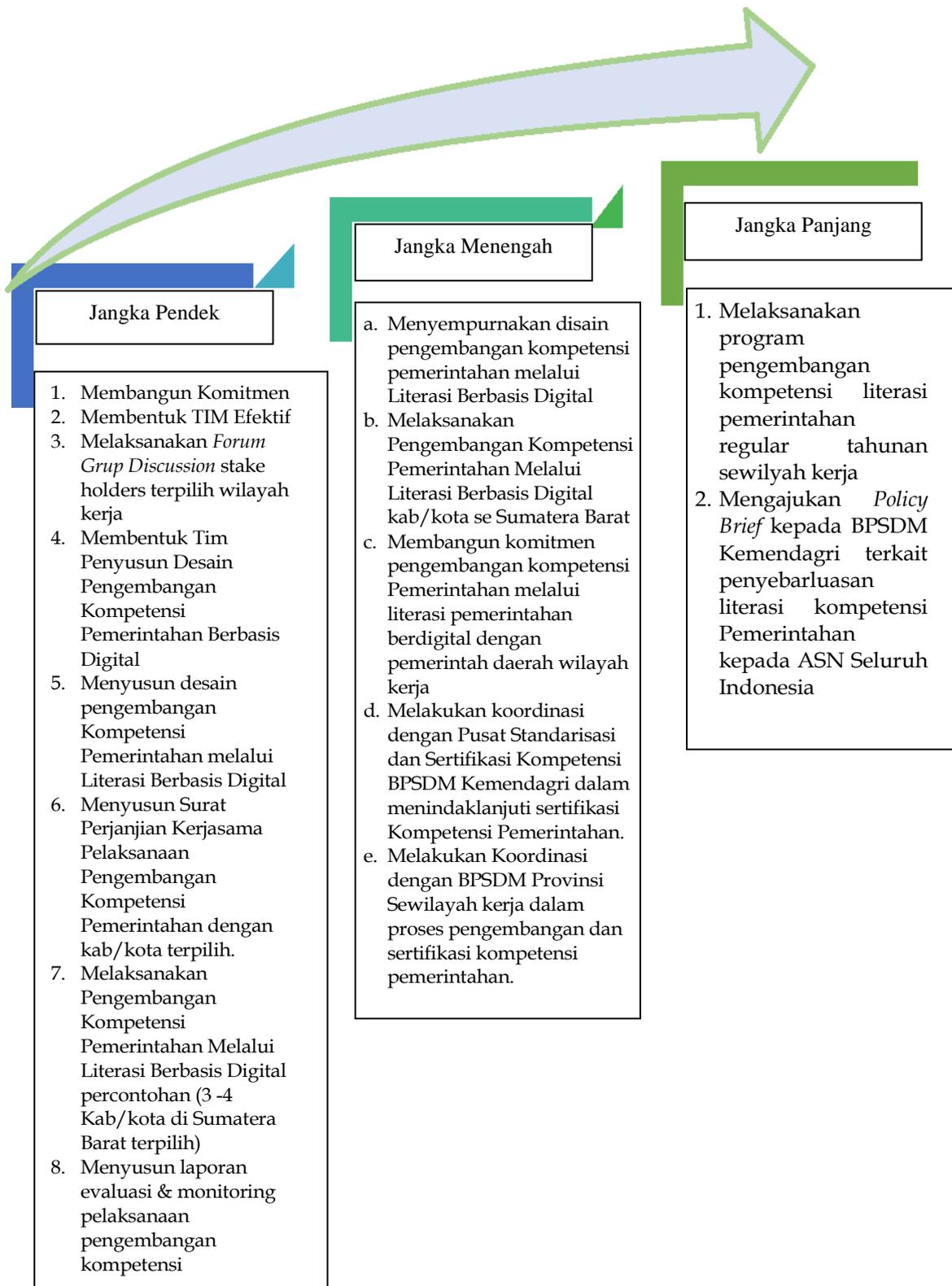
2) Terobosan/Inovasi

Berdasarkan penilaian Urgensi, Seriousness & Growth di atas terhadap permasalahan yang ada diperoleh nilai tertinggi adalah “Masih terbatasnya pemahaman aparatur sipil negara yang disebabkan terbatasnya kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi pemerintahan”, untuk itu Terobosan atau inovasi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan “Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Literasi Berbasis Digital” dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan *focus group discussion stakeholders* pemerintahan wilayah kerja terpilih (Sekretaris Daerah Kab/Kota se Sumatera Barat)
- b) Menyiapkan disain pengembangan kompetensi literasi pemerintah berbasis teknologi informasi
- c) Melaksanakan pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi berbasis digital percontohan (3-4 Kab/kota)

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Roadmap Pelaksanaan Proyek Perubahan



Gambar 1.2 Road Map Penyelesaian Proyek Perubahan

b. *Milestones/Pentahapan Proyek Perubahan*

Tahapan pelaksanaan proyek perubahan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan utama yaitu:

- a. Jangka Pendek (minggu ke 3 Bulan Oktober 2022 s/d minggu ke 1 Bulan Desember 2022)
- b. Jangka Menengah (Bulan Desember 2022 s/d Bulan April 2023)
- c. Jangka Panjang (satu/ dua tahun dan seterusnya)

Tabel 1.4 *Milestones* Proyek Perubahan

No	Tahap/Kegiatan	Output	Evidence	Waktu Pelaksanaan
JANGKA PENDEK				
1.	Membangun Komitmen : a. Koordinasi kepada Mentor b. Koordinasi awal dengan <i>Stakeholder</i> Intern & eksternal;	Terbangunnya keselarasan persamaan persepsi terkait gagasan pelaksanaan aksi per	Dokumentasi	Minggu I Oktober 2022
2.	Membentuk Tim Efektif : a. R a p a t identifikasi kebutuhan personalia/proyek perubahan b. Penyusunan SK Tim Efektif	Terbentuknya Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar hadir • Notulen • SK Tim Efektif • Dokumentasi 	Minggu III Oktober 2022
3.	Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> dengan <i>stakeholders</i> wilayah kerja terpilih a. Melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah se Sumatera Barat b. Menyiapkan disain <i>Focus Group Discussion</i> c. Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> d. Menyusun Berita Acara FG e. Menyiapkan dan menandatangani surat perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya <i>Focus Group Discussion</i> • Tersusunnya Berita Acara FGD • Terbentuknya Forum Literasi Pemerintahan se Sumatera Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara • Administrasi penyelenggaraan • Dokumentasi • Naskah konsep kerja tindakan lanjut forum literasi pemerintahan 	Minggu IV Oktober 2022
4.	Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi berbasis digital; a. Membentuk Tim Penyusun Desaian Pengembangan Kompetensi Pemerintahan melalui Literasi Berbasis	Tersedianya naskah disain pengembangan Kompetensi pemerintahan melalui Litetrasi berbasis digital	<ul style="list-style-type: none"> • SK TIM Penyusunan Naskah Pengembangan Kompetensi • Naskah perangkat pengembangan kompetensi 	Minggu V Oktober-awal November 2022

No	Tahap/Kegiatan	Output	Evidence	Waktu Pelaksanaan
	Digital b. Menyusun disain pengembangan kompetensi literasi pemerintahan c. Menyusun perangkat pembelajaran d. Finalisasi disain pengembangan kompetensi literasi digital		<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi 	
5.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Literasi Pemerintahan percontohan; a. Menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan b. Menyiapkan Learning Management System/LMS (Bekerjasama dengan BPSDM Kemendagri) c. Melaksanakan literasi pemerintahan berbasis digital d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Literasi Pemerintahan	Terlaksananya pengembangan kompetensi literasi pemerintahan percontohan	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi penyelenggaraan kerjasama Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi literasi pemerintahan Dokumentasi 	Minggu II & III November 2022
JANGKA MENENGAH				
6.	Menyempurnakan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi Berbasis Digital	Tersedianya disain pengembangan kompetensi yang sudah disempurnakan	<ul style="list-style-type: none"> Naskah pengembangan kompetensi pemerintahan 	Minggu III & IV Desember 2022
7	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Melalui Literasi Berbasis Digital untuk kab/kota se Sumatera Barat	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Melalui Literasi Berbasis Digital untuk kab/kota se Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Melalui Literasi Berbasis Digital untuk kab/kota se Sumatera Barat 	Minggu I Januari s.d Maret 2023
8.	Membangun komitmen pengembangan kompetensi Pemerintahan melalui literasi pemerintahan digitalisasi dengan pemerintah daerah wilayah kerja	Terbangunnya komitmen pengembangan kompetensi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Nota kesepahaman Dokumentasi 	Minggu V Desember 2022 sd Maret 2023

No	Tahap/Kegiatan	Output	Evidence	Waktu Pelaksanaan
9.	Melakukan koordinasi dengan Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi BPSDM Kemendagri dalam menindaklanjuti sertifikasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.	Terlaksananya koordinasi tindaklanjut sertifikasi Kompetensi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Surat Usulan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan sertifikasi Kompetensi Pemerintahan 	Minggu I Januari s.d Maret 2023
10.	Melakukan Koordinasi dengan BPSDM Provinsi Sewilayah kerja dalam proses pengembangan dan sertifikasi kompetensi pemerintahan.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi pemerintahan dengan BPSDM Provinsi sewilayah kerja	<ul style="list-style-type: none"> Surat Perjanjian Kerjasama kegiatan pengembangan Kompetensi Pemerintahan 	Minggu I Januari s.d Maret 2023
JANGKA PANJANG				
11.	Melaksanakan program pengembangan kompetensi pemerintahan melalui literasi berbasis digital regular tahunan <ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana kegiatan tahunan secara reguler 	Terlaksananya pengembangan kompetensi literasi pemerintahan secara reguler	<ul style="list-style-type: none"> Naskah program/ kegiatan tahunan 	Tahun selanjutnya
12.	Mengajukan <i>Policy Brief</i> kepada BPSDM Kemendagri terkait penyebarluasan literasi kompetensi Pemerintahan kepada ASN Seluruh Indonesia	Tersampainya <i>Policy Brief</i> penyebarluasan literasi kompetensi Pemerintahan ke BPSDM Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> Naskah <i>Policy Brief</i> penyebarluasan literasi kompetensi Pemerintahan 	Tahun selanjutnya

F. RENCANA STRATEGIS MARKETING

1. Identifikasi Stakeholder

Dalam pelaksanaan proyek perubahan perlu diketahui terlebih dahulu *stakeholder* terkait yang berpengaruh, mana *stakeholder* yang akan mendukung, netral, ataupun menolak serta dapat dipetakan *stakeholder* mana saja yang memiliki kepentingan (*interest*) dan memiliki pengaruh (*influence*) besar terhadap proyek perubahan ini.

a. Stakeholder Internal

- Kepala BPSDM KEMENDAGRI
- Kepala Pusat di Lingkungan BPSDM KEMENDAGRI
- Pegawai di lingkungan PPSDM KEMENDAGRI Regional

Bukittinggi

b. *Stakeholder* Eksternal

- Pimpinan Daerah Wilayah Kerja
- SEkretais Daerah sewilayah Kerja
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Wilayah Kerja
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Wilayah Kerja
- Kepala BKPSDM Kab/Kota Wilayah Kerja
- ASN se wilayah kerja

2. *Jenis Stakeholder*



Gambar 1.3 Kuadran *Stakeholder*

3. Analisa Stakeholders

Tabel 1.5 Analisa Stakeholder

No	Stakeholders		Analisa
1.	Promoters	:	Stakeholder pada kuadran ini merupakan Stakeholder Yang mempunyai kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga pengaruh/kekuatan yang tinggi untuk membantu membuat proyek perubahan tersebut berhasil. Metode komunikasi yang dilakukan pada kelompok ini lebih banyak dilakukan secara konsultatif langsung <i>face to face</i> , selalu mendengarkan mereka dan menjalin komunikasi dengan baik serta menjaga agar mereka tetap mengikuti perkembangan issue proyek perubahan
2.	Defenders	:	Stakeholder pada kuadran ini adalah stakeholder yang memiliki kepentingan besar untuk kegiatan tersebut berjalan, akan tetapi pengaruh/kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan. Metode komunikasi yang dilakukan adalah dengan merencanakan apa yang akan dikomunikasikan dan melaksanakan rapat kecil terkait peran apa yang diharapkan dari mereka
3.	Latents	:	Stakeholder pada kuadran ini merupakan stakeholders yang Tidak mempunyai kepentingan khusus dalam proyek perubahan, tetapi mempunyai pengaruh/kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka tertarik pada proyek perubahan tersebut. Metode komunikasi yang dilakukan adalah menggunakan media diskusi dalam

No	Stakeholders		Analisa
			memperoleh masukan tentang proyek perubahan, serta memastikan dukungan dari mereka.
4.	<i>Apathetics</i>	:	<i>Stakeholders</i> pada kuadran ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh mendukung proyek perubahannya sangat rendah.

4. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi diperlukan untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dimana makna yang diterima penerima pesan sama dengan makna yang disampaikan oleh pemberi pesan, sehingga keduanya mempunyai persepsi yang sama. Strategi merujuk pada pendekatan komunikasi menyeluruh yang akan diambil dalam rangka menghadapi tantangan yang akan dihadapi selama berlangsungnya proses komunikasi. Berbagai pendekatan dapat dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi serta dengan siapa komunikasi dilakukan seperti yang tertera pada kuadran *stakeholder* di atas. Metode komunikasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Konsultatif yaitu bersifat konsultasi, metode ini dapat dilakukan bila berkomunikasi dengan para *stakeholders*/kelompok besar pengaruhnya dan punya kekuatan terhadap keberhasilan proyek perubahan, dalam kelompok ini adalah para Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, komunikasi dilakukan secara konsultatif langsung *face to face*, selalu mendengarkan mereka dan menjalin komunikasi dengan baik serta menjaga agar mereka tetap mengikuti perkembangan issue proyek perubahan;
- Koordinasi yaitu mengatur proyek dengan pihak lain sehingga peraturan dan tindakan yang dilaksanakan tidak

saling bertentangan, penggabungan yang sederajat. Metode komunikasi ini dapat dilakukan bila berhadapan dengan *stakeholders* yang memiliki kepentingan besar untuk kegiatan tersebut berjalan, akan tetapi pengaruh/kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan. Metode komunikasi yang dilakukan adalah dengan merencanakan apa yang akan dikomunikasikan dan melaksanakan rapat kecil terkait peran apa yang diharapkan dari mereka.;

- Informatif yaitu bersifat penerangan. Metode ini dapat dilakukan bila melakukan komunikasi dengan *stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan khusus dalam proyek perubahan, tetapi mempunyai pengaruh/kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka tertarik pada proyek perubahan tersebut. Metode komunikasi yang dilakukan adalah menggunakan media diskusi dalam memperoleh masukan tentang proyek perubahan, serta memastikan dukungan dari mereka.;
- Persuasif yaitu mempengaruhi dengan membujuk, metode ini dapat dilakukan bila berhadapan dengan *Stakeholders* pada kuadran ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh mendukung proyek perubahannya sangat rendah.
- Edukatif yaitu mempengaruhi dengan memberikan fakta-fakta dan pengetahuan. Metode ini dapat dilakukan bila berkomunikasi dengan *stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh mendukung proyek perubahannya sangat rendah.

Adapun strategi komunikasi yang digunakan terhadap *stakeholder* dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Strategi Komunikasi Stakeholder Proyek Perubahan

No	Stakeholder	Kegiatan/ Tindakan	Teknik Komunikasi
1.	Kepala Daerah Terpilih Wilayah Kerja	Konsultatif	Tatap Muka/ Online
2.	Sekretaris Daerah Terpilih Wilayah Kerja	Konsultatif	Tatap Muka/ Online
3.	Kepala BKD/BPSDM Provinsi Terpilih Wilayah Kerja	Koordinatif	Tatap Muka/ Online
4.	Kepala BKPSDM Kab/Kota Terpilih Wilayah Kerja	Koordinatif	Tatap Muka/ Online
5.	ASN Wilayah Kerja	Edukatif dan persuasif	Penyampaian informatif

5. Strategi Marketing Mix

1. Product

Produk yang ditawarkan dalam proyek perubahan ini adalah disain pengembangan kompetensi literasi pemerintahan dan naskah komitmen kerjasama Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Literas Pemerintahan ASN, yang merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi diklat ASN dengan mempertimbangkan standar kompetensi jabatan yang selanjutnya akan digunakan sebagai pemetaan pengembangan karier.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Kompetensi dimaksud adalah kompetensi pemerintahan meliputi :

- a. Kebijakan Desentralisasi,
- b. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah,
- c. Pemerintahan Umum,
- d. Pengelolaan Keuangan Daerah,
- e. Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah,
- f. Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
- g. Etika Pemerintahan

Strategi pengembangan kualitas ASN yang berdasarkan

kepada pengembangan kompetensi berorientasi pada tingkatan produk yang diharapkan dapat memudahkan dalam strategi pemasaran kepada *stakeholder* dalam mendukung implementasi proyek perubahan. Adapun tingkatan produk dari disain pengembangan kompetensi literasi pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 1.7 Tingkatan Produk Proyek Perubahan

<i>Category</i>	<i>Product</i>
<i>Product</i>	1. <i>Focus group discussion stakeholders</i> pemerintahan 2. Naskah disain Pengembangan Kompetensi Literasi Pemerintahan 3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis digital
<i>Place</i>	PPPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI
<i>Price</i>	1. Sumber daya manusia Melek Literasi Pemerintahan 2. Dukungan <i>stakeholders</i>
<i>Promotion</i>	Sosialisasi
<i>Customers</i>	BPSDM Provinsi/BKPSDM Kab/Kota Wilayah Kerja

2. *Place*

Terobosan ini dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk jangka pendek dan 1 (satu) tahun untuk jangka menengah, dan selanjutnya akan diimplementasikan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi.

3. *Promotion*

Untuk memberikan pemahaman terhadap disain pengembangan kompetensi literasi pemerintah dilakukan sosialisasi kepada seluruh BKD/BPSDM Provinsi, BKPSDM Kab/Kota wilayah kerja.

4. *Price*

Penerapan dari konsep pengembangan kompetensi literasi

pemerintahan bagi ASN disertai dengan komitmen bersama dari *stakeholders*. Artinya ketika Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi menyusun Rencana Kerjanya dalam pelaksanaan Pengembangan kompetensi literasi pemerintahan yang dibiayai dari anggaran tahunan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi.

5. *Customers*

Memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi ASN wilayah kerja melalui BPSDM Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/Kota dalam pengembangan kompetensi dirinya.

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Tahapan Rencana Strategis

Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi dalam jangka pendek dilaksanakan dengan beberapa tahapan antara lain:

1. Membangun Komitmen Proyek Perubahan;
2. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;
3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan stakeholders wilayah kerja terpilih;
4. Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi berbasis digital; dan
5. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Literasi Pemerintahan berbasis digital.

Adapun penjelasan pelaksanaan tahapan secara ringkas dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

No	Tahapan	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksanaan		Capaian Hasil
					Sudah	Belum	
1	Membangun Komitmen	a. Konsultasi dengan Mentor		Dokumentasi	V		100 %
		b. Koordinasi awal dengan <i>Stakeholder</i> Internal & eksternal;	3 Oktober 2022	Dokumentasi	V		100 %
2	Membentuk Tim Efektif	a. Rapat identifikasi kebutuhan personalia/proyek perubahan	24 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi • Surat Undangan Rapat • Notula • Daftar Hadir 	V		100 %
		b. Penyusunan SK Tim Teknis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi ASN melalui Literasi Berbasis Digital	24 Oktober 2022	SK Tim	V		100 %
		c. Penyusunan SK Tim Penyusun Materi Pembelajaran Literasi Pemerintahan	24 Oktober 2022	SK Tim			
3	Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> dengan <i>stakeholders</i> wilayah kerja terpilih	a. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah pada Instansi Pemerintah se Sumatera Barat	27 Oktober s.d	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi • Surat Tugas • Laporan Kegiatan 	V		100 %
		b. Rapat Persiapan <i>Focus Group Discussion</i>	7 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi • Surat Undangan Rapat • Notula • Daftar Hadir 	V		100 %
		c. Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i>	11 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi • Surat Undangan FGD • Daftar Hadir • Laporan 	V		100 %

No	Tahapan	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksanaan		Capaian Hasil
					Sudah	Belum	
				Kegiatan			
		d. Menyiapkan dan menandatangani Acara <i>Focus Group Discussion</i>	11 November	Berita Acara	V		100 %
4	Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi berbasis digital	a. Rapat Penyusunan Materi literasi pemerintahan	31 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi • Surat Undangan Rapat • Notula • Daftar Hadir 	V		100 %
		b. Menyusun perangkat pembelajaran	31 Oktober s.d 3 November 2022	Materi Pembelajaran	V		100 %
		c. Membuat Surat Undangan mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	15 November 2022	Surat Undangan	V		100 %
5	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan berbasis digital	a. Mengaplikasikan <i>Learning Management System / LMS</i>	15 - 25 November 2022	Dokumentasi	V		100 %
		b. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan	22 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi • Surat Undangan Rapat • Notula • Daftar Hadir 	V		100 %
		c. Melaksanakan literasi Kompetensi pemerintahan berbasis digital	23 November 2022	Dokumentasi	V		100 %
		d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Literasi Pemerintahan	24 - 30 November 2022	Laporan Penggunaan LMS	V		100 %

Penjelasan capaian Tahapan Kegiatan tersebut dapat dijelaskan melalui uraian berikut:

1. Membangun Komitmen Proyek Perubahan

a. Konsultasi dengan Mentor

Pelaksanaan kegiatan membangun komitmen diawali dengan melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri sekaligus selaku mentor, Bapak Dr. Sugeng Haryono, M.Si pada tanggal 18 Oktober 2022. Dari pertemuan yang dilaksanakan di BPSDM Kementerian Dalam Negeri tersebut diminta dukungan dan komitmen pelaksanaan proyek perubahan. Diantara dukungan yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Sugeng Haryono, M.Si adalah :

- 1) Koordinasi dengan Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah untuk dapat mendukung pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi;
- 2) Menjadi Narasumber pada kegiatan *Focus Group Discussion* Arah Kompetensi Pemerintahan yang dilaksanakan di PPSDM Regional Bukittinggi;



Gambar 2.4
Membangun Komitmen dengan Kepala BPSDM Kemendagri

b. Koordinasi dengan *Stakeholder* internal dan eksternal

Membangun Komitmen yang dilakukan dengan *Stakeholder* Internal PPSDM Regional Bukittinggi terdiri atas :

- 1) Kepala Bagian Tata Usaha
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawauan
- 3) Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
- 4) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 5) Ketua Tim
- 6) Pejabat Fungsional Widyaiswara
- 7) Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian
- 8) Pejabat Fungsional Perencana
- 9) Pelaksana

Para *Stakeholder* Internal diundang untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 3 Oktober 2022 di Ruang Kebangkitan Nasional PPSDM Regional Bukittinggi dalam rangka membangun Komitmen Proyek **P e r u b a h a n P e l a t i h a n K e p e m i m p i n a n N a s i o n a l**.

Membangun Komitmen dengan *Stakeholder* Eksternal diawali dengan kunjungan menemui Bupati Dharmasraya Bapak Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E di Rumah Dinas Bupati Dharmasraya pada tanggal 4 Oktober 2022. Pada kunjungan tersebut disampaikan terkait pentingnya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara dan meminta dukungan beliau untuk pelaksanaan pengembangan Kompetensi Pemerintahan di PPSDM Regional Bukittinggi. Dari hasil pertemuan tersebut Bupati Dharmasraya yang juga selalui ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia memberi dukungan sebagai berikut:

- 1) Bersedia mendorong kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Berkenan menjadi Narasumber pada kegiatan *Focus Group Discussion* Arah Kompetensi Pemerintahan yang dilaksanakan di PPSDM Regional Bukittinggi.



Gambar 2.5
Membangun Komitmen dengan Bupati Dharmasraya

2. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan

Dalam rangka efektifnya pelaksanaan teknis kegiatan pengembangan kompetensi Pemerintahan dibentuklah Tim yang secara khusus memiliki tugas dan wewenang tertentu. Pembentukan tim efektif diawali dengan mengundang *Stakeholder* internal di PPSDM Regional Bukittinggi untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi pukul 14.00 WIB. Dari hasil Pertemuan tersebut di bentuklah 2 Surat Keputusan tentang kelompok Tim Efektif sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Kepala PPSDM Regional Bukittinggi Nomor 81/PPSDM-BKT/2022 tentang Tim Pelaksanaan Teknis Operasional Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi ASN melalui Literasi berbasis Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi;

- b. Surat Keputusan Kepala PPSDM Regional Bukittinggi Nomor 82/PPSDM-BKT/2022 tentang Tim Penyusun Materi Pembelajaran Literasi Pemerintahan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi.



Gambar 2.6 Membentuk Tim Efektif

3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* wilayah kerja terpilih

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dalam rangka membahas Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah. Hasil dari FGD akan digunakan untuk implementasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan di PPSDM Regional Bukittinggi. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah di Instansi Pemerintah Daerah se Sumatera Barat.

Dalam rangka mendapatkan dukungan terkait pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara

perlu dilakukan koordinasi baik dalam bentuk kunjungan secara langsung maupun via telepon terhadap unsur pimpinan pada Instansi Daerah. Secara ringkas bentuk koordinasi yang dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel.2.9 Daftar koordinasi dengan Pimpinan Daerah

No	Instansi	Media Komunikasi	Pejabat yang dikunjungi/dihubungi	Waktu
1	Kabupaten Dharmasraya	Kunjungan Langsung	Walikota	4 Oktober 2022
2	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kunjungan Langsung	Kepala BKPSDM	27 Oktober 2022
3	Kota Payakumbuh	Kunjungan Langsung	Plh. Sekretaris Daerah	27 Oktober 2022
4	Kabupaten Sijunjung	Kunjungan Langsung	Sekretaris Daerah	28 Oktober 2022
5	Kabupaten Tanah Datar	Kunjungan Langsung	Sekretaris Daerah	28 Oktober 2022
6	Kabupaten Solok	Kunjungan Langsung	Kepala BKPSDM	1 November 2022
7	Kota Bukittinggi	Kunjungan Langsung	Sekretaris Daerah	1 November 2022
8	Kota Padang	Kunjungan Langsung	Kepala BKPSDM	3 November 2022
9	Provinsi Sumatera Barat	Kunjungan Langsung	Kepala BPSDM	3 November 2022
10	Kota Solok	Kunjungan Langsung	Walikota	6 November 2022
11	Kabupaten Agam	Via Telepon	Sekretaris Daerah	29 Oktober 2022
12	Kabupaten Kep. Mentawai	Via Telepon	Sekretaris Daerah	4 November 2022
13	Kabupaten Padang Pariaman	Via Telepon	Sekretaris Daerah	2 November 2022
14	Kabupaten Pasaman	Via Telepon	Sekretaris Daerah	4 November 2022
15	Kabupaten Pasaman Barat	Via Telepon	Sekretaris Daerah	4 November 2022
16	Kabupaten Pesisir Selatan	Via Telepon	Sekretaris Daerah	1 November 2022
17	Kabupaten Solok Selatan	Via Telepon	Sekretaris Daerah	3 November 2022
18	Kota Padang Panjang	Via Telepon	Sekretaris Daerah	3 November 2022
19	Kota Pariaman	Via Telepon	Sekretaris Daerah	2 November 2022
20	Kota Sawahlunto	Via Telepon	Sekretaris Daerah	1 November 2022

Saat melakukan Koordinasi baik secara langsung maupun via telepon, hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi dan pengembangan kompetensi yang akan digalang oleh PPSDM Regional Bukittinggi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri di Regional Sumatera, adapun kompetensi yang akan dikembangkan dan menjadi perhatian adalah

Kompetensi Pemerintahan yang memiliki 7 Core Competensi yang terdiri atas:

- a) Kebijakan Desentralisasi
 - b) Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c) Pemerintahan Umum
 - d) Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e) Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah
 - f) Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan
 - g) Etika Pemerintahan.
- 2) Meminta dukungan serta kesediaan menghadiri Kegiatan *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan secara Klasikal di PPSDM regional Bukittinggi pada tanggal 11 November 2022.

Secara umum, pejabat yang dihubungi tersebut diatas menyatakan dukungan terhadap kegiatan pengembangan Kompetensi Pemerintahan di Lingkup Kerja PPSDM Regional Bukittinggi, serta menyatakan kesediaannya untuk menghadiri *Focus Group Discussion*.

Gambar. 8
Dokumentasi Koordinasi ke Pemerintah Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung



Gambar 2.7
Koordinasi ke Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota



Gambar 2.8
Dokumentasi Koordinasi ke Pemerintah Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung



Gambar 2.9
Koordinasi ke Pemerintah Kota Padang dan BPSDM Prov. Sumbar



Gambar 2.10
Koordinasi dengan Walikota Solok

b. Rapat Persiapan *Focus Group Discussion*

Pada Pukul 08.30 WIB tanggal 7 November 2022 dilakukan Rapat Persiapan *Focus Group Discussion* di Ruang Kebangkitan Nasional PPSDM Regional Bukittinggi dengan menghadirkan Tim Efektif. Pada kegiatan tersebut ditentukan target tugas yang harus diselesaikan pada tahap persiapan pelaksanaan *Focus Group Discussion* antara lain:

- 1) Pembuatan Surat Undangan ke Instansi Daerah
- 2) Persiapan Sarana dan Prasarana Kegiatan
- 3) Persiapan Administrasi dan Keuangan sebagai biaya kegiatan
- 4) Persiapan Konsumsi
- 5) Persiapan Tim Dokumentasi



Gambar. 2.11 Rapat Persiapan *Focus Group Discussion*

c. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Arah Kompetensi Pemerintahan: Penerapan dan Tantangannya di Daerah” dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022 Pukul 13.30 WIB di Aula Proklamasi Lt. 2 Gedung Utama PPSDM Regional Bukittinggi. Kegiatan FDG dihadiri oleh 25 orang Pejabat Daerah yang terdiri atas Sekretaris Daerah serta Kepala BKPSDM Instansi Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat. Dr. Sugeng Haryono, M.Si selaku Narasumber Utama Memimpin Kegiatan FGD setelah pemberian Materi terkait Kompetensi Pemerintahan. Narasumber Utama lainnya yang hadir adalah Walikota Solok Zul Elfian, SH, M.Si berkesempatan memberikan Materi terkait pentingnya Kompetensi Pemerintah pada penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan FGD didominasi dengan tanya jawab serta pemberian argumentasi dari peserta FGD tentang perlunya implementasi pengembangan kompetensi dan Langkah kongkrit pelaksanaannya di Pemerintah Daerah.



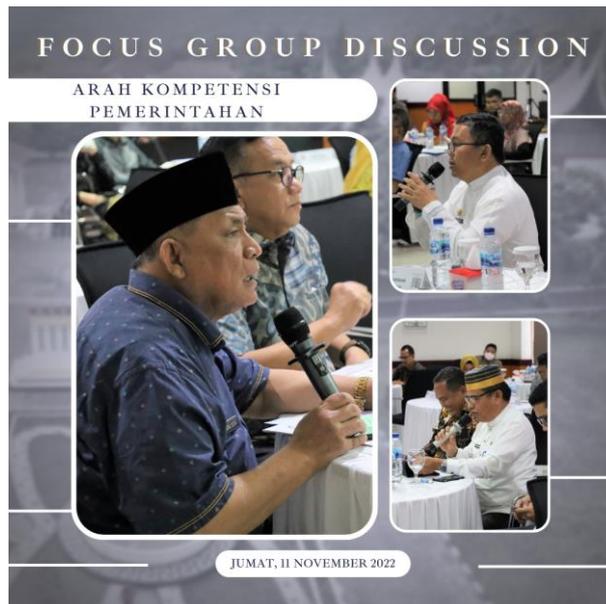
Gambar 2.12

Dokumentasi Narasumber Utama FGD



Gambar 2.13

Dokumentasi pelaksanaan FGD



Gambar 2.14

Dokumentasi diskusi saat pelaksanaan FGD



d. Menyiapkan dan Menandatangani Berita Acara *Focus Group Discussion*

Pada akhir kegiatan, Narasumber maupun Peserta FGD menandatangani Berita Acara kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Arah Kompetensi Pemerintahan: Penerapan dan Tantangannya di Daerah”.

Diantara poin yang disepakati dalam Berita Acara tersebut adalah mendukung dilaksanakannya kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital dengan menugaskan pegawai pada Instansi yang mereka pimpin untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan di PPSDM Regional Bukittinggi.

4. Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi Berbasis Digital

Rangkaian Kegiatan diawali dengan Rapat Penyusunan materi Literasi Pemerintahan yang dilakukan pada pukul 09.00 WIB tanggal 31 Oktober tahun 2022 di Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi. Diantara hal yang dibahas pada kegiatan rapat adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian tugas pembuatan konten pembelajaran berupa materi dan soal untuk *Pretest* dan *Posttest*.
- b. Persiapan penggunaan *Learning Management System* (LMS) untuk kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan.



Gambar 15.
Rapat persiapan Penyusunan materi literasi kompetensi pemerintahan

Kegiatan selanjutnya mengirimkan undangan mengikuti kegiatan Literasi Pemerintahan ke Instansi Daerah melalui surat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 893.2/1639/PPSDM-BKT tanggal 15 November 2022 perihal Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital. Terdapat 8 Instansi Pemerintah Daerah yang diundang untuk mengikuti kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
- b. Pemerintah Kabupaten Agam
- c. Pemerintah Kabupaten Pasaman
- d. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- e. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
- f. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
- g. Pemerintah Kota Bukittinggi
- h. Pemerintah Kota Padang Panjang

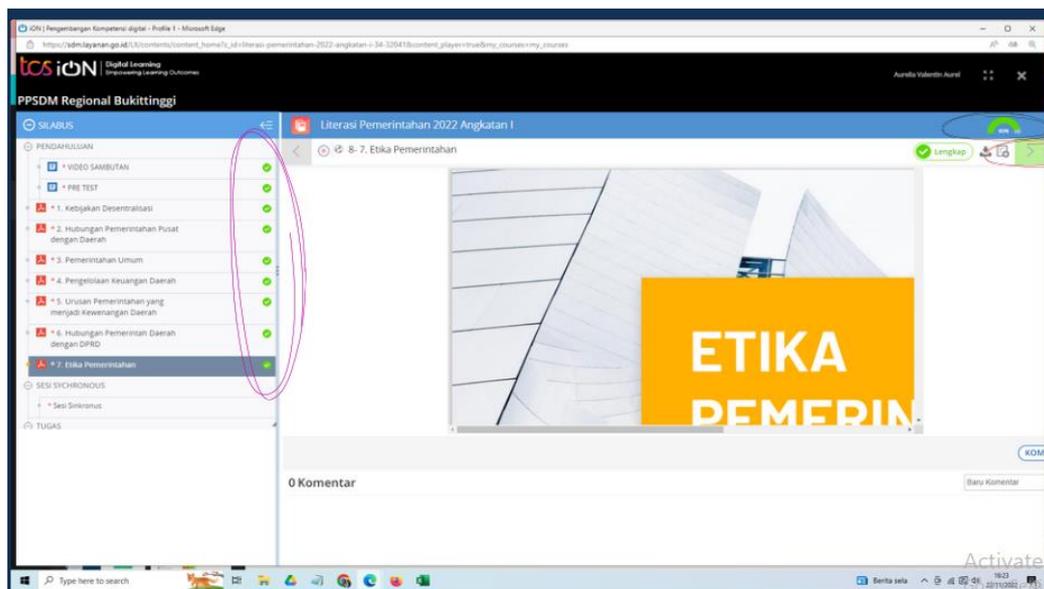
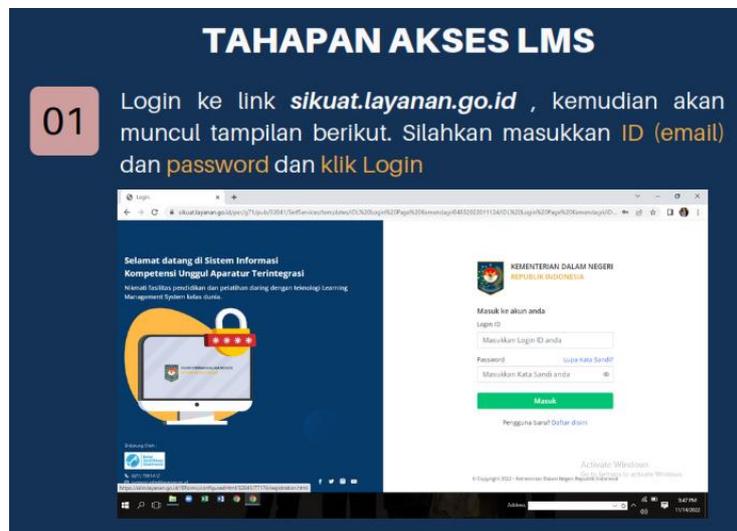
5. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan berbasis Digital

a. Mengaplikasikan *Learning Management System*

Alur Pengembangan Kompetensi Pemerintahan melalui *Learning Management System (LMS)* adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta melakukan registrasi melalui tautan yang diberikan pada surat undangan
- 2) Peserta melakukan Login pada LMS
- 3) Peserta mengerjakan *Pretest*
- 4) Peserta mengunduh materi pembelajaran
- 5) Peserta mendapatkan tautan *zoom meeting* kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan
- 6) Peserta mengerjakan *Posttest* dan melakukan upload bukti kehadiran mengikuti kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan
- 7) Peserta mengunduh Sertifikat

Registrasi dibuka pada tanggal 15–22 November 2022 dan pengaplikasiannya dipandu oleh *Person In Charge* (PIC) LMS.



Gambar. 16 Tampilan *Learning Management System* (Sikuat.layanan.go.id)

b. Rapat Persiapan Kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan

Dalam rangka finalisasi persiapan kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan dilaksanakan rapat pada tanggal 22 November 2022 di Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi. Rapat membahas Teknis pelaksanaan serta pembagian tugas dan wewenang pada kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan yang dilakukan secara digital menggunakan Aplikasi *Zoom Meeting*.



Gambar 2.17.
Rapat Persiapan Literasi Kompetensi Pemerintahan

c. Pelaksanaan literasi Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital

Kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan berbasis digital dilaksanakan pada Rabu Tanggal 23 November 2022 melalui Platform Zoom Meeting pada Pukul 09.00 WIB. Kegiatan dibuka oleh Kepala PPSDM Regional Bukittinggi Sarjayadi, SS dan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh 2 orang Narasumber menggunakan 1 Akun zoom dengan membagi kedalam 2 *Breakout Room* dengan keterangan pembagian Tugas dan Wewenang sebagai berikut

1) Breakout Room 1

Narasumber : Dr. Mudji Estiningsih, SH, M.Hum

Moderator : Ratna Sriwina, M.Si

Host : Jerry Marantika, S.Psi

2) Breakout Room 2

Narasumber : Afri Yendra, SH, MH

Moderator : Andari Dwi Utami, SH, MH

Host : Leo August Fernando, S.Kom



Gambar 2.18
Dokumentasi Pelaksanaan literasi Kompetensi Pemerintahan

Kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan dilaksanakan sampai dengan pukul 12.00 WIB, diikuti sebanyak 467 Peserta untuk kedua Breakout Room.

Terdapat sesi pemberian materi dan sesi tanya jawab bagi peserta. Diakhir kegiatan, 5 (lima) orang peserta pada masing-masing *room* diberikan *doorprize* bagi peserta yang paling aktif bertanya maupun menjawab selama interaksi.

Setelah kegiatan literasi kompetensi pemerintahan dilaksanakan, diberikan waktu bagi peserta mengerjakan posttest dan upload screenshot pada LMS. Apabila semua tahapan telah dilalui peserta, mereka dapat mengunduh sertifikat pelatihan pada LMS.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan

Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan:

- 1) Berkoordinasi dengan pejabat di BKPSDM pada Instansi Daerah yang diundang untuk memastikan jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan dan melakukan registrasi pada LMS.
- 2) Memonitoring kegiatan Tim Teknis penanggungjawab LMS untuk memastikan kelancaran proses penggunaan LMS.
- 3) Berkoordinasi dengan *Stakeholder* pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani kendala selama pemanfaatan LMS.
- 4) Memonitoring kegiatan selama penyampaian materi saat Literasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.

Evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan antara lain:

- 1) Evaluasi Data Peserta Literasi Kompetensi Pemerintahan

Tabel 2.10 Data Peserta Literasi Kompetensi Pemerintahan

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Peserta yang teregistrasi	1224
2	Jumlah Peserta yang berhasil Login LMS	881
3	Jumlah Peserta Lulus Pretest	200
4	Jumlah Peserta Tidak Lulus Pretest	177
5	Jumlah Peserta yang mengikuti Literasi Kompetensi Pemerintahan secara synchronous	467
6	Jumlah Peserta yang mengikuti post test	569
7	Jumlah Peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat	383

Pemanfaatan LMS pada Literasi Pemerintahan Berbasis Digital menunjukkan hasil sesuai dengan tujuan awal pengembangan kompetensi Pemerintahan dari ranah pengetahuan. Peserta pelatihan secara pengetahuan menunjukkan peningkatan sebesar 7.45 poin dari skor rata-rata tes kemampuan awal sebesar 72, 55 menjadi 80 pada rata-rata Skor tes kemampuan akhir.

2) Evaluasi Penggunaan Learning Management System

Pelaksanaan Literasi Pemerintahan dengan memanfaatkan LMS menemui beberapa kendala yang dikelompokkan dan dijelaskan sebagai berikut:

a) Kendala Peserta.

Kompetensi digital terutama dalam melakukan beberapa kegiatan pada aplikasi berbasis web. Secara umum kendala yang ditemui peserta sebagai berikut:

- (1) Peserta kesulitan melakukan registrasi karena kesulitan menuliskan alamat pendaftaran.
- (2) Peserta kesulitan mengikuti alur kegiatan terutama jika ditemui adanya perintah pada web.
- (3) Peserta kesulitan melakukan pengambilan tangkapan layar guna penyelesaian penugasan.
- (4) Peserta kesulitan memahami mekanisme atau alur kerja LMS sehingga beberapa kali mengajukan pertanyaan teknis. Misal waktu penutupan, waktu upload tugas dan waktu mendapatkan sertifikat.

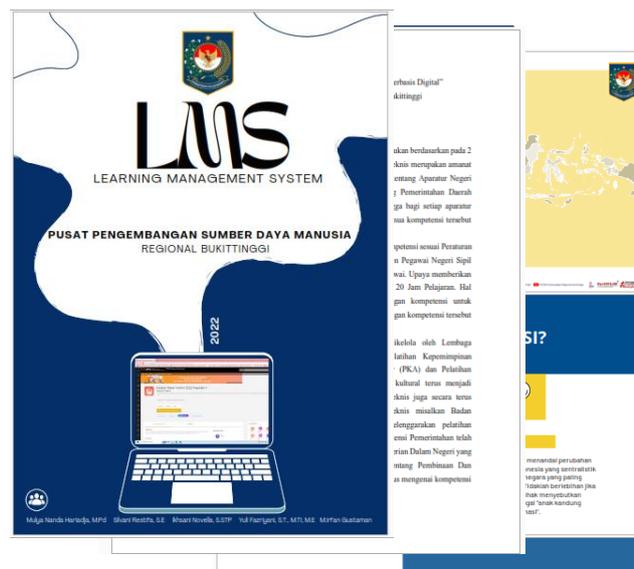
b) Kendala LMS

Peserta yang menemui kendala pemanfaatan LMS salah satunya disebabkan akibat kompetensi digital yang belum mumpuni. Hal tersebut juga makin sulit akibat ditemukan juga sumber masalah dari aplikasi LMS. Berikut beberapa masalah LMS yang ditemukan:

- (1) Kewenangan admin masih belum merata. Hal tersebut salah satunya ditemukan pada saat memerlukan tindakan berupa memanggil peserta hanya bisa dilakukan oleh admin pusat.
- (2) Alur pendaftaran yang berada di luar aplikasi atau berbeda alamat. Alamat pendaftaran di tempatkan pada alamat <http://sikuat.layanan.go.id> sedangkan alamat kegiatan di <http://sdm.layanan.go.id>. Hal tersebut menimbulkan asumsi peserta jika melakukan pendaftaran maka secara otomatis

masuk dalam kegiatan padahal masih ada satu proses yang disebut “Approval Admin Pusat”. Disamping itu pendaftaran peserta dalam jumlah besar dalam waktu bersamaan menyebabkan Admin Pusat kesulitan hal tersebut terjadi pada kegiatan Literasi Pemerintahan pada 21 November 2022 total pendaftar mencapai 800 orang dalam waktu bersamaan.

- (3) Bilah pendaftaran pada bagian tahun lahir hanya memuat sampai 1972 menyebabkan beberapa peserta menyimpulkan bahwa aparaturnya yang berhak mengikuti hanya peserta yang memiliki tahun lahir di atas 1972.
- (4) Tampilan LMS yang berisi banyak animasi bergerak menghambat proses “loading page”. Animasi dan gambar gerak lainnya membutuhkan data yang lebih besar dibanding gambar diam. Hal ini dikeluhkan peserta karena terasa lambat ketika mengakses laman.
- (5) Feature Test yang memerlukan tahapan saat unggah soal menyulitkan admin kegiatan karena kewenangan unggah butir soal pada bank soal masih berada di admin pusat.



Gambar 19.

Laporan Penggunaan *Learning Manageman System* (Sikuat.layanan.go.id)

B. Implementasi Strategi Marketing

1. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi

Stakeholder merupakan pihak yang berperan terhadap keberhasilan implementasi baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pihak yang mendapatkan dampak maupun manfaat dari hasil implementasi. *Stakeholder* internal maupun eksternal pada pelaksanaan kegiatan pengembangan Kompetensi Pemerintahan di PPSDM Regional Bukittinggi dapat diuraikan sebagai berikut:

a) *Stakeholder Internal*, meliputi:

Tabel 2.11 . Peranan *Stakeholder* Internal

No	<i>Stakeholder</i>	Peranan
1	Kepala BPSDM KEMENDAGRI	Pengarah dan Atasan Langsung Perubahan
2	Kepala Pusat di Lingkungan BPSDM KEMENDAGRI	Pemberi Advice Perubahan
3	Kepala PPSDM KEMENDAGRI Regional Bukittinggi	Project Leader Perubahan
4	Pegawai di lingkungan PPSDM KEMENDAGRI Regional Bukittinggi	Tim Efektif Proyek Perubahan

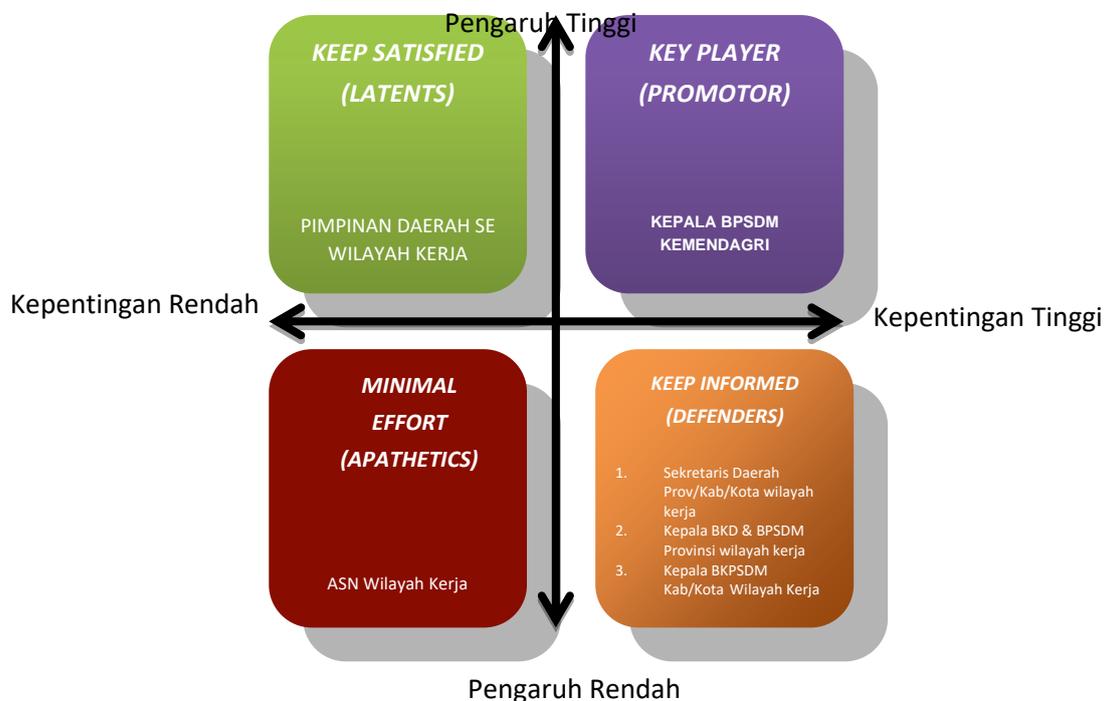
b) *Stakeholder Eksternal*, meliputi:

Tabel 2.12 Peranan *Stakeholder* eksternal

No	<i>Stakeholder</i>	Peranan
1	Bupati Dharmasraya	Pengarah dan Mitra Proyek Perubahan
2	Walikota Solok	Pengarah dan Mitra Proyek Perubahan
3	Kemkominfo	Pengarah Proyek Perubahan
4	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pengarah dan Mitra Proyek Perubahan
5	Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat	Pengarah dan Mitra Proyek Perubahan
6	Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten Se Sumatera	Pengarah dan Mitra Proyek Perubahan

No	Stakeholder	Peranan
	Barat	
7	Kepala BKPSDM Kota/Kabupaten Se Sumatera Barat	Mitra Proyek Perubahan
8	ASN Sewilayah Kerja PPSDM Regional Bukittinggi	Mitra Proyek Perubahan

Setelah mengidentifikasi *stakeholder* yang mempengaruhi proyek perubahan ini, selanjutnya dilakukan analisis terhadap pengaruh *stakeholder* untuk tercapainya keberhasilan proyek perubahan ini. Analisis *stakeholder* menggunakan analisis tingkat pengaruh (*influence/power*) dan tingkat minat (*interest*) *stakeholder* tersebut terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. Ditemukan perubahan posisi *stakeholder* setelah dilaksanakannya Laboratorium Kepemimpinan. Adapun posisi *stakeholder* tidak ada perubahan Laboratorium Kepemimpinan, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.20 Peta Stakeholder

2. Strategi Komunikasi

Setelah mengetahui gambaran posisi *stakeholder*, selanjutnya dapat ditentukan strategi komunikasi apa yang akan diambil sebagai upaya persuasi terhadap *stakeholder*. Strategi komunikasi dibutuhkan untuk mengurangi hambatan, mengelola penolakan dan menarik dukungan dari para *stakeholder*. Berikut ini dijelaskan strategi dan Teknik komunikasi project leader dalam mengimplementasikan proyek perubahan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Strategi Komunikasi

Kelompok <i>Stakeholder</i>	Strategi Komunikasi
<p>Promotors</p> <p>Kelompok <i>stakeholder</i> yang memiliki kepentingan dan pengaruh besar untuk mendukung terhadap keberhasilan proyek perubahan dan sebaliknya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dengan menyampaikan informasi yang akurat dengan dasar-dasar yang valid terkait kegiatan yang dilaksanakan. • Konsultasi dan meminta arahan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan
<p>Latens</p> <p>Kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka tertarik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan sopan dan profesional serta beradaptasi dengan keadaan pihak <i>stakeholder</i> yang dituju • Menyampaikan informasi terkait maksud, tujuan dan manfaat kegiatan secara lugas.
<p>Defenders</p> <p>Kelompok <i>stakeholder</i> yang memiliki kepentingan dan menyuarakan dukungan besar, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan kunjungan langsung untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan • Melakukan diskusi meminta masukan agar terlaksananya kegiatan dengan baik. • Melakukan persuasi untuk mendukung terlaksananya kegiatan. • Memberikan motivasi agar tercapainya sasaran kegiatan.
<p>Apathetics</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan informasi terkait maksud, tujuan dan manfaat kegiatan

Kelompok <i>Stakeholder</i>	Strategi Komunikasi
Kelompok <i>stakeholders</i> yang tidak memiliki kepentingan dan kekuatan terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan.	secara lugas. <ul style="list-style-type: none"> • Mengajak dan memberikan motivasi agar terlaksananya dan tercapainya sasaran kegiatan.

3. Strategi Marketing

Target dari kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan berbasis Digital di PPSDM Regional Bukittinggi adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kerja PPSDM Regional Bukittinggi. Pada tahap jangka pendek ini, ruang lingkup target peserta pada kegiatan pengembangan Kompetensi Pemerintahan terfokus pada ASN di wilayah Sumatera Barat. Adapun Strategi marketing sector publik yang dilaksanakan adalah Strategi Marketing Mix yaitu suatu bentuk strategi dalam menggabungkan berbagai macam kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan yang mana dalam hal ini menggunakan pola "4P + 1 C" atau terdiri dari *Product, Place, Price, Promotion* dan *Costumer*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Strategi marketing Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital dapat diuraikan sebagai berikut:

a) *Product* (Produk)

Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini berupa:

- (1) Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Kota/Kabupaten se-Sumatera Barat.
- (2) Aplikasi *Learning Management System* (LMS) Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
- (3) Materi/Bahan Tayang Pembelajaran Kompetensi Pemerintahan.

b) *Place* (Lokasi)

Tempat yang digunakan saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) adalah Aula Proklamasi dan Ruang Belajar pada Gedung Kantor PPSDM Regional Bukittinggi. Bagi Narasumber yang menginap disediakan kamar pada Asrama Mutiara Kampus PPSDM Regional Bukittinggi. Diantara

tujuan menggunakan Gedung PPSDM Regional Bukittinggi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan adalah mengenalkan lokasi kampus PPSDM serta mempromosikan fasilitas yang dimiliki sebagai penunjang kegiatan pelatihan di PPSDM Regional Bukittinggi.

c) *Price* (Biaya)

Biaya pelaksanaan proyek perubahan ini dibebankan pada mata anggaran pengembangan sumber daya manusia pada PPSDM Regional Bukittinggi tahun anggaran 2022.

d) *Promotion* (Promosi)

Promosi pelaksanaan proyek perubahan dilakukan melalui:

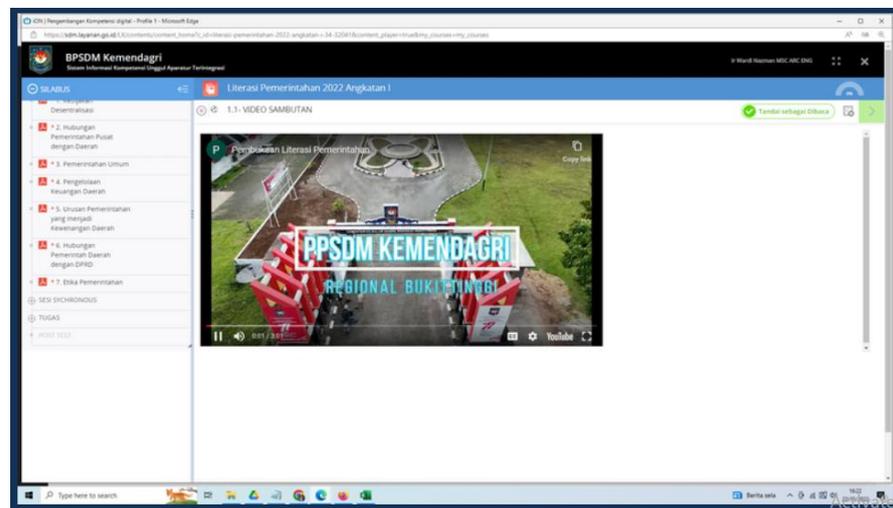
- (1) sosialisasi secara online pada platform Facebook, Instagram, Website dan Media Sosial.
- (2) Sosialisasi melalui kunjungan langsung ke lokasi *Stakeholder* Eksternal yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Kota/ Kabupaten se Sumatera Barat.
- (3) Mengirimkan Surat Undangan Kepala BPSDM Kemendagri dan Surat Kepala PPSDM Regional Bukittinggi untuk mengikuti kegiatan.
- (4) Membuat Tutorial penggunaan LMS dalam bentuk Text dan Video.
- (5) Memutar Video Highlight Kantor PPSDM Regional Bukittinggi pada kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan.

e) *Costumers* (Pelanggan)

Costumers dalam proyek perubahan ini dalam *Milestone* jangka pendek adalah Aparatur Sipil Negara se-Wilayah Sumatera Barat.



Gambar 2.21 Dokumentasi Promosi pada Aplikasi Instagram



Gambar 2.22 Dokumentasi Promosi pada LMS (Sikuat.layanan.go.id)

C. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Sebuah organisasi pembelajar menurut Dawood et al. (2015) harus mengubah proses pembelajaran atau pelatihan pegawai menjadi aktivitas pemecahan masalah organisasi, inovasi, dan pembelajaran. Dengan demikian sebuah organisasi pembelajar harus menjadikan pembelajaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari semua aktifitas.

Agar pembelajaran dalam organisasi bisa dilaksanakan dengan baik maka peran *leader* sangat menentukan. Beberapa Tindakan praktis yang dilaksanakan oleh *project leader* pembelajaran anggotanya mengacu pada Pendekatan Metodologi Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Pembelajar menurut Aliev dan Sigov (2017) yaitu Membangun organisasi dengan sistem pembelajaran, transfer pengetahuan, berbagi pengetahuan, mengakumulasi modal manusia (*human capital*), dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pembangunan berbagai elemen tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh *project leader* dalam membangun organisasi pembelajar meliputi:

1. Identifikasi kondisi organisasi

Untuk mengetahui *gap* antara kondisi yang ideal dengan kondisi saat ini perlu dilakukan penilaian terhadap kebutuhan pengembangan organisasi. Sehingga dapat ditetapkan variabel yang menjadi prioritas objek pembelajaran dalam organisasi. Dalam langkah ini, *Project Leader* membuka ruang diskusi bersama seluruh *Stakeholder* internal di PPSDM Regional Bukittinggi dalam sebuah forum rapat. Dalam kegiatan tersebut dibuka pembahasan terkait kekuatan dan kelemahan organisasi kita dalam melaksanakan proyek perubahan yang akan dilakukan. *Project Leader* terbuka menerima argumen dan saran dari seluruh *stakeholder* yang terlibat dan menjadikannya sebagai informasi dalam mengidentifikasi kondisi organisasi. Informasi tersebut menjadi pertimbangan dalam teknis pelaksanaan proyek perubahan serta menjadi rekomendasi prospek pengembangan organisasi kedepannya.

2. Mempelajari kemampuan dan kemauan pegawai bekerja dalam tim serta mengidentifikasi sosionik pegawai.

Setiap *stakeholder* memiliki spesifikasi kemampuan dan kemauan tertentu dalam bekerja. Dari pengalaman memimpin organisasi serta disandingkan dengan jabatan yang melekat pada *Stakeholder* maka dibentuklah tim efektif menjadi 2 kelompok Tim yaitu; 1) Tim Teknis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi ASN melalui Literasi berbasis Digital dan 2) Tim Penyusun Materi Pembelajaran Literasi Pemerintahan. Namun secara umum diluar tugas mereka pada tim tersebut, seluruh tim diarahkan untuk saling membantu dan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan pada proyek perubahan.

3. Penetapan Instrumen Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Dalam tahapan jangka pendek, diantara instrumen yang dilakukan oleh Project Leader dalam memberdayakan organisasi pembelajar adalah sebagai berikut:

- a. Menugaskan pegawai untuk mendampingi dan melakukan pengamatan saat kunjungan dalam rangka koordinasi dengan *Stakeholder* Eksternal.
- b. Menugaskan pegawai untuk mendampingi dan melakukan pengamatan kegiatan *Focus Group Discussion* dengan tema Arah Kompetensi Pemerintahan.
- c. Menugaskan Pegawai untuk mempelajari penggunaan *Learning Management System* yang merupakan *pilot project* produk BPSDM Kemendagri serta menjadi PIC dalam pelaksanaannya.
- d. Menugaskan Pejabat Fungsional Widyaaiswara sebagai Tim Penyusun Materi, Narasumber dan Moderator pada kegiatan Literasi Kompetensi Pemerintahan.

BAB III PENUTUP

A. *Lesson Learnt*

Pelaksanaan Proyek Perubahan pada jangka pendek merupakan proses pembelajaran (*Lesson Learnt*) bagi penulis terkait kepemimpinan dan manajemen strategis. Pada awal pelatihan, penulis mengalami berbagai kesulitan dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Namun dari kesulitan tersebut, penulis melalui proses pembelajaran yang memaksa penulis harus mampu memecahkan masalah dan mencari solusi dari setiap kendala yang dihadapi.

Adapun pembelajaran yang dirasa sangat mempengaruhi kepemimpinan *Project Leader* selama melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II diantaranya:

1. Keterampilan menggunakan teknologi informasi

Pergeseran paradigma pelatihan yang semula didominasi metode klasikal ke metode *blended learning* menjadikan ASN harus melek teknologi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kita tidak direpotkan dengan hal yang bersifat teknis. Tidak hanya bagi penulis, dari hasil evaluasi pemanfaatan LMS (sebagaimana terlampir dalam Laporan LMS) juga terlihat bahwa terhambatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi dikarenakan kurangnya kemampuan dalam menggunakan aplikasi pembelajaran.

2. Keterampilan komunikasi dalam berkoordinasi dengan unsur Pimpinan instansi Pemerintah Daerah

Teknik komunikasi yang baik dapat mengantarkan hubungan koordinasi menjadi lebih efektif sesuai dengan target dan sasaran koordinasi. Seringkali cara komunikasi yang salah mempengaruhi kedekatan dengan lawan bicara yang dapat berakibat fatal. Pengalaman penulis bertemu dengan banyak pejabat pada unsur Pemerintah Daerah, menjadikan

penulis harus terus meningkatkan diri mengasah keterampilan dalam berkomunikasi agar terjalin hubungan yang harmonis.

3. Peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajemen Sumber daya manusia yang efektif untuk mewujudkan terlaksananya program kegiatan.

Merupakan hal yang mustahil dilakukan, jika proyek perubahan yang penulis lakukan ini tidak melibatkan berbagai unsur *stakeholder* internal dan eksternal. Diawali dengan membangun komitmen pelaksanaan proyek perubahan, berbagai sumbangan pemikiran para *stakeholder* mengantarkan penulis untuk menetapkan isu dan tahapan kegiatan yang inovatif. Dan saat pelaksanaan Proyek perubahan, dengan memanfaatkan spesialisasi masing masing *stakeholder* dapat mengantarkan penulis menyelesaikan kegiatan sesuai target yang diharapkan.

B. Kesimpulan

Mengacu kepada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 233 ; 2, selain memenuhi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan sosio kultural, Aparatur Sipil Negara harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Proyek Perubahan “Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi” merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan pengembangan kompetensi pemerintahan ideal.

Implementasi Proyek Perubahan ini melaksanakan target yang telah direncanakan pada milestone jangka pendek melalui inovasi dengan tahapan kegiatan berupa:

1. Membangun Komitmen Proyek Perubahan;
2. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;
3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan *stakeholders* wilayah kerja terpilih;

4. Menyiapkan disain pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi berbasis digital; dan
5. Melaksanakan Literasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan berbasis digital.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pada milestone jangka pendek antara lain:

1. Terbentuknya komitmen antara para *stakeholder* baik internal maupun eksternal untuk mendukung terlaksananya pengembangan kompetensi pemerintahan bagi para Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja PPSDM Regional Bukittinggi Kemendagri.
2. Terbentuknya tim efektif proyek perubahan yang dibagi dalam 2 kelompok tim yaitu; 1) Tim Teknis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi ASN melalui Literasi berbasis Digital dan 2) Tim Penyusun Materi Pembelajaran Literasi Pemerintahan
3. Terlaksananya kegiatan *Focus Group Discussion* yang dihadiri oleh 25 dari 42 orang narasumber yang diundang yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM di Instansi Pemerintah se-Sematera Barat. Sedangkan yang menjadi Narasumber utama kegiatan FGD adalah Walikota Solok dan Kepala BPSDM Kemendagri.
4. Terbuatnya konten pembelajaran yang akan diakses pada *Learning Management System* dan ditayangkan pada kegiatan Literasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital.
5. Terlaksananya kegiatan Literasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dengan keikutsertaan peserta sebagai berikut:
 - a. Jumlah Peserta registrasi LMS sebanyak 1224
 - b. Jumlah Peserta berhasil Login LMS sebanyak 881
 - c. Jumlah Peserta mengikuti Literasi Kompetensi Pemerintahan secara synchronous sebanyak 467
 - d. Jumlah Peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat 383 orang.

Peserta pelatihan secara pengetahuan menunjukkan peningkatan sebesar 7.45 poin dari skor rata-rata tes kemampuan awal sebesar 72, 55 menjadi 80 pada rata-rata Skor tes kemampuan akhir

Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara akan terus disempurnakan pada tahapan jangka menengah dan jangka Panjang dengan target akhir terlaksananya penyebarluasan literasi kompetensi Pemerintahan kepada ASN Seluruh Indonesia.

C. Saran

1. Kegiatan *Focus Group Discussion* perlu dijadikan agenda rutin karena berdampak positif terhadap dukungan *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara.
2. *Learning Management System* yang digunakan perlu pengembangan lebih lanjut agar tidak ada kendala teknis dan seharusnya memudahkan peserta untuk melakukan rangkaian pembelajaran.
3. Perlu dilaksanakan pengembangan kapasitas bagi pemateri atau narasumber melalui pelatihan agar kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar dan lebih berkualitas.

D. Implementasi Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar memiliki kualitas yang lebih baik. Selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Penulis menyadari perlunya meningkatkan kompetensi kepemimpinan dalam mengelola pekerjaan. Salah satu pendekatan konsep teori terkait Kompetensi Kepemimpinan menurut

Matondang (2008), menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kecerdasan yang harus dipelajari oleh seorang pemimpin yaitu adalah pemimpin yang

memiliki "Multi Intelligent". Hal ini tercermin dari mutu kepemimpinannya yang memiliki sikap, perilaku, tindakan serta hati nuraninya menjadi lebih baik dan benar karena dia mampu menggunakan berbagai jenis kecerdasan seperti:

1) Kecerdasan Intelejensi (IQ)

Kemampuan yang berhubungan dengan penalaran atau berpikir.

2) Kecerdasan Emosional (EQ)

Kemampuan untuk mengendalikan emosional.

3) Kecerdasan Ragawi (PQ)

Kemampuan untuk menjaga kesehatan diri sendiri.

4) Kecerdasan Spiritual (SQ)

Berhubungan dengan kepercayaan terhadap agama.

Dengan demikian, seorang pemimpin yang kompeten harus dapat mengembangkan kapasitas dirinya terlebih dahulu dari berbagai aspek pengetahuan sebelum ia menggerakkan roda organisasi yang ia pimpin. Sebagaimana hal tersebut diatas, dalam mengembangkan potensi diri agar dapat mencapai pribadi yang mantap dan sukses baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, beberapa hal yang dilakukan oleh project leader antara lain:

1. Mengukur Kelebihan dan Kekurangan Diri

Untuk menentukan kebutuhan pengembangn diri tentu diperlukan identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan diri, dalam tahapan ini penulis/*project leader* melakukan *self asesment* (penilaian terhadap diri sendiri) dengan hasil identifikasi kelebihan dan kekurangan diri project leader sebagai berikut:

a. Kelebihan Diri

- 1) *Project Leader* memiliki pengalaman pekerjaan di PPSDM Regional Bukittinggi selama 26 tahun. Pengalaman tersebut menjadi kekuatan tersendiri bagi *Project Leader* dari sisi pengetahuan terhadap bidang pekerjaan sehingga *Project Leader* memahami betul

kebutuhan dan prospek organisasi serta relasi yang sudah terjalin dengan organisasi.

- 2) *Project Leader* merupakan individu pembelajar yang baik dan mau beradaptasi terhadap perubahan yang ada.
- 3) *Project Leader* memiliki komitmen dalam pekerjaan sehingga mampu memutuskan dan membuat kebijakan yang objektif.

b. Kekurangan Diri

- 1) *Project Leader* belum memiliki banyak pengalaman bekerja diluar bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 2) Perlunya meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi yang efektif dalam melakukan koordinasi dengan unsur Pimpinan.
- 3) Perlunya meningkatkan kepercayaan untuk mendelegasikan pekerjaan.

2. Menentukan Target Pengembangan Diri

Menentukan target pengembangan diri tidak terlepas dari Standar kompetensi Manajerial. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 38 Tahun 2017 bahwasanya Kompetensi Manajerial terdiri atas 8 variabel yaitu :

- a. Integritas
- b. Kerjasama
- c. Komunikasi
- d. Orientasi Pada Hasil
- e. Pelayanan Publik
- f. Pengembangan diri dan orang lain
- g. Mengelola Perubahan
- h. Pengambilan Keputusan

Setelah melakukan konfirmasi kebutuhan pengembangan diri antara identifikasi terhadap kekurangan diri melalui *self assessment* dengan variabel kompetensi manajerial, maka fokus target pengembangan diri

project leader adalah pada variabel 1) komunikasi, 2) pengembangan diri dan orang lain, dan 3) mengelola perubahan.

3. Strategi Pengembangan Diri

Strategi pengembangan diri dari tiap variabel kompetensi yang menjadi target pengembangan diri diuraikan pada table berikut:

Tabel 2.14 Strategi Pengembangan Diri

No	Variabel	Strategi Pengembangan Diri
1.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • membangun komunikasi dengan baik dan proaktif dalam berkoordinasi antar anggota tim, • memastikan perintah yang diberikan dapat dipahami oleh pegawai. • menjalin hubungan yang baik dengan karyawan. • berusaha untuk memahami kondisi psikologis lawan bicara saat berkomunikasi .
2.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	<ul style="list-style-type: none"> • memastikan seluruh pegawai di anggota tim dapat berkontribusi, • membuat pegawai merasa bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan tim. • memberikan pendampingan dan nasehat kepada pegawai
3.	Mengelola Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan arahan yang jelas, • memberikan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh anggota tim, • memberikan panduan yang jelas tentang cara mencapai tugas, • memastikan pegawai mengerjakan tugas dan tanggung jawab tepat waktu.

4. Implementasi Strategi Pengembangan Diri

Diantara bentuk pengembangan diri yang dilakukan kedepan ialah Aktif melaksanakan kunjungan secara langsung dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para Pejabat Sekretaris Daerah Kota atau Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat sebelum kegiatan *Focus Group Discussion* dilaksanakan. *Project Leader* merasakan manfaat dari upaya tersebut terhadap kemampuan

berkomunikasi dan menjalin relasi dengan para *stakeholder* eksternal. Peningkatan yang signifikan juga dirasakan pada kepercayaan diri khususnya menghadapi pejabat dengan strata lebih tinggi dari *project leader* sendiri dalam menjalin Kerjasama dan membangun komitmen.

Pengembangan kompetensi juga dilaksanakan kepada Tim Efektif Proyek Perubahan diantaranya dengan cara mengikut sertakan tim efektif untuk mengikuti kegiatan FGD dan literasi kompetensi pemerintahan serta mengikuti kunjungan kerja saat berkoordinasi,

E. Tindak Lanjut

Dengan telah dilakukannya Proyek Perubahan “Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi” tahapan milestone jangka pendek, maka diperlukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menyempurnakan *Learning Management Sistem* (Sikuat Layanan) pada untuk kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Literasi Berbasis Digital
2. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Melalui Literasi Berbasis Digital untuk kab/kota se-wilayah kerja PPSDM Regional Bukittinggi
3. Melakukan koordinasi dengan Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi BPSDM Kemendagri dalam menindaklanjuti sertifikasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.
4. Melakukan Koordinasi dengan BPSDM Provinsi Sewilayah kerja dalam proses pengembangan dan sertifikasi kompetensi pemerintahan.
5. Melaksanakan program pengembangan kompetensi pemerintahan melalui literasi berbasis digital regular tahunan
6. Mengajukan *Policy Brief* kepada BPSDM Kemendagri terkait penyebarluasan literasi kompetensi Pemerintahan kepada ASN Seluruh Indonesia

Profil Peserta



Nama Peserta : Sarjayadi, SS

NIP : 197003041993061001

Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I / IV.b

Angkatan/Kelompok : Angkatan XXVIII / kelompok V

Tempat / Tanggal Lahir : Karanganyar / 4 Maret 1970

Pendidikan terakhir : S-1

Program Studi : Sastra Inggris

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surakarta

Instansi : Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi
Kementerian Dalam Negeri

Jabatan : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi
Kemendagri

Daftar Pustaka

1. LAN RI, Modul PKN II, 2021
2. Pramudhita, Ayoda, *Inovasi Birokrasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2020
3. Solusu, *Pengambilan Keputusan Strategik*, Cetakan Ketiga, Rasindo, 2000
4. Triwidodo, *Inovasi Harga Mati*, Rajawali Persada, 2019
5. Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Cetakan Ketujuh, Raga Garfindo, 2013

LAMPIRAN

MILESTONE JANGKA PENDEK TAHAPAN KEGIATAN





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdbukittinggi2022@gmail.com

Bukittinggi, 30 September 2022

Nomor : 005/1377.a/PPSDM – BKT
Sifat : -
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Undangan Membangun
Komitmen Proyek Perubahan
PKN

Kepada
Yth. (Daftar Nama Terlampir)
Di-
PPSDM Regional
Bukittinggi

Sehubungan dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang diikuti oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, bahwa dalam agenda pembelajaran pelatihan tersebut terdapat Penulisan Proyek Perubahan, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/tanggal : Senin, 3 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kebangkitan Nasional PPSDM Regional
Bukittinggi
Acara : Membangun Komitmen Proyek Perubahan PKN

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/1377.a/PPSDM-BKT
Tanggal : 30 September 2022

Daftar Nama Undangan Membangun Komitmen Proyek Perubahan PKN

1. Shohibul Azmi Riva'i, SE, M.Si, Kepala Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bukittinggi;
2. Ir. Said Alkhudri, MM, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
3. Ir. Wardi Nazman, M.Sc, Arc.Eng, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
4. Drs. Khalid Efendi, M.Pd, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
5. Pramana Wahyu S, S. Sos, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
6. Yanison MN, SE., MM, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
7. Defrimen, M.Si, Koordinator Tim II PPSDM Regional Bukittinggi;
8. Yatmiko, S.STP, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
9. Drs. Deswan Syam, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
10. Norma Sulisiawati, S.Sos., M.SE, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
11. Afri Yendra, SH, M.H, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
12. Ratna Sriwina, M.Si, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
13. Irzal, S.Sos, Assessor SDM Aparatur Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
14. Em Arryjante Ananta, S. Sos, Analis Kepegawaian Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
15. Marta Suarni, S.Sos, Kasubbag Keuangan PPSDM Regional Bukittinggi;
16. Marsam, S.Sos, Kasubbag Supras dan Rumah Tangga PPSDM Regional Bukittinggi;
17. Eka Saputra, S.Sos, MM, Analis Kepegawaian Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
18. Aryo Fernandes, S.Si, Koordinator Tim I PPSDM Regional Bukittinggi;
19. Mulya Nanda Hariandja, M.Pd, Perencana Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;

20. Retwando, S.Komp, M.Si, Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian PPSDM Regional Bukittinggi;
21. Andari Dwi Utami, SH, MH, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
22. Leo Agust Fernando, S.Kom, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PPSDM Regional Bukittinggi;
23. Jerry Marantika, S.Psi, Analis Pengembangan SDM Aparatur PPSDM Regional Bukittinggi.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdmbukittinggi2022@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1389/PPSDM-BKT

Dasar : Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : Sarjayadi, SS
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
NIP : 19700304 199603 1 001
Jabatan : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka membangun komitmen Proyek Perubahan PKN II Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, pada tanggal 4 Oktober 2022 ke BKPSDM Kabupaten Dharmasraya;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

An. Kepala BPSDM Kemendagri
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1390/PPSDM-BKT

Dasar : Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN:

Kepada :

1. Nama : Aryo Fernandes, S.Si
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19850112 201001 1 020
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda
2. Nama : Jerry Marantika, S.Psi
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP : 19890712 201503 1 003
Jabatan : Analis Pengembangan SDM Aparatur
3. Nama : Rendi Richardo
Jabatan : Pengemudi PPSDM Regional Bukittinggi

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka membangun komitmen Proyek Perubahan PKN II Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, pada tanggal 4 Oktober 2022 ke BKPSDM Kabupaten Dharmasraya;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 1

Dokumentasi Membangun Komitmen Proyek Perubahan
dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri



LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 1

Dokumentasi Membangun Komitmen Proyek Perubahan



Agenda : Membangun Komitmen Proyek Perubahan

Lokasi : Ruang Kebangkitan Bangsa PPSDM Reg. Bukittinggi

Waktu : 3 Oktober 2022

<http://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/>

[f @ppsdmregbukittinggi](https://www.facebook.com/ppsdmregbukittinggi)

[PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi](https://www.youtube.com/channel/UC...)



BerAKHLAK
Berkeadilan, Berkepastian, Berkeadilan, Berkepastian
Berkeadilan, Berkepastian, Berkeadilan, Berkepastian

**bangga
melayani
bangsa**

LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 1

Dokumentasi Membangun Komitmen Proyek Perubahan



PPSDM
Regional Bukittinggi



Bersama Bupati Dharmasraya
Sutan Riska Tuanku Kerajaan



- Agenda : Membangun Komitmen Proyek Perubahan
- Lokasi : Rumah Dinas Bupati Dharmasraya
- Waktu : 4 Oktober 2022

<http://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/>



@ppsdmregbukittinggi



PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi



BerAKHLAK
Berkeadilan, Berkepercayaan, Berkeadilan, Berkepercayaan
Berkeadilan, Berkepercayaan, Berkeadilan, Berkepercayaan

**bangga
melayani
bangsa**

LAMPIRAN

MILESTONE JANGKA PENDEK TAHAPAN KEGIATAN

2



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdmbukittinggi2022@gmail.com

Bukittinggi, 21 Oktober 2022

Nomor : 005/1489.a/PPSDM – BKT
Sifat : -
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Undangan Rapat Tim Efektif

Kepada
Yth. (Daftar Nama Terlampir)
Di-
PPSDM Regional
Bukittinggi

Sehubungan dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang diikuti oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, bahwa dalam agenda pembelajaran pelatihan tersebut terdapat Penulisan Proyek Perubahan, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/tanggal : Senin, 24 Oktober 2022
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi
Acara : Rapat Tim Efektif

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/1489.a/PPSDM-BKT
Tanggal : 21 Oktober 2022

Daftar Nama Undangan Rapat Tim Efektif

1. Shohibul Azmi Riva'i, SE, M.Si, Kepala Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bukittinggi;
2. Defrimen, M.Si, Koordinator Tim II PPSDM Regional Bukittinggi;
3. Marta Suarni, S.Sos, Kasubbag Keuangan PPSDM Regional Bukittinggi;
4. Marsam, S.Sos, Kasubbag Saprasi dan Rumah Tangga PPSDM Regional Bukittinggi;
5. Aryo Fernandes, S.Si, Koordinator Tim I PPSDM Regional Bukittinggi;
6. Mulya Nanda Hariandja, M.Pd, Perencana Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
7. Retwando, S.Komp, M.Si, Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian PPSDM Regional Bukittinggi;
8. Jerry Marantika, S.Psi, Analis Pengembangan SDM Aparatur PPSDM Regional Bukittinggi;
9. Anggy Reonal, S.STP, Analis Kepegawaian Ahli Pertama PPSDM Regional Bukittinggi;
10. Ikhsani Novella, S.STP, Analis Rencana Program Dan Kegiatan PPSDM Regional Bukittinggi;
11. Hayyi Utamimul Hasanah, S.Psi, Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama PPSDM Regional Bukittinggi;
12. Niky Khoirunnisa Utami, A.P.Kb.N, Pengadministrasi Keuangan pada Subbagian Keuangan Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bukittinggi;
13. Silvani Restifa, S.E, Staf Subbagian Perencanaan PPSDM Regional Bukittinggi;
14. Ari Saputra, A.Md, Staf Subbagian Saprasi dan Rumah Tangga PPSDM Regional Bukittinggi.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Provinsi Sumatera Barat
Telp. (0752) 28241, Fax (0752) 28240 Email : ppsdmregionalbukittinggi@gmail.com

NOTULA

Rapat : Rapat Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Hari/Tanggal : Senin/24 Oktober 2022
Surat Undangan : 005/1489.a/PPSDM-BKT
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB
Acara : 1. Penyampaian Rencana Implementasi Proyek Perubahan
2. Membahas rencana teknis kegiatan
3. Diskusi dan Tanya Jawab Rencana Aksi Perubahan

Pimpunan Rapat :
Ketua : Sarjayadi, SS
Sekretaris : Shohibul Azmi Riva'I, SE, M.Si
Notulen : Jerry Marantika, S.Psi

Peserta : - Koordinator Tim
- Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian
- Pejabat Fungsional Perencana
- Pejabat Pelaksana

Kegiatan :

1. Penyampaian Rencana Implementasi Proyek Perubahan

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, Sarjayadi,SS selaku pemimpin rapat membuka acara dengan menyampaikan target kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan di wilayah kerja PPSDM Regional Bukittinggi. Adapun yang masuk dalam pembahasan target ialah target instansi, target jumlah peserta serta target materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan.

2. Membahas rencana teknis kegiatan

Pimpinan rapat mengerucutkan pembahasan rapat kepada teknis pelaksanaan kegiatan proyek perubahan yang memiliki sedikitnya 3 output yaitu, 1) terlaksananya FGD yang melibatkan Bupati Dharmasraya dan Sekretaris daerah Kota dan Kabupaten se Sumatera Barat, 2) adanya kesepakatan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan dengan beberapa pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera Barat, 3) Terlaksananya kegiatan pengembangan Kompetensi Pemerintahan berupa Literasi

Pemerintahan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting yang diikuti ASN pada beberapa Instansi Pemerintah Kota atau Kabupaten di Sumatera barat.

3. Diskusi dan Tanya Jawab Rencana Implementasi Aksi Perubahan
Setelah menyampaikan rencana target capaian kegiatan, Pimpinan Rapat meminta tanggapan peserta rapat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada Aksi Perubahan. Terdapat tanggapan dari 2 orang peserta rapat yang memberikan saran terkait teknis pelaksanaan Aksi Perubahan.

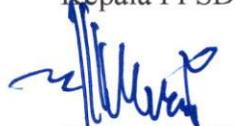
Penutup :

Rapat ditutup pada hari Senin, 24 Oktober 2022 pada pukul 15.00 WIB.

Demikian notulen hasil kesimpulan Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Nasional dilaporkan.

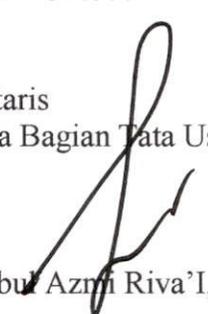
Baso, 24 Oktober 2022

Pimpinan Rapat
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS

Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha



Shohibul Azmi Riva'I, SE, M.Si

Notulen



Jerry Marantika, S.Psi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

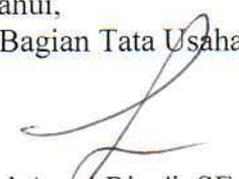
Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 2821 Facs. (0752) 28240

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 24 Oktober 2022
Agenda : Tim Efektif

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Shohibul	1.
2.	Aryo Fernandes	2.
3.	Marta Suarni	3.
4.	Niky Khoirunnisa U	4.
5.	Marsam	5.
6.	Hayyi Utamimul H	6.
7.	Defimen	7.
8.	Jerry Maranika	8.
9.	Mura Nirela Hanandja	9.
10.	Anggy Reonal	10.
11.	Ari Saputra	11.
12.	SKHCANI NOVELLA	12.
13.	Silvani Restifa	13.
14.	Petwandi	14.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha


Shohibul Azmi Riva'i, SE, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19751013 200801 1 001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdmbukittinggi2022@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI
NOMOR : 81/PPSDM-BKT/2022
TENTANG
TIM PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL
PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN
BAGI ASN MELALUI LITERASI BERBASIS DIGITAL PADA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI
REGIONAL BUKITTINGGI**

KEPALA PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI

- Menimbang
- a. Bahwa untuk mewujudkan penatakelolaan kepesertaan pelatihan kepemimpinan nasional, kesempatan pengembangan karier, dan pengembangan kompetensi yang lebih luas dipandang perlu untuk membentuk tim pelaksanaan teknis operasional pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi.
- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI TENTANG TIM PELAKSANAAN TEKNIK OPERASIONAL PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN BAGI ASN MELALUI LITERASI BERBASIS DIGITAL PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksanaan Teknik Operasional Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Bagi ASN Melalui Literasi Berbasis Digital Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi;
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas pengoperasian terkait Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Berbasis Digital Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 24 September 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala PPSDM
Regional Bukittinggi
Nomor : 81/PPSDM-BKT/2022
Tanggal : 24 September 2022

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL
PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN
BAGI ASN MELALUI LITERASI BERBASIS DIGITAL PADA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI
REGIONAL BUKITTINGGI**

NO	NAMA	JABATAN
1	Sarjayadi, SS	Ketua
2	Shohibul Azmi Rivai, SE, M.Si	Penanggung jawab
3	Jerry Marantika, S.Psi	Sekretaris
4	Defrimen, M.Si	Anggota
5	Marsam, S.Sos	
6	Marta Suarni, S.Sos	
7	Retwando, S.Kom, M.Si	
8	Mulya Nanda Hariandja, M.Pd	
9	Aryo Fernandes, S.Si	
10	Anggy Reonal, S.STP	
11	Anna Febrina Sugiarti, M.E.	
12	Niky Khoirunnisa Utami, A.P.Kb.N	
13	Ari Saputra	

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdbukittinggi2022@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI
NOMOR : 82/PPSDM-BKT/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN MATERI PEMBELAJARAN LITERASI PEMERINTAHAN PADA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI
REGIONAL BUKITTINGGI**

KEPALA PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI

- Menimbang
- a. Bahwa untuk mewujudkan penatakelolaan kepesertaan pelatihan kepemimpinan nasional, kesempatan pengembangan karier, dan pengembangan kompetensi yang lebih luas dipandang perlu untuk membentuk tim konten pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi.
- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI TENTANG TIM PENYUSUN MATERI PEMBELAJARAN LITERASI PEMERINTAHAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Materi Pembelajaran Literasi Pemerintahan Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi ;
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas membuat Modul Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Literasi Berbasis Digital Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 24 September 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala PPSDM
Regional Bukittinggi
Nomor : 82/PPSDM-BKT/2022
Tanggal : 24 September 2022

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN MATERI PEMBELAJARAN LITERASI
PEMERINTAHAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

NO	NAMA	JABATAN
1	Sarjayadi, SS	Ketua
2	Ir. Wardi Nazman, MSC, ARC.ENG	Penanggung jawab
3	Pramana Wahyu S, S. Sos, M.Si	Sekretaris
4	Dra. Sastri Yunizarti Bakry, Akt, M.Si	Anggota
5	Ir. Said Alkhudri, MM	
6	Drs. Khalid Efendi, M.Pd	
7	Yatmiko, S.STP, M.Si	
8	Yanison MN, SE., MM	
9	Drs. Deswan Syam, M.Si	
10	Norma Sulisiawati, S.Sos., M.SE	
11	Afri Yendra, SH, M.H	
12	Ratna Sriwina, M.Si	
13	Andari Dwi Utami, SH, MH	

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 2

Dokumentasi Rapat Tim Efektif



Agenda : Rapat Tim Efektif

Lokasi : Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi

Waktu : 24 Oktober 2022

<http://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/>

[f @ppsdmregbukittinggi](https://www.facebook.com/ppsdmregbukittinggi)

[PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi](https://www.youtube.com/channel/UC...)



BerAKHLAK **#bangga**
berkeadilan melayani bangsa

LAMPIRAN

MILESTONE JANGKA PENDEK TAHAPAN KEGIATAN

3



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdbukittinggi2022@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1512/PPSDM-BKT

Dasar : Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : Sarjayadi, SS
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
NIP : 19700304 199603 1 001
Jabatan : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan, pada tanggal 27 Oktober 2022 ke Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Baso
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022

a.n. Kepala BPSDM Kemendagri
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1513/PPSDM-BKT

Dasar : Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN:

Kepada : 1. Nama : Leo Agust Fernando, S.Kom
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP : 19860809 201402 1 004
Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2. Nama : Hayyi Utamimul Hasanah, S.Psi.
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
NIP : 199406062020122029
Jabatan : Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama

3. Nama : Rendi Richardo
Jabatan : Pengemudi PPSDM Regional Bukittinggi

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan, pada tanggal 27 Oktober 2022 ke Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota;

2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;

3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Baso
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sariyadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

LAPORAN KEGIATAN

Dari : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi
Tembusan : -
Lampiran : Dokumentasi Kegiatan
Hal : Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan di Lingkup Kerja PPSDM regional Bukittinggi

b. Landasan Hukum

Surat Tugas Kepala PPSDM Regional Bukittinggi nomor: 094/1512/PPSDM-BKT

c. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kunjungan kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan ke Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota.

d. Waktu Pelaksanaan

27 Oktober 2022

II. Rincian Kegiatan

Dalam acara kunjungan kerja PPSDM Regional Bukittinggi Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan tersebut dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan pada 2 pemerintah daerah dan kegiatan kerja disambut oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing kabupaten dan kota yakni :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten 50 Kota Bapak Adrian Wahyudi, SH, MH
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Bapak Dafrul Pasi M., S.IP., MM

- b. Dalam kunjungan kerja tersebut disampaikan terkait regulasi dan pengembangan kompetensi kedepan yang akan digalang oleh PPSDM Regional Bukittinggi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri di Regional Sumatera, adapun kompetensi yang akan dikembangkan dan menjadi perhatian adalah Kompetensi Pemerintahan yang memiliki 7 Core Kompetensi yang terdiri atas :
1. Kebijakan Desentralisasi
 2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 3. Pemerintahan Umum
 4. Pengelolaan Keuangan Daerah
 5. Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah
 6. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan
 7. Etika Pemerintahan.
- c. Pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kab. 50 Kota yang diwakili oleh Kepala BKPSDM Kab. 50 Kota sedangkan pada Sekretariat Kota Payakumbuh, kunjungan diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh. Dalam kesempatan tersebut disampaikan urgensi diadakannya pengembangan kompetensi pemerintahan dan mengundang Sekretaris Daerah untuk dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud. Selain itu juga meminta kerjasama Sekretaris Daerah untuk mengarahkan kepada ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan yang akan diadakan di PPSDM Regional Bukittinggi. Baik Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh maupun Kepala BKPSDM menyambut dengan baik rencana pengembangan Kompetensi Pemerintahan didaerah dan mendukung kegiatan dimaksud serta bersedia mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PPSDM Regional Bukittinggi terkait kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan tersebut.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi, 28 Oktober 2022
yang Membuat Laporan,



Sarjayadi, SS
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

DOKUMENTASI

Kunjungan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Persiapan pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

27 Oktober 2022





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdmbukittinggi2022@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1522/PPSDM-BKT

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPSDM Kemendagri;
2. Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021..

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : Sarjayadi, SS
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
NIP : 19700304 199603 1 001
Jabatan : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi

- Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan, pada tanggal 28 Oktober 2022 ke Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Baso
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022

a.n. Kepala BPSDM Kemendagri
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1523/PPSDM-BKT

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPSDM Kemendagri;
2. Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. Nama : Anggy Reonal, S.STP
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP : 19901010 201406 1 001
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Pertama
2. Nama : Ari Saputra, A.Md
Jabatan : Supporting Staf
3. Nama : Rendi Richardo
Jabatan : Pengemudi PPSDM Regional Bukittinggi

- Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan, pada tanggal 28 Oktober 2022 ke Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Baso
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

LAPORAN KEGIATAN

Dari : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi
Tembusan : -
Lampiran : Dokumentasi Kegiatan
Hal : Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan di Lingkup Kerja PPSDM Regional Bukittinggi

b. Landasan Hukum

Surat Tugas Kepala PPSDM Regional Bukittinggi nomor: 094/1523/PPSDM-BKT

c. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kunjungan kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Sijunjung

d. Waktu Pelaksanaan

28 Oktober 2022

II. Rincian Kegiatan

Dalam acara kunjungan kerja PPSDM Regional Bukittinggi Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan tersebut dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan pada 2 pemerintah daerah dan kegiatan kerja disambut oleh sekretaris daerah masing-masing kabupaten kota yakni :

1. Sekretaris Daerah kabupaten Sijunjung Bpk. Dr. Zefnihan, AP. MSi
2. Sekretaris Daerah kabupaten Tanah Datar Bpk. Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si

- b. Dalam kunjungan kerja tersebut disampaikan terkait regulasi dan pengembangan kompetensi kedepan yang akan digalang oleh PPSDM Regional Bukittinggi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri di Regional Sumatera, adapun kompetensi yang akan dikembangkan dan menjadi perhatian adalah Kompetensi Pemerintahan yang memiliki 7 Core Kompetensi yang terdiri atas :
1. Kebijakan Desentralisasi
 2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 3. Pemerintahan Umum
 4. Pengelolaan Keuangan Daerah
 5. Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah
 6. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan
 7. Etika Pemerintahan.
- c. Dalam pertemuan tersebut sekretaris daerah kabupaten Sijunjung Dr.Zefnihan,M,Si menyinggung pengembangan kompetensi pemerintahan selain ASN juga dapat di kembangkan kepada unsur eksekutif dan legislative di pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan anggota DPRD yang menjadi garda terdepan dalam pengambilan kebijakan publik.
- d. Dalam pembahasan yang menarik tersebut pada dasarnya pemerintah tertarik guna pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pengembangan kompetensi dimaksud maka dibutuhkan pertemuan dalam membahas pengembangan kompetensi pemerintahan dimaksud dalam bentuk diskusi grup diantara pada Sekretaris Daerah kabupaten/Kota di wilayah kerja PPSDM regional Bukittinggi

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi, 1 November 2022
yang Membuat Laporan,



Sarjayadi, SS
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

DOKUMENTASI

Kunjungan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Persiapan pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
28 Oktober 2022





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdmbukittinggi2022@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1543/PPSDM-BKT

Dasar : Surat Kapala Kepolisian Resor Bukittinggi tanggal 26 Oktober 2022 perihal Undangan Upacara Pengukuhan Polres Bukittinggi menjadi Polresta Bukittinggi.

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : Sarjayadi, SS
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
NIP : 19700304 199603 1 001
Jabatan : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan ke Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Sawahlunto, pada tanggal 1 November 2022, pukul 08.00 WIB s.d selesai;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Baso
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

a.n. Kepala BPSDM Kemendagri
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1544/PPSDM-BKT

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPSDM Kemendagri;
2. Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. Nama : ARYO FERNANDES, S.Si
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19850112 201001 1 020
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda
2. Nama : JERRY MARANTIKA, S.Psi
Jabatan : Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP : 19890712 201503 1 003
Jabatan : Analis Pengembangan SDM Aparatur
3. Nama : Rendi Richardo
Jabatan : Pengemudi PPSDM Regional Bukittinggi

- Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan ke Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Sawahlunto, pada tanggal 1 November 2022, pukul 08.00 WIB s.d selesai;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Baso
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sariyadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdmbukittinggi2022@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1564/PPSDM-BKT

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPSDM Kemendagri;
2. Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN :

- Kepada : Nama : Sarjayadi, SS
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
NIP : 19700304 199603 1 001
Jabatan : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi
- Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan ke Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Pariaman dan BKPSDM Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 3 November 2022, pukul 08.00 WIB s.d selesai;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Baso
Pada Tanggal : 2 November 2022

a.n. Kepala BPSDM Kemendagri
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1565/PPSDM-BKT

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPSDM Kemendagri;
2. Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. Nama : ARYO FERNANDES, S.Si
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19850112 201001 1 020
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda
2. Nama : JERRY MARANTIKA, S.Psi
Jabatan : Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP : 19890712 201503 1 003
Jabatan : Analis Pengembangan SDM Aparatur
3. Nama : Ari Saputra, A.Md
Jabatan : Supporting Staf
4. Nama : Rendi Richardo
Jabatan : Pengemudi PPSDM Regional Bukittinggi

- Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan ke Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Pariaman dan BKPSDM Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 3 November 2022, pukul 08.00 WIB s.d selesai;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Baso
Pada Tanggal : 2 November 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

LAPORAN KEGIATAN

Dari : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi
Tembusan : -
Lampiran : Dokumentasi Kegiatan
Hal : Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan di Lingkup Kerja PPSDM regional Bukittinggi

b. Landasan Hukum

Surat Tugas Kepala PPSDM Regional Bukittinggi nomor: 094/1543/PPSDM-BKT

c. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kunjungan kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan ke Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Kota Solok dan Kabupaten Solok.

d. Waktu Pelaksanaan

1 November 2022

II. Rincian Kegiatan

Dalam acara kunjungan kerja PPSDM Regional Bukittinggi Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan tersebut dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Tim PPSDM mengawali perjalanan menemui Bapak Drs. Martias Wanto, MM selaku Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi didampingi oleh Kepala BKPSDM Kota Bukittinggi Ibu Sustinna, SE. Pada pertemuan tersebut dibahas terkait latar belakang direncanakannya kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dan permintaan kesediaan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi mendukung serta membantu terlaksananya kegiatan

tersebut. Setelah mendapatkan dukungan, Sekda Kota Bukittinggi memberikan masukan terkait teknis pelaksanaan diantaranya penjadwalan kegiatan dan penentuan lokasi kegiatan *Focus Group Discussion* sebagai Langkah awal pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan di Pemerintah Daerah.

- b) Tim PPSDM menuju lokus kedua yaitu Pemerintah Kota Solok yang disambut oleh Kepala BKPSDM Kota Solok Bapak Bitel, SH, MM beserta jajarannya. Pada pertemuan tersebut, Tim PPSDM membahas terkait rencana kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan yang akan dilaksanakan di Pemerintahan Daerah, setelah itu meminta pihak BKPSDM untuk menyampaikan pesan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok terkait permohonan untuk dapat mendukung kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan di daerah yang diawali dengan kegiatan *Focus Group Discussion* yang dihadiri oleh pejabat Sekretaris Daerah se Sumatera Barat.
- c) Lokus Terakhir adalah Pemerintah Kabupaten Solok yang mana Tim PPSDM diterima oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Solok, Bapak Afrialdi SE, MM. pada kesempatan tersebut Bapak Sarjayadi mengawali perbincangan dengan memperkenalkan Tim PPSDM dan menyampaikan rencana kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan yang akan dilaksanakan di Pemerintahan Daerah. Pada akhir pembicaraan, kepala Bapak Afrialdi, SE, MM memberikan dukungan serta masukan terkait teknis kegiatan pengembangan kompetensi agar kegiatan lebih efektif. Diantara masukan beliau ialah, berkenan pihak PPSDM memperkuat koordinasi dengan BKPSDM kota dan kabupaten selaku pelaksana teknis penyelenggara kegiatan pengembangan Aparatur Sipil Negara.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi, 1 November 2022
yang Membuat Laporan,



Sarjayadi, SS
NIP. 197003041996031001

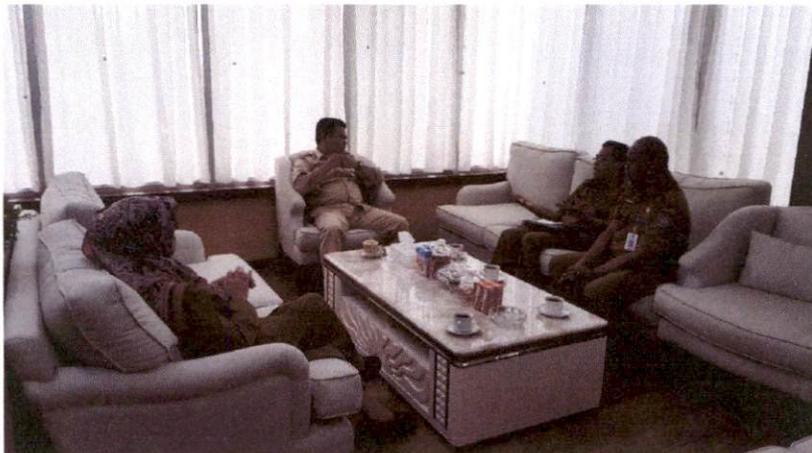


**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

DOKUMENTASI

Kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan ke Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Kota Solok dan Kabupaten Solok
1 November 2022





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

LAPORAN KEGIATAN

Dari : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi
Tembusan : -
Lampiran : Dokumentasi Kegiatan
Hal : Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan di Lingkup Kerja PPSDM regional Bukittinggi

b. Landasan Hukum

Surat Tugas Kepala PPSDM Regional Bukittinggi nomor: 094/1565/PPSDM-BKT

c. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kunjung kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan ke Sekretaris Daerah dan Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

d. Waktu Pelaksanaan

3 November 2022

II. Rincian Kegiatan

Dalam acara kunjung kerja PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan tersebut dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tim PPSDM mengawali perjalanan menuju BKPSDM Kota Padang dan disambut dengan Sekretaris BKPSDM Kota Padang Bapak Damanik. Pada pertemuan tersebut dibahas terkait latar belakang direncanakannya kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dan kegiatan *Focus Group Discussion* sebagai Langkah awal pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan di Pemerintah Daerah.

Setelah itu Tim PPSDM meminta pihak BKPSDM untuk menyampaikan pesan kepada Kepala BKPSDM maupun Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang terkait permohonan untuk dapat mendukung kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan di daerah.

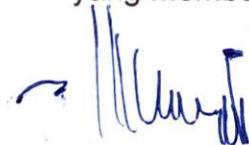
- 2) Tim PPSDM menuju lokus kedua yaitu menemui Kepala BKPSDM Provinsi Sumatera Barat Bapak Bustavidia. Pertemuan dengan Bapak Bustavidia dilaksanakan di Komplek Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Kepada Bapak Bustavidia, Tim PPSDM menyampaikan terkait rencana kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan yang akan dilaksanakan di Pemerintahan Daerah, setelah itu meminta pihak BPSDM untuk dapat mendukung kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan di daerah yang diawali dengan kegiatan *Focus Group Discussion* yang dihadiri oleh pejabat Sekretaris Daerah se Sumatera Barat. Pada akhir pembicaraan, kepala Bapak Bustavidia memberikan dukungan serta masukan terkait teknis kegiatan pengembangan kompetensi agar kegiatan lebih efektif.

- 3) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Kota Pariaman dan Kota Padang tidak dapat ditemui dikarenakan pejabat yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas diluar kantor.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi, 3 November 2022
yang Membuat Laporan,



Sarjayadi, SS

NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

DOKUMENTASI

Kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
ke Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dan BKPSDM
Provinsi Sumatera Barat
3 November 2022





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdmbukittinggi2022@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1589/PPSDM-BKT

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPSDM Kemendagri;
2. Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : Sarjayadi, SS
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
NIP : 19700304 199603 1 001
Jabatan : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi

- Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan, pada tanggal 6 November 2022 ke rumah dinas Walikota Solok;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 4 November 2022

a.n.Kepala BPSDM Kemendagri
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1590/PPSDM-BKT

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPSDM Kemendagri;
2. Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. Nama : Aryo Fernandes, S.Si
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19850112 201001 1 020
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda
2. Nama : Jerry Marantika, S.Psi
Jabatan : Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP : 19890712 201503 1 003
Jabatan : Analis Pengembangan SDM Aparatur
3. Nama : Rendi Richardo
Jabatan : Pengemudi PPSDM Regional Bukittinggi
- Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan, pada tanggal 6 November 2022 ke rumah dinas Walikota Solok;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah;
3. Biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan DIPA Petikan Satuan Kerja PPSDM Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 4 November 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

LAPORAN KEGIATAN

Dari : Kepala PPSDM Regional Bukittinggi
Tembusan : -
Lampiran : Dokumentasi Kegiatan
Hal : Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan di Lingkup Kerja PPSDM regional Bukittinggi

b. Landasan Hukum

Surat Tugas Kepala PPSDM Regional Bukittinggi nomor: 094/1590/PPSDM-BKT

c. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kunjungan kerja Kepala PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan ke Rumah Dinas Walikota Solok.

d. Waktu Pelaksanaan

6 November 2022

II. Rincian Kegiatan

Dalam acara kunjungan kerja PPSDM Regional Bukittinggi terkait Persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan tersebut dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

a) Tim PPSDM diterima oleh Walikota Solok, Zul Elfian, SH, MH yang didampingi oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok.

Pada pertemuan tersebut dibahas terkait latar belakang direncanakannya kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dan permintaan kesediaan Walikota Solok mendukung serta membantu terlaksananya kegiatan tersebut. Kepada Bapak Zul Elfian dimintakan kesediaan beliau menjadi Narasumber kegiatan *Focus Group Discussion* sebagai Langkah awal pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan di Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Sekretaris Daerah se Sumatera Barat.

- b) Pada akhir pembicaraan, menyampaikain kesediaan menjadi narasumber dan memberikan dukungan serta masukan terkait teknis kegiatan pengembangan kompetensi agar kegiatan lebih efektif. Diantara masukan dan harapan beliau ialah, diselenggarakannya kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan secara klasikal yang diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan pemerintahan Kota Solok.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi, 6 November 2022
yang Membuat Laporan,



Sarjayadi, SS
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

DOKUMENTASI

Kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
ke Rumah Dinas Walikota Solok
6 November 2022





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdbukittinggi2022@gmail.com

Bukittinggi, 4 November 2022

Nomor	: 005/1588/PPSDM – BKT	Yth. (Daftar Nama Terlampir)
Sifat	: -	Di-
Lampiran	: 2 (Dua) Lembar	PPSDM Regional
Perihal	: Undangan	Bukittinggi

Sehubungan akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/tanggal : Senin, 7 November 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kebangkitan Nasional PPSDM Regional Bukittinggi
Acara : Persiapan FGD dan Literasi Pemerintahan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/1588/PPSDM-BKT
Tanggal : 4 November 2022

Daftar Nama Undangan Persiapan Pelaksanaan FGD
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

1. Shohibul Azmi Riva'i, SE, M.Si, Kepala Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bukittinggi;
2. Dra. Hj. Sastri Yunizarti Bakry, Akt, M.Si, Widyaiswara Ahli Utama PPSDM Regional Bukittinggi;
3. Ir. Said Alkhudri, MM, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
4. Ir. Wardi Nazman, M.Sc, Arc.Eng, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
5. Drs. Khalid Efendi, M.Pd, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
6. Pramana Wahyu S, S. Sos, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
7. Yanison MN, SE., MM, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
8. Defrimen, M.Si, Analis Kepegawaian Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
9. Yatmiko, S.STP, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
10. Drs. Deswan Syam, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
11. Norma Sulisiawati, S.Sos., M.SE, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
12. Afri Yendra, SH, M.H, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
13. Ratna Sriwina, M.Si, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
14. Marta Suarni, S.Sos, Kasubbag Keuangan PPSDM Regional Bukittinggi;
15. Marsam, S.Sos, Kasubbag Saprass dan Rumah Tangga PPSDM Regional Bukittinggi;
16. Aryo Fernandes, S.Si, Analis Kepegawaian Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
17. Mulya Nanda Hariandja, M.Pd, Perencana Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
18. Retwando, S.Komp, M.Si, Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian PPSDM Regional Bukittinggi;
19. Andari Dwi Utami, SH, MH, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;

20. Jerry Marantika, S.Psi, Analis Pengembangan SDM Aparatur PPSDM Regional Bukittinggi.
21. Anggy Reonal,S.STP, Analis Kepegawaian Ahli Pertama PPSDM Regional Bukittinggi;
22. Ikhsani Novella,S.STP, Analis Rencana Program Dan Kegiatan PPSDM Regional Bukittinggi;
23. Hayyi Utamimul Hasanah, S.Psi, Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama PPSDM Regional Bukittinggi;
24. Niky Khoirunnisa Utami, A.P.Kb.N, Pengadministrasi Keuangan pada Subbagian Keuangan Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bukittinggi;
25. Silvani Restifa, S.E, Staf Subbagian Perencanaan PPSDM Regional Bukittinggi;
26. Ari Saputra, A.Md, Staf Subbagian Saprass dan Rumah Tangga PPSDM Regional Bukittinggi.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 2821 Facs. (0752) 28240

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 7 November 2022
Agenda : Persiapan FGD dan Literasi Pemerintahan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Deswa Fgt	U1	1.
2.	Defren		2.
3.	WARDI NAZMAN	WIDYASWARA	3.
4.	Ratna Sriwina	widyaiswara	4.
5.	Andari Pui Utami	widyaiswara.	5.
6.	Marta Lurri	Subbrig. Keuangan	6.
7.	Marsam	Kesuber n & Sarpras	7.
8.	Aryo	JFT	8.
9.	Ichulit Apud	widyaiswara	9.
10.	SASTRI BAKREY		10.
11.	Jamirun M.		11.
12.	Norma S		12.
13.	Niky Khoirunnisa	Peng. keuangan	13.
14.	Ikhscui Novella		14.
15.	Silvani Rectifa		15.
16.	Ari Saputra		16.
17.	Retwondo		17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

21.		21.
22.		22.
23.		23.
24.		24.
25.		25.
26.		26.
27.		27.
28.		28.
29.		29.
30.		30.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha


Shohibul Azmi Riva'i, SE, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19751013 200801 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Provinsi Sumatera Barat
Telp. (0752) 28241, Fax (0752) 28240 Email : ppsdmregionalbukittinggi@gmail.com

NOTULA

Rapat : Rapat Persiapan Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
Hari/Tanggal : Senin/7 November 2022
Surat Undangan : 005/1588/PPSDM-BKT
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Acara : Pembahasan Teknis Persiapan FGD dan Literasi Pemerintahan

Pimpunan Rapat :
Ketua : Sarjayadi, SS
Sekretaris : Shohibul Azmi Riva'I, SE, M.Si
Notulen : Jerry Marantika, S.Psi

Peserta : - Pejabat Struktural
- Ketua Tim
- Pejabat Fungsional Widyaiswara
- Pejabat Pelaksana

Kegiatan : Pembahasan Teknis Persiapan FGD dan Literasi Pemerintahan

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, Sarjayadi,SS selaku pemimpin rapat membuka acara dengan memberikan arahan kepada peserta rapat untuk mempersiapkan kegiatan Focus Group Discussion dan membagi penugasan melalui Surat Keputusan Nomor 81/PPSDM-BKT/2022 tentang Tim Pelaksanaan Teknis Operasional Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi ASN melalui Literasi berbasis Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi. Pemimpin Rapat mengarahkan target pekerjaan yang harus dicapai dalam waktu persiapan kegiatan diantaranya:

1. Pembuatan Surat Undangan ke Sekretaris Daerah
2. Persiapan Sarana dan Prasarana Kegiatan
3. Persiapan Administrasi dan Keuangan sebagai biaya kegiatan
4. Persiapan Konsumsi
5. Persiapan Tim Dokumentasi

Target undangan kegiatan FGD adalah Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat serta Kepala BPSDM dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pemimpin rapat selanjutnya membahas persiapan kegiatan Literasi Pemerintahan dengan mengarahkan Pejabat Fungsional Widyaiswara untuk menyiapkan materi untuk dipaparkan dalam kegiatan Literasi Pemerintahan.

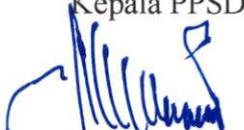
Penutup :

Rapat ditutup pada hari Senin, 7 November 2022 pada pukul 11.00 WIB.

Demikian notula hasil kesimpulan Rapat Persiapan Focus Group Discussion (FGD) dan Literasi Digital dilaporkan.

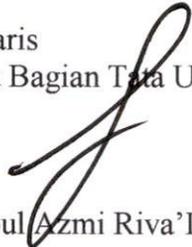
Baso, 7 November 2022

Pimpinan Rapat
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS

Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha



Shohibul Azmi Riva'I, SE, M.Si

Notulen



Jerry Marantika, S.Psi

Lampiran
Dokumentasi Kegiatan
Rapat Persiapan Focus Group Discussion (FGD) dan Literasi Digital





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl.Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021-7943418

Nomor : 005/10193/BPSDM
Sifat : -
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Undangan

Jakarta, 3 November 2022
Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri Pusat Pengembangan Sumber Daya (PPSDM) Regional Bukittinggi, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir dengan didampingi oleh Kepala BKPSDM pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 11 November 2022
Pukul : 12.45 WIB s.d selesai
Tempat : PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi
Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km.14 Tabek Panjang, Kec. Baso, Kab. Agam.
Acara : Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Tantangannya di Daerah"

Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdra Anggy Reonal, S.STP (HP. 085374760654).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretaris,

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Pit. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mohammad Rizal, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 196408171993031001

Tembusan :
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Lampiran I Surat Kepala BPSDM Kemendagri

Nomor : 005/10193/BPSDM

Tanggal : 3 November 2022

Daftar Nama Undangan
Focus Group Discussion (FGD)

“Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Tantangannya di Daerah”

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan;
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar;
15. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi;
16. Sekretaris Daerah Kota Padang;
17. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang;
18. Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
19. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh;
20. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
21. Sekretaris Daerah Kota Solok.

a.n. Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretaris,



Lampiran II Surat Kepala BPSDM Kemendagri

Nomor : 005/10193/BPSDM

Tanggal : 3 November 2022

Susunan Acara
FGD “Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Tantangannya di Daerah”
PPSDM Regional Bukittinggi
Baso, 11 November 2022

PUKUL	AGENDA	KETERANGAN
12.45 s/d 13.30 WIB	Registerasi dan Makan Siang Bersama	Panitia
13.30 s/d 13.45 WIB	Pembukaan	Panitia
13.45 s/d 14.00 WIB	Paparan mengenai pelaksanaan FGD	Kepala PPSDM Reg Bukittinggi
14.00 s/d 14.20 WIB	Paparan Narasumber I	Kepala BPSDM Kemendagri
14.20 s/d 14.40 WIB	Paparan Narasumber II	Walikota Solok
14.40 s/d 15.00 WIB	Paparan Narasumber III	Bupati Dharmasraya
15.00 s/d 15.50 WIB	Diskusi dan Tanggapan Forum FGD	Narasumber dan Peserta FGD
15.50 s/d 16.00 WIB	Penutupan	Panitia

a.n. Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretaris,

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mohammad Rizal, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 196408171993031001

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI



TERM OF REFERENCE (TOR)
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

DENGAN TEMA
**ARAH KOMPETENSI PEMERINTAHAN : PENERAPAN DAN
TANTANGANNYA DI DAERAH**

TAHUN 2022

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Kementerian Dalam Negeri berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 233 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Menteri Dalam Negeri menetapkan kompetensi Pemerintahan sebagai persyaratan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah, jabatan administrator dibawah kepala perangkat daerah dan jabatan pengawas.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut bertujuan untuk membangun sistem pengembangan kompetensi yang terstandar, adil, transparan dan terintegrasi antara NSPK urusan pemerintahan dengan kualifikasi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Daerah secara sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga tercipta dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Mengacu kepada pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, seorang Aparatur Pemerintahan haruslah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang berkaitan dengan (a) kebijakan desentralisasi; (b) hubungan pemerintah pusat dan daerah; (c) pemerintahan umum; (d) pengelolaan keuangan daerah; (e) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (f) hubungan pemerintah daerah dan DPRD; dan (g) etika pemerintahan.

Meskipun telah diterbitkannya beberapa regulasi terkait dengan kompetensi pemerintahan yang dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tetapi masih banyak ditemui beberapa persoalan yang terjadi di lapangan misalnya pengangkatan camat yang tidak berlatar belakang Pendidikan ilmu pemerintahan atau yang memiliki sertifikat profesi kepomongprajaan, atau contoh lain kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD yang menghambat penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ini menjadi tantangan kedepannya untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sesuai dengan kompetensi pemerintahan yang harus dimiliki oleh setiap aparatur penyelenggara pemerintah.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bukittinggi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis BPSDM Kemendagri di bidang pengembangan sumber daya manusia, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah berencana untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema **“Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Tantangannya di Daerah”**.

2. Tujuan Kegiatan

Setelah mengikuti Focus Group Discussion dengan tema Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Tantangannya di Daerah diharapkan dapat menjadi menjadi salah satu masukan untuk menerapkan dan mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan kompetensi pemerintahan yang harus dimiliki oleh setiap aparatur penyelenggara pemerintahan khususnya di daerah.

3. Fokus Kegiatan dan Materi Narasumber

Fokus dari FGD dengan tema Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Tantangannya di Daerah, yaitu:

1. Peserta FGD dapat berbagi pengalaman *best practice* penerapan kompetensi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
2. Peserta FGD dapat memberikan masukan / saran untuk mengatasi tantangan

dalam penerapan kompetensi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan FGD dengan tema Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Tantangannya di Daerah ini diselenggarakan oleh PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

.

5. Penutup

Demikianlah TOR ini disusun semoga dapat menjadi referensi bagi narasumber FGD dengan tema Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Tantangannya di Daerah ini diselenggarakan oleh PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Bukittinggi, 02 November 2022.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 094/1618/PPSDM-BKT

Dasar : Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN:

- Kepada :
1. Nama : Drs. Deswan Syam, M.Si
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19761211 199511 1 001
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya
 2. Nama : Defrimen, M.Si
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
NIP : 19740902 200801 1 001
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Madya
 3. Nama : Ratna Sriwina, M.Si
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
NIP : 197508132008012001
Jabatan : Widyaiswara Ahli Muda
 4. Nama : Andari Dwi Utami, SH, MH
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata (III/c)
NIP : 19880103 201402 2 004
Jabatan : Widyaiswara Ahli Muda
 5. Nama : Rahayu Melysa, SH. MH
Jabatan : Supporting Staf
- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pengamat kegiatan FGD Literasi Pemerintahan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi, pada tanggal 11 November 2022 pada pukul 13:30 WIB bertempat di Aula Proklamasi;
 2. Membuat catatan pengamatan, mengambil dokumentasi dan membuat laporan kegiatan Literasi Digital Pemerintahan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 November 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 893/1619PPSDM-BKT

Dasar : Tugas Pokok Dan Fungsi PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA-Petikan) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : SP.DIPA-010.12.2.506137/2022 Tanggal 17 November 2021.

MENUGASKAN :

Kepada : Daftar Nama-Nama Terlampir :

Untuk : 1. Mengikuti FGD Literasi Pemerintahan, pada tanggal 11 November 2022 pukul 13:30 WIB, bertempat di Aula Proklamasi;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 November 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 893/1619/PPSDM-BKT
Tanggal : 11 November 2022

PESERTA FGD LITERASI PEMERINTAHAN

NO	NAMA	NIP/ PANGKAT	GOLONGAN	JABATAN
1.	Ir. Wardi Nazman, M.Sc, Arc.Eng	196404161992031007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Ahli Madya
2.	Yanison MN, SE., MM	197310051992021001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Ahli Madya
3.	Drs. Khalid Efendi, M.Pd	196212191982101001	Pembina Tk. I (IV/b)	Widyaiswara Ahli Madya
4.	Pramana Wahyu S, S. Sos, M.Si	196803261990031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Widyaiswara Ahli Madya
5.	Yatmiko, S.STP, M.Si	197705121997031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Widyaiswara Ahli Madya
6.	Norma Sulisiawati, S.Sos., M.SE	196708111989032003	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Ahli Madya
7.	Afri Yendra, SH, M.H	19680421 199401 001	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Ahli Muda

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km. 14 Baso 26192 Telp (0752) 28241 Fax (0752) 28240

LAPORAN PENGAMATAN FGD LITERASI PEMERINTAHAN DI PPSDM
KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran dan fungsi ASN menurut UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana disebutkan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 69, disebutkan bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural.

Sementara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi tersebut, disebutkan juga bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah, mutatis mutandis pejabat yang menduduki jabatan di bawahnya, harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

“Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.

Adapun Kompetensi Pemerintahan terdiri dari 7 (tujuh) materi, yaitu: Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan Etika Pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas maka seorang ASN idealnya memiliki 10 (sepuluh kompetensi) dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Maka Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Regional Bukittinggi berinisiatif untuk mengadakan kegiatan “FGD Literasi Pemerintahan “

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 November 2021 Nomor SP DIPA 010.12.2.506137/2022, tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

C. TUJUAN

Adapun tujuan kegiatan FGD ini adalah : untuk menyamakan tanggapan atau persepsi dari peserta terkait penguasaan kompetensi Literasi Pemerintahan bagi aparatur pemerintahan

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pengamatan kegiatan FGD Literasi Pemerintahan di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi pada tanggal 11 November pukul 13.30 WIB - selesai.

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Terlaksananya kegiatan FGD dengan peserta para Sekretaris Daerah se-Provinsi Sumatera Barat dan para pejabat fungsional serta Widyaiswara PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi ;
2. Pemaparan materi oleh 2 (dua) orang Narasumber yaitu :
 - a. Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri
 - b. Walikota Solok Sumatera BaratKesimpulan dari pemaparan yang dilakukan oleh ke 2 narasumber bahwa memang sangat diperlukan kompetensi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.
3. Kegiatan FGD ini juga ada berupa penyamaan persepsi dari berbagai komentar para peserta bahwa literasi pemerintahan khususnya terkait dengan 7 (tujuh) kompetensi pemerintah sangat di perlukan oleh pemerintah daerah terutama kompetensi etika pemerintahan . Diminta oleh para peserta agar PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi dapat merealisasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pemerintahan untuk berbagai tingkatan jabatan ASN.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan FGD berjalan dengan lancar dan diharapkan secepatnya direalisasikan kegiatan pelatihan literasi pemerintahan bagi ASN

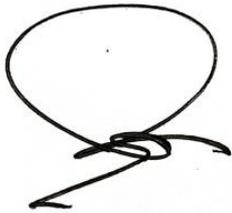
2. Saran

Diharapkan dukungan dan arahan lebih lanjut dari Bapak Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi setelah kegiatan FGD literasi pemerintahan ini terlaksana.

V. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan FGD Literasi Pemerintahan disusun.

1. Defrimen, M.Si



2. Drs Deswan Syam, M.Si



3. Ratna Sriwina, M.Si



4. Andari Dwi Utami, SH.MH



5. Rahayu Melysa, SH.MH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahayu Melysa', is written over a vertical line. The signature is stylized and includes a long horizontal flourish extending to the right.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Telp. (0752) 28240

**LAPORAN PENYELENGGARAAN FGD
ARAH KOMPETENSI PEMERINTAHAN**

Kepada : Menteri Dalam Negeri RI
c.q Kepala BPSDM Kemendagri
Dari : Sarjayadi, SS
Tembusan : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Hal : Laporan Penyelenggaraan FGD Arah Kompetensi Pemerintahan
di PPSDM Regional Bukittinggi

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap perilaku (attitude) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 233 Ayat (1), bahwa Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Tambahannya, pada pasal 233 Ayat (2) disebutkan bahwa selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah, mutatis mutandis pejabat yang menduduki jabatan dibawahnya harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Hal ini dipertegas dan ditindaklanjuti dengan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan. menyebutkan, pegawai ASN yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional yang meliputi; Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan Etika Pemerintahan.

b. Landasan Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan

c. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan FGD dengan Topik Arah Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan PPSDM Regional Bukittinggi BPSDM Kemendagri.

d. Waktu Pelaksanaan

11 November 2022

II. Rincian Kegiatan

Dalam rangka pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, kami telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema : Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Tantangannya di Daerah.

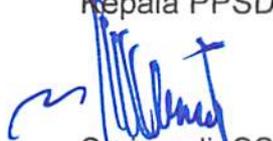
Beberapa hal penting dengan hormat kami laporkan sebagai berikut :

- 1. FGD diselenggarakan pada Hari Jum'at Pukul 13.00 s/d 17.00 WIB bertempat di Aula Proklamasi PPSDM Regional Bukittinggi.**
- 2. Tujuan dilaksanakannya FGD ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk menerapkan dan mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan kompetensi pemerintahan yang harus dimiliki oleh setiap aparatur penyelenggara pemerintahan khususnya di daerah.**
- 3. Pembicara utama FGD ini antara lain :**
 - I. Dr. Drs. SUGENG HARIYONO, M.Pd (Kepala BPSDM Kemendagri)**
 - II. Zul Elfian Umar, SH, M.Si (Walikota Solok)**
- 4. FGD ini juga diikuti oleh para Sekretaris Daerah di wilayah provinsi Sumatera Barat, para Kepala BKPSDM Kab/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat.**
- 5. Acara diawali dengan pemaparan Walikota Solok (Bapak Zul Elfian Umar, SH, M.Si) mengenai strategi dalam menerapkan kompetensi pemerintahan serta kiat-kiat untuk mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walikota Solok juga menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan di daerah, tidak hanya ASN tetapi juga Kepala Daerah dan anggota DPRD harus memiliki kompetensi yang mumpuni dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.**

6. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Kepala BPSDM Kemendagri mengenai pentingnya pemenuhan kompetensi pemerintahan bagi ASN yang menduduki jabatan pemerintahan di daerah.
7. Pada pelaksanaan FGD ini para narasumber dan peserta saling berbagi pengalaman best practice penerapan kompetensi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di wilayah Sumatera Barat, dan juga memberikan masukan/saran untuk mengatasi tantangan dalam penerapan kompetensi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Seluruh pembicara dan peserta FGD sepakat bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka seluruh ASN harus memiliki kompetensi pemerintahan, dengan tujuan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Selain itu juga didiskusikan juga bahwa kompetensi pemerintahan mutlak dimiliki oleh para calon kepala daerah maupun calon anggota DPRD sebelum menduduki jabatan.
9. Mengacu kepada pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, seorang Aparatur Pemerintahan haruslah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang berkaitan dengan (a) kebijakan desentralisasi; (b) hubungan pemerintah pusat dan daerah; (c) pemerintahan umum; (d) pengelolaan keuangan daerah; (e) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (f) hubungan pemerintah daerah dan DPRD; dan (g) etika pemerintahan.
10. Tindak lanjut berikutnya dari pelaksanaan FGD ini adalah dengan melaksanakan kegiatan Literasi Pemerintahan dengan target peserta para ASN di lingkungan provinsi Sumatera Barat untuk mengenalkan konsep dasar kompetensi pemerintahan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi, 11 November 2022
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi–Payakumbuh KM. 14 Kec. Baso – 26192 Kab. Agam Prov. Sumatera Barat
Telp. (0752) 28241, Fax (0752) 28240 Email : ppsdmregionalbukittinggi@gmail.com

BERITA ACARA **NOMOR : 800.2/1987/PPSDM-BKT**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Arah Kompetensi Pemerintahan : Penerapan dan Permasalahannya di daerah** yang dilaksanakan oleh :

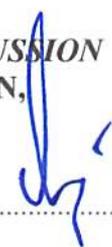
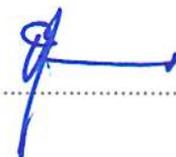
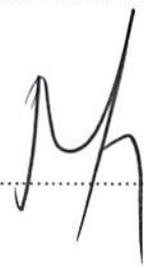
- Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd (Kepala BPSDM Kemendagri) dan Zul Elfian, SH, MH (Walikota Solok), selaku Narasumber Utama
- Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pejabat Sekretaris Daerah dari Kota/Kabupaten di Sumatera Barat, Kepala BPSDM Sumatera Barat, dan Kepala BKPSDM dari Kota/Kabupaten di Sumatera Barat selaku narasumber.

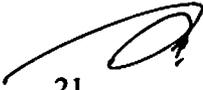
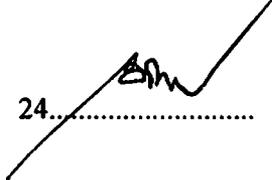
Setelah melakukan diskusi dan pembahasan terkait arah kompetensi pemerintahan, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi pemerintahan di Daerah perlu implementasikan untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan lain yang mengiringi Undang Undang tersebut.
2. Untuk mewujudkan langkah awal pengembangan kompetensi Pemerintahan, dilakukan literasi Pemerintahan yang di selenggarakan oleh PPSDM Regional Bukittinggi dan pelaksanaan tersebut didukung oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bentuk dukungan sebagaimana poin 2 diatas adalah menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti kegiatan Literasi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh PPSDM Regional Bukittinggi

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION*
YANG MENGHADIRI KEGIATAN,**

1. **Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd**
(Kepala BPSDM) 1.....
2. **Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.**
(Bupati Dharmasraya) 2.....
3. **Zul Elfian, S.H., M.Si**
(Walikota Solok) 3.....
4. **Drs. H. Syafrizal, M.M**
(Staf Ahli Gubernur Sumatra Barat Bidang
Ekonomi dan Keuangan) 4.....
5. **Drs. Martias Wanto, M.M**
(Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi) 5.....
6. **Andree Harmadi Algamar S.STP., M.Si., M.Han**
(Sekretaris Daerah Kota Padang) 6.....
7. **Sonny Budaya Putra, AP,M.Si**
(Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang) 7.....
8. **Yota Balad, S.STP., M.Si**
(Sekretaris Daerah Kota Pariaman) 8.....
9. **Dafrul Pasi. M. S.IP., MM**
(Plh. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh) 9.....
10. **Dr. dr. Ambun Kadri, MKM**
(Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto) 10.....
11. **Drs. Syaiful Rustam, M.Si**
(Sekretaris Daerah Kota Solok) 11.....
12. **Drs. Edi Busti, M.Si**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Agam) 12.....
13. **Adlisman, S.Sos, M.Si.**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya) 13.....
14. **Rinaldi, S.Kom., MM**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Kep. Mentawai) 14.....
15. **Widya Putra, S.Sos, M.Si**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota) 15.....
16. **Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.M.**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman) 16.....
17. **Drs. Mara Ondak, M.M.**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman) 17.....
18. **Hendra Putra, S.STP**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat) 18.....

19. **Mawardi Roska, S.IP**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan) 19.....
20. **Zefnihan, AP.M.Si**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung) 20.....
21. **Mulyadi Marcos, SE, MM**
(Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan SDM)  21.....
22. **Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE., MM**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan) 22.....
23. **Drs. Iqbal Ramadani Payana, M.Si**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar)  23.....
24. **Drs. Bustavidia, M.M**
(Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat)  24.....



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Provinsi Sumatera Barat
Telp. (0752) 28241, Fax (0752) 28240 Email : ppsdmregionalbukittinggi@gmail.com

REKAPITULASI DAFTAR HADIR NARASUMBER / PESERTA *FOCUS GROUP DISCUSSION* ARAH KOMPETENSI PEMERINTAHAN : PENERAPAN DAN PERMASALAHANNYA DI DAERAH

Hari : Jumat
Tanggal : 11 November 2022
Waktu : 13.30 – 17.00 WIB
Tempat : Aula Proklamasi PPSDM Regional Bukittinggi

No	Nama	Instansi	Jabatan	Keterangan*
1	Dr. SUGENG HARIYONO, M.Pd	Kementerian Dalam Negeri	Kepala BPSDM Kemendagri	Hadir
2	H. ZUL ELFIAN, S.H., M.Si	Pemerintah Kota Solok	Walikota	Hadir
3	Drs. H. SYAFRIZAI, M.M	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Staf Ahli Gubernur	Hadir
4	MULYADI MARCOS, SE, MM	Pemerintah Kabupaten Solok	Staf Ahli Bupati	Hadir
5	YOTA BALAD, S.STP, M.Si	Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris Daerah	Hadir
6	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	Pemerintah Kota Padang Panjang	Sekretaris Daerah	Hadir
7	Drs. MARTIAS WANTO, MM	Pemerintah Kota Bukittinggi	Sekretaris Daerah	Hadir
8	Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Sekretaris Daerah	Hadir
9	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M.	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Sekretaris Daerah	Hadir
10	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	Pemerintah Kota Payakumbuh	Plt. Sekretaris Daerah	Hadir
11	RINALDI, S.Kom, MM	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Plt. Sekretaris Daerah	Hadir
12	Drs. BUSTAVIDIA, MM	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Kepala BPSDM Sumatera Barat	Hadir
13	BITEL, SH, MM	Pemerintah Kota Solok	Kepala BKPSDM	Hadir
14	Drs. GUSPRIADI, MM	Pemerintah Kota Sawahlunto	Kepala BKPSDM	Hadir
15	IRMADAWANI, S.Sos	K Pemerintah ota Pariaman	Kepala BKPSDM	Hadir
16	SUSTINNA, SE	Pemerintah Kota Bukittinggi	Kepala BKPSDM	Hadir

No	Nama	Instansi	Jabatan	Keterangan*
17	JASRINALDI, SH, S.Sos	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Kepala BKPSDM	Hadir
18	MAIZAR, S.Sos	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Kepala BKPSDM	Hadir
19	YUSRISAL, SKM, MM	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Kepala BKPSDM	Hadir
20	YUNILSON, S.Sos	Pemerintah Kabupaten Agam	Kepala BKPSDM	Hadir
21	EDI SISWARA	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	Sekretaris BKPSDM	Hadir
22	ANCE ALFIANDO, S.ST, MPSSp	Pemerintah Kota Payakumbuh	Kabid. PSDM BKPSDM	Hadir
23	NOVITA, SE, M.Si	Pemerintah Kabupaten Solok	Kabid. PSDM BKPSDM	Hadir
24	YULWIDYA ISRA PUTRA	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Kabid. PSDM BKPSDM	Hadir
25	Andree Harmadi Algamar, S.STP, M.Si, M.Han	Pemerintah Kota Padang	Sekretaris Daerah	Hadir Via Zoom Meeting

Baso, 11 November 2022

Diketahui
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS

Pembina Tk.I

NIP. 19700304199651001

*Catatan :

Data diambil dengan aplikasi *online* "jotform" melalui :

1. Tautan : https://bit.ly/DH_Narasumber_FGD

2. Scan QR Code :



LAMPIRAN

MILESTONE JANGKA PENDEK TAHAPAN KEGIATAN

4



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI**

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241
Fax. (0752) 28240 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id
E-mail. ppsdbukittinggi2022@gmail.com

Bukittinggi, 28 Oktober 2022

Nomor : 005/1524/PPSDM – BKT Yth. (Daftar Nama Terlampir)
Sifat : - Di-
Lampiran : 1 (Satu) Lembar PPSDM Regional
Perihal : Undangan Bukittinggi

Sehubungan dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang diikuti oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, bahwa dalam agenda pembelajaran pelatihan tersebut terdapat Penulisan Proyek Perubahan, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Senin
Tanggal : 31 Oktober 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi
Acara : Rapat persiapan penyusunan materi Literasi Pemerintahan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/1524/PPSDM-BKT
Tanggal : 28 Oktober 2022

Daftar Nama Undangan
Rapat Persiapan Penyusunan Materi Literasi Pemerintahan

1. Dra. Hj. Sastri Yunizarti Bakry, Akt, M.Si, Widyaiswara Ahli Utama PPSDM Regional Bukittinggi;
2. Ir. Said Alkhudri, MM, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
3. Ir. Wardi Nazman, M.Sc, Arc.Eng, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
4. Drs. Khalid Efendi, M.Pd, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
5. Pramana Wahyu S, S. Sos, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
6. Yanison MN, SE., MM, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
7. Yatmiko, S.STP, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
8. Drs. Deswan Syam, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
9. Norma Sulisiawati, S.Sos., M.SE, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
10. Afri Yendra, SH, M.H, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
11. Ratna Sriwina, M.Si, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
12. Andari Dwi Utami, SH, MH, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 2821 Facs. (0752) 28240

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 31 Oktober 2022
Agenda : Rapat persiapan penyusunan materi Literasi Pemerintahan

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Desura Suman	1.
2.	Janny Lany	2.
3.	Ratna Srimina	3.
4.	Norma S	4.
5.	Andari Dwi Utami	5.
6.	Chalid Efendi	6.
7.	Latmiko, S.STP, M.Si	7.
8.	WARDI NAZMAN.	8.
9.	SASTRI BARRY	9.
10.		10.
11.		11.
12.		12.
13.		13.
14.		14.
15.		15.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha

Shohibul Armi Riva'i, SE, M.Si
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19751013 200801 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Provinsi Sumatera Barat
Telp. (0752) 28241, Fax (0752) 28240 Email : ppsdmregionalbukittinggi@gmail.com

NOTULA

Rapat : Rapat Persiapan Penyusunan Materi Literasi Pemerintahan
Hari/Tanggal : Senin/31 Oktober 2022
Surat Undangan : 005/1524/PPSDM-BKT
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Acara : 1. Penyampaian Rencana Implementasi Proyek Perubahan
2. Pembahasan Teknis Penyusunan Materi Literasi Pemerintahan

Pimpinan Rapat :
Ketua : Sarjayadi, SS
Sekretaris : Shohibul Azmi Riva'I, SE, M.Si
Notulen : Jerry Marantika, S.Psi

Peserta : - Pejabat Fungsional Widyaiswara
- Pejabat Pelaksana

Kegiatan :

1. Penyampaian Rencana Implementasi Proyek Perubahan

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, Sarjayadi,SS selaku pemimpin rapat membuka acara dengan menyampaikan latar belakang dan target kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan di wilayah kerja PPSDM Regional Bukittinggi. Setelah menjelaskan latar belakang dan target kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan, pemimpin rapat memberikan arahan kepada peserta rapat untuk menyiapkan dan menyusun materi terkait kompetensi Pemerintahan yang akan dibahas pada kegiatan Focus Group Discussion dan untuk ditayangkan pada kegiatan Literasi Pemerintahan.

2. Pembahasan Teknis Penyusunan Materi Literasi Pemerintahan

Pimpinan rapat membentuk tim Penyusunan Materi Literasi Pemerintahan dan menunjuk Bapak Ir. Wardi Nazman, M.Sc.Arch.Eng selaku Ketua Tim. Setelah dilakukan pembahasan terkait teknis penyusunan materi maka disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. Target konten pembelajaran yang dibuat :
 - 1) Bahan Tayang
 - 2) Soal Pretest & Posttest
- b. Keterangan Pembuatan Bahan Tayang dan Soal Pretest & Posttest
 - 1) Jumlah maksimal Bahan Tanyang sebanyak 10 lembar
 - 2) Tim Penyusun Materi diberikan tanggung jawab menyelesaikan materi dan membuat soal *Pretest* dan *Posttest* sebagai berikut :

No.	Materi	Penanggung Jawab
a)	Kebijakan Desentralisasi	- Ir. Said Alkhudri, MM - Afri Yendra, SH, MH
b)	Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Daerah	- Yatmiko, STTP, M.Si
c)	Pemerintahan Umum	- Drs. Khalid Effendi, M.Pd
d)	Pengelolaan Keuangan Daerah	- Dra. Sastri Yunizarti Bakri, A.Kt, M.Si - Yanison MN, SE, MM
e)	Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah	- Ir. Wardi Nazman, M.Sc.Arch.Eng - Pramana Wahyu S., S.Sos, M.Si
f)	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD	- Drs. Deswan, M.Si - Ratna Sriwina, M.Si
g)	Etika Pemerintahan	- Norma Sulistiawaty, S.Sos, M.SE - Andari Dwi Utami, SH, MH

- 3) Jumlah Soal Pretest dan Posttest sebanyak 2 Soal Per Materi dengan total 14 Soal dan peserta diberikan waktu mengerjakan selama 15 Menit.
 - 4) Draft Materi dikumpulkan kepada Ketua Tim paling lambat hari Kamis tanggal 3 November 2022.
- c. Tim Penyusun Materi juga menyiapkan alur cerita dan materi pembuatan video *overview* kompetensi pemerintahan.

Penutup :

Rapat ditutup pada hari Senin, 31 Oktober 2022 pada pukul 12.00 WIB.

Demikian notula hasil kesimpulan Rapat Persiapan Penyusunan Materi Literasi Pemerintahan dilaporkan.

Baso, 31 Oktober 2022

Pimpinan Rapat
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS

Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha



Shohibul Azmi Riva'I, SE, M.Si

Notulen



Jerry Marantika, S.Psi

Lampiran
Dokumentasi Kegiatan
Rapat Persiapan Penyusunan Materi Literasi Pemerintahan



LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 4

Dokumentasi Rapat Persiapam Literasi Pemerintahan Berbasis Digital



Agenda : Rapat Persiapan Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital

Lokasi : Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi

Waktu : 22 November 2022

<http://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/>

[Facebook](https://www.facebook.com/ppsdmbukittinggi) @ppsdmbukittinggi

[YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC...) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi

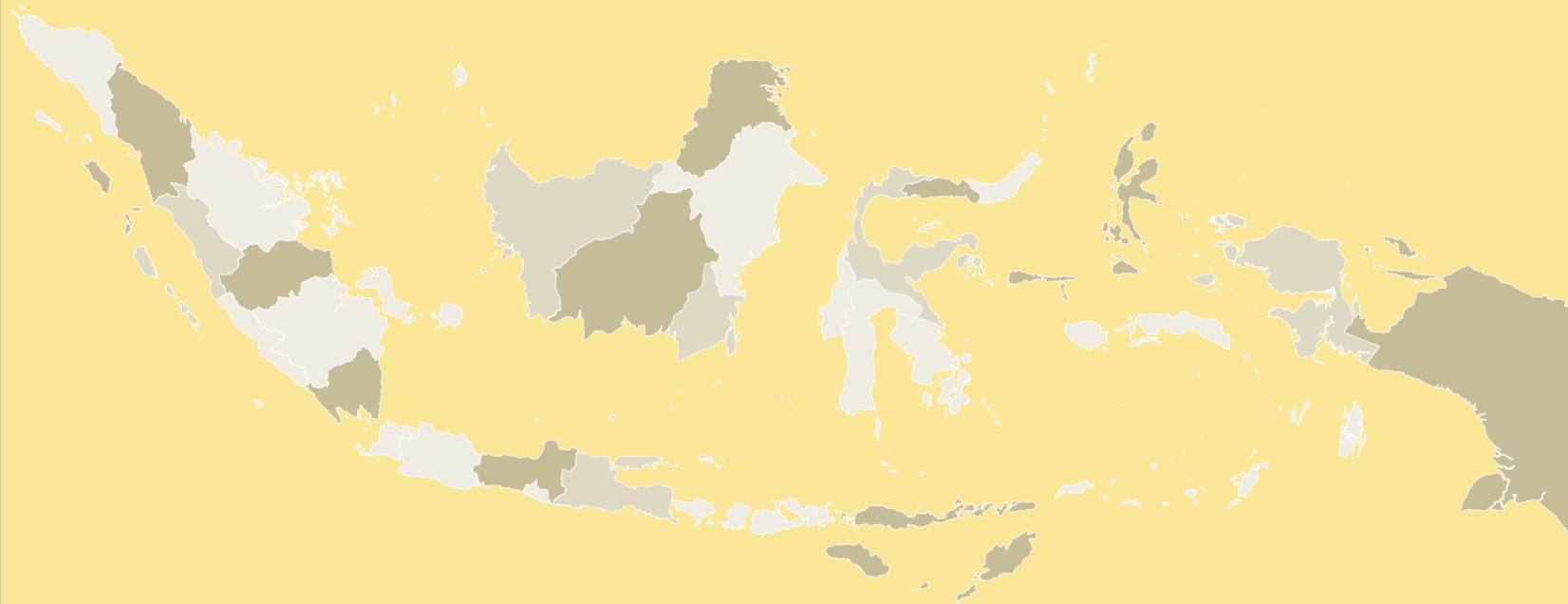


BerAKHLAK
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

bangga melayani bangsa



KEBIJAKAN DESENTRALISASI



BUSINESS AND
CORPORATE

APA ITU DESENTRALISASI?



1

Seiring dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, kebijakan *desentralisasi menjadi pilihan utama dalam sistem penyelenggaraan negara.*



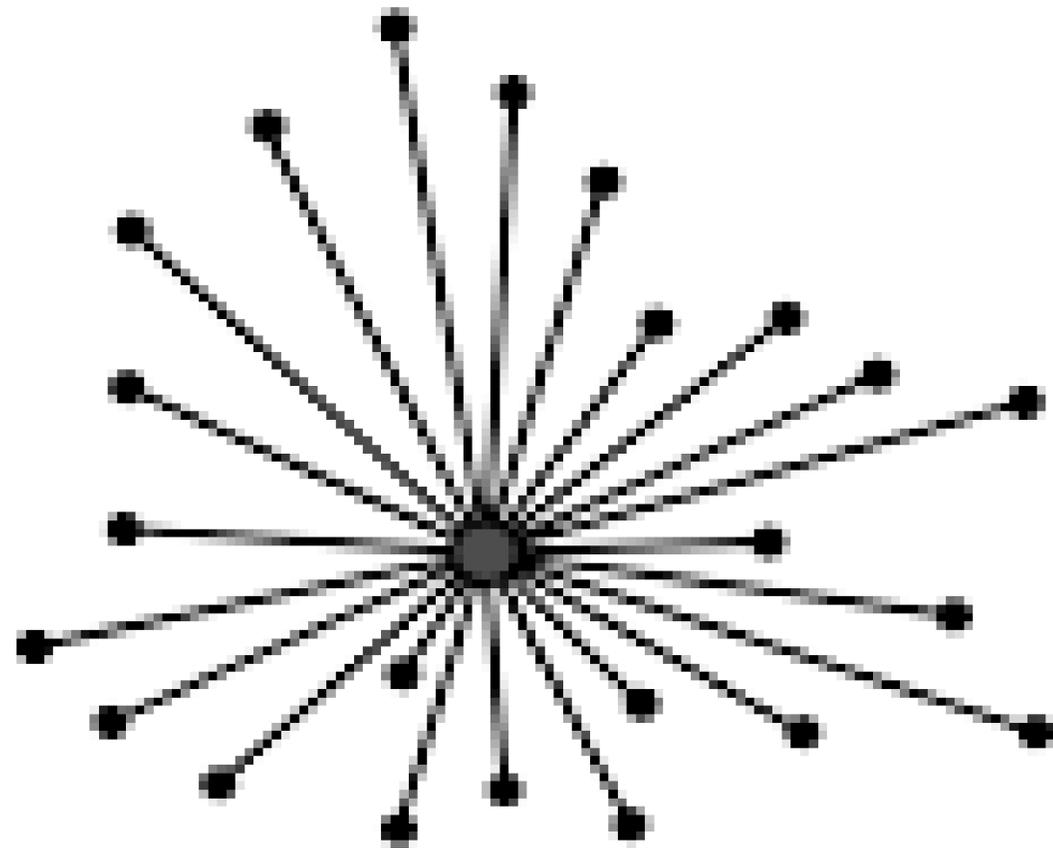
2

Lahirnya era reformasi menandai perubahan besar sistem politik Indonesia yang sentralistik menjadi salah satu negara yang paling desentralistik di dunia. Tidaklah berlebihan jika kemudian banyak pihak menyebutkan desentralisasi sebagai "anak kandung reformasi".

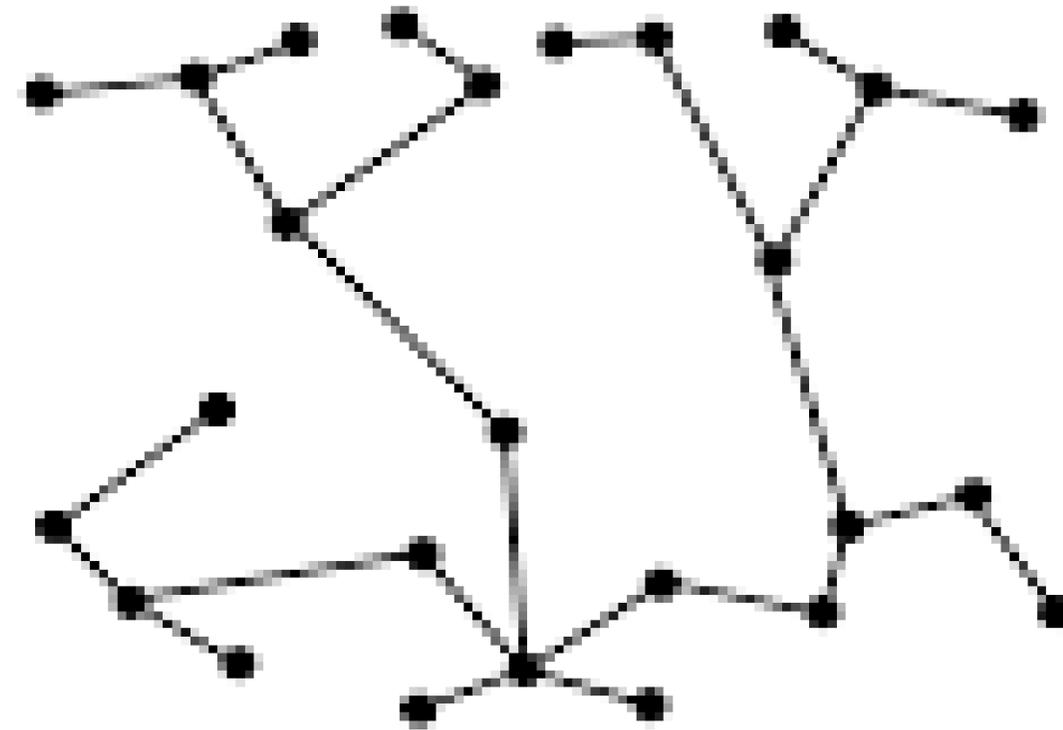
Sebagai sebuah pilihan politik, desentralisasi merupakan kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah kenegaraan

As a choice

KONSEP DESENTRALISASI



SENTRALISASI



DESENTRALISASI

PENGERTIAN

Pengertian dan penafsiran terhadap desentralisasi sangat beragam antar negara, antar ilmuwan, maupun antar praktisi pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Devas (1997: 351-352), istilah desentralisasi memiliki makna yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan pendekatan terhadap desentralisasipun sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain (*the term decentralization means different things to different people, and the approach to decentralization has varied widely between countries*).

DEFINISI DESENTRALISASI

1.

Desentralisasi Sebagai Transfer Perencanaan, Pengambilan Keputusan Dan Atau Kewenangan Administrasi Dari Pemerintah Pusat Kepada Organisasi Pusat Di Daerah, Unit Administrasi Lokal, Organisasi Semi Otonomi Dan Parastatal (Perusahaan), Pemerintah Daerah Atau Organisasi Non Pemerintah.

Rondinelli Dan Cheema (1983),

2.

Desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsifungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semipemerintah, maupun kepada swasta

(decentralization is the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasiindependent government organizations and/or private sector).

Rondinelli dan Bank Dunia (1999).

3.

desentralisasi di dalam sebuah negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani

(a transfer of authority to perform some service to the public from an individual or an agency in central government to some other individual or agency which is 'closer' to the public to be served).

Turner dan Hulme (1997: 152)

JENIS DESENTRALISASI

D. POLITIK

Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana.

D. ADMINISTRASI

Desentralisasi administratif melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah daerah atau badan publik semi-otonom atau perusahaan.

D. FISKAL

Tanggung jawab keuangan adalah komponen inti dari desentralisasi. Jika pemerintah daerah dan organisasi swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, mereka harus memiliki tingkat pendapatan yang memadai baik yang diperoleh secara lokal atau ditransfer dari pemerintah pusat—serta kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran.

D. PASAR

Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar mungkin melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru.

TUJUAN DESENTRALISASI



PERBAIKAN SOSIAL EKONOMI DI DAERAH

untuk memperbaiki sosial ekonomi di daerah melalui penerapan berbagai program pemerintah



MENCEGAH PEMUSATAN KEUANGAN

dapat mencegah pemusatan keuangan. Seperti yang banyak orang ketahui dengan adanya sistem desentralisasi maka pemerintah pusat melimpahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, maka penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana untuk peningkatan kerja sama umum di daerah tersebut.



BENTUK DEMOKRASI PEMERINTAH DAERAH

untuk membentuk demokrasi pemerintah daerah. Melalui penerapan sistem desentralisasi pemerintah berharap masyarakat juga turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

KATEGORI DESENTRALISASI MENURUT TUJUAN DAN INSTRUMEN

No	Kategori desentralisasi	Tujuan	Instrumen
1	Desentralisasi politik	Meningkatkan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik	Perbedaan konstitusi dan undang-undang, pengembangan partai politik, penguatan legislatif, pembentukan institusi politik lokal, pendukungan kelompok kepentingan publik yang efektif
2	Desentralisasi administrasi	Memperbaiki efisiensi manajemen untuk penyediaan layanan publik	Dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi masing-masing dengan karakteristik yang berbeda
3	Desentralisasi fiskal	Memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional.	Pengaturan kembali dalam pengeluaran, penerimaan dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintahan
4	Desentralisasi ekonomi dan pasar	Menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar	Transfer fungsi pemerintahan kepada organisasi bisnis, kelompok masyarakat atau ornop melalui privatisasi dan penguatan ekonomi pasar melalui deregulasi

KELEBIHAN DESENTRALISASI

1.

Lebih efektif

Kelebihan desentralisasi yang paling utama adalah meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah. Dengan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efektif karena tidak perlu menunggu arahan langsung dari pusat. Pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya intruksi dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tertentu

2.

Meringankan pekerjaan pemerintah pusat

Dengan tiap daerah melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri, pekerjaan pemerintah pusat jadi lebih ringan. Desentralisasi merupakan alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat.

3.

Birokrasi tidak terlalu panjang

Dengan desentralisasi, proses birokrasi untuk menjalankan pemerintahan daerah tidak terlalu panjang. Memangkas tahapan-tahapan prosedural dalam birokrasi dapat membuat sistem pemerintahan lebih efisien. Birokrasi yang panjang dan berbelit seringkali menjadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi.

KELEBIHAN DESENTRALISASI

4.

Lebih efisien biaya

Salah satu kelebihan desentralisasi adalah lebih efisien dalam segi biaya. Tanpa adanya birokrasi yang panjang dan wewenang pasar dan finansial turut dipegang oleh pemerintah daerah, pengeluaran daerah jadi lebih terkontrol. Pelayanan masyarakat akan menjadi lebih cepat dan efisien

5.

Kemajuan daerah terukur

Dengan desentralisasi, daerah-daerah yang tertinggal akan lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat. Pemerintah daerah jadi lebih fokus membangun daerahnya. Pengembangan beserta perencanaan dari beragam lembaga pemerintahan akan lebih terintegrasi.

6.

Meningkatkan hubungan pusat dan daerah

Meski desentralisasi memungkinkan daerah mengatur pemerintahannya sendiri, pemerintah pusat tetap ikut andil dalam berbagai keputusan. Ini yang bisa membuat hubungan pusat dan daerah akan tetap terjalin dengan baik

KEKURANGAN DESENTRALISASI

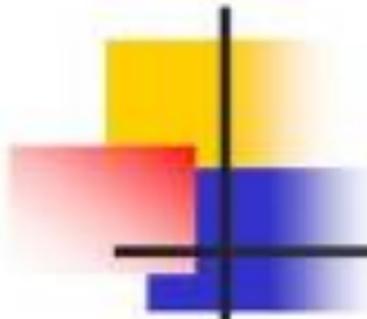
PERBEDAAN KEBIJAKAN ANTAR DAERAH	MENDORONG TIMBULNYA PAHAM KEDAERAHAN	MENGIKIS PERAN PEMERINTAH PUSAT
Adanya desentralisasi di tiap pemerintahan daerah bisa menyebabkan perbedaan kebijakan antar daerah. Pemerintah daerah yang bisa membuat kebijakannya sendiri bisa membuat tiap daerah memiliki banyak perbedaan dalam sistem otonomi daerahnya.	Desentralisasi juga memicu paham kedaerahan yang kuat. Jika berlebihan, sikap ini dapat memicu perpecahan antar daerah. Paham kedaerahan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional.	Berkurangnya peran pemerintah pusat bisa mengikis keterlibatan pusat dalam daerah. Sebagai pemegang arahan tertinggi, pemerintah pusat tetap harus memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

KEKURANGAN DESENTRALISASI

PENYELENGGARAAN LEBIH KOMPLEKS	RAWAN EKSPLOITASI KEKAYAAN DAERAH	TIDAK EFEKTIF JIKA PEMERINTAH DAERAH TIDAK KOMPETEN
<p>Dengan desentralisasi, struktur dari pemerintahan menjadi kian kompleks. Kebijakan pemerintah daerah bisa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memutuskan sesuatu perkara. Keseimbangan nasional bisa terganggu karena beragamnya kepentingan pemerintah daerah</p>	<p>Desentralisasi juga bisa memicu eksploitasi kekayaan daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah bisa bebas menggunakan kekayaan daerahnya. Jika pemerintahan tidak berjalan dengan baik, ini bisa memicu eksploitasi dan korupsi.</p>	<p>Desentralisasi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang benar-benar kompeten. Jika pemerintah tidak berjalan dengan baik, desentralisasi bisa menambah beban inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p>

Cakupan desentralisasi

Decentralization : the transfer of authority and responsibility for public functions for the central government to subordinate or quasi independent government or organization or the privat sector. Each type of decentralization –political, administrative, fiscal, and market- has different characteristics, policy implications, and conditions for success (Litvack, 1998).

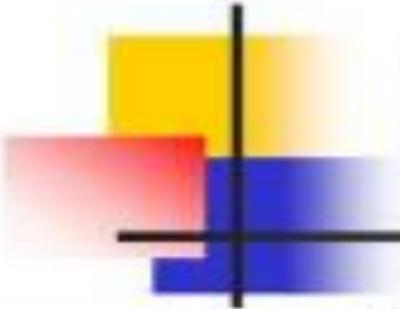


Cakupan desentralisasi

- Desentralisasi politik : melimpahkan wewenang kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan.
- Desentralisasi administratif : pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada unit-unit administratif pemerintahan yang lebih rendah, organisasi semi otonom, hingga organisasi sukarela.
- Desentralisasi fiskal : delegasi wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bidang fiskal meliputi aspek pendapatan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*)

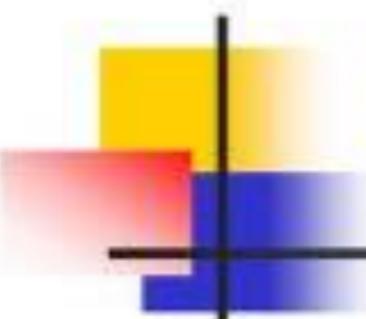
Cakupan desentralisasi yang lebih luas

- *Privatization, deregulation of private service provision, devolution to local government, delegation to public enterprises, deconcentration of central government bureaucracy (Rondinelli, 1989).*
- *Privatization* : pemberian semua tanggung jawab terhadap organisasi di luar pemerintah (swasta)
- *Devolution to local government* : pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub nasional dengan aktivitas sub nasional di luar kontrol pemerintah pusat



Dampak kebijakan desentralisasi

- Desentralisasi melahirkan *local (self) government*
- Dekonsentrasi melahirkan *local state government* atau *field administration*
- *Local government* memiliki otonomi (lokal) dalam arti *self government*, karena itu hubungan dengan sesamanya tidak bersifat hirarkis.
- Walaupun demikian, kepentingan dan urusan yang terliput dapat bersifat hirarkis. Sekalipun hubungan dengan Pemerintah merupakan hubungan antar organisasi, namun keberadaannya bersifat sub ordinate dan dependent terhadap pemerintah (*Hoessein, 2001*)



Keberadaan *local government*

- Sangat tergantung pada perspektif desentralisasi yang dianut oleh suatu negara.
- Desentralisasi sebagai suatu teori memiliki beberapa perspektif yang secara kohern memperkaya teori desentralisasi itu sendiri.
- Tidak ada sintesis atau agregasi teori yang monolitik dalam desentralisasi, kesepakatan dan pemahaman memiliki peranan penting dalam penggunaan konsep desentralisasi.



DESENTRALISASI DAN OTONOMI

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan otonomi daerah adalah hak mandiri pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Maka hubungan keduanya adalah **persamaan dalam kegiatan atau kebijakannya.**

OTONOMI DAERAH





Dasar Hukum Otonomi Daerah

1. Pasal 18 ayat (1) sampai (7), Pasal 18A ayat (1) dan (2), serta Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Secara umum, pengertian otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri.

secara harfiah pengertian otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.



MENURUT PENDAPAT AHLI

Desentralisasi adalah :

**Rozali
Abdullah**

Sebagai pemerintahan sendiri (zelfregering) dan terdiri dari membuat undang-undang sendiri (zelfwetgeving), melaksanakan sendiri (zelfitvoering), mengadili sendiri (zelfrechtspraak) dan menindaki sendiri (zelfpolitie).

Ubedilah

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.

**Philip
Mahwood**

Pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri di mana keberadannya terpisah dengan otoritas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.

**Vincent
Lemieux**

Kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan.

TUJUAN OTONOMI

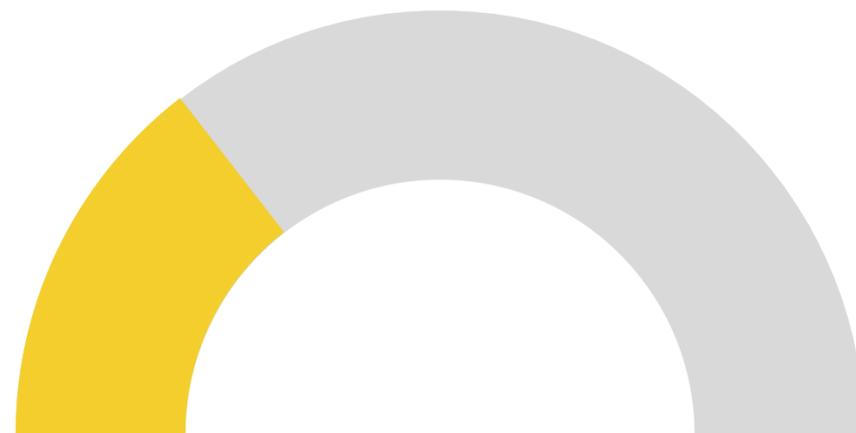
1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat



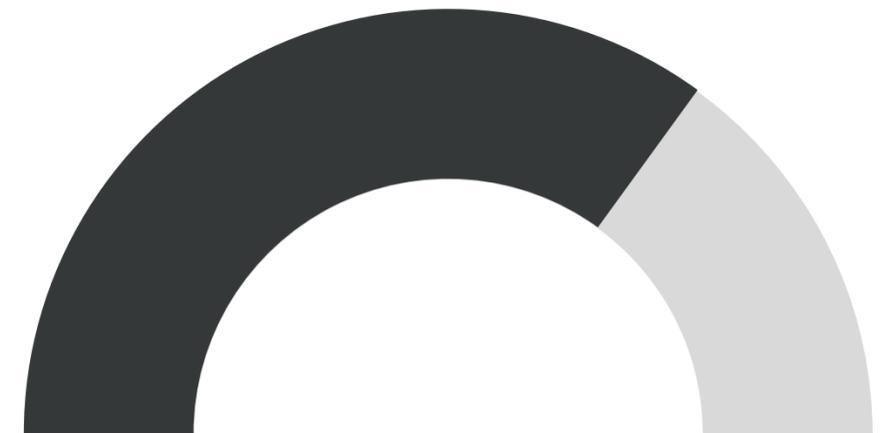
2

Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan



3

Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.



PRINSIP OTONOMI DAERAH

PRINSIP OTONOMI LUAS

Kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya.

PRINSIP OTONOMI NYATA

suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

PRINSIP OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB

otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

TERIMA KASIH



HUBUNGAN KELEMBAGAAN

PEMERINTAH PUSAT-DAERAH

HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PP 12 TAHUN 2017



PASAL 8 ayat (3)
BINWAS Secara Nasional
dikoordinasikan Mendagri

PASAL 379 ayat (2)
BINWAS dibantu
Inspektorat Provinsi

Sedangkan BINWAS menurut PP 12 Tahun 2017 menjelaskan tugas BINWAS umum yang terdiri atas:

- a.pembagian urusan pemerintahan;
- b.kelembagaan daerah;
- c.kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d.keuangan daerah;
- e.pembangunan daerah;
- f.pelayanan publik di daerah;
- g.kerjasama daerah;
- h.kebijakan daerah;
- i.kepala daerah dan DPRD; dan
- j.bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,” prinsip negara kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kpd pemerintah daerah.

2. Pola Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. oleh karena itu, Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom harus tunduk pada aturan negara dan semua kewenangan pemerintahan daerah bertanggung jawab kepada Presiden

3. Pemerintahan daerah merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari fungsi penyelenggara negara sebagai amanat dari undang-undang, yaitu adanya pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



1.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri

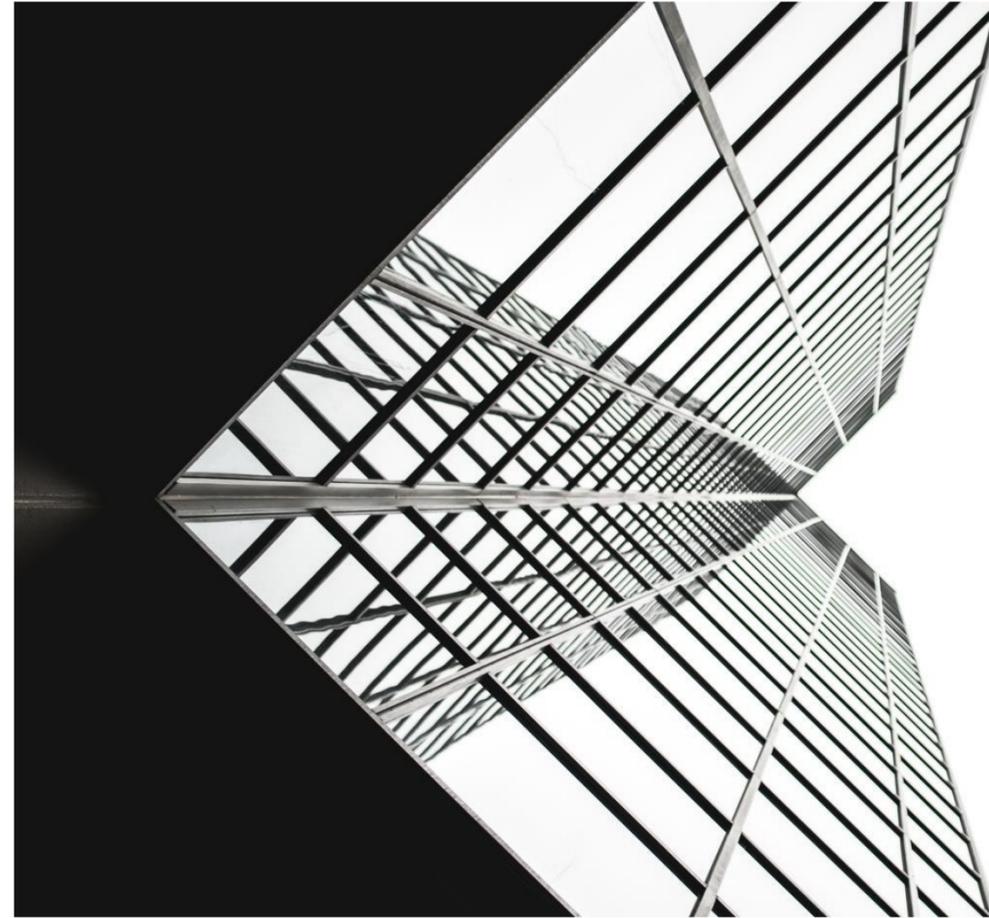
4.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk Provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk umum dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian untuk pembinaan teknis

5.

Adapun pembinaan kepada Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis

ASPEK- ASPEK PEMBINAAN WILAYAH



1

Pembinaan sebagai proses pengintegrasian berbagai nilai sosial-kultural yang terdapat pada berbagai sub-wilayah di suatu wilayah tertentu.

2

Pembinaan sebagai proses untuk menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya di wilayah yang bersangkutan

3

Pembinaan sebagai mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah pemerintahan sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat.

4

Pembinaan sebagai membangun manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam kerangka satu bangsa, bangsa Indonesia.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LINGKUP PEMBINAAN	PELAKU PEMBINAAN	JENIS	KETERANGAN
PROVINSI	Mendagri	Pembinaan Umum	Mendagri sebagai Koordinator Binwas
PROVINSI	Menteri Teknis/Kepala LPNK	Pembinaan Teknis	
PROVINSI	Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	Pembinaan Umum dan Teknis	Dibantu oleh Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Lingkup Pembinaan Umum:

1. Pembagian urusan pemerintahan;
2. Kelembagaan daerah;
3. Kepegawaian pada perangkat daerah;
4. Keuangan daerah;
5. Pembangunan daerah;
6. Pelayanan publik di daerah;
7. Kerja sama daerah;
8. Kebijakan daerah;
9. Kepala daerah dan DPRD; dan
10. Bentuk pembinaan lain

Lingkup Pembinaan Teknis

Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan daerah kab/kota

Bentuk: Fasilitasi, Konsultasi,
Diklat, Litbang



Thank You

<http://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/>

  @ppsdmregbukittinggi

 PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



SUMBER DAYA ALAM DAN PERANANNYA DALAM PEREKONOMIAN WILAYAH



— Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membahas pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk merumuskan program Pemerintah **berbasis budaya lokal** dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan demokrasi.

Kompetensi Dasar

Berdasarkan elemen kompetensi, maka setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan identitas budaya komunitas setempat, mengidentifikasi penerapan kebijakan eksisting, dan menentukan kebutuhan program pemerintah di daerah setempat.

INDIKATOR KEBERHASILAN

Mengidentifikasi nilai
dan tatanan budaya

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok



MATERI POKOK

Nilai dan Tatanan
Budaya Lokal



SUB MATERI POKOK

Sumber daya alam
dan Peranannya
dalam Perekonomian
Wilayah

Pengelolaan SDA Nagari Cingkariang (Kabupaten Agam)

TANAH ULAYAT

- Nagari Cingkariang sejak dahulu tidak memiliki tanah ulayat nagari
- Tanah ulayat di Nagari Cingkariang adalah tanah ulayat kaum yang telah dibagi-bagi secara turun temurun

Sumber Daya Alam/Kekayaan Nagari Cingkariang

01 PASAR NAGARI

02 MASJID NAGARI

06 MDA

Sebelum UU No. 5 Tahun 1979: Hasil kekayaan nagari dipergunaan untuk pembangunan nagari yang besarnya ditentukan oleh Wali Nagari

03 BALAI PERTEMUAN

04 TABEK/KOLAM NAGARI

Berlakunya UU No. 5 Tahun 1979: SDA dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintah Desa

05 SUMBER AIR ALAM

Setelah UU No. 5 Tahun 1979. Hasil kekayaan nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari

Pengelolaan SDA Nagari Sungai Tarab (Tanah Datar)



**SDA YANG DIMILIKI
PANITAHAN/
KETURUNANNYA
(SUMBER MATA AIR)**



MASJID NAGARI



**SDA yang dimiliki
Suku/Kaum**

tanah : hutan, sawah, sungai
gunung, ulayat suku



**SDA yang dimiliki
Nagari**

Pasar Nagari

Pengelolaan SDA Nagari Pariangan (Tanah Datar)

SUMBER DAYA ALAM

01

Tanah ulayat nagari. Terdiri dari tanah-tanah ulayat kaum maupun tanah-tanah bauntuak (diperuntukkan/ dibagikan) kepada kaum perempuan secara turun-temurun.

02

Tanah ulayat yang belum diolah , dapat dimanfaatkan oleh setiap anak nagari dengan memenuhi persyaratan Pemerintah nagari

03

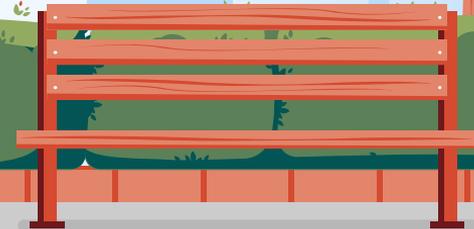
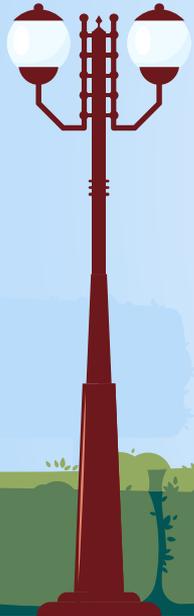
Obyek wisata alam, obyek wisata sejarah (kuburan kuno) , lapangan olah raga, masjid



Thank you!



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



CONTENTS

01

DASAR HUKUM

PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

02

PEJABAT

PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

03

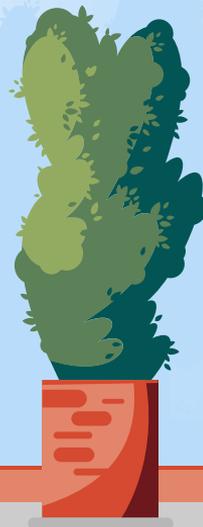
SIKLUS

PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

04

PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH



DASAR HUKUM



UU 17 TAHUN 2003

Tentang Keuangan Negara



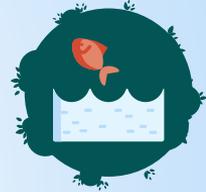
UU 1 TAHUN 2004

Tentang Perbendaharaan
Negara



PP 12 TAHUN 2019

Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah



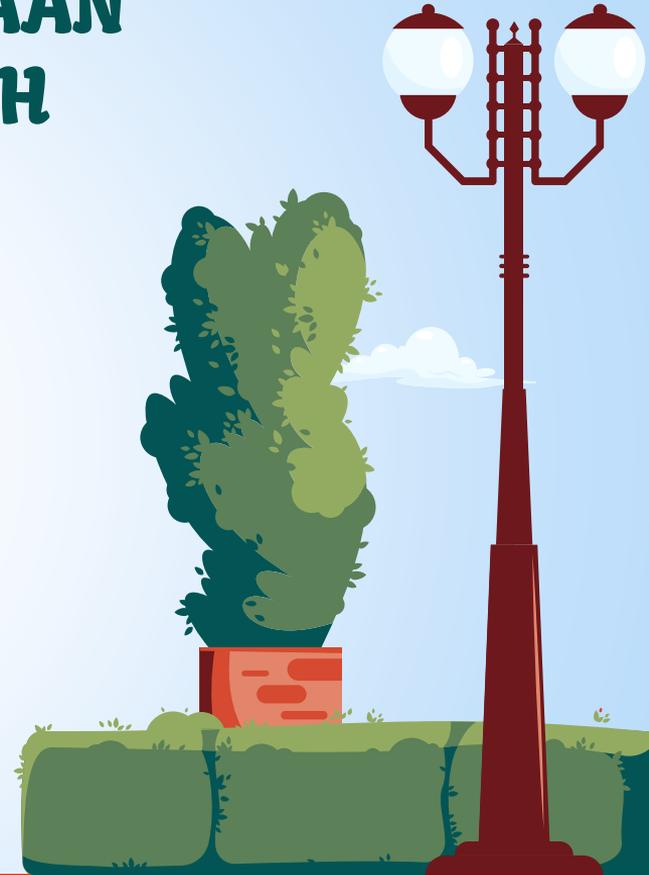
**PERMENDAGR1 77
TAHUN 2020**

Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan
Daerah



PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- PA
- KPA
- PPTK
- PPTK PEMBANTU
- BENDAHARA PENERIMAAN/ PENGELUARAN
- BENDAHARA PENERIMAAN/ PENGELUARAN PEMBANTU
- PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN/ PENGELUARAN



URUSAN PEMERINTAHAN

(Berdasarkan Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014)

ABSOLUT

1. POLITIK LUAR NEGERI
 2. PERTAHANAN
 3. KEAMANAN
 4. YUSTISI
 5. MONETER & FISKAL NASIONAL
 6. AGAMA
- (Pasal 9)

1. Dilaksanakan sendiri
2. Dilimpahkan Wew. Kpd Ins Vert di Drh Atau Gub sbg Wkl Pem Pus Berd Asas Dekon

KONKUREN

WAJIB

YAN DASAR
(Pasal 12 Ayat 1)

S P M

NON YAN
DASAR (Pasal 12
Ayat 2)

PILIHAN (Pasal 12 Ayat 3)

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

PEMERINTAHAN UMUM (Pasal 25)

DESENTRALISASI

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB

Berkaitan dengan pelayanan dasar

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum & penataan ruang;
4. perumahan rakyat & kawasan pemukiman;
5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. sosial.

Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

- | | |
|--|---|
| 1. tenaga kerja; | 9. perhubungan; |
| 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; | 10.komunikasi dan informatika; |
| 3. pangan; | 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah; |
| 4. pertanahan; | 12.penanaman modal; |
| 5. lingkungan hidup; | 13.kepemudaan dan olah raga; |
| 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; | 14.statistik; |
| 7. pemberdayaan masyarakat dan desa; | 15.persandian; |
| 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; | 16.kebudayaan; |
| | 17.perpustakaan; dan |
| | 18.kearsipan. |

PILIHAN

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumberdaya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN

Clue 1

PERENCANAAN

Clue 3

PELAKSANAAN

Clue 2

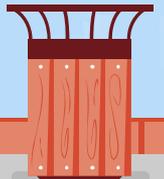
PENGAANGGARAN

Clue 4

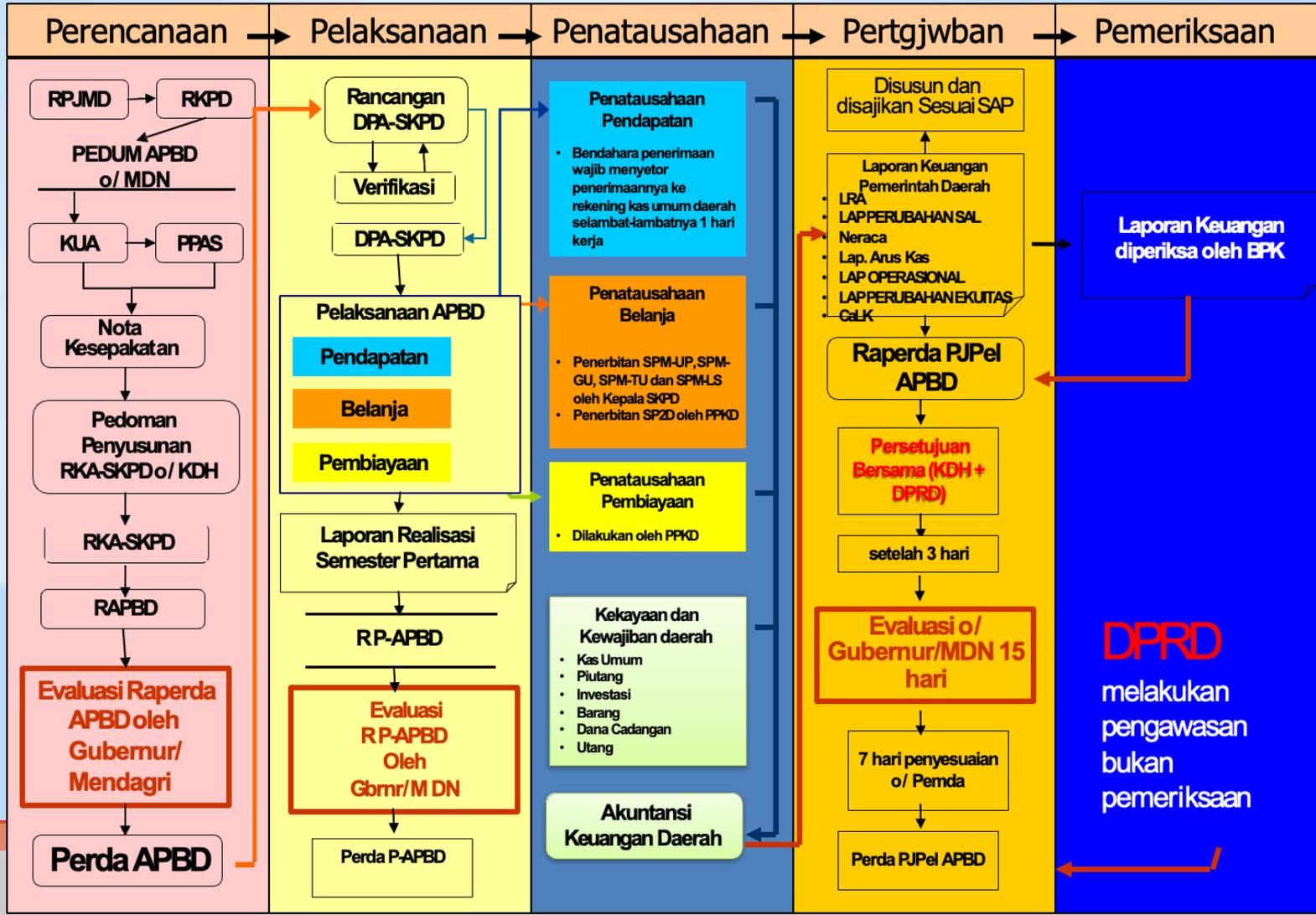
PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Clue 5

PELAPORAN



SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



PEMERIKSAAN

BPKP

Pemeriksaan
Ekternal

BPK

Pemeriksaan
Ekternal

INSPEKTORAT

Pemeriksaan
Internal

IRJEN

Pemeriksaan
Ekternal



OPINI LAP KEU

1. WTP

Wajar Tanpa
Pengecualian

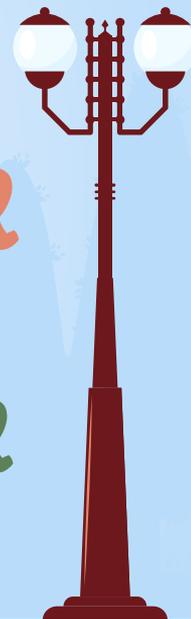
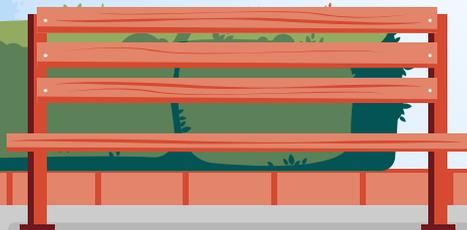
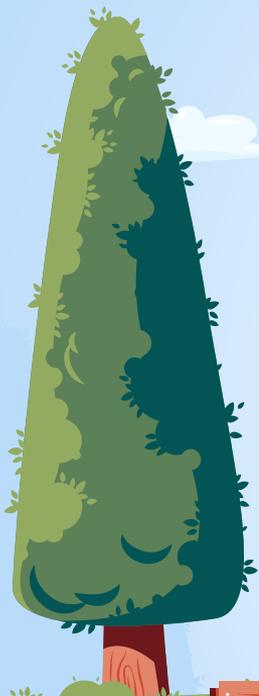
2. WDP

Wajar Dengan
Pengecualian

3. WAJAR

4. TIDAK WAJAR

5. DISCLAIMER



Thanks!

 <http://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/>   @ppsdmregbukittinggi  PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi

 **BerAKHLAK**
BERAKHLAK MELAYANI MELAKUKAN MELAKSENA MELAKSESANAKAN
HARMONIS LAYANAN BERAKHLAK BERAKSESIBILITAS

 **#bangga
melayani
bangsa**



URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

(Sesuai UU Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pemerintahan Daerah adalah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

***Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom*

***Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah*

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

*Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan **penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat***

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk **mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat** melalui **peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah**



DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan mitra sejajar



PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UU 32/2004

- Pasal. 120 s.d Pasal 128:
Perangkat Daerah Provinsi:
- Sekretariat Daerah;
 - Sekretariat DPRD;
 - Dinas Daerah;
 - Lembaga Teknis Daerah;

- Perangkat Daerah Kab/Kota:
- Sekretariat Daerah;
 - Sekretariat DPRD;
 - Dinas Daerah;
 - Lembaga Teknis Daerah;
 - Kecamatan;
 - Kelurahan.

PP 41 / 2007

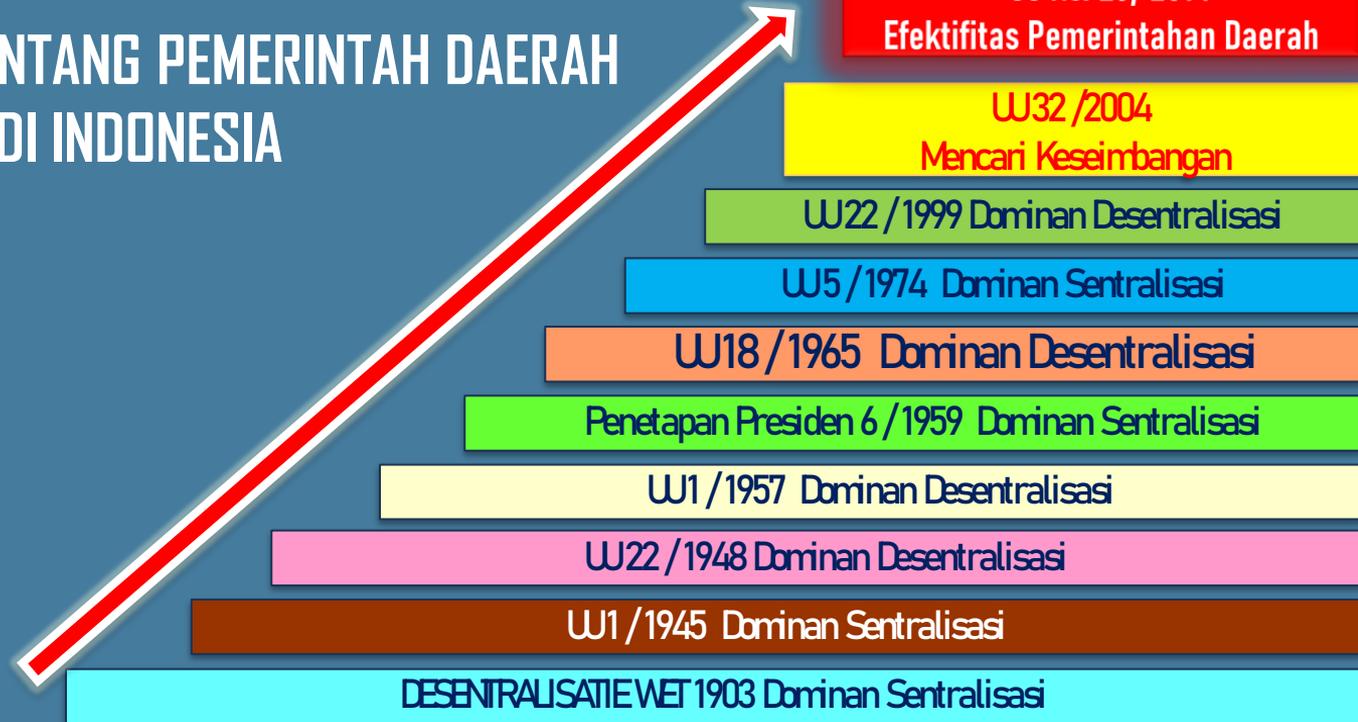
UU 23/2014

- Pasal. 209:
Perangkat Daerah Provinsi:
- sekretariat daerah;
 - sekretariat DPRD;
 - inspektorat;
 - dinas dan
 - badan.

- Perangkat Daerah Kab/Kota:
- sekretariat daerah;
 - sekretariat DPRD;
 - inspektorat;
 - dinas;
 - badan; dan
 - Kecamatan.

PP 72 / 2019

SEJARAH UU TENTANG PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA



HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DALAM NKRI

PASAL 4 UUD 1945

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

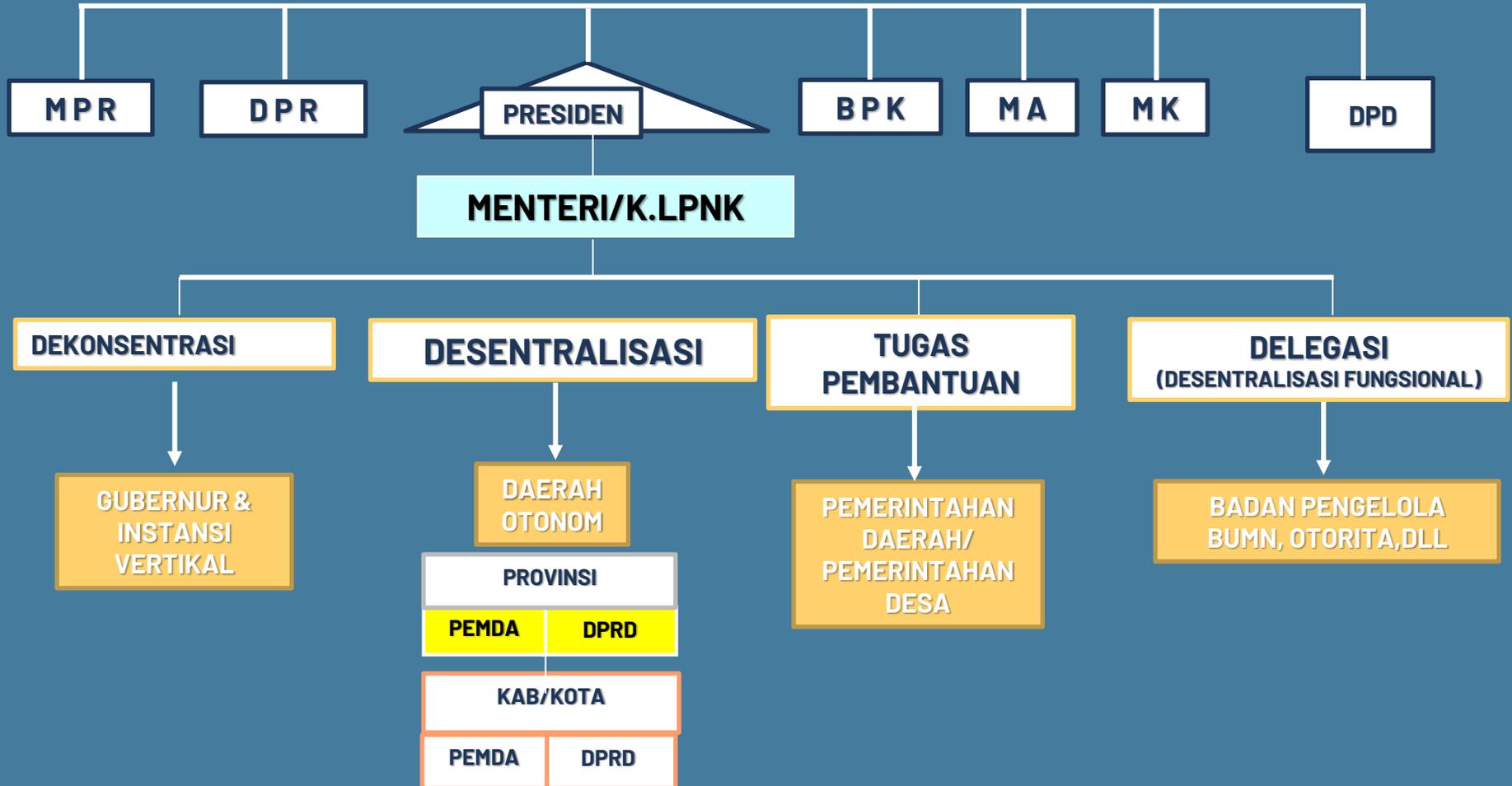
PASAL 17 UUD 1945

- 1) Presiden dibantu oleh menteri menteri negara.
- 2) Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
- 4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

PASAL 18 UUD 1945

- 1) NKRI dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. **)
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA





Latar Belakang

1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menata manajemen Pemerintahan Daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien.
3. Menata keseimbangan tanggungjawab antar tingkatan/susunan Pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.
4. Menata pembentukan Daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan Daerah.
5. Menata hubungan antara Pusat dan Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

AKUNTABILITAS

adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

EFISIENSI

adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh

EKSTERNALITAS

adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yg timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

STRATEGI NASIONAL

adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan per-U-an

Prinsip Pembagian Urusan



KEWENANGAN SESUAI PEMBAGIAN URUSAN

Pemerintah PUSAT

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Provinsi atau lintas Negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Provinsi atau lintas Negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Provinsi atau lintas Negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan Nasional.

Pemerintahan Provinsi

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Pemerintahan Kabupaten/Kota

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

KEWENANGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PUSAT

1. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Melaksanakan Sosialisasi, Monev, fasilitasi, Supervisi, Binwas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Mengelola urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan Pusat; dan
4. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat strategis Nasional.

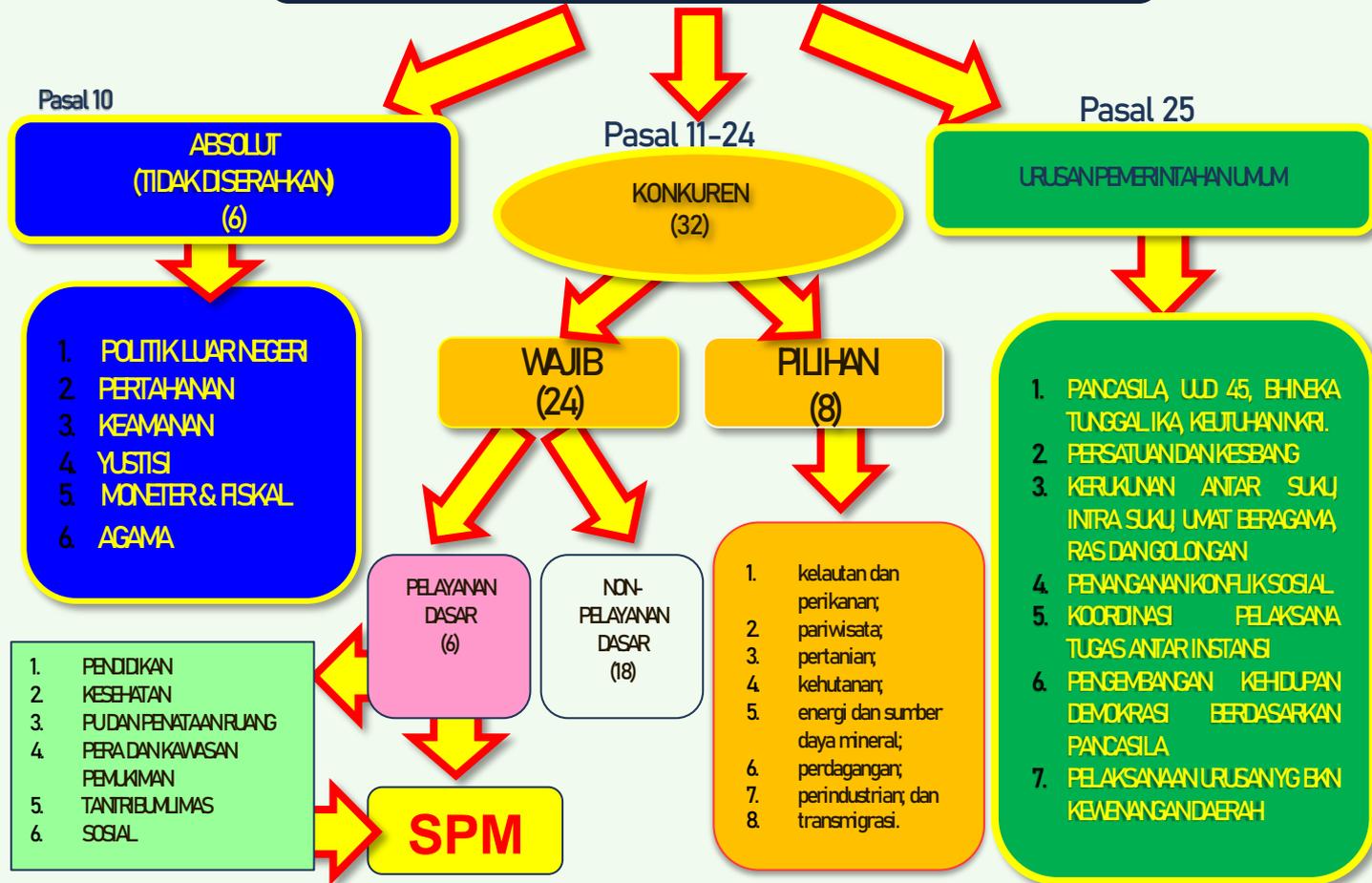
PEMERINTAHAN PROVINSI

Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota,
[Mengacu pada NSPK]

PEMERINTAHAN KAB/KOTA

Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota,
[Mengacu pada NSPK]

URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23/2014)



URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN (KONKUREN)

WAJIB (24)

Berkaitan
dengan
Pelayanan
Dasar
(6)

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. sosial;

Non- Pelayanan Dasar
(18)

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan;

PILIHAN (8)

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan
7. perindustrian
8. transmigrasi

SE-MENDAGRI

KEPADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SELURUH INDONESIA

NO. 120/253/SJ

TGL 16 JANUARI 2015



TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAH DAERAH



SERAH TERIMA P3D

1. PASAL 404 UU 23/2014 SERAH TERIMA PERSONIL, PENDANAAN, SARANA PRASARANA, SERTA DOKUMEN (P3D) SBG AKIBAT PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KAB/KOTA YG DIATUR BERDASARKAN UU INI DILAKUKAN PALING LAMA 2 TH SEJAK UU INI DIUNDANGKAN (2 OKTOBER 2014).

DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PS.404 DIATAS, SIKLUS ANGGARAN DLM APBN DAN APBD, SERTA UTK MENGHINDARI STAGNASI PENYELENGGARAAN PEMDA YG BERAKIBAT TERHENTINYA PELAYANAN KPD MASYARAKAT, MAKA PENYELENGGARAAN UP KONKUREN YG BERSIFAT PELAYANAN KPD MASYARAKAT LUAS DAN MASIF, YG PELAKSANAANNYA TDK DPT DITUNDA DAN TDK DPT DILAKSNAKAN TANPA DUKUNGAN P3D, TETAP DILAKSANAKAN OLEH TINGKATAN/SUSUNAN PEMERINTAHAN YG SAAT INI MENYELENGGARAKAN UP KONKUREN SAMPAI DGN DISERAHKAN P3D.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

2. ADAPUN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TSB MELIPUTI PENYELENGGARAAN SUB URUSAN:

- a. **PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH**
- b. **PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A DAN TIPE B**
- c. **PELAKSANAAN REHABILITASI DI LURA HUTAN NEGARA**
- d. **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI**
- e. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**
- f. **PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI**
- g. **PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN**
- h. **PENGELOLAAN TENAGA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN**
- i. **PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERIKANAN NASIONAL**
- j. **PENYEDIAAN DANA UTK LISTRIK BLM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN**





3

Penyelenggaraan up konkuren di luar urusan pemerintahan sbg dimaksud pd angka 1 dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dgn pembagian urusan pemerintahan sbgmana dimaksud dlm uu 23/2014

4

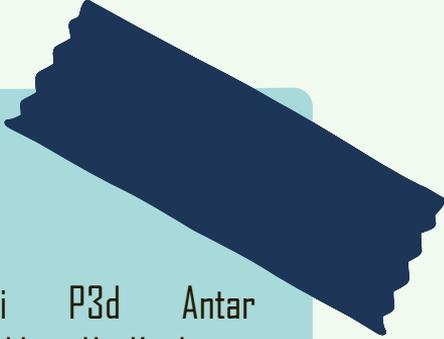
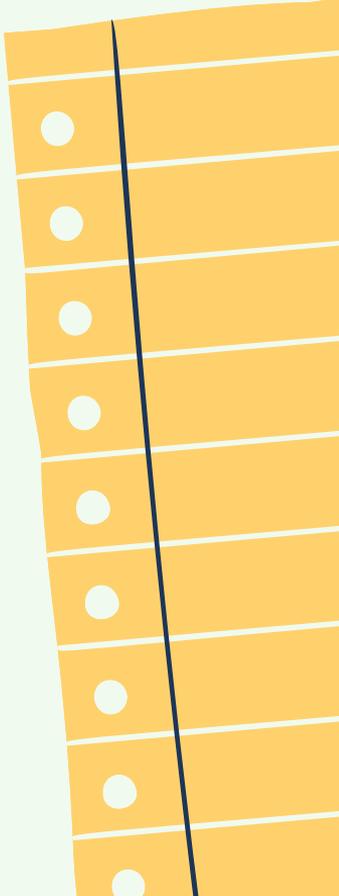
Khusus Penyelenggaraan Perizinan Dlm Bentuk Pemberian Atau Pencabutan Izin Dilaksanakan Oleh Susunan/Tingkatan Pemerintahan Sesuai Dgn Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Sbgmana Dimaksud Dlm Uu 23/2014 Dgn Mengutamakan Kecepatan Dan Kemudahan Proses Pelayanan Perizinan Serta Mempertimbangkan Proses Dan Tahapan Yg Sdh Dilalui

5

Penataan/perubahan perangkat daerah (SKPD) utk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dpt dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan up sbgmana dimaksud dlm uu 23/2014

6

Urusan Pemerintahan Umum (Upu) Sbgmana Dimaksud Pasal 25 Uu 23/2014 Dilaksanakan Oleh Badan/Kantor Kesbangpol Dan/Atau Biro/Bagian Pd Sekretariat Daerah Yg Membidangi Pemerintahan Sblm Terbentuknya Instansi Vertikal Yg Membantu Gubernur Dan Bupati/Walikota Utk Melaksanakan Upu Tsb.



BERKAITAN DGN HAL TSB DIATAS, DIMINTA GUB, BUPATI/WALKOT SBG BERIKUT:

- a. Menyelesaikan Scr Seksama Inventarisasi P3d Antar Tingkatan/Susunan Pemerintahan Sbg Akibat Pengalihan Up Konkuren Paling Lambat Tgl. 31 Maret 2016 Dan Serah Terima Personel, Sarana Dan Prasarana Serta Dokumen (P2d) Plg Lambat Tgl. 2 Oktober 2016. Hasil Inventarisasi P3d Tsb Menjadi Dokumen Dan Dasar Penyusunan Rkpd, Kua/Ppas Dan Raperda Ttg Apbd Provinsi/Kab/Kota T.A 2017.
- b. Gub, Bupati/Walkot Sgr Berkoordinasi Terkait Dgn Pengalihan Up Konkuren.
- c. Melakukan Koordinasi Dgn K/L Terkait Yg Membidangi Masing2 Urusan Pemerintahan Dan Dapat Difasilitasi Oleh Kemendagri.
- d. Melakukan Koordinasi Dgn Pimpinan DPRD Masing2
- e. Melaporkan Pelaksanaan S E Ini Kpd Mendagri Pada Kesempatan Pertama.

PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN

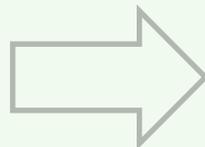
URUSAN KE-UTANAN

URUSAN PERTAMBANGAN

URUSAN
KELAUTAN



MENJADI
KEWENANGAN
PROMSI



KAB/KOTA MENDAPATKAN
BAGI HASIL

WEWENANG PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 16

1.

MENETAPKAN NSPK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.

2.

MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

Pasal 17

1. NSPK BERUPA KENTENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN HARUS DIKOORDINASIKAN DENGAN KEMENTERIAN TERKAIT.
2. PENETAPAN NSPK DILAKUKAN PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN TERHITUNG SEJAK PP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DIUNDANGKAN.
3. DAERAH MENETAPKAN KABIJAKAN DAERAH WAJIB BERPEDOMAN PADA NSPK YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSAT.
4. APABILA KEBIJAKAN DAERAH DIBUAT TIDAK BERPEDOMAN PADA NSPK, PEMERINTAH PUSAT MEMBATALKAN KEBIJAKAN DAERAH.
5. APABILA DALAM JANGKA 2 TAHUN PEMERINTAH PUSAT BELUM MENETAPKAN NSPK, PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

PENETAPAN NSPK SUB BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.

MENGHINDARI TUMPANG TINDIH PENYELENGARAAN DAN PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

2.

NSPK BERFUNGSI SBG PEDOMAN BAGI DAERAH DLM MENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH., HARUS DIATUR SECARA JELAS DALAM NSPK.

3.

INVENTARISASI SELURUH NSPK SUB BIDANG URUSAN KONKUREN YANG TELAH DITETAPKAN. APAKAH TELAH SESUAI ATAU BELUM SESUAI DENGAN PEMBAGIAN URUSAN YANG ADA DALAM LAMPIRAN UU 23/2014, KALAU BELUM SESUAI SEGERA DISEMPURNAKAN DAN KALAU BLM ADA SGR DISUSUN.

KEMENTERIAN/LPNK BERSAMA PEMDA
MELAKUKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR DAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (Psl 24)

DITETAPKAN
DENGAN PERMEN SETELAH HASIL PEMETAAN
MENDAPAT REKOMENDASI
DARI MENDAGRI

**PEMETAAN URUSAN WAJIB
YANG TIDAK TERKAIT DENGAN
PELAYANAN DASAR**

1. LAKUKAN UNTUK MENENTUKAN INTESITAS URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR.
2. BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, BESARNYA APBD DAN LUAS WILAYAH.

PEMETAAN URUSAN PILIHAN

1. LAKUKAN UNTUK MENENTUKAN DAERAH YANG MEMPUNYAI URUSAN PILIHAN.
2. BERDASARKAN POTENSI, PROYEKSI PENYERAPAN TENAGA KERJA, DAN PEMANFAATAN LAHAN

HASIL PEMETAAN :

1. DIGUNAKAN OLEH DAERAH DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.
2. DIGUNAKAN OLEH K/L SEBAGAI DASAR UNTUK PEMBINAAN KEPADA DAERAH .
3. KEMENTERIAN/LPNK BERDASARKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG TDK BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN MELAKUKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI DGN DAERAH UTK MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (Pasal 9)



URUSAN PEMERINTAAHAN

ABSOLUT :

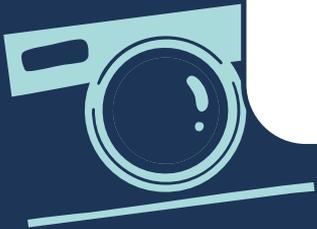
Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

KONKUREN :

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

PEMERINTAHAN UMUM :

Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan didelegasikan kepada Camat



URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Pasal 19)

Prinsip

1. Dapat didekonsentrasikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal
2. Tidak dapat ditugaspembantuankan kepada Daerah Otonom, karena tidak ada Perangkat Daerah yang melaksanakan.
3. Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pembentukan Instansi Vertikal di Daerah tidak memerlukan persetujuan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

PRINSIP DAN KRITERIA

PRINSIP PEMBAGIAN:

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN:

1. Lokasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
2. Pengguna/konsumen atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. Manfaat atau dampak pelaksanaan urusan pemerintahan;
4. Kedudukan strategis bagi kepentingan nasional.

KETENTUAN PEMBAGIAN:

1. Diatur dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014.
2. Urusan ekologis (ESDM, Kehutanan, dan Kelautan hanya diserahkan kepada daerah provinsi.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

SUBSTANSI PEMBAGIAN

POLA PEMBAGIAN:

Yang dibagi antar tingkatan/susunan pemerintahan hanya substansi urusan saja, sedangkan **unsur manajemen** dan **fungsi manajemen** melekat pada setiap substansi tersebut kecuali ada fungsi manajemen tertentu atau unsur manajemen tertentu yang secara eksplisit dinyatakan sebagai kewenangan susunan pemerintahan yang lain

KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN:

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan setiap tingkatan/susunan pemerintahan dilakukan secara jelas (clear cut), sehingga tidak ada lagi urusan pemerintahan yang tumpang tindih antar tingkatan/susunan pemerintahan.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Kelompok Urusan

WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR :

Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR :

Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya tidak mengandung Pelayanan Dasar.

PILIHAN :

Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PRINSIP

1. Mengandung Pelayanan Dasar
Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
2. Memerlukan SPM :
Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
3. Menjadi Prioritas:
Dilaksanakan mendahului/mengatasi seluruh kebutuhan pembiayaan yang lain.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

PRINSIP PELAKSANAAN

AZAS PELAKSANAAN :

Dilaksanakan berdasarkan azas dekonsentrasi karena merupakan kewenangan Presiden yang tidak diotonomikan.

ANGGARAN :

Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN.

PELAKSANA :

Di daerah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh instansi vertikal. Camat melaksanakan kewenangan Bupati/Walikota di tingkat kecamatan

PERTANGGUNGJAWABAN:

Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Mendagri dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Mendagri melalui Gubernur Wakil Pusat.

ESENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



- Untuk menjamin agar pelaksanaan urusan oleh Pemerintahan Daerah selaras/harmonis sesuai dengan amanat Undang-Undang.
- Peran BINWAS tidak berarti Pusat dapat ikut serta (intervensi) penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah Kecuali diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

BINWAS UMUM DAN BINWAS TEKNIS

- BINWAS UMUM.
Pembagian Urusan Pemerintahan;
Kelembagaan Daerah;
Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
Keuangan Daerah;
Pembangunan Daerah;
Pelayanan Publik di Daerah;
Kerjasama Daerah;
Kebijakan Daerah;
Kepala Daerah dan DPRD; dan
Bentuk Pembinaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Binwas Teknis : Binwas Teknis pelaksanaan urusan di luar Binwas Umum.



TERIMA KASIH



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Cerdas, Inovatif, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**





HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD

DESKRIPSI SINGKAT



Mata Pelatihan Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD ini memberikan pemahaman tentang Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kedudukan Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

TUJUAN PEMBELAJARAN



Kompetensi Dasar :

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat memahami tentang hubungan pemerintah daerah dan DPRD dengan baik dan benar

Indikator Hasil Belajar :

- Memahami tentang konsepsi dan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
- Memahami tentang hubungan kerja antara DPRD dengan Kepala Daerah

Materi Pokok & Sub Materi Pokok

Konsepси Pemerintahan Daerah

- 1.1. Definisi Pemerintah Daerah
- 1.2. Urusan Pemerintahan

1

Konsepси Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 2.1. Definisi DPRD
- 2.2. kedudukan, Fungsi, tugas dan wewenang , hak dan kewajiban DPRD

2

Konsepси Organisasi Perangkat Daerah

- 3.1. Definisi Perangkat Daerah
- 3.2. Organisasi Perangkat Daerah

3

Hubungan Kerja Kepala Daerah dan DPRD

- 4.1. Wujud Hubungan Kemitraan DPRD dengan Kepala Daerah

4

Pemerintah Daerah

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

02 Urusan Wajib

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemdaya Perempuan & Lind Anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Adminduk & Capil
- g. Pemb Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan KB
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, UKM
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan Olah Raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

03 Urusan Pilihan

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumberdaya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



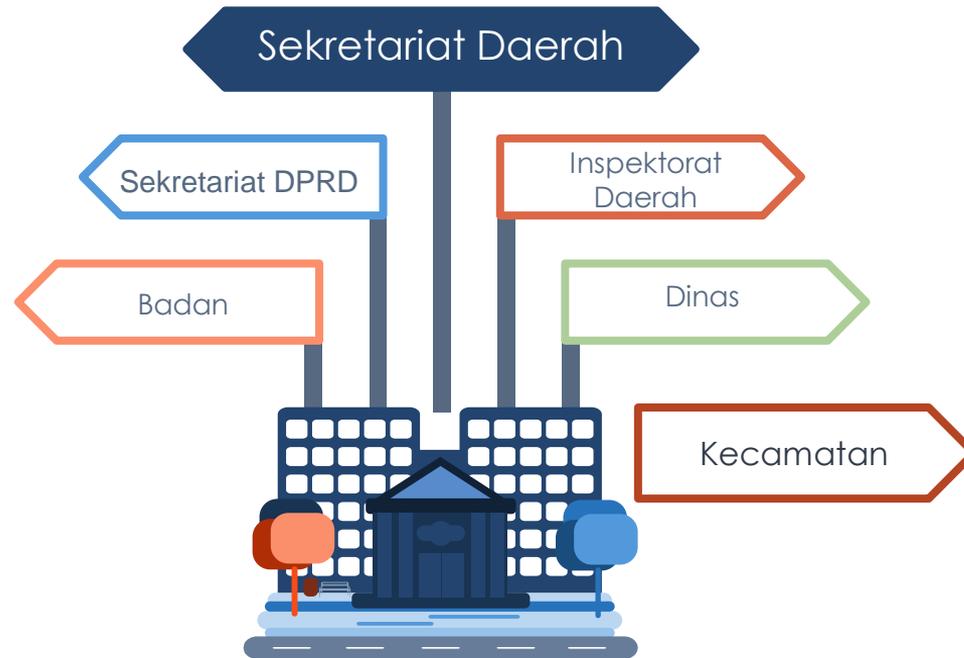
Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah

1. Pimpinan DPRD
2. Badan Musyawarah
3. Komisi
4. Badan Pembentukan Perda
5. Badan Anggaran
6. Badan Kehormatan
7. Dan kelengkapan lainnya



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

“Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan”



HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD

“KEMITRAAN”





ETIKA PEMERINTAHAN

DEFINISI ETIKA



Wehrich dan Koontz (2005)

Etika sebagai ***the dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation.***

Collins Cobuild (1990)

Etika sebagai *"an idea or moral belief that influences the behavior, attitudes and philosophy of life of a group of people"*.

Etika ad. refleksi atas baik/buruk atau benar/salah (bagaimana melakukan yang baik atau benar) sedangkan Moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. **(Modul Latsar LAN)**

Ficocur (1990)

Etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil.

DEFINISI PEMERINTAHAN

Luas

Pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Pamudji (1995)

Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.

Perbedaan pengertian "pemerintah" dan "pemerintahan pemerintah " adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara sedangkan " pemerintahan " dari aspek dinamikanya.



DEFINISI ETIKA PEMERINTAHAN



<http://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/>



@ppsdmregbukittinggi



PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



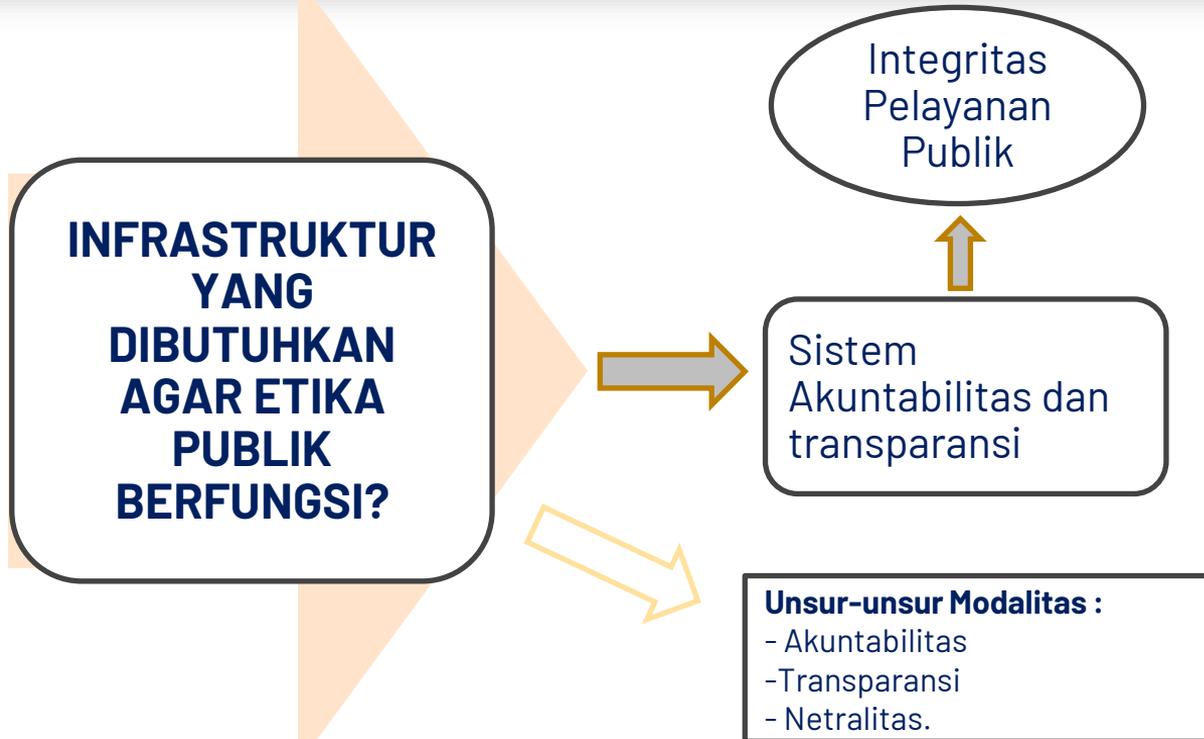
Ethical Governance
(Etika Pemerintahan) adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.

DIMENSI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



- Bentuk pelayanan publik yg memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik.
- KOMPETENSI TEKNIS

DIMENSI IMPLEMENTASI MODALITAS



**DIMENSI IMPLEMENTASI
TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK**



NO CORRUPTION



POKOK-POKOK ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

TAP MPR NO. VI/MPR/2001
masih dinyatakan berlaku berdasarkan
TAP MPR NO.I/MPR/2003



ETIKA SOSIAL DAN BUDAYA



1

**Sikap jujur,
peduli,
memahami,
menghargai**

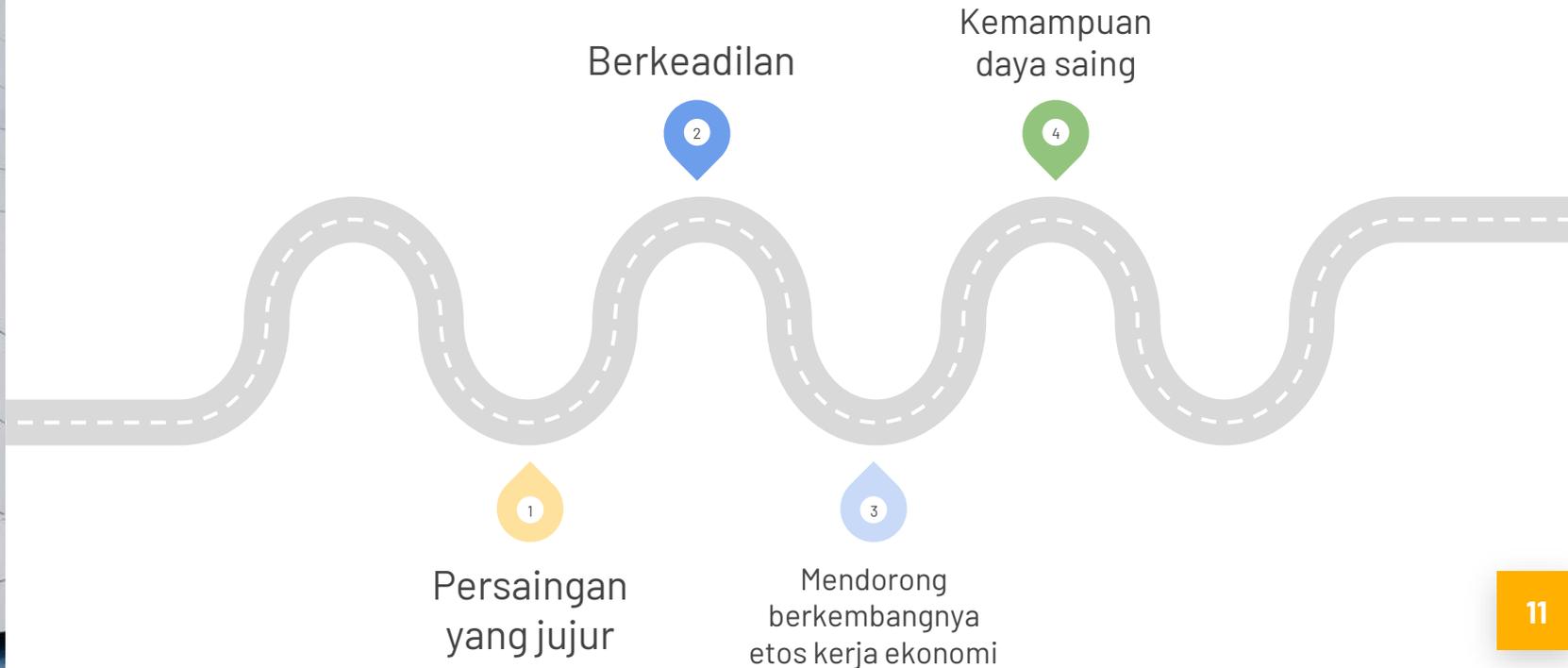
2

Menumbuhkan budaya malu, tdk berbuat hal yg melanggar norma, etika dan moral agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

ETIKA EKONOMI DAN BISNIS



Melahirkan kondisi realitas ekonomi yang bercirikan:



ETIKA POLITIK & PEMERINTAHAN



**Mewujudkan Pemerintahan bersih, efisien & efektif,
suasana politik yang demokratis, bercirikan:**

- Keterbukaan
- tanggung jawab
- tanggap aspirasi rakyat
- Menghargai perbedaan
- ✓ Jujur dlm persaingan
- ✓ Kesediaan menerima pendapat yg lebih benar
- ✓ Menjunjung tinggi hak & kewajiban
- ✓ Kepedulian tinggi dlm memberikan pelayanan publik
- ✓ Siap mundur jika merasa melanggar kaidah, sistem nilai, tdk mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa & negara

Misi Pejabat & Elit Politik

- Jujur
- Amanah
- Sportif
- Siap melayani
- Berjiwa besar
- Rendah Hati
- Keteladanan.

ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN



Menumbuhkan Kesadaran :

tertib sosial, ketenangan & keteraturan hidup bersama

Diwujudkan dengan :

- taat hukum dan Peraturan
- berpihak pada keadilan, non diskriminatif
- menghindari penegakan hukum yang diimplementasikan secara salah sebagai alat kekuasaan & manipulasi hukum lainnya.

ETIKA KEILMUAN



- **menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengikuti perkembangan IPTEK,**
- **diwujudkan dengan :**
 - Karsa
 - Cipta
 - Karya yang inovatif, kreatif, komunikatif.
 - Mendorong budaya kerja keras dan kerja cerdas.
 - Menghargai **waktu, disiplin, tepat janji, komitmen, dan lain-lain.**



ETIKA ETIKA LINGKUNGAN

- Menegakkan pentingnya kesadaran menghargai pelestarian lingkungan hidup
- Penataan tata ruang secara berkelanjutan & bertanggung jawab
- **GO GREEN**



TERIMA KASIH

SOAL POST TEST/PRE TEST

1. Bentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Hubungan anatara atasan dengan bawahan
 - b. Hubungan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis
 - c. Hubungan yang terafiliasi dengan partai politik
 - d. Hubungan sesuai dengan kepentingan

2. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pembinaan dan pengawasan umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, pembinaan dan pengawasan teknis oleh kementrerian/lembaga lainnya.
 - b. Pembinaan dan pengawasan terbagi menurut urusan pemerintahan
 - c. Presiden sebagai kepala negara melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung
 - d. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh presiden bersama DPR RI

3. Dasar hukum yang mengatur tentang Perbendaharaan Negara adalah sebagai berikut:
 - a. **UU No. 1 Tahun 2004;**
 - b. UU No. 23 Tahun 2006;
 - c. UU No. 22 Tahun 2009;
 - d. Semua jawaban diatas adalah salah.

4. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang mendahului Penetapan Perda APBD, kecuali:
 - a. Penyusunan Pedoman Umum APBD oleh Menteri Dalam Negeri;
 - b. **Penyusunan Rancangan DPA-SKPD;**
 - c. Penyusunan KUA dan PPAS;
 - d. Penyusunan RAPBD

5. Hal yang membedakan antara opini WTP dengan WDP dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- a. Sama-sama merupakan predikat tertinggi dalam penilaian laporan keuangan daerah;
 - b. Ada atau tidaknya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) namun tidak berpengaruh secara keseluruhan terhadap laporan keuangan epemrintah daerah;**
 - c. Ada atau tidaknya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang berpengaruh secara keseluruhan terhadap laporan keuangan epemrintah daerah;
 - d. Tidak diperolehnya bukti yang memadai sebagai sebagai dasar untuk menetapkan opini.
6. Defenisi etika menurut **Collins Cobuild** adalah
- a. Etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil.
 - b. an idea or moral belief that influences the behavior, attitudes and philosophy of life of a group of people”.**
 - c. the dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation”.
 - d. Semua jawaban salah
7. Pokok pokok kehidupan berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan TAP MPR NO.I/MPR/2003 adalah:
- e. TAP MPR NO. VI/MPR/2001;**
 - f. TAP MPR NO. VII/MPR/2001;
 - g. TAP MPR NO. VI/MPR/2003;
 - h. TAP MPR NO. VII/MPR/2003;
8. Sumber daya alam yang dikuasai Panitahan/Keturunannya di Nagari Sungai tarab adalah ...
- a. Gunung
 - b. Hutan
 - c. Mata air**
 - d. Sawah

9. Kuburan kuno adalah obyek wisata sejarah yang terdapat di Nagari ...
- Cingkariang
 - Pariangan**
 - Punggasan
 - Sungai Tarab
10. Pemerintahan nagari yang tidak memiliki tanah ulayat nagari adalah ...
- Cingkariang**
 - Pariangan
 - Punggasan
 - Sungai Tarab
11. Sumber daya alam yang dikuasai oleh panitahan/Keturunannya terdapat di nagari ...
- Cingkariang
 - Pariangan
 - Punggasan
 - Sungai Tarab**
12. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar antara lain, kecuali :
- Tenaga Kerja
 - Lingkungan Hidup
 - Persandian
 - Pertanian**
13. Dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, alat kelengkapan DPRD antara lain terdiri atas :
- Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah
 - Komisi dan Bapemperda
 - Badan Anggaran dan Badang Kehormatan
 - Semua jawaban a,b,dan c benar**

KONTEN L x Beranda x Desain tar x tahapan x draft_pand x ION | Peng x ION | Peng x Drive Saya x Satu platf x +

sdm.layanan.go.id/LX/home/home_page?c_id=literasi-pemerintahan-2022-angkatan-i-34-32041

ION Digital Learning Empowering Learning Outcomes PPSDM Regional Bukittinggi

Beranda > Literasi Pemerintahan 2022 Angkatan I Login terakhir: 14 Nov 2022, 20:14 Tipe: LX Pembertahuan Privasi Bantuan

Literasi Pemerintahan 2022 Angkatan I

Angkatan [Daftar sekarang](#)

Ringkasan
Literasi Pemerintahan merupakan langkah awal PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi untuk memberikan pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil terutama dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

Deskripsi You are screen sharing Stop Share
Literasi Pemerintahan merupakan langkah awal PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi untuk memberikan pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil terutama dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

Direkomendasikan Untuk
Tidak ada data

Prasyarat
Tidak ada data

Metode Penyampaian
Tidak ada data

Format
Tidak ada data

Batch Tanggal Mulai

[GABUNG SEKARANG](#) [Batal](#)

Saya ingin bergabung sebagai
Course Participant User

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Address 8:11 PM 11/14/2022



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Telp. (0752) 28240

Bukittinggi, 15 November 2022

Nomor : 893.2 / 1639 / PPSDM-Bkt
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyelenggaraan Literasi
Pemerintahan Berbasis Digital

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Tanah Datar
2. Sekretaris Daerah Kab. Agam
3. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman
4. Sekretaris Daerah Kab. Padang
Pariaman
5. Sekretaris Daerah Kab. Solok
Selatan
6. Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya
7. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
8. Sekretaris Daerah Kota Padang
Panjang

di

TEMPAT

Dengan hormat,

Sesuai peraturan pemerintah berkaitan dengan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk kepada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwasanya ASN harus menguasai 4 (empat) kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan. Dari empat kompetensi tersebut, sebagai penyelenggara pemerintahan ASN dituntut juga harus menguasai kompetensi pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam yang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Dalam upaya menyamakan persepsi terkait penguasaan kompetensi pemerintahan bagi ASN sebagai penyelenggara pemerintahan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema **“Arah Kompetensi Pemerintahan ; Penerapan dan Tantangannya di Daerah”** yang diikuti oleh pemangku kepentingan dalam program pengembangan kompetensi ASN di wilayah kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi.
3. Menindaklanjuti hasil FGD tersebut, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi berinisiatif untuk melaksanakan pengembangan kompetensi ASN dalam hal penguasaan kompetensi pemerintahan melalui **“Kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital”**. Kegiatan ini

dilaksanakan secara *online* bertempat dikedudukan peserta, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Massive Open Online Course (MOOC)</i>	21 – 22 November 2022
2.	Pembelajaran Tatap Maya	23 November 2022

4. Sejalan perihal tersebut diatas, kami mohonkan kepada Bapak dapat menugaskan ASN untuk mengikuti kegiatan dimaksud sesuai alokasi peserta (**terlampir**). Peserta Literasi Pemerintahan adalah ASN yang bertugas di instansi pemerintah daerah dengan target jumlah peserta sebanyak 1.000 orang. Kegiatan ini juga untuk memenuhi kewajiban ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam setahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Peserta yang mengikuti kegiatan Literasi Pemerintahan tidak dipungut biaya dan peserta juga akan diberikan sertifikat diakhir kegiatan.
6. Bagi peserta yang ditugaskan, sebelum melakukan registrasi dan memulai MOOC peserta dapat mempedomani panduan registrasi terlebih dahulu melalui link <https://bit.ly/3hJ4GM5>.
7. Peserta melakukan registrasi **paling lambat tanggal 21 November 2022 melalui link <https://sikuat.layanan.go.id>**. Setelah melakukan registrasi kepada peserta diharapkan bergabung pada **Whatsapp Group** sesuai alokasi daerah (terlampir). Apabila terdapat kendala dalam proses registrasi dapat menghubungi Saudari Ikhsani Novella, S.STP (HP 081275944170).

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPSDM KEMENDAGRI di Jakarta
2. Kepala BKPSDM Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kab. Padang Panjang
3. Arsip

Lampiran : Alokasi Jumlah Peserta Literasi Pemerintahan Berbasis Digital

No	Instansi	Alokasi Peserta	WA Group
	Ruang Zoom I		
1.	Kabupaten Tanah Datar	125 orang	https://chat.whatsapp.com/D51tCNA4f6C8WyMI2ZXT8T
2.	Kabupaten Agam	125 orang	
3.	Kabupaten Padang Pariaman	125 orang	
4.	Kabupaten Pasaman	125 orang	
	Jumlah	500 orang	
	Ruang Zoom II		
5.	Kabupaten Dharmasraya	125 orang	https://chat.whatsapp.com/DzP2MD99EKf080AJPd1afw
6.	Kabupaten Solok Selatan	125 orang	
7.	Kota Bukittinggi	125 orang	
8.	Kota Padang Panjang	125 orang	
	Jumlah	500 orang	

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

LAMPIRAN

MILESTONE JANGKA PENDEK TAHAPAN KEGIATAN

5



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km. 14 Baso 26192 Telp. (0752) 28241, Fax. (0752) 28240

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BUKITTINGGI

NOMOR SK. 87/ PPSDM /2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LITERASI PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI TAHUN 2022

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital Bagi Aparatur Sipil Negara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi Tahun 2022, dirasa perlu membentuk dan menetapkan, Panitia, Narasumber, Moderator, Tim Pendukung pada Kegiatan dimaksud;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pada kegiatan penyelenggaraan diklat tersebut pada butir (a) di atas;

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
 7. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 November 2021 Nomor SP DIPA 010.12.2.506137/2022, tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menyelenggarakan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital Bagi Aparatur Sipil Negara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi pada tanggal 23 November 2022;
- KEDUA : Menunjuk Tim Penyelenggara pada Literasi Pemerintahan Berbasis Digital Bagi Aparatur Sipil Negara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Menunjuk Narasumber pada Literasi Pemerintahan Berbasis Digital Bagi Aparatur Sipil Negara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Menunjuk Moderator pada Literasi Pemerintahan Berbasis Digital Bagi Aparatur Sipil Negara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran III Surat Keputusan ini
- KELIMA : Menunjuk Tim Pendukung pada Literasi Pemerintahan Berbasis Digital Bagi Aparatur Sipil Negara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Tahun 2022, dengan susunan seperti tersebut pada lampiran IV Surat Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II Angkatan XII di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Tahun 2022;
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BUKITTINGGI
PADA TANGGAL : 16 November 2022

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PPSDM
KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI
NOMOR : 87/PPSDM/ 2022
TANGGAL : 16 November / 2022

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENYELENGGARA LITERASI PEMERINTAHAN BERBASIS
DIGITAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

1	MATERI	VOLUME		NAMA
		OK	KUM	
1	Penanggung Jawab	1	0	Sarjayadi, SS
2	Ketua	1	0	Defrimen, M Si
3	Sekretaris	1	0	Jerry Marantika, S.Psi
4	Anggota	1	0	1. Marsam, S Sos. 2. Mulyananda Hariandja, M Pd. 3. Retwando, S Kom., M Si

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

DAFTAR NAMA-NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR PADA LITERASI
PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

NO	MATERI	VOLUME		NAMA	JABATAN
		OJ	KOJ		
1	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Pemerintah Daerah (1 org x 3 JP)	1 x 3 = 3	3	Dr. Mudji Estiningsih, SH., M Hum.	Narasumber
2	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Pemerintah Daerah (1 org x 3 JP)	1 x 3 = 3	6	Afriyendra, SH., M hum	Narasumber

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

DAFTAR NAMA-NAMA MODERATOR PADA LITERASI PEMERINTAHAN BERBASIS
DIGITAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

NO	MATERI	VOLUME		NAMA	JABATAN
		OK	KOK		
3	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Pemerintah Daerah (1 org x 1 Keg) JP)	1 x 1 = 1	1	Ratna Sriwina, M Si	Moderator
4	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Pemerintah Daerah (1 org x 1 Keg)	1 x 2 = 1	2	Andari Dwi Utami, MH	Moderator

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENDUKUNG PADA LITERASI PEMERINTAHAN
BERBASIS DIGITAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI

NO	NAMA	JABATAN
1.	ARYO FERNANDES, S Si	TIM TEKNIS
2.	LEO AGUSTUS FERNANDO, S Kom	TIM TEKNIS
3.	JERRY MARANTIKA, S Psi.	TIM TEKNIS
4.	ANGGI REONAL, SSTP	TIM TEKNIS
5.	IKHSANI NOVELLA, SSTP	TIM LMS
6.	ARI SAPUTRA, A Md	TIM TEKNIS
7.	MEI RISKA ELLEN, M AP	MASTER CEREMONY
8.	SILFANI RESTIFA, S E	TIM LMS

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



AKSES AKUN LMS

sikuat.layanan.go.id



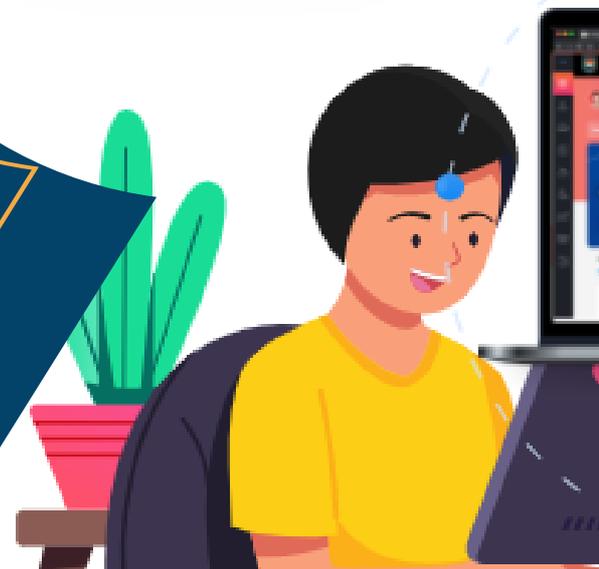
SIKUAT

Platform untuk mendukung semua alat manusia secara menyeluruh dengan *System* kelas dunia.

Masuk Aplikasi →

**LITERASI
PEMERINTAHAN**

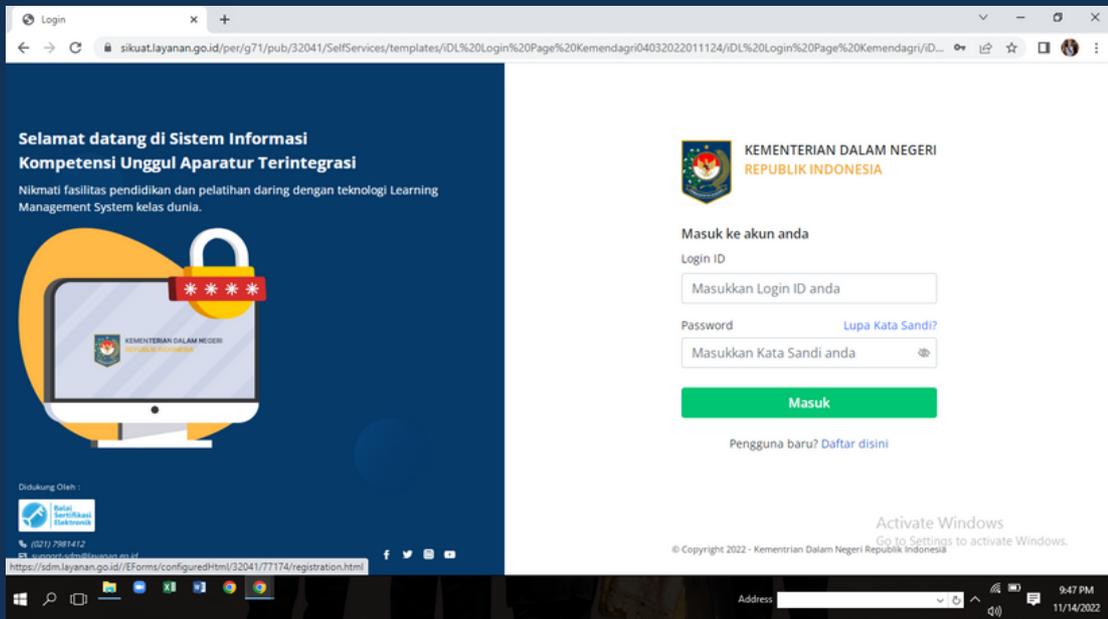
21-28 NOVEMBER 2022



TAHAPAN AKSES LMS

01

Login ke link sikuat.layanan.go.id, kemudian akan muncul tampilan berikut. Silahkan masukkan ID (email) dan password dan klik Login



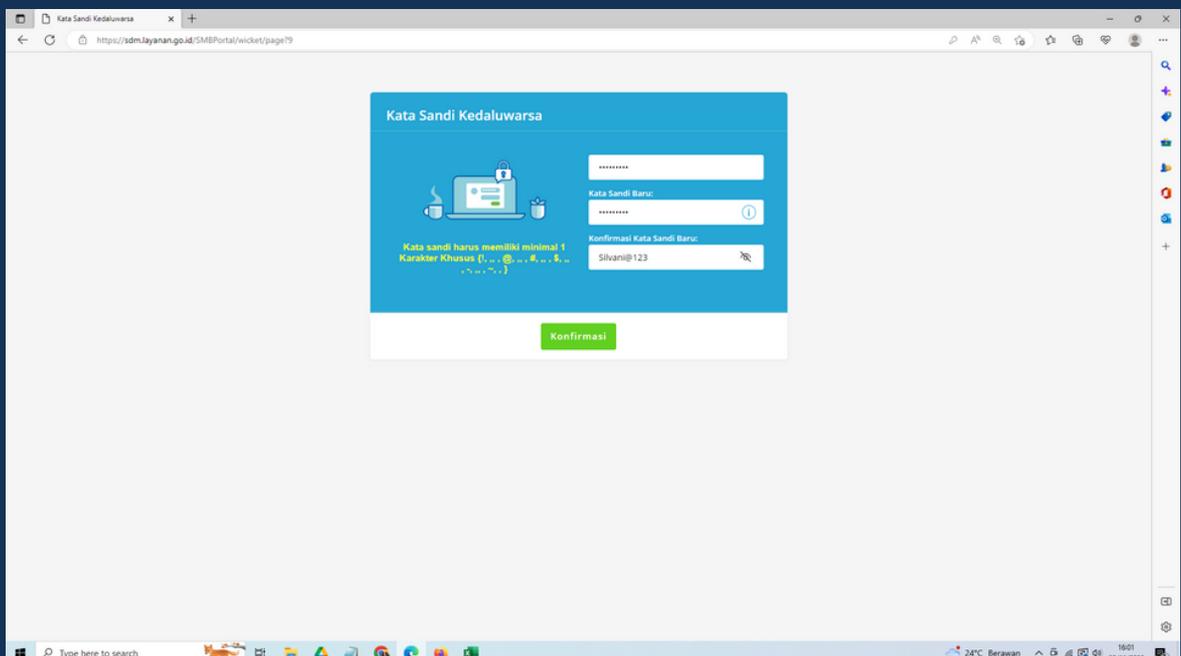
02

Peserta akan diarahkan untuk memperbaharui password. Silahkan buat password baru.

Current Password: (password yg dikirim ke email)

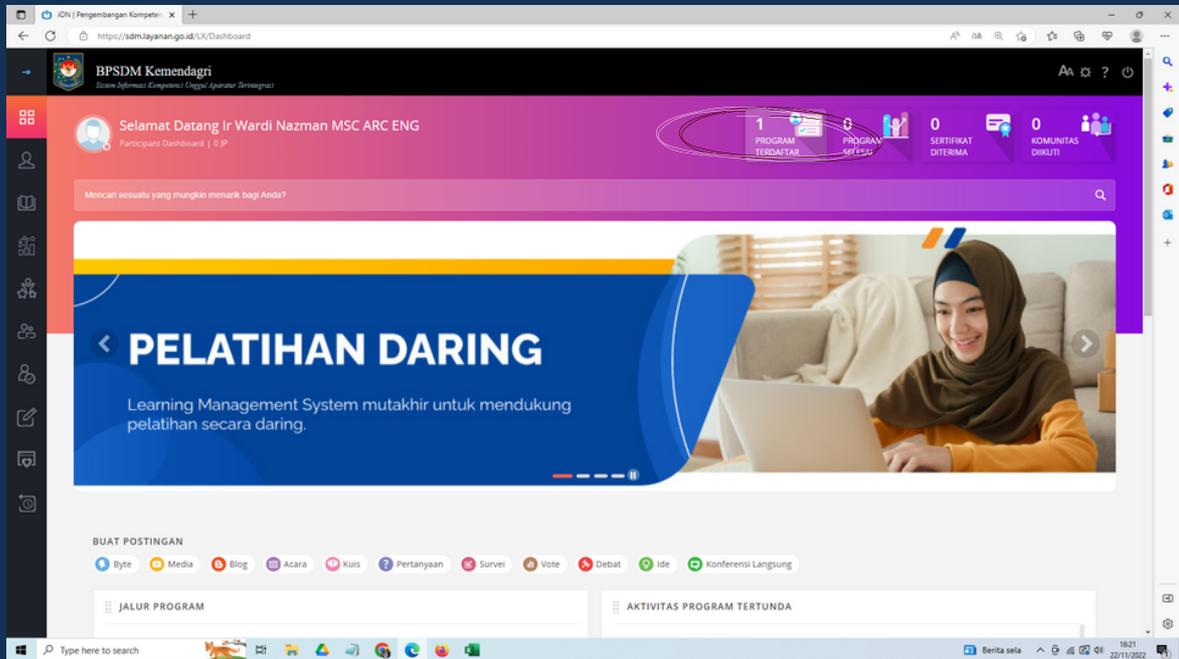
New Password: (buat password baru)

Konfirmasi: (sama dengan new passwor)



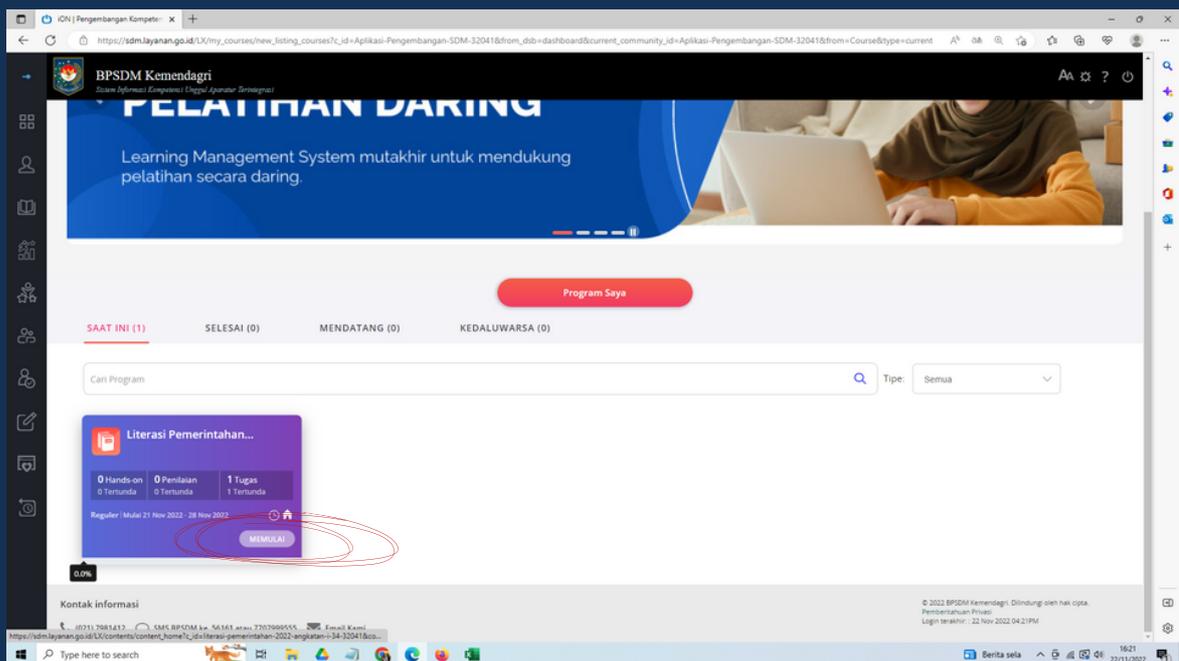
03

Pada halaman awal sudah ada 1 program terdaftar, silahkan langsung di klik tools tersebut

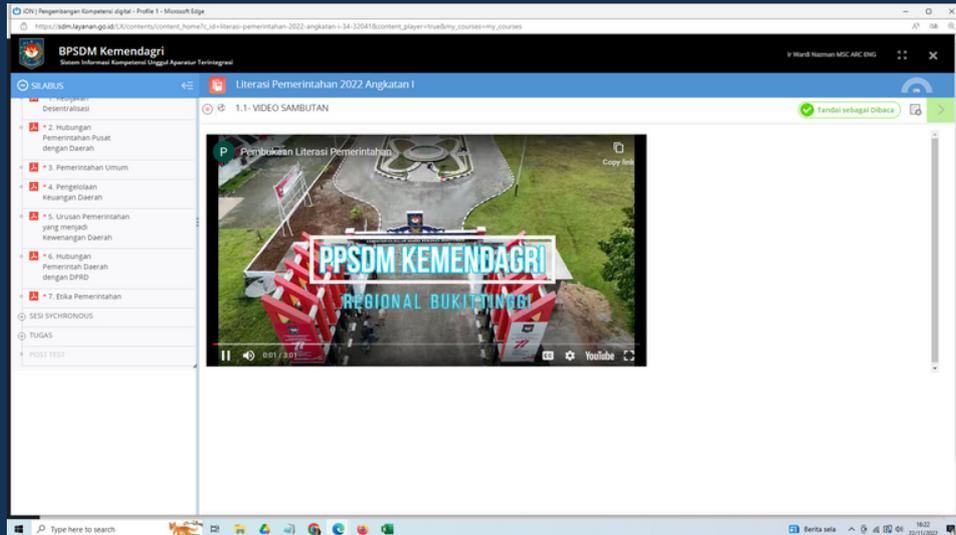


04

Akan muncul Daftar Pelatihan yang sedang diikuti. Silahkan klik **Memulai**



Ini merupakan Jendela proses Pelatihan Literasi Pemerintahan 2022 Angkatan I berlangsung.

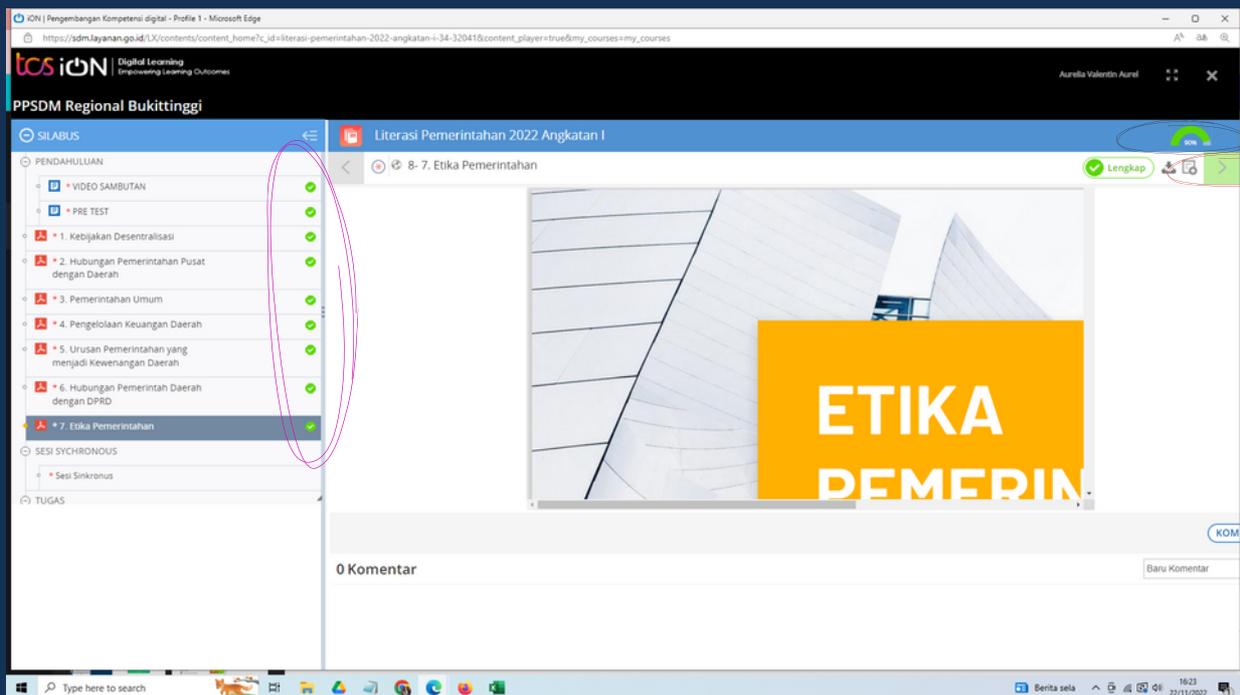


Ini adalah halaman Program Literasi Pemerintahan 2022 Angkatan I . Hal yang harus diperhatikan: silahkan ikuti stepbystep. diawali dari

- SENIN dan SELASA (21 dan 22 Nov 2022)
 - **Pendahuluan**
 - -- Video
 - -- Mengerjakan Post Test
 - Mengakses **Materi** (dapat didownload)
 - 1. Kebijakan Desentralisasi
 - 2. Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Daerah
 - 3 s.d 7

ctt: untuk progres hari Senin dan Selasa cukup sampai Konten Materi nomor 7 karena konten selanjutnya masih terkunci oleh sistem dan bisa diakses Rabu, 23 November 2022

- RABU (22 Nov 2022)
 - **SESI SINKRONUS (zoom meeting)**
 - ctt: link tertera di LMS di bagian SESI SINKRONUS
 - **TUGAS** (upload bukti screenshot menghadiri sesi zoom meeting di LMS)
 - **POST TEST** (harap mengerjakan post tes Rabu setelah sesi zoom meeting, jika telah mengerjakan post tes, sertifikat akan langsung terbit di halaman LMS peserta)



Ctt:

(lingkar ungu) Mohon dipastikan disamping judul konten/step sudah terdapat **centang hijau**. hal ini menandakan bapak ibu sudah selesai dan sukses di step tersebut.

(lingkar merah) silahkan di klik **tanda panah hijau** dan klik **YA**. Apabila telah selesai mengerjakan step tersebut.

(lingkat orange) persentase progres bapak ibu dalam pelatihan ini. **Sertifikat akan terbit** jika persentase sudah **100%**



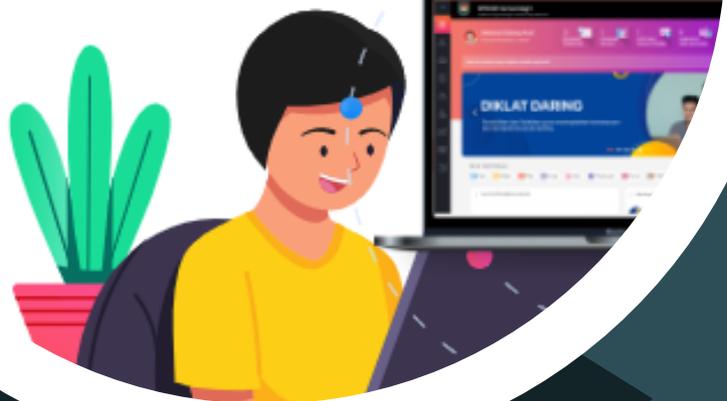
TAHAPAN PEMBUATAN AKUN/ PENDAFTARAN PESERTA



SIKUAT

Platform untuk mendukung semua aktivitas kinerja manusia secara menyeluruh dengan fungsionalitas System kelas dunia.

Masuk Aplikasi →



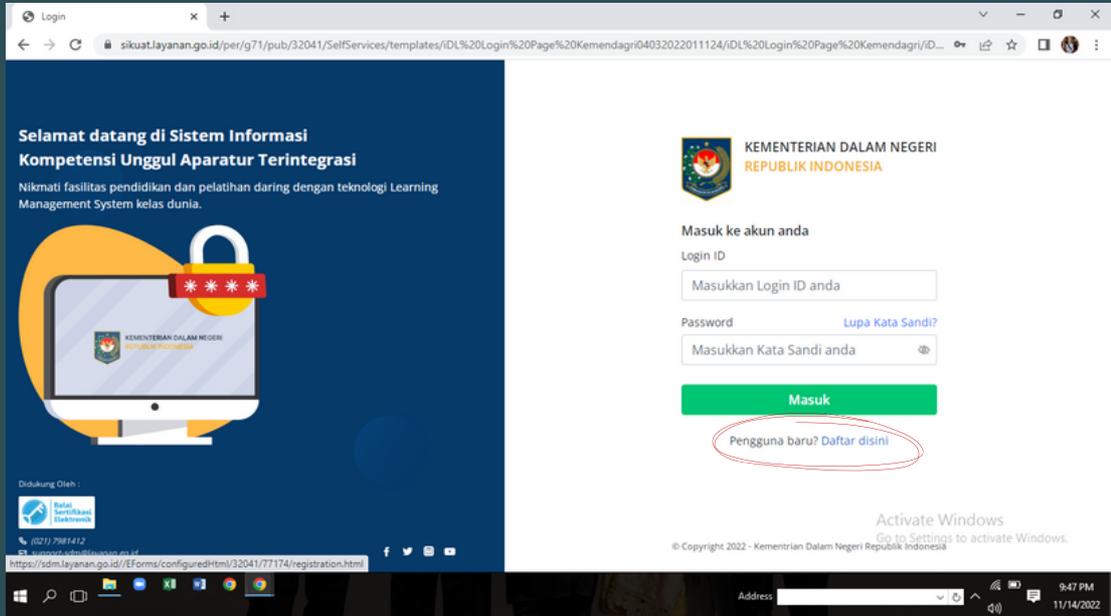
**LITERASI
PEMERINTAHAN**

21-28 NOVEMBER 2022

TAHAPAN PENDAFTARAN

01

Login ke alamat website pendaftaran sikuat.layanan.go.id, kemudian akan muncul tampilan berikut. Silahkan klik tulisan "daftar disini"



02

Calon peserta akan diarahkan pada halaman pengisian biodata peserta yang berisikan data pribadi, kontak, dan informasi pekerjaan. Calon peserta dimohon untuk mengisi seluruh kolom yang tersedia.

* untuk calon peserta yang lahir sebelum tahun 1972, silahkan dipilih tahun 1972 saja, nanti setelah registrasi berhasil dapat diedit kemudian di profil akun peserta

*Untuk pengisian kolom silahkan mengisi hanya dengan huruf tanpa menggunakan karakter khusus atau simbol (,/-dll).

Contoh yang benar: **Penata Tk I Ivb** tanpa (.) dan (/)

Jabatan : **Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan** tanpa (,)

Setelah itu, silahkan memasukkan kode captcha yang ada pada layar dan klik tombol "Registrasi Sekarang"

The screenshot shows a web browser window displaying the registration form. The page header includes the logo of the Indonesian Ministry of Government Administration and the text 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA'. The main heading is 'Form Registrasi'. On the left, there is contact information: 'Hubungi Kami', 'Kontak' (021-3849366, tu.ditlalp_aptika@kominfo.go.id), and 'Sosial Media' icons for YouTube, Twitter, Facebook, and Instagram. The form fields include: 'Alamat Kantor' (Lawang Mandahiling), 'Nomor Telepon Kantor' (Nomor Telepon), 'Nomor Fax Kantor' (Nomor Fax), and a CAPTCHA image showing the text 'Wdutejk'. A blue button labeled 'Registrasi Sekarang' is visible at the bottom right. The version number 'Version 14.04.01' is displayed at the bottom center. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 10:22 PM on 11/14/2022.

03

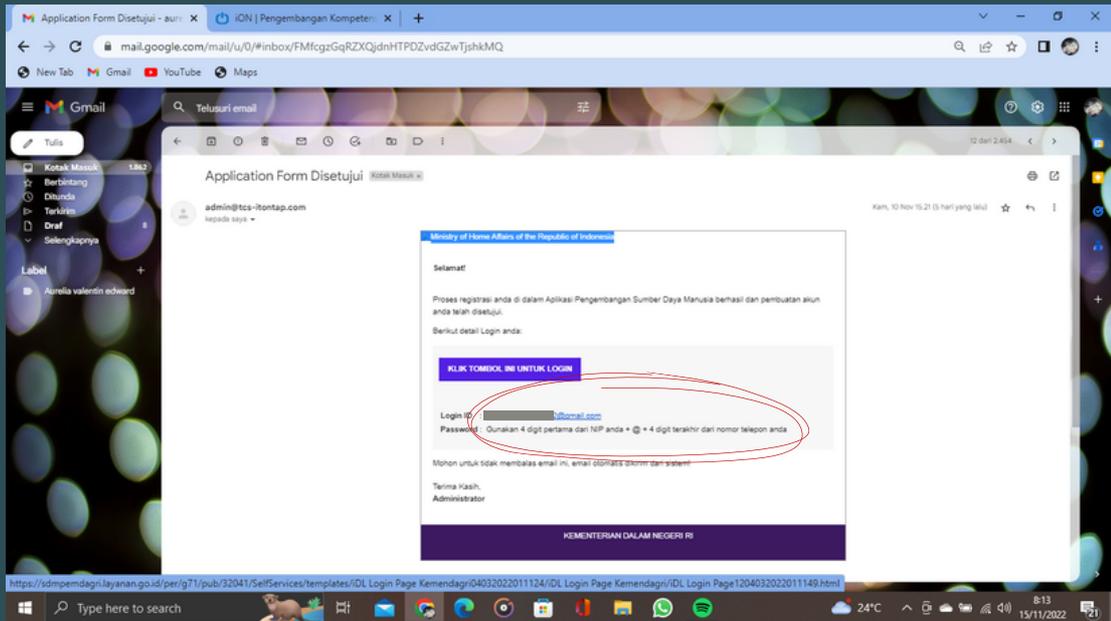
Silahkan menunggu email persetujuan. Secara berkala cek email masuk pada inbox atau pada spam email untuk memperoleh password masuk anda

The screenshot shows the registration success message on the website. The message reads: 'Registrasi berhasil! Mohon menunggu email persetujuan. Password masuk anda akan dikirimkan ke email anda.' The page also features the 'Activate Windows' watermark and the Windows taskbar at the bottom, showing the date and time as 10:16 PM on 11/14/2022.

04

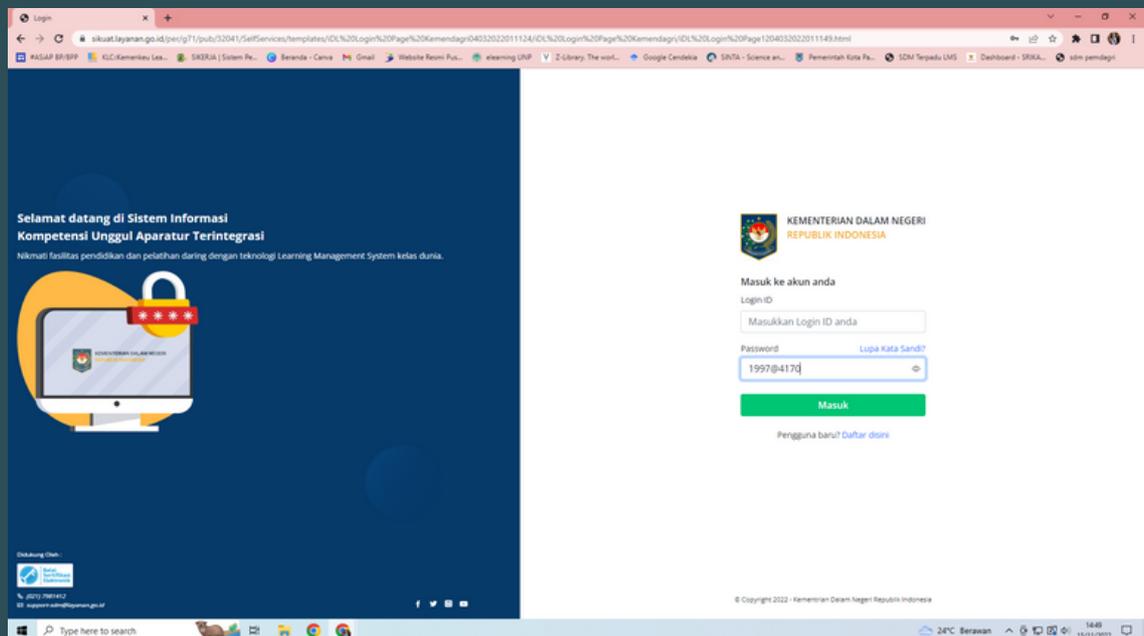
Pada email akan muncul tampilan berikut.

Login ID dan password anda tertera pada halaman email, kemudian silahkan klik panel ungu "klik tombol ini untuk login" atau langsung membuka tab baru ke link sikuat.layanan.go.id



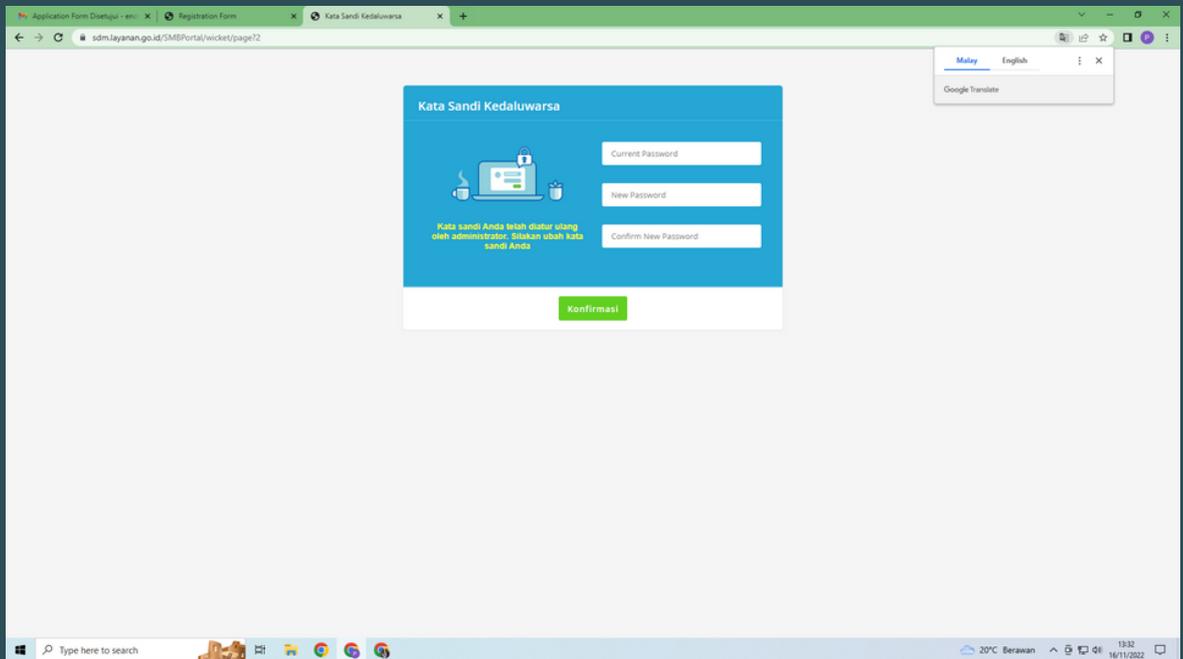
05

Ini merupakan halaman awal sikuat.layanan.go.id ada Langkah ini peserta sudah mempunyai akun LMS. Masukkan **LOGIN ID** dan **Password (4 angka pertama nip)>@<4 angka nomor belakang hp)** dan klik "Masuk"



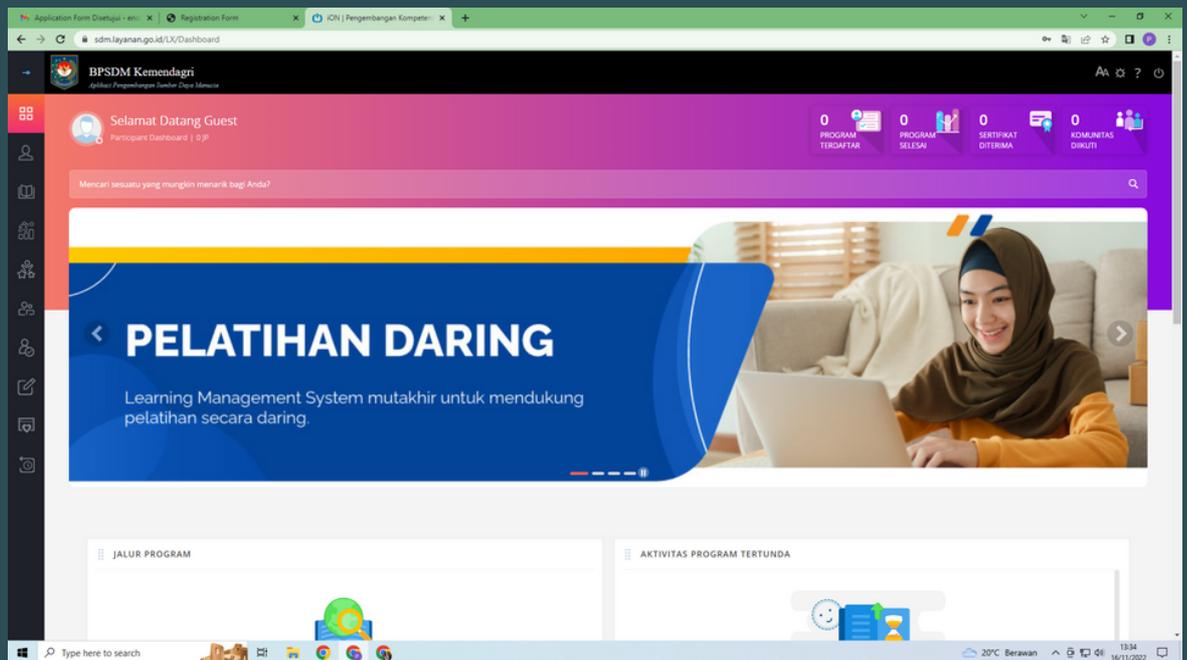
06

Peserta berhasil login, kemudian peserta akan diarahkan untuk melakukan ganti password terlebih dahulu. Silahkan ikuti perintah yang diberikan



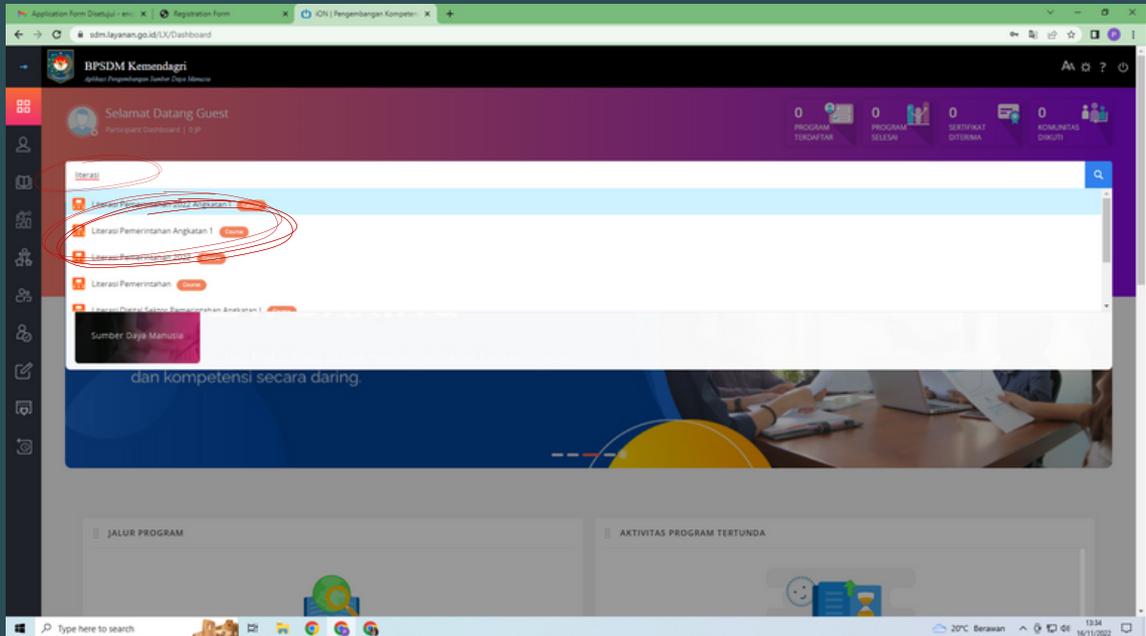
07

Apabila telah melakukan perbaharuan password, akan tampil Halaman Awal LMS sebagai berikut:



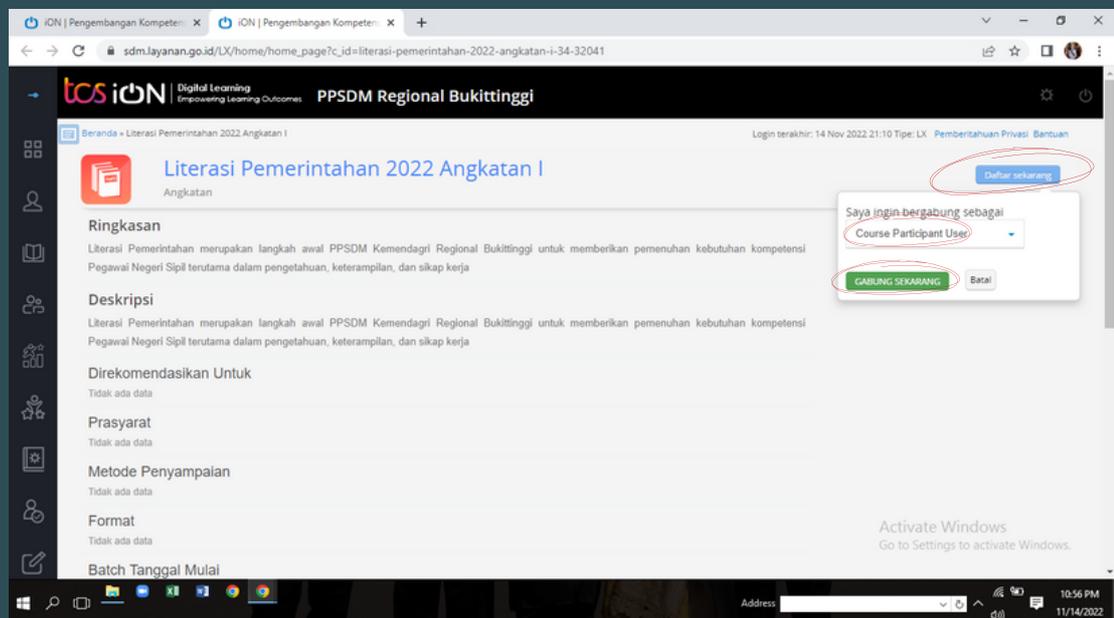
08

Pada menu pencarian di halaman awal LMS. Masukkan nama program "Literasi" kemudian pilih program "Literasi Pemerintahan 2022 Angkatan I"



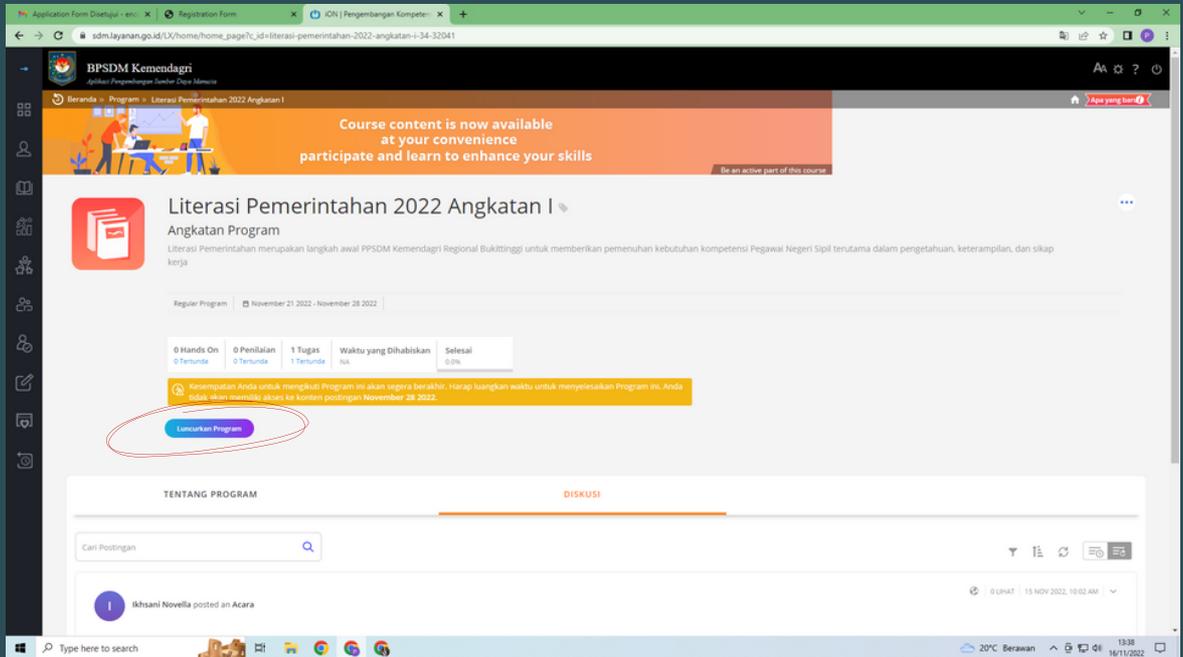
09

Akan muncul halaman program Literasi Pemerintahan 2022 Angkatan I. Klik "Daftar sekarang" pada pojok kanan atas, pilih "Course Participant User", kemudian klik "Gabung Sekarang". Dan anda sudah tergabung ke dalam kelas program Literasi Pemerintahan 2022 Angkatan I



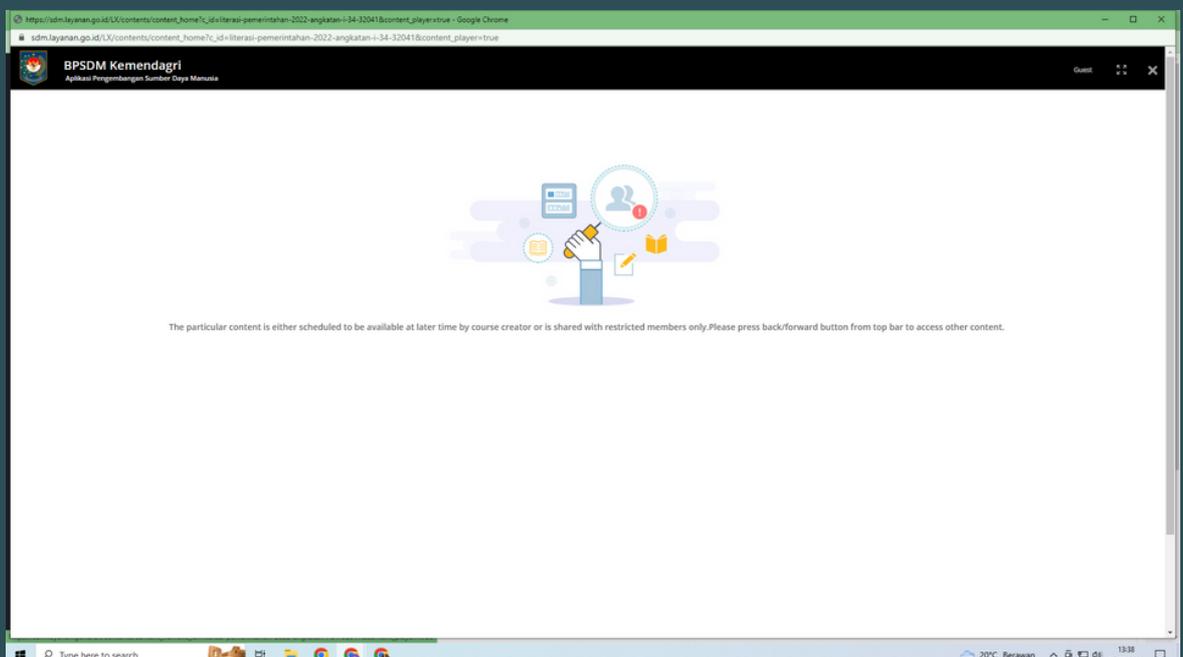
10

Akan tampil halaman berikut.
Silahkan klik "luncurkan program"



11

Anda telah memiliki satu program Diklat "Literasi Pemerintahan" yang akan bisa diakses mulai tanggal 21 November - 28 November 2022



ctt:

Untuk kegiatan Diklat Literasi Pemerintahan 2022 Angkatan I akan dimulai **Senin, 21 November 2022**, dapat diakses mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan **Senin, 28 November 2022**. **Kegiatan Diklat ini meliputi Asynconous dan Synchronous yang berjumlah 12 jp.**

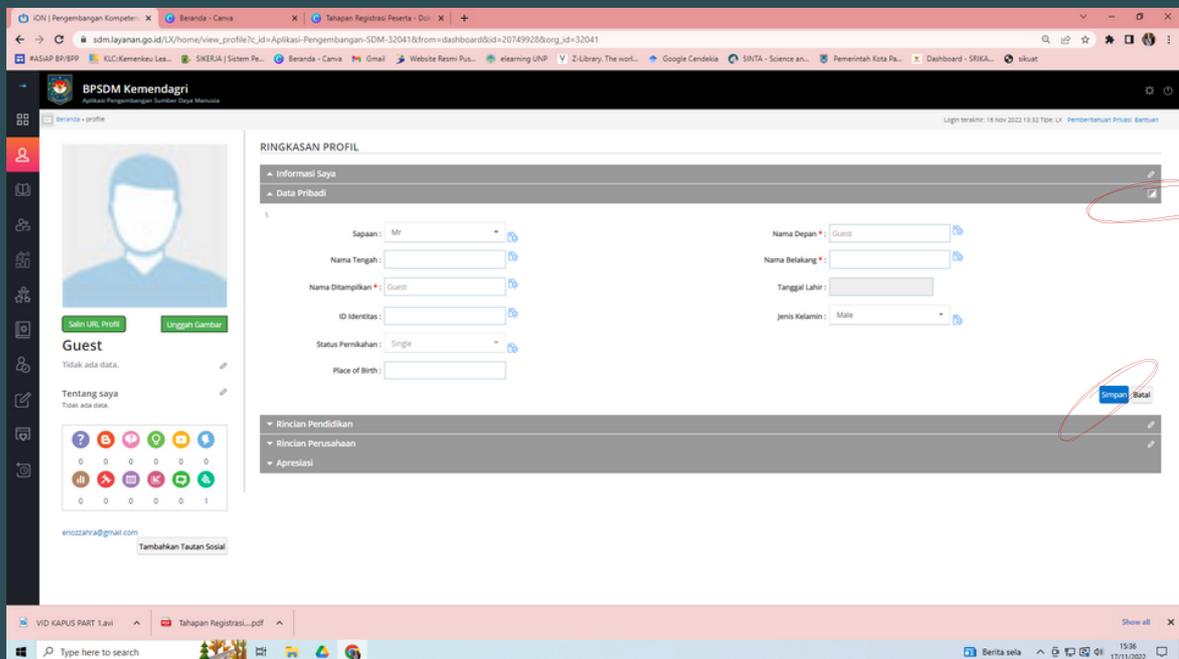
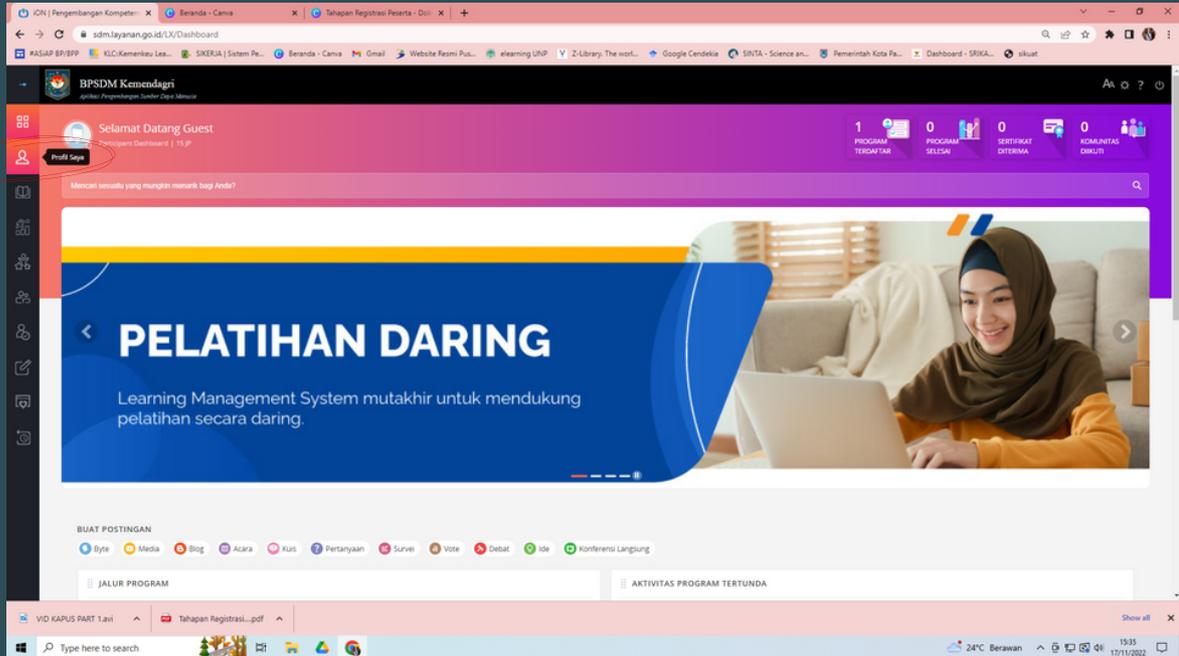
Peserta pada **Senin, 21 November 2022** disilahkan login akun LMS masing-masing dengan akses di sikuat.layanan.go.id

Akun LMS yang telah didaftarkan **dapat digunakan selamanya** untuk mengikuti kegiatan **Pelatihan lainnya** yang **diselenggarakan** di lingkup Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri

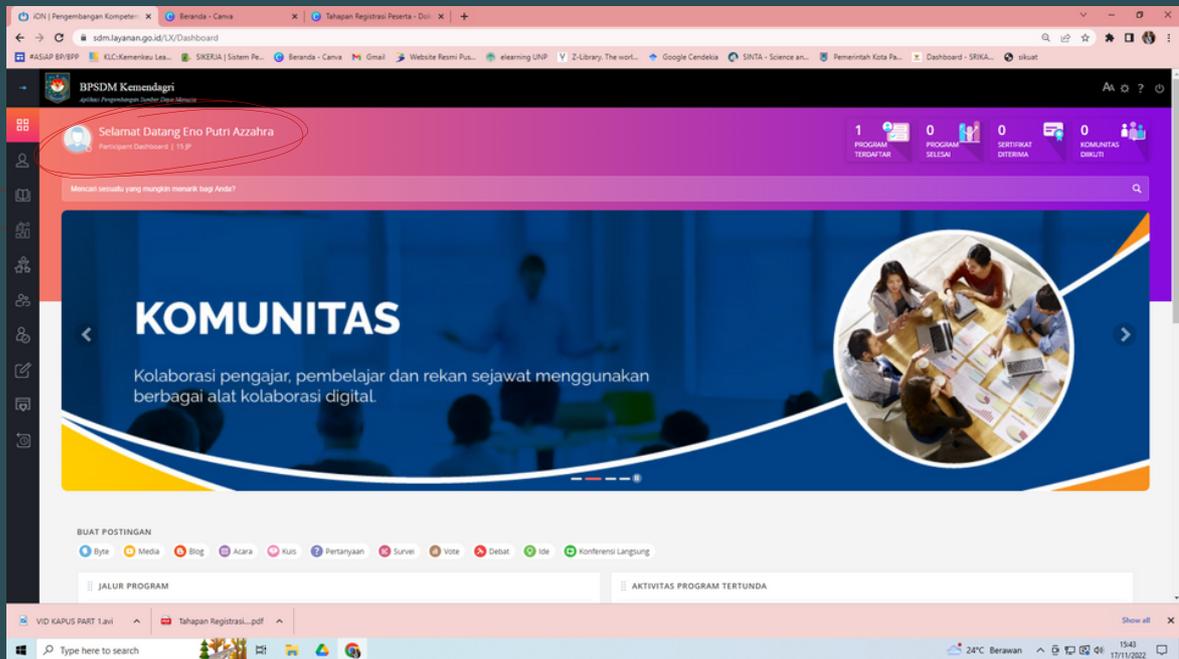
Apabila terdapat kendala, peserta dapat menghubungi panitia atau dapat mengunjungi akun instagram PPSDM Regional Bukittinggi: [@ppsdmregbukittinggi](https://www.instagram.com/ppsdmregbukittinggi)

ctt:

Peserta diwajibkan untuk memperbaharui Nama User melalui menu Profil Saya. Klik "profil saya" pada halaman awal, klik gambar pena pada kolom "data pribadi", Kemudian silahkan isi kolom nama sesuai dengan Nama Peserta, lalu klik "Simpan"



Tampilan apabila data / nama pengguna telah diperbaharui





JADWAL KEGIATAN

Literasi Pemerintahan 2022 Angkatan I

16-21 Nov
2022

PENDAFTARAN PESERTA MELALUI LINK:

sikuat.layanan.go.id

atau dapat discan pada barcode berikut:



Peserta diwajibkan bergabung ke Group Whatsapp "Literasi Pemerintahan 2020" untuk informasi selama pelaksanaan kegiatan Diklat melalui scan barcode:



1

Kabupaten Tanah Datar, Agam,
Padang Pariaman, dan Pasaman



2

Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan,
Kota Bukittinggi dan Padang Panjang



3

Di luar Kabupaten (1) dan (2)

21-22 Nov
2022

ASYNCONOUS

Pembelajaran via LMS

Pre-Test, dan Akses Konten Materi Pokok Literasi Pemerintahan

23 Nov
2022

SYNCRONOUS

zoom meeting

link zoom tertera di LMS Peserta

23-28 Nov 2022

ASYNCONOUS

Upload Tugas via LMS

- Apabila telah upload tugas, peserta akan otomatis dapat mengerjakan POST TEST
- Apabila nilai post test terpenuhi, peserta akan langsung mendapatkan SERTIFIKAT yang dapat didownload melalui LMS

28 Nov
2022

Program "Literasi Pemerintahan 2022" selesai

(ditutup otomatis)



UPDATE DATA LMS

sikuat.layanan.go.id



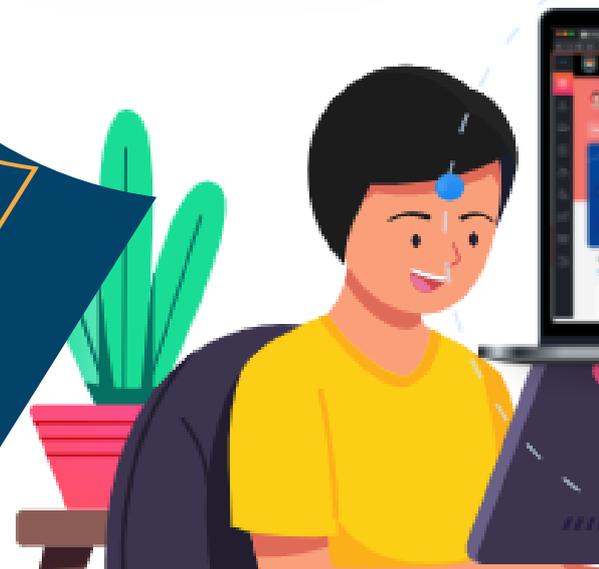
SIKUAT

Platform untuk mendukung semua alat manusia secara menyeluruh dengan *System* kelas dunia.

Masuk Aplikasi →

**LITERASI
PEMERINTAHAN**

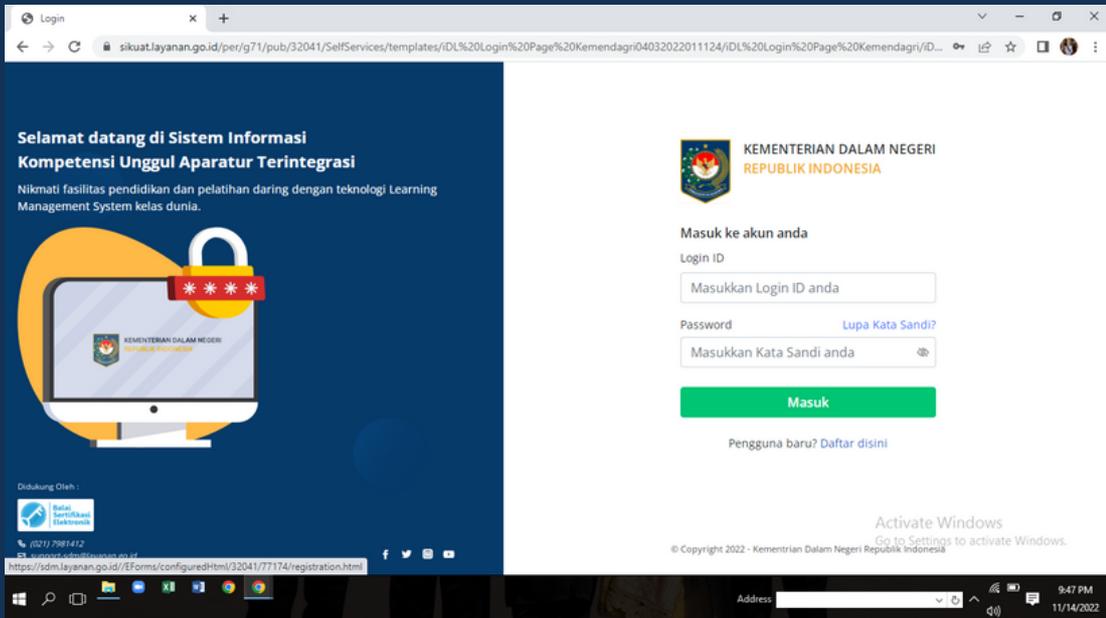
21-28 NOVEMBER 2022



TAHAPAN UPDATE DATA LMS KEPERLUAN SERTIFIKAT

01

Login ke link sikuat.layanan.go.id , kemudian akan muncul tampilan berikut. Silahkan masukkan ID (email) dan password dan klik Login



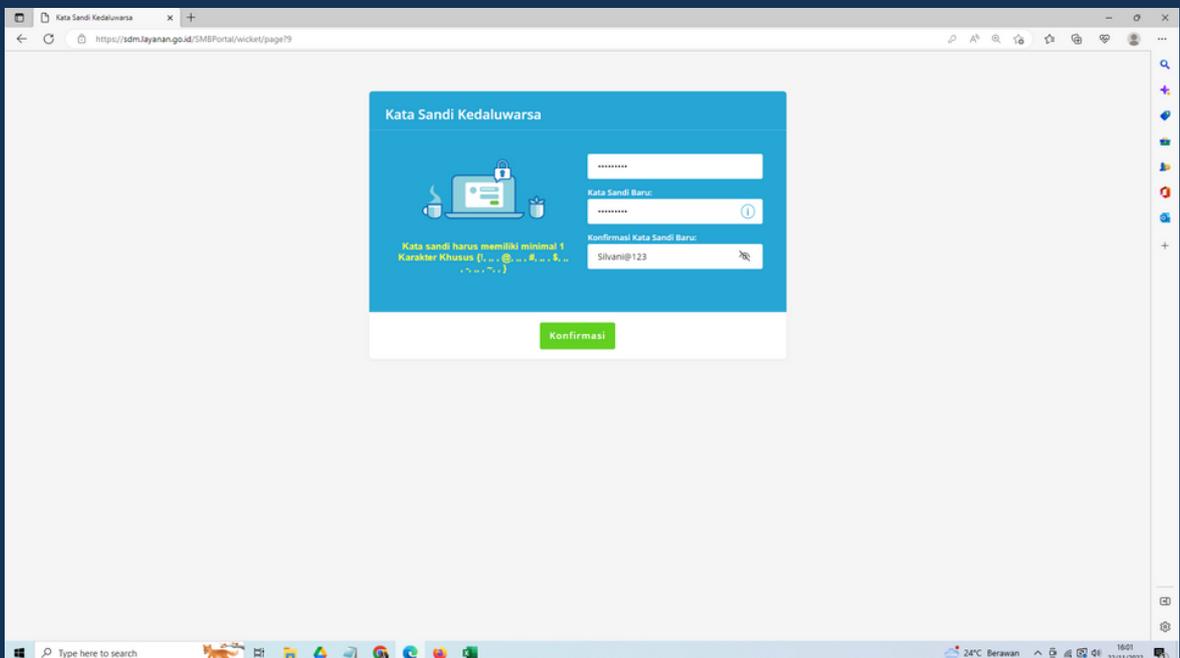
02

Peserta akan diarahkan untuk memperbaharui password. Silahkan buat password baru.

Current Password: (password yg dikirim ke email)

New Password: (buat password baru)

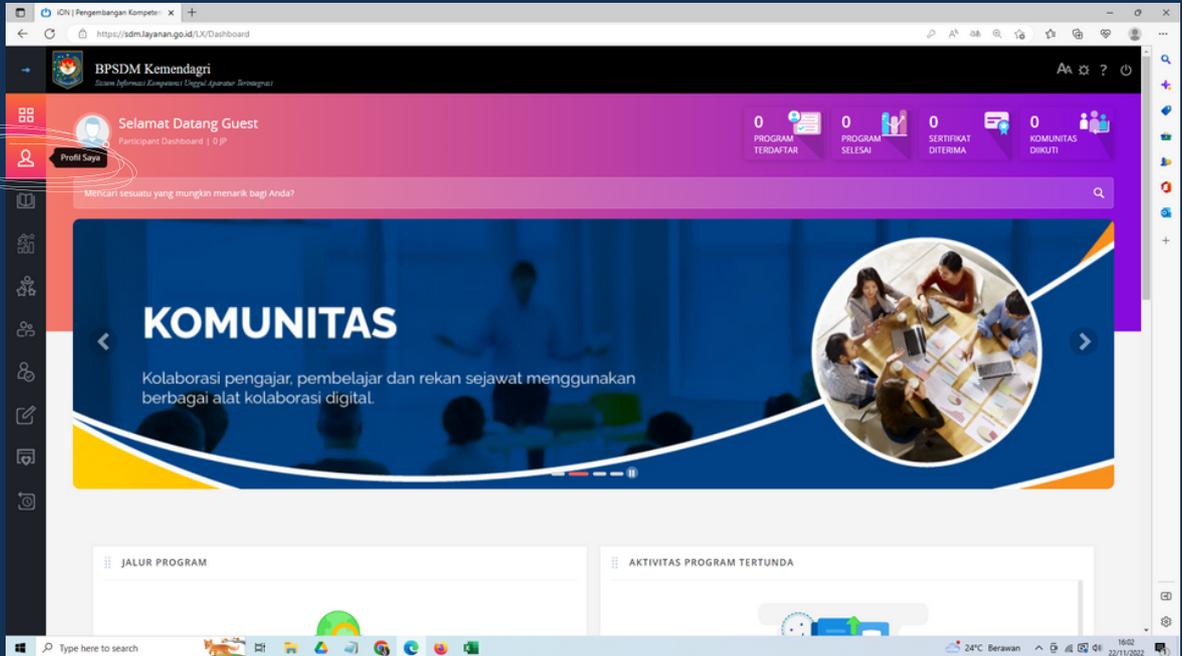
Konfirmasi: (sama dengan new passwor)



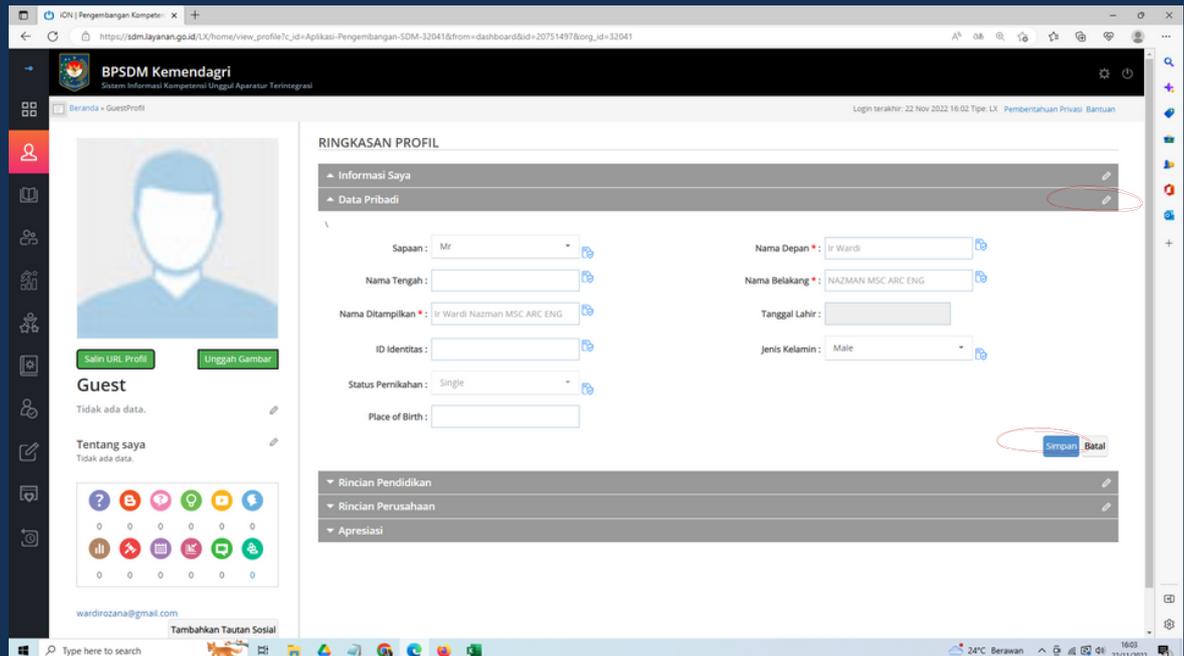
03

Halaman awal LMS.

Peserta diwajibkan melakukan update biodata, dengan mengklik tools "Profil Saya" untuk melengkapi **SERTIFIKAT**



Klik **Tools Pensil** pada kolom **Data Pribadi**, Silahkan sesuaikan data dan klik **simpan**



Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/1682/PPSDM-BKT
Tanggal : 18 November 2022

Daftar Nama Undangan
Rapat Persiapan Kegiatan Literasi Pemerintahan

1. Shohibul Azmi Riva'i, SE, M.Si, Kepala Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bukittinggi;
2. Dra. Hj. Sastri Yunizarti Bakry, Akt, M.Si, Widyaiswara Ahli Utama PPSDM Regional Bukittinggi;
3. Ir. Said Alkhudri, MM, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
4. Ir. Wardi Nazman, M.Sc, Arc.Eng, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
5. Drs. Khalid Efendi, M.Pd, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
6. Pramana Wahyu S, S. Sos, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
7. Yanison MN, SE., MM, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
8. Defrimen, M.Si, Analis Kepegawaian Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
9. Yatmiko, S.STP, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
10. Drs. Deswan Syam, M.Si, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
11. Norma Sulisiawati, S.Sos., M.SE, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bukittinggi;
12. Afri Yendra, SH, M.H, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
13. Ratna Sriwina, M.Si, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
14. Marta Suarni, S.Sos, Kasubbag Keuangan PPSDM Regional Bukittinggi;
15. Marsam, S.Sos, Kasubbag Saprasi dan Rumah Tangga PPSDM Regional Bukittinggi;
16. Aryo Fernandes, S.Si, Analis Kepegawaian Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
17. Mulya Nanda Hariandja, M.Pd, Perencana Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;
18. Retwando, S.Komp, M.Si, Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian PPSDM Regional Bukittinggi;
19. Andari Dwi Utami, SH, MH, Widyaiswara Ahli Muda PPSDM Regional Bukittinggi;

20. Jerry Marantika, S.Psi, Analisis Pengembangan SDM Aparatur PPSDM Regional Bukittinggi.
21. Anggy Reonal, S.STP, Analisis Kepegawaian Ahli Pertama PPSDM Regional Bukittinggi;
22. Ikhsani Novella, S.STP, Analisis Rencana Program Dan Kegiatan PPSDM Regional Bukittinggi;
23. Hayyi Utamimul Hasanah, S.Psi, Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama PPSDM Regional Bukittinggi;
24. Niky Khoirunnisa Utami, A.P.Kb.N, Pengadministrasi Keuangan pada Subbagian Keuangan Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bukittinggi;
25. Silvani Restifa, S.E, Staf Subbagian Perencanaan PPSDM Regional Bukittinggi;
26. Ari Saputra, A.Md, Staf Subbagian Saprasi dan Rumah Tangga PPSDM Regional Bukittinggi.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Telp. (0752) 28240

Bukittinggi, 16 November 2022.

Nomor : 893.2 /1652/ PPSDM-Bkt

Kepada Yth :

Lampiran : -

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya

Perihal : Undangan Rapat Persiapan Kegiatan Literasi
Pemerintahan Berbasis Digital

Manusia KEMENDAGRI Regional Yogyakarta
di

YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan penyelenggaraan kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 23 November 2022. Pelaksanaan kegiatan dimaksud diselenggarakan secara online.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dibutuhkan kesiapan sumber daya pendukung sesuai tujuan kegiatan dimaksud berjalan sesuai rencana. Rapat persiapan kegiatan akan dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 bertempat di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi
3. Berkenaan hal tersebut diatas, kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menugaskan nama dibawah ini untuk mengikuti rapat persiapan kegiatan dimaksud :

No	Nama	JABATAN
1.	Dr. MUDJI ESTININGSIH, SH., M Hum.	WIDYAIWARA AHLI MADYA
2.	DRA. WIDI ASTUTI,M.Pd	WIDYAIWARA AHLI MADYA
3.	MILA ANGGRAINI,SE.MM	WIDYAIWARA AHLI MUDA

4. Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi TA 2022.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

TEMBUSAN : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BPSDM KEMENDAGRI di Jakarta
2. Arsip



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 14 Baso - 26192 Telepon (0752) 28240
Faksimile (0752) 28241 www.ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa

Tanggal : 22 November 2022

Agenda : Rapat Persiapan Literasi Kompetensi Pemerintahan

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ikhlas	
2.	Sarjaya	
3.	WARDI NAZMAN .	
4.	Delin	
5.	Yusuf	
6.	Jerry M.	
7.	Mudji Estiningsih. DR.	
8.	Widi Astuti	
9.	Mila Angraeni	
10.	Khalid apud	
11.	Ikhwan Novella	
12.	Hayyi Utaminul H	
13.	Art Saputra	
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Shohibul Azmi Riva'i, M.Si
NIP. 19751013 200801 1 001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI**

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Provinsi Sumatera Barat
Telp. (0752) 28241, Fax (0752) 28240 Email : ppsdmregionalbukittinggi@gmail.com

NOTULA

Rapat : Rapat persiapan Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital
Hari/Tanggal : Selasa / 22 November 2022
Surat Undangan : 005/1682/PPSDM-BKT
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Acara : Pembahasan Teknis Persiapan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital

Pimpunan Rapat :
Ketua : Sarjayadi, SS
Sekretaris : Shohibul Azmi Riva'I, SE, M.Si
Notulen : Jerry Marantika, S.Psi

Peserta : - Pemateri Literasi Pemerintahan
- Koordinator Tim
- Pejabat Fungsional Widyaiswara
- Pejabat Pelaksana

Kegiatan : Pembahasan Teknis Persiapan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, Sarjayadi,SS selaku pemimpin rapat memberikan arahan kepada peserta rapat untuk mempersiapkan kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital yang dilaksanakan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting. Laporan terkait registrasi Peserta melalui Learning Management System (LMS) terkait Jumlah Peserta yang telah mendaftar adalah sebanyak 1150 orang peserta. Namun dari jumlah tersebut baru sekitar 300 orang peserta yang berhasil login dalam sistem LMS dan Pimpinan Rapat mengarahkan tim PIC LMS untuk dilaksanakan asistensi kepada calon peserta agar dapat login dalam LMS.

Kegiatan Literasi dilaksanakan menggunakan 1 Akun zoom dengan membagi kedalam 2 *Breakout Room* dengan keterangan pembagian Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

1. Breakout Room 1

Narasumber : Dr. Mudji Estiningsih, SH, M.Hum

Moderator : Ratna Sriwina, M.Si

Host : Jerry Marantika, S.Psi

2. Breakout Room 2

Narasumber : Afri Yendra, SH, MH

Moderator : Andari Dwi Utami, SH, MH

Host : Leo August Fernando, S.Kom

Kegiatan direncanakan dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri.

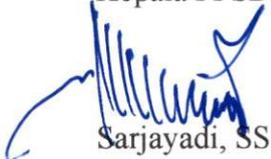
Penutup :

Rapat ditutup pada hari Selasa, 22 November 2022 pada pukul 11.00 WIB.

Demikian notula hasil kesimpulan Rapat Teknis Persiapan Literasi Pemerintahan Berbasis
Digital dilaporkan.

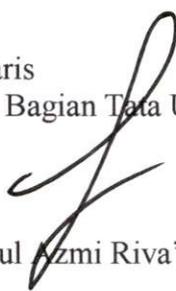
Baso, 22 November 2022

Pimpinan Rapat
Kepala PPSDM Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS

Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha



Shohibul Azmi Riva'I, SE, M.Si

Notulen



Jerry Marantika, S.Psi

Lampiran
Dokumentasi Kegiatan
Persiapan Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital





BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 18 November 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Tanah Datar

di

Tempat

Nomor : 893/ 753 /BKPSDM-2022

Lampiran : -

Perihal : Penyelenggaraan Literasi
Pemerintahan Berbasis
Digital.

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi nomor 893.2/1639/PPSDM-Bkt tanggal 15 November 2022 perihal Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi akan menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi ASN dalam hal penguasaan kompetensi pemerintahan melalui **Kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital** yang dilaksanakan secara online dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Massive Open Online Course (MOOC)</i>	21 - 22 November 2022
2.	Pembelajaran tatap muka	23 November 2022

2. Sehubungan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menugaskan ASN di lingkungan perangkat daerah Saudara sebagaimana daftar terlampir.
3. Peserta yang ditugaskan melakukan registrasi paling lambat tanggal **21 November 2022** melalui link <https://sikuat.layanan.go.id>. Setelah melakukan registrasi diharapkan bergabung pada *Whatsapp Group* peserta.
4. Sebelum melakukan registrasi dan memulai MOOC peserta dapat mempedomani panduan registrasi terlebih dahulu pada link <https://bit.ly/3hJ4GM5>.
5. Setelah mengikuti kegiatan agar mengirimkan laporan dan Sertifikat peserta ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar paling lambat tanggal 25 November 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

Yth. Kepala Pusat Pengembangan SDM KEMENDAGRI Regional Bukittinggi di Bukittinggi.

Jalan Sultan Alam Bagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat
Telp. (0752) 73185 Fax. 574000

DAFTAR LAMPIRAN SURAT BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 893/753 /BKPSDM-2022
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2022

DAFTAR ALOKASI PESERTA KEGIATAN LITERASI PEMERINTAHANAN BERBASIS
DIGITAL BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PESERTA
1.	SEKRETARIAT DAERAH A. KEPALA BAGIAN	10 ORANG
2.	SEKRETARIAT DPRD A. KEPALA BAGIAN	3 ORANG
3.	INSPEKTORAT A. SEKRETARIS B. INSPEKTUR PEMBANTU	1 ORANG 2 ORANG
4.	BADAN DAN DINAS A. SEKRETARIS B. KEPALA BIDANG (MASING-MASING 2 ORANG)	20 ORANG 40 ORANG
5.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3 ORANG
6.	RSUD	
	A. SEKRETARIS	1 ORANG
	B. KEPALA BIDANG	3 ORANG
7.	KECAMATAN A. CAMAT B. SEKRETARIS CAMAT C. KASI PEMERINTAHAN	14 ORANG 14 ORANG 14 ORANG
	JUMLAH	125 ORANG

BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA, SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kode Pos 25584
Telepon (0751) 478455 Faksimile 4784555 Email: Sekda@PadangPariamankab.go.id
Website: www.padangpariamankab.go.id

Nomor : 892/2785 / BKPSDM-PKP/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelatihan Literasi
Pemerintahan Berbasis Digital bagi
ASN

Parit Malintang, 18 November 2022
Kepada Yth Sdr,
1. Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Kab. Padang Pariaman
2. Inspektur Daerah Kab. Padang Pariaman
3. Sekretaris DPRD Kab. Padang Pariaman
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor se Kab. Padang
Pariaman
5. Camat se Kab. Padang Pariaman
di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka peningkatan kompetensi pemerintahan bagi ASN sebagai penyelenggara pemerintahan, maka Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN dilingkup kerja melalui "kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasais Digital, dengan target group khususnya Kabupaten Padang Pariaman dengan kuota peserta berjumlah 142 ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar menugaskan ASN yang bertugas di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing untuk mengikuti Kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital sesuai daftar terlampir.
2. Adapun jadwal pelaksanaan Pelatihan tersebut adalah sebaga berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Massive Open Online Course (MOOC)	21-22 November 2022
2.	Pembelajaran Tatap Maya	23 November 2022

3. Peserta yang mengikuti kegiatan Literasi Pemerintah tidak dipungut biaya dan peserta juga akan diberikan sertifikat diakhir kegiatan.
4. Bagi peserta yang ditugaskan, sebelum melakukan registrasi dan memulai MOOC peserta dapat mempedomani panduan registrasi terlebih dahulu melalui link <https://bit.ly/3hj4GM5>.
5. Peserta melakukan registrasi paling lambat tanggal 21 November 2022 melalui link <https://sikuat.layanan.go.id>. Setelah melakukan registrasi kepada peserta diharapkan bergabung pada whatsapp Group <https://chat.whatsapp.com/D51tCNA4f6C8WymI2ZXT8T>. Apabila terdapat kendala dalam proses registrasi dapat menghubungi Saudari Ikhsani Novella,S.STP (HP 081275944170).

Untuk informasi selanjutnya, dapat menghubungi bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN BKPSDM, dengan narahubung: 081363254943 (Fitri Agustin A).

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDY REBENALDI RILIS, S.STP, M.M
Pembina Utama Muda, Nip. 19790402 199803 1 003

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang sebagai laporan
2. Arsip

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 876/2785 /BKPSDM-PKP/2022
Tanggal : November 2022

Daftar Peserta Pelatihan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital Bagi ASN
Di Lingkungan Pemerintah Kab. Padang Pariaman

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	RIKI ZAKARIA, SH, MH 19850520 200803 1 001	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH
2	MULYADI, SP, MM 19700612 200801 1 001	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	SEKRETARIAT DAERAH
3	FAFDAL ANDRIANOS, ST,MPSDA 19810113 200501 1 005	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
4	ASRIADI.H, ST.MM 19670903 199701 1 001	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH
5	ANDRI SATRIA MASRI, SE, M.E 19720107 200501 1 009	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	SEKRETARIAT DAERAH
6	MARDI, S.Sos, M.Ec.Dev 19720408 199303 1 004	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH
7	dr. JASNELI, MARS 19760716 200604 2 008	DIREKTUR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
8	SHABRI BS, SH 19680717 199312 1 001	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	DPRD
9	ANTON SAPUTRA, ST, M.Si 19751028 200501 1 011	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	DPRD
10	JUNAIDI SYAH, S.Sos 19741113 199503 1 001	CAMAT	KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
11	Ir. FIRMAN SUHERI, MM 19680103 199903 1 002	CAMAT	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
12	KECIL ARDINATA, S.Pd 19670509 198610 1 001	CAMAT	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
13	ZULBASRI, S.Sos 19791024 200801 1 014	CAMAT	KECAMATAN PATAMUAN
14	Dra. AGUSTI FRAMI , MM 19660119 199112 2 001	CAMAT	KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
15	Drs. JON RISWAN 19660101 200212 1 004	CAMAT	KECAMATAN ENAM LINGKUNG
16	ARMEDES, SE, MM 19761213 199703 1 003	CAMAT	KECAMATAN BATANG GASAN
17	DEDI SPENDRI, S.Sos, MM 19710404 200701 1 007	SEKRETARIS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18	RAFLIS EFENDI, SE,MM 19691230 198903 1 001	SEKRETARIS	DINAS KESEHATAN
19	FAUZIL IRAWADI, ST.MT 19800808 200604 1 006	SEKRETARIS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	MARSIDI, S.Pd., MM 19660326 198610 1 001	SEKRETARIS	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
21	SUHATMAN,S.Pd, M.Si 19800419 200501 1 008	SEKRETARIS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
22	MARDALENA UMAR, SE MM 19670815 199003 2 004	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTORAT
23	ASMI S.Pd 19660521 199312 1 001	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

24	VEBI DESWANTO, S.Pd 19871201 201101 1 007	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25	EVA TRISNA MURNI, SKM 19710405 199101 2 002	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
26	dr. SYAFRINAWATI 19771005 199703 2 001	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
27	ZAIRIL, S.KM, M.Kes 19690311 199203 1 006	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
28	DEKY SAPUTRA, ST, MT 19810712 200804 1 002	KEPALA BIDANG BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	DIAN YUHENDRI, ST.M.Eng 19800526 200902 1 001	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	NOFARIANTY, S.Hut, M.Si 19731108 200003 2 004	KEPALA BIDANG TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	JONADI, SST 19740124 200604 1 001	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	FIRMANSYAH, S.IP 19810116 200501 1 006	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
33	NASMI PANALA, SH, MH 19840612 201001 1 005	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
34	Ns. ASRIDA DAYANG, S.Kep 19730416 200604 2 009	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
35	YULIA KRISTINA DEWI, SH 19690721 199803 2 002	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
36	AFNI SUSANTI, SP,MM 19710428 199903 2 006	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN SAMPAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
37	JHONY FIRMAN, SE, MM 19731029 199403 1 003	KEPALA BIDANG PERTANAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
38	ANDRIYANI, SE.MM 19730206 199803 2 002	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
39	HERI SUGIANTO, SH 19770620 200604 1 024	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
40	MAYSAR ARISZKI, SE, MM 19810522 200003 1 002	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
41	DEDED PERMANA, S.Psi, MM 19751228 200604 1 005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
42	LISA MUHARTIKA, SE 19831118 201001 2 001	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43	ADRIWASTI MASRO, SKM, M.Kes 19730518 199302 2 002	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
44	ARDINAL, SH 19710716 200604 1 011	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN DAN PERKERETAAPIAN	DINAS PERHUBUNGAN

45	ROZA SUHENDRA, SE. M.CIO 19820915 200501 1 003	KEPALA BIDANG LAYANAN E- GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
46	MARDALENA, S.Sos 19740310 199311 2 001	KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, TENAGA KERJA DAN UKM
47	INDRIATI, SE 19700428 199003 2 003	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, TENAGA KERJA DAN UKM
48	TRISNA JUNAILI, ST 19770617 200501 2 006	KEPALA BIDANG BINA INDUSTRI	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
49	WIWIK HERAWATI, S.ST, MM 19741229 200902 2 002	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
50	KEMBANG DEWITA, S.P,MM 19690613 199003 2 003	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
51	EDI SATRIA, SE 19690103 199403 1 006	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
52	ARWITA AZ, S.Pi 19760726 200312 2 003	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN
53	DIAN PERMATA, SP, M.Si 19841114 200902 1 001	KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
54	SALMIATI, SP, MM 19690407 199903 2 003	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
55	ISMAIL, SP 19781001 200312 1 003	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
56	IRAWATI FEBRIANI, S.P, M.Si 19810214 200501 2 009	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
57	DWI HASTUTI, SST 19770927 200003 2 001	KEPALA BIDANG PERBIBITAN & PRODUKSI	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
58	drh. DEVI YANTI 19821220 200902 2 002	KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
59	NOFRIA MELSI, SE, M.Si 19801127 200604 1 008	KEPALA BIDANG EKONOMI	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
60	ZUINNA MARLIUS, SKM 19830208 200501 2 007	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
61	RONI ABDILLAH, SE 19840415 201001 1 029	KEPALA BIDANG ANGGARAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
62	RINI ANGGRAINI, SE.Ak 19771028 200902 2 001	KEPALA BIDANG ASET	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
63	NOFRIYANTI, SP, M.Si 19811124 200803 2 001	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
64	DEWI ANGGRAINI, S.Kom 19790614 200312 2 012	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
65	HELMI, SP, MM 19690416 199403 1 004	KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
66	YENDRI, ST 19700115 199003 1 006	KEPALA BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

67	PIPIT YENITA, S.SiT 19710620 199103 2001	KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
68	MARIANI, SE,MM 19701225 199303 2 004	KEPALA BIDANG KEUANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
69	ALKAMAR RAHIM, SE 19700206 200604 1 004	SEKRETARIS	KECAMATAN VII KOTO
70	EFINALDI, ST, MT 19711104 200212 1 004	SEKRETARIS	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
71	AFLIZALDI, SE 19690304 199403 1 004	SEKRETARIS	KECAMATAN V KOTO TIMUR
72	DAWANIS, SE 19680815 199003 1 021	SEKRETARIS	KECAMATAN SUNGAI LIMAU
73	NISMAWATI MANZA, SE, MM 19721231 199303 2 012	SEKRETARIS	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
74	RUSNIWITA, S.Sos 19710322 199103 2 001	SEKRETARIS	KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
75	YUSRIRIZAL, S.Sos 19821220 201503 1 001	SEKRETARIS	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
76	ALKHAUFA, S.TP 19830414 200501 1 004	SEKRETARIS	KECAMATAN NAN SABARIS
77	MIRZA HARMADI, SE 19770206 201001 1 008	SEKRETARIS	KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
78	WARNALIS, S.Pd 19720722 200701 2 006	SEKRETARIS	KECAMATAN ENAM LINGKUNG
79	BY. RAYO, S.Pd 19670320 198802 1 001	SEKRETARIS	KECAMATAN PADANG SAGO
80	DEDY MIZARDI, SE 19650810 199101 1 002	SEKRETARIS	KECAMATAN BATANG GASAN
81	SYANTI FITRI ANGGARAINI, SE 19830922 201001 2 021	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
82	ALFAKHRI SYUKRI, ST 19850109 200901 1 003	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
83	MUKHTAR LUTHFI, S.PdI 19841215 201001 1 017	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
84	MASFUFAH, SKM 19780514 200604 2 007	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
85	SUARNI, S. Kep 19671021 198703 2001	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
86	SISKA ADE YUSNI, SE 19890105 201903 2 008	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
87	NILA PURNAMA, S.KOM 19920710 201503 2 003	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
88	AISAH ANUGERAH QADRI, S.E. 199512172020122014	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
89	RENI OKTAVIA, SE 19841027 201903 2 002	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
90	NIA LAILATUL AZMI, SE 19950516 201903 2 016	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
91	HAKIKI ULANDARI, A.Md 199311222022032004	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
92	GERRY RONALDO SEPTIANUS, A.Md 199609232022031007	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
93	dr. ATIKA DWITAMA 199301192022032004	AHLI PERTAMA- DOKTER	RSUD

94	dr. DEWI NOVIARTI TANJUNG 199311302022032010	AHLI PERTAMA- DOKTER	RSUD
95	dr. DIAN TRIANA PUTRI 199511182022032008	AHLI PERTAMA- DOKTER	RSUD
96	dr. MIHAL VIVQI PRATAMA 199404062022031003	AHLI PERTAMA- DOKTER	RSUD
97	dr. NINDO MAYANG SUMBA 199408202022032006	AHLI PERTAMA- DOKTER	RSUD
98	dr. NOVRI ELLYZA 199411042022032010	AHLI PERTAMA- DOKTER	RSUD
99	ALFANDI PRANATA, S.E 199111162022031002	ANALIS PEREKONOMIAN	SEKRETARIAT DAERAH
100	HASYIM MUNTHAZERY, S.T. 199511132022031001	ANALIS BENCANA	BPBD
101	DESER MAYENI, S.Psi 199512312022032005	ANALIS MITIGASI BENCANA	BPBD
102	REZA ANGGRAINI, S.Sos 199705262022032008	PENYULUH BENCANA	BPBD
103	ADE SAPUTRA, S.Psi 198906062022031004	ANALIS DAMPAK SOCIAL	BPBD
104	FAHRUL ROZI, ST 199507262022031004	ANALIS INFRASTRUKTUR	BPBD
105	RAYMALL RAMAYON, S.E 198610242022031002	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BADAN Pengelola Keuangan Daerah
106	ANNITA LUBIS, S.St 199806182022032020	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
107	AZHARDI BUSTAMI, S.T. 199604212022031010	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
108	LATHIFA HAQI, S.Pd 199708292022032017	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
109	NISSA SURYANI, S.SI 199306142022032014	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
110	SUPARMO PAKU ATMOJO, S.Pd 199007112022031006	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
111	WAHYU RIWANDA, S.Pi 199502282022031005	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
112	WIFIL IDLI, S.Pi 198801242022032005	ANALIS BENIH	DINAS PERIKANAN
113	BAYU IKHLAS, S.Pt 199701072022031004	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
114	RAHMI AULIA, S.Sos. 199706142022032005	ANALIS DAMPAK SOCIAL	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
115	ALITA PRATIWI YUSRA, S.E. 199211242022032008	AHLI PERTAMA - AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
116	NANDA FAULANA SAPUTRA, S.E. 199504252022031003	AHLI PERTAMA - AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
117	WAHYUNI, S.E. 199509212022032010	AHLI PERTAMA - AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH

118	ZULDA HANDAYANI, S.E. 198805262022032004	AHLI PERTAMA - AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
119	DWI OKTAFIANI PUTRI, S.E 199010192022032004	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	SEKRETARIAT DAERAH
120	HENDRA SETIAWAN, S.Ak 199605082022031004	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	SEKRETARIAT DAERAH
121	MUTIARA RAHAYU, S.E 199410152022032005	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	SEKRETARIAT DAERAH
122	NILA SAFITRI, S.E 199201182022032006	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	SEKRETARIAT DAERAH
123	YOPI MULYONO PUTRA, S.E. 199208242022031001	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	SEKRETARIAT DAERAH
124	BERTI INDAH SARI, A.Md. 199605072022032015	PENGELOLA KEUANGAN	BAPPELITBANGDA
125	YOLIVIA ARISKA, A.Md 199507222022032005	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS KESEHATAN
126	RAHMADINA ZULFANI, A.Md 199506212022032009	VERIFIKATOR KEUANGAN	INSPEKTORAT DAERAH
127	AHMAD FADEL, A.Md. AK 199408182022031007	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	RSUD
128	ATIQA H HUMAIRA, A.Md.TEM. 199606192022032008	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	RSUD
129	FICHA ADRIANY, Amd.AK 199206022022032008	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	RSUD
130	LATIFAH KURNIA PUTRI, A.Md. T. 199811252022032002	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	RSUD
131	MUSRI FALDYNUR, AMTE 199612082022031003	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	RSUD
132	NADIA FITRI, A.Md.Kes.(Rad.) 199904042022032008	TERAMPIL - RADIOGRAFER	RSUD
133	RIA NOVITA, A.Md.AK 198611122022032002	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	RSUD
134	RIFDA SRI HARYATI, A.Md.Tem 199706152022032003	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	RSUD
135	RIZKI MELLINDA, A.md.Rad 199412092022032012	TERAMPIL - RADIOGRAFER	RSUD
136	RONI GUNAWAN, A.Md Rad 199112222022031007	TERAMPIL - RADIOGRAFER	RSUD
137	SITI SYAFIAH, A.Md.Kes.(Rad) 199710172022032006	TERAMPIL - RADIOGRAFER	RSUD
138	SYAFLINA REZKI, Amd. Rad 199606242022032009	TERAMPIL - RADIOGRAFER	RSUD
139	WAHYU NELISA SARI, A.Md.AK 199109102022032007	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	RSUD
140	YOLI DEVITA SARI, A.Md.AK 198912232022032006	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	RSUD
141	ANDY SAFUTRA, A.Md.Kom 198901092022031003	PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA	SEKRETARIAT DPRD
142	PEBI WITRA, A.Md 198707102022031001	PENGELOLA PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD



 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SETDA
 RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M
 Pemula Utama Muda, Nip. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telepon (0751) 478455 Faksimile 4784555 Email: Sekda@PadangPariamankab.go.id
Website: www.padangpariamankab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 311 /SPT/BKPSDM/XI/2022

Dasar : Surat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi Noomor 893.2/1639/PPSDM-BKT tanggal 15 November 2022 perihal Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital.

SEKRETARIS DAERAH PADANG PARIAMAN

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana daftar terlampir :
Untuk : Mengikuti Kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital mulai tanggal 21 s/d 23 November 2022, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Massive Open Online Course (MOOC)	21-22 November 2022
2.	Pembelajaran Tatap Maya	23 November 2022

Biaya : Peserta yang mengikuti Kegiatan Literasi Pemerintahan tidak dipungut biaya dan peserta akan diberi sertifikat diakhir kegiatan.

Keterangan : 1. Bagi peserta yang ditugaskan, sebelum melakukan registrasi dan memulai MOOC peserta dapat mempedomani panduan registrasi terlebih dahulu melalui link <https://bit.ly/3hJ4GM5>.
2. Peserta melakukan registrasi paling lambat tanggal 21 November 2022 melalui link <https://sikuat.layanan.go.id>. Setelah melakukan registrasi kepada peserta diharapkan bergabung pada Whatsapp Group <https://chat.whatsapp.com/D51tCNA4f6C8WyMI2ZXt8T>

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Parit Malintang, 17 November 2022



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M
Pembina Utama Muda, Nip. 197904021998031003

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parik Malintang sebagai laporan
2. Arsip

Lampiran : Surat Perintah Tugas
 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Padang Pariaman
 Nomor : 311/ SPT/BKPSDM/XI/2022
 Tanggal : 17 November 2022

Daftar Peserta Pelatihan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital Bagi ASN
 Di Lingkungan Pemerintah Kab. Padang Pariaman

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	RIKI ZAKARIA, SH, MH 19850520 200803 1 001	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH
2	MULYADI, SP, MM 19700612 200801 1 001	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	SEKRETARIAT DAERAH
3	FAFDAL ANDRIANOS, ST,MPSDA 19810113 200501 1 005	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
4	ASRIADI.H, ST.MM 19670903 199701 1 001	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH
5	ANDRI SATRIA MASRI, SE, M.E 19720107 200501 1 009	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	SEKRETARIAT DAERAH
6	MARDI, S.Sos, M.Ec.Dev 19720408 199303 1 004	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH
7	dr. JASNELI, MARS 19760716 200604 2 008	DIREKTUR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
8	SHABRI BS, SH 19680717 199312 1 001	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	DPRD
9	ANTON SAPUTRA, ST, M.Si 19751028 200501 1 011	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	DPRD
10	JUNAIDI SYAH, S.Sos 19741113 199503 1 001	CAMAT	KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
11	Ir. FIRMAN SUHERI, MM 19680103 199903 1 002	CAMAT	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
12	KECIL ARDINATA, S.Pd 19670509 198610 1 001	CAMAT	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
13	ZULBASRI, S.Sos 19791024 200801 1 014	CAMAT	KECAMATAN PATAMUAN
14	Dra. AGUSTI FRAMI, MM 19660119 199112 2 001	CAMAT	KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
15	Drs. JON RISWAN 19660101 200212 1 004	CAMAT	KECAMATAN ENAM LINGKUNG
16	ARMEDES, SE, MM 19761213 199703 1 003	CAMAT	KECAMATAN BATANG GASAN
17	DEDI SPENDRI, S.Sos, MM 19710404 200701 1 007	SEKRETARIS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18	RAFLIS EFENDI, SE,MM 19691230 198903 1 001	SEKRETARIS	DINAS KESEHATAN
19	FAUZIL IRAWADI, ST.MT 19800808 200604 1 006	SEKRETARIS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	MARSIDI, S.Pd., MM 19660326 198610 1 001	SEKRETARIS	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
21	SUHATMAN,S.Pd, M.Si 19800419 200501 1 008	SEKRETARIS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
22	MARDALENA UMAR, SE MM 19670815 199003 2 004	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTORAT
23	ASMI S.Pd 19660521 199312 1 001	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

24	VEBI DESWANTO, S.Pd 19871201 201101 1 007	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25	EVA TRISNA MURNI, SKM 19710405 199101 2 002	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
26	dr. SYAFRINAWATI 19771005 199703 2 001	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
27	ZAIRIL, S.KM, M.Kes 19690311 199203 1 006	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
28	DEKY SAPUTRA, ST, MT 19810712 200804 1 002	KEPALA BIDANG BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	DIAN YUHENDRI, ST.M.Eng 19800526 200902 1 001	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	NOFARIANTY, S.Hut, M.Si 19731108 200003 2 004	KEPALA BIDANG TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	JONADI, SST 19740124 200604 1 001	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	FIRMANSYAH, S.IP 19810116 200501 1 006	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
33	NASMI PANALA, SH, MH 19840612 201001 1 005	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
34	Ns. ASRIDA DAYANG, S.Kep 19730416 200604 2 009	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
35	YULIA KRISTINA DEWI, SH 19690721 199803 2 002	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
36	AFNI SUSANTI, SP,MM 19710428 199903 2 006	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN SAMPAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
37	JHONY FIRMAN, SE, MM 19731029 199403 1 003	KEPALA BIDANG PERTANAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
38	ANDRIYANI, SE.MM 19730206 199803 2 002	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
39	HERI SUGIANTO, SH 19770620 200604 1 024	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
40	MAYSAR ARISZKI, SE, MM 19810522 200003 1 002	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
41	DEDED PERMANA, S.Psi, MM 19751228 200604 1 005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
42	LISA MUHARTIKA, SE 19831118 201001 2 001	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43	ADRIWASTI MASRO, SKM, M.Kes 19730518 199302 2 002	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
44	ARDINAL, SH 19710716 200604 1 011	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN DAN PERKERETAAPIAN	DINAS PERHUBUNGAN

45	ROZA SUHENDRA, SE. M.CIO 19820915 200501 1 003	KEPALA BIDANG LAYANAN E- GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
46	MARDALENA, S.Sos 19740310 199311 2 001	KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, TENAGA KERJA DAN UKM
47	INDRIATI, SE 19700428 199003 2 003	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, TENAGA KERJA DAN UKM
48	TRISNA JUNAILI, ST 19770617 200501 2 006	KEPALA BIDANG BINA INDUSTRI	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
49	WIWIK HERAWATI, S.ST, MM 19741229 200902 2 002	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
50	KEMBANG DEWITA, S.P,MM 19690613 199003 2 003	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
51	EDI SATRIA, SE 19690103 199403 1 006	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
52	ARWITA AZ, S.Pi 19760726 200312 2 003	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN
53	DIAN PERMATA, SP, M.Si 19841114 200902 1 001	KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
54	SALMIATI, SP, MM 19690407 199903 2 003	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
55	ISMAIL, SP 19781001 200312 1 003	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
56	IRAWATI FEBRIANI, S.P, M.Si 19810214 200501 2 009	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
57	DWI HASTUTI, SST 19770927 200003 2 001	KEPALA BIDANG PERBIBITAN & PRODUKSI	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
58	drh. DEVI YANTI 19821220 200902 2 002	KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
59	NOFRIA MELSI, SE, M.Si 19801127 200604 1 008	KEPALA BIDANG EKONOMI	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
60	ZUINNA MARLIUS, SKM 19830208 200501 2 007	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
61	RONI ABDILLAH, SE 19840415 201001 1 029	KEPALA BIDANG ANGGARAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
62	RINI ANGGRAINI, SE.Ak 19771028 200902 2 001	KEPALA BIDANG ASET	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
63	NOFRIYANTI, SP, M.Si 19811124 200803 2 001	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
64	DEWI ANGGRAINI, S.Kom 19790614 200312 2 012	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
65	HELMI, SP, MM 19690416 199403 1 004	KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
66	YENDRI, ST 19700115 199003 1 006	KEPALA BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

67	PIPIT YENITA, S.SiT 19710620 199103 2001	KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
68	MARIANI, SE,MM 19701225 199303 2 004	KEPALA BIDANG KEUANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
69	ALKAMAR RAHIM, SE 19700206 200604 1 004	SEKRETARIS	KECAMATAN VII KOTO
70	EFINALDI, ST, MT 19711104 200212 1 004	SEKRETARIS	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
71	AFLIZALDI, SE 19690304 199403 1 004	SEKRETARIS	KECAMATAN V KOTO TIMUR
72	DAWANIS, SE 19680815 199003 1 021	SEKRETARIS	KECAMATAN SUNGAI LIMAU
73	NISMAWATI MANZA, SE, MM 19721231 199303 2 012	SEKRETARIS	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
74	RUSNIWITA, S.Sos 19710322 199103 2 001	SEKRETARIS	KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
75	YUSRIRIZAL, S.Sos 19821220 201503 1 001	SEKRETARIS	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
76	ALKHAUFA, S.TP 19830414 200501 1 004	SEKRETARIS	KECAMATAN NAN SABARIS
77	MIRZA HARMADI, SE 19770206 201001 1 008	SEKRETARIS	KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
78	WARNALIS, S.Pd 19720722 200701 2 006	SEKRETARIS	KECAMATAN ENAM LINGKUNG
79	BY. RAYO, S.Pd 19670320 198802 1 001	SEKRETARIS	KECAMATAN PADANG SAGO
80	DEDY MIZARDI, SE 19650810 199101 1 002	SEKRETARIS	KECAMATAN BATANG GASAN
81	SYANTI FITRI ANGGARAINI, SE 19830922 201001 2 021	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
82	ALFAKHRI SYUKRI, ST 19850109 200901 1 003	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
83	MUKHTAR LUTHFI, S.PdI 19841215 201001 1 017	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
84	MASFUFAH, SKM 19780514 200604 2 007	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
85	SUARNI, S. Kep 19671021 198703 2001	ANALIS SDM APARATUR MUDA	BKPSDM
86	SISKA ADE YUSNI, SE 19890105 201903 2 008	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
87	NILA PURNAMA, S.KOM 19920710 201503 2 003	ANALIS KOMPETENSI	BKPSDM
88	AISAH ANUGERAH QADRI, S.E. 199512172020122014	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
89	RENI OKTAVIA, SE 19841027 201903 2 002	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
90	NIA LAILATUL AZMI, SE 19950516 201903 2 016	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
91	HAKIKI ULANDARI, A.Md 199311222022032004	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
92	GERRY RONALDO SEPTIANUS, A.Md 199609232022031007	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BKPSDM
93	dr. ATIKA DWITAMA 199301192022032004	Ahli Pertama - Dokter	RSUD

94	dr. DEWI NOVIARTI TANJUNG 199311302022032010	Ahli Pertama - Dokter	RSUD
95	dr. DIAN TRIANA PUTRI 199511182022032008	Ahli Pertama - Dokter	RSUD
96	dr. MIHAL VIVQI PRATAMA 199404062022031003	Ahli Pertama - Dokter	RSUD
97	dr. NINDO MAYANG SUMBA 199408202022032006	Ahli Pertama - Dokter	RSUD
98	dr. NOVRI ELLYZA 199411042022032010	Ahli Pertama - Dokter	RSUD
99	ALFANDI PRANATA, S.E 199111162022031002	Analisis Perekonomian	Sekretariat Daerah
100	HASYIM MUNTHAZERY, S.T. 199511132022031001	Analisis Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
101	DESER MAYENI, S.Psi 199512312022032005	Analisis Mitigasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
102	REZA ANGGRAINI, S.Sos 199705262022032008	Penyuluh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
103	ADE SAPUTRA, S.Psi 198906062022031004	Analisis Dampak Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
104	FAHRUL ROZI, ST 199507262022031004	Analisis Infrastruktur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
105	RAYMALL RAMAYON, S.E 198610242022031002	Analisis Pajak Dan Retribusi Daerah	BADAN Pengelola Keuangan Daerah
106	ANNITA LUBIS, S.St 199806182022032020	Ahli Pertama - Instruktur	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
107	AZHARDI BUSTAMI, S.T. 199604212022031010	Ahli Pertama - Instruktur	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
108	LATHIFA HAQI, S.Pd 199708292022032017	Ahli Pertama - Instruktur	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
109	NISSA SURYANI, S.Si 199306142022032014	Ahli Pertama - Instruktur	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
110	SUPARMO PAKU ATMOJO, S.Pd 199007112022031006	Ahli Pertama - Instruktur	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
111	WAHYU RIWANDA, S.Pi 199502282022031005	Analisis Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
112	WIFIL IDLI, S.Pi 198801242022032005	Analisis Benih	Dinas Perikanan
113	BAYU IKHLAS, S.Pt 199701072022031004	Ahli Pertama - Pengawas Bibit Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
114	RAHMI AULIA, S.Sos. 199706142022032005	Analisis Dampak Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
115	ALITA PRATIWI YUSRA, S.E. 199211242022032008	Ahli Pertama - Auditor	Inspektorat Daerah
116	NANDA FAULANA SAPUTRA, S.E. 199504252022031003	Ahli Pertama - Auditor	Inspektorat Daerah
117	WAHYUNI, S.E. 199509212022032010	Ahli Pertama - Auditor	Inspektorat Daerah

118	ZULDA HANDAYANI, S.E. 198805262022032004	Ahli Pertama - Auditor	Inspektorat Daerah
119	DWI OKTAFIANI PUTRI, S.E 199010192022032004	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
120	HENDRA SETIAWAN, S.AK 199605082022031004	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
121	MUTIARA RAHAYU, S.E 199410152022032005	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
122	NILA SAFITRI, S.E 199201182022032006	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
123	YOPI MULYONO PUTRA, S.E. 199208242022031001	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
124	BERTI INDAH SARI, A.Md. 199605072022032015	Pengelola Keuangan	Badab Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
125	YOLIVIA ARISKA, A.Md 199507222022032005	Pengelola Barang Milik Negara	Dinas Kesehatan
126	RAHMADINA ZULFANI, A.Md 199506212022032009	Verifikator Keuangan	Inspektorat Daerah
127	AHMAD FADEL, A.Md. AK 199408182022031007	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	RSUD
128	ATIQA HUMAIRA, A.Md.TEM. 199606192022032008	Terampil - Teknisi Elektromedis	RSUD
129	FICHA ADRIANY, Amd.AK 199206022022032008	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	RSUD
130	LATIFAH KURNIA PUTRI, A.Md. T. 199811252022032002	Terampil - Teknisi Elektromedis	RSUD
131	MUSRI FALDYNUR, AMTE 199612082022031003	Terampil - Teknisi Elektromedis	RSUD
132	NADIA FITRI, A.Md.Kes.(Rad.) 199904042022032008	Terampil - Radiografer	RSUD
133	RIA NOVITA, A.Md.AK 198611122022032002	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	RSUD
134	RIFDA SRI HARYATI, A.Md.Tem 199706152022032003	Terampil - Teknisi Elektromedis	RSUD
135	RIZKI MELLINDA, A.md.Rad 199412092022032012	Terampil - Radiografer	RSUD
136	RONI GUNAWAN, A.Md Rad 199112222022031007	Terampil - Radiografer	RSUD
137	SITI SYAFIAH, A.Md.Kes.(Rad) 199710172022032006	Terampil - Radiografer	RSUD
138	SYAFLINA REZKI, Amd. Rad 199606242022032009	Terampil - Radiografer	RSUD
139	WAHYU NELISA SARI, A.Md.AK 199109102022032007	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	RSUD
140	YOLI DEVITA SARI, A.Md.AK 198912232022032006	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	RSUD
141	ANDY SAFUTRA, A.Md.Kom 198901092022031003	Pengelola Media Center Dan Kemitraan Media	Sekretariat DPRD
142	PEBI WITRA, A.Md 198707102022031001	Pengelola Persidangan	Sekretariat DPRD


 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M
 Pembina Utama Muda Nip. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sudirman No. 40 Telp. (0753) 20030
- Lubuk Sikaping 26313

Lubuk Sikaping, 1² November 2022 M.
Rabiul Akhir 1444 H.

Nomor : 893/11.5/PSDM-BKPSDM/2022.
Lamp : 1 (satu) berkas.
Perihal : Penyelenggaraan Literasi
Pemerintahan berbasis Digital.

Kepada:
Yth. Kepala SKPD Se Kabupaten
Pasaman (terlampir);

di
Tempat.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor 893.2/1639/PPSDM-Bkt tanggal 15 November 2022 perihal Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital, maka akan dilaksanakan pengembangan kompetensi ASN dalam hal penguasaan kompetensi pemerintahan melalui "**Kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital**". Kegiatan ini dilaksanakan secara *online* bertempat dikedudukan peserta, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Massive Open Online Course (MOOC)	21 - 22 November 2022
2.	Pembelajaran Tatap Maya	23 November 2022

Sehubungan hal tersebut diatas, agar saudara menugaskan ASN untuk mengikuti kegiatan dimaksud sesuai alokasi peserta (*terlampir*). Bagi peserta yang ditugaskan, sebelum melakukan registrasi dan memulai MOOC peserta dapat mempedomani panduan registrasi terlebih dahulu melalui link <https://bit.ly/3hJ4GM5>. Peserta melakukan registrasi *paling lambat tanggal 21 November 2022* melalui link <https://sikuat.layanan.go.id>. Setelah melakukan registrasi peserta diharapkan bergabung pada *Whatsapp Group* sesuai alokasi.

Apabila terdapat kendala dalam proses registrasi dapat menghubungi Saudari Ikhsani Novella, S.STP (HP 081275944170).

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lubuk Sikaping, 1² November 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. MARA ONDAK, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680830 1989033 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Pasaman sebagai laporan;
2. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi di Baso;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Poros Timbulun Telp (0755) 7575124

Nomor : 800/82/ XI /BKPSDM-2022
Lampiran : 1
Perihal : **Penyelenggaraan Literasi
Pemerintah Berbasis Digital di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Solok Selatan**

Padang Aro, 17 November 2022

Kepada Yth,
Kepala OPD se Kabupaten Solok
Selatan

di-

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Nomor 893.2/1639/PPSDM-Bkt tanggal 15 November 2022 perihal Penyelenggaraan Literasi Pemerintah Berbasis Digital. Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat mengikutsertakan Pejabat Esesol III , Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Penyetaraan di lingkungan OPD Saudara sesuai jadwal terlampir. untuk proses registrasi di lakukan mulai Rabu tanggal 16 Novemembr s.d Senin 21 November 2022. Bagi semua peserta agar dapat bergabung ke WA Group yang sudah disediakan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA



IRWANDI OSMADI, SE

Nip. 196709191990031006

PEMBINA TK I / IVb

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro (sebagai Laporan)
2. Arsip



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Telp. (0752) 28240

Bukittinggi, 15 November 2022

Nomor : 893.2 / 1639 / PPSDM-Bkt
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyelenggaraan Literasi
Pemerintahan Berbasis Digital

Kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kab. Tanah Datar
2. Sekretaris Daerah Kab. Agam
3. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman
4. Sekretaris Daerah Kab. Padang
Pariaman
5. Sekretaris Daerah Kab. Solok
Selatan
6. Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya
7. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
8. Sekretaris Daerah Kota Padang
Panjang
di

TEMPAT

Dengan hormat,

Sesuai peraturan pemerintah berkaitan dengan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk kepada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwasanya ASN harus menguasai 4 (empat) kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan. Dari empat kompetensi tersebut, sebagai penyelenggara pemerintahan ASN dituntut juga harus menguasai kompetensi pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam yang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Dalam upaya menyamakan persepsi terkait penguasaan kompetensi pemerintahan bagi ASN sebagai penyelenggara pemerintahan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "**Arah Kompetensi Pemerintahan ; Penerapan dan Tantangannya di Daerah**" yang diikuti oleh pemangku kepentingan dalam program pengembangan kompetensi ASN di wilayah kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi.
3. Menindaklanjuti hasil FGD tersebut, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi berinisiatif untuk melaksanakan pengembangan kompetensi ASN dalam hal penguasaan kompetensi pemerintahan melalui "**Kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital**". Kegiatan ini

dilaksanakan secara *online* bertempat dikedudukan peserta, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Massive Open Online Course (MOOC)</i>	21 – 22 November 2022
2.	Pembelajaran Tatap Maya	23 November 2022

4. Sejalan perihal tersebut diatas, kami mohonkan kepada Bapak dapat menugaskan ASN untuk mengikuti kegiatan dimaksud sesuai alokasi peserta (**terlampir**). Peserta Literasi Pemerintahan adalah ASN yang bertugas di instansi pemerintah daerah dengan target jumlah peserta sebanyak 1.000 orang. Kegiatan ini juga untuk memenuhi kewajiban ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam setahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Peserta yang mengikuti kegiatan Literasi Pemerintahan tidak dipungut biaya dan peserta juga akan diberikan sertifikat diakhir kegiatan.
6. Bagi peserta yang ditugaskan, sebelum melakukan registrasi dan memulai MOOC peserta dapat mempedomani panduan registrasi terlebih dahulu melalui link <https://bit.ly/3hJ4GM5>.
7. Peserta melakukan registrasi **paling lambat tanggal 21 November 2022 melalui link <https://sikuat.layanan.go.id>**. Setelah melakukan registrasi kepada peserta diharapkan bergabung pada **Whatsapp Group** sesuai alokasi daerah (terlampir). Apabila terdapat kendala dalam proses registrasi dapat menghubungi Saudari Ikhsani Novella, S.STP (HP 081275944170).

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPSDM KEMENDAGRI di Jakarta
2. Kepala BKPSDM Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kab. Padang Panjang
3. Arsip

Lampiran : Alokasi Jumlah Peserta Literasi Pemerintahan Berbasis Digital

No	Instansi	Alokasi Peserta	WA Group
	Ruang Zoom I		
1.	Kabupaten Tanah Datar	125 orang	https://chat.whatsapp.com/D51tCNA4f6C8WyMI2ZXT8T
2.	Kabupaten Agam	125 orang	
3.	Kabupaten Padang Pariaman	125 orang	
4.	Kabupaten Pasaman	125 orang	
	Jumlah	500 orang	
	Ruang Zoom II		
5.	Kabupaten Dharmasraya	125 orang	https://chat.whatsapp.com/DzP2MD99EKf080AJPd1afw
6.	Kabupaten Solok Selatan	125 orang	
7.	Kota Bukittinggi	125 orang	
8.	Kota Padang Panjang	125 orang	
	Jumlah	500 orang	

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Regional Bukittinggi



Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudirman No.1 Telp. (0752) 76304 Fax. (0752) 76310 Lubuk Basung
www.agamkab.go.id

Lubuk Basung, 18 November 2022 M
Jumadil Akhir 1444 H

Nomor : 893/743/BKPSDM-2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kegiatan Literasi Pemerintahan
Berbasis Digital

Kepada
Yth. 1. Kepala OPD
2. Kepala Bagian
3. Camat se-Kab. Agam
di -
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi nomor 893.2/1639/PPSDM-Bkt tanggal 15 November 2022 perihal Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital, dengan ini disampaikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi akan melaksanakan kegiatan literasi pemerintahan berbasis digital secara *online* dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Massive open online course</i> (MMOC)	21 – 22 November 2022
2.	Pembelajaran Tatap Maya	23 November 2022

2. Bagi peserta yang ditugaskan, sebelum melakukan registrasi dan memulai MOOC peserta dapat mempedomani panduan registrasi terlebih dahulu melalui link : <https://bit.ly/3hJ4GM5>
3. Peserta melakukan registrasi paling lambat tanggal 21 November 2022 melalui link : <https://sikuat.layanan.go.id> dan bergabung pada *whatsapp group* melalui <https://chat.whatsapp.com/D51tCNA4f6C8WyMI2ZXT8T>
4. Peserta akan mendapatkan sertifikat dan dapat digunakan untuk pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dalam memenuhi pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam 1 tahun.
5. Sehubungan dengan hal diatas, diminta kepada Saudara sebagai berikut :
 - a. Menugaskan pegawai di Lingkungan OPD Saudara untuk mengikuti kegiatan literasi tersebut sesuai dengan jumlah kuota terlampir.
 - b. Menyampaikan sertifikat yang didapat peserta ke BKPSDM Kabupaten Agam paling lambat tanggal 30 November 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. EDI BUSTI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19660305 199003 1 005

Tembusan :

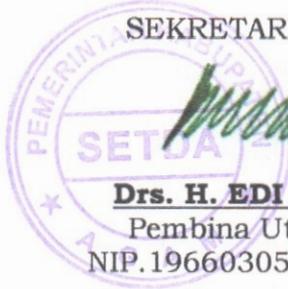
Yth. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung (sebagai laporan)

Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 893/743/BKPSDM-2022
Tanggal : 16 November 2022

JUMLAH KUOTA KEGIATAN LITERASI PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL

NO	OPD	Jumlah Peserta (orang)
1	INSPEKTORAT	1
2	SEKRETARIAT DPRD	1
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	1
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1
10	DINAS KESEHATAN	24
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1
13	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	1
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	1
16	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN	1
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1
19	DINAS PERHUBUNGAN	1
20	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	1
21	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1
22	DINAS PERTANIAN	1
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1
24	DINAS SOSIAL	1
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG	1
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1
28	BAGIAN HUKUM	1
29	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1
30	BAGIAN ORGANISASI	1
31	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	1
32	BAGIAN PEREKONOMIAN	1
33	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1
34	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1
35	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	1
36	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1
37	BAGIAN UMUM	1
38	KECAMATAN AMPEK ANGKEK	1
39	KECAMATAN AMPEK NAGARI	1
40	KECAMATAN BANUHAMPU	1

41	KECAMATAN BASO	1
42	KECAMATAN CANDUANG	1
43	KECAMATAN IV KOTO	1
44	KECAMATAN KAMANG MAGEK	1
45	KECAMATAN LUBUK BASUNG	1
46	KECAMATAN MALALAK	1
47	KECAMATAN MATUR	1
48	KECAMATAN PALEMBAYAN	1
49	KECAMATAN PALUPUH	1
50	KECAMATAN SUNGAI PUA	1
51	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA	1
52	KECAMATAN TANJUNG RAYA	1
53	KECAMATAN TILATANG KAMANG	1
	TOTAL	125


 SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. EDI BUSTI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP.19660305 199003 1 005



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Telp. (0752) 33050 Fax. (0752) 33050

Bukittinggi, 17 November 2022

Nomor : 890/1302 /III-BKPSDM/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Penyelenggaraan Literasi
Pemerintahan Berbasis Digital

Kepada
Yth: Sdr. Kepala SKPD / Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kota Bukittinggi

di -

Bukittinggi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bukittinggi Nomor: 893.2/1639/PPSDM-Bkt Tanggal 15 November 2022 Perihal sebagaimana tersebut diatas bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. PPSDM Regional Bukittinggi bermaksud melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui **Kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital**.
2. Kegiatan ini dilaksanakan pada **tanggal 23 November 2022** secara virtual, dengan melakukan registrasi melalui link <https://sikuat.layanan.go.id>
3. Untuk lancarnya kegiatan ini, diminta agar peserta bergabung dengan group <https://chat.whatsapp.com/DzP2MD99EKf080AJPd1afw>
4. Sedangkan untuk panduan kegiatan ini dapat mempedomani pada link <https://bit.ly/3hJ4GM5>
5. Diminta kepada Saudara untuk diikuti beserta pejabat struktural di lingkungan SKPD yang Saudara pimpin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



Drs. MARTIAS WANTO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660301 198602 1 002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan);
- Sdr. Kepala PPSDM Regional Bukittinggi (sebagai laporan).



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang Telp: (0752) 82200 - Faks : (0752) 82870
email: setdako@padangpanjang.go.id – website: padangpanjang.go.id

Nomor : B/800/1885/BKPSDM-PP/XI/2022 Padang Panjang, 16 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Di Padang Panjang

Menindaklanjuti Surat Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor: 893.2/1639/PPSDM-Bkt tanggal 15 November perihal Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk kepada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwasanya ASN harus menguasai 4 (empat) kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan. Dari empat kompetensi tersebut, sebagai penyelenggara pemerintahan ASN dituntut juga harus menguasai kompetensi pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam yang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Dalam upaya menyamakan persepsi terkait penguasaan kompetensi pemerintahan bagi ASN sebagai penyelenggara pemerintahan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “Arah Kompetensi Pemerintahan ; Penerapan dan Tantangannya di Daerah” yang diikuti oleh pemangku kepentingan dalam program pengembangan kompetensi ASN di wilayah kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi;
3. Menindaklanjuti hasil *FGD* tersebut, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi berinisiatif untuk melaksanakan pengembangan kompetensi ASN dalam hal penguasaan kompetensi pemerintahan melalui “Kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital“. Kegiatan ini Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN dilaksanakan secara online bertempat dikedudukan peserta, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : 1. *Massive Open Online Course (MOOC)* (21-22 November 2022) dan 2. Pembelajaran Tatap Maya (23 November 2022);
4. Sejalan perihal tersebut diatas, kami mohonkan kepada Saudara/i Kepala OPD dapat menugaskan ASN untuk mengikuti kegiatan dimaksud sesuai alokasi peserta (terlampir). Peserta Literasi Pemerintahan adalah ASN yang bertugas di Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang dengan target jumlah peserta sebanyak 125 orang. Kegiatan ini juga untuk memenuhi kewajiban ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam setahun sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Peserta yang mengikuti kegiatan Literasi Pemerintahan tidak dipungut biaya dan peserta juga akan diberikan sertifikat diakhir kegiatan;
6. Bagi peserta yang ditugaskan, sebelum melakukan registrasi dan memulai *MOOC* peserta dapat mempedomani panduan registrasi terlebih dahulu melalui link <https://bit.ly/3hJ4GM5>;
7. Peserta melakukan registrasi paling lambat tanggal 21 November 2022 melalui link <https://sikuat.layanan.go.id>. Setelah melakukan registrasi kepada peserta diharapkan bergabung pada *Whatsapp Group* pada link <https://chat.whatsapp.com/D51tCNA4f6C8WyMI2ZZT8T>. Apabila terdapat kendala dalam proses registrasi dapat menghubungi Sdr. Ibnu Kuntara, S.STP (HP. 081312191618) dan Widya Karunia, S.Kom, M.I.Kom (HP. 085363889036).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah



Sonny Budaya Putra

Tembusan :

1. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang;
2. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Telp. 0754-451488, Fax. 0754-451488
Pulau Punjung (27578)

Nomor : 800/ 922 / BKPSDM – 2022
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pelaksanaan Pelatihan Literasi Digitali bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasraya**

Pulau Punjung, 16 November 2022
21 Rabiul Athir 1444 H

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasraya

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi Nomor : 893.2/1639/BPSDM-2022 tanggal 15 November 2022 perihal Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi akan mengadakan pengembangan kompetensi ASN dalam hal penguatan Kompetensi Pemerintahan melalui kegiatan “Literasi Pemerintahan Berbasis Digital”;
2. Kompetensi pemerintahan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selain Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
3. Kegiatan literasi digital merupakan salah satu sarana bagi ASN untuk memenuhi amanat pemenuhan pengembangan kompetensi 20 jp pertahun;
4. Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang sebagaimana daftar terlampir;
5. Bagi peserta yang ditugaskan mengikuti kegiatan dimaksud agar mendaftar pada Link : <https://sikuat.layanan.go.id> paling lambat pada tanggal 18 November 2022;
6. Setelah melakukan pendaftaran peserta agar bergabung pada Whatsapp Group dengan link : <https://chat.whatsapp.com/DzP2MD99EKf080AJP1afw>;
7. Sebelum mendaftar dan memulai kegiatan MOOC dapat mempedomani panduan terlebih dahulu melalui link <https://bit.ly/3hJ4GM5> ;

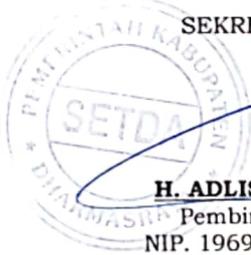
8. Agar menugaskan ASN pada unit kerja saudara sesuai daftar terlampir untuk mengikuti kegiatan dimaksud secara daring pada dengan tahapan sebagai berikut :

NO	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Massive Open Online Course (MOOC)	21 s.d 22 November 2022
2	Pembelajaran Tatap Maya	23 November 2022

11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdri. Syawitri, S.Ap No. HP/WA 082382302040.

Demikian disampaikan, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690825 198902 1 002

Tembusan :

1. Bupati Dharmasraya sebagai laporan di Pulau Punjung;
2. Inspektur Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung

**JUMLAH KUOTA MASING-MASING OPD PESERTA LITERASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN
BERBASIS DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA TAHUN 2022**

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ORANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	6
2	SEKRETARIAT DPRD	4
3	INSPEKTORAT	4
4	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4
7	BADAN KEUANGAN DAERAH	5
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4
9	DINAS PENDIDIKAN	6
10	DINAS KESEHATAN	6
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4
12	DINAS PERTANIAN	5
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	4
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4
15	DINAS PERHUBUNGAN	4
16	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	4
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	4
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4
19	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	4
20	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4
22	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	4
27	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1
28	KECAMATAN ASAM JUJUAN	1
29	KECAMATAN IX KOTO	1
30	KECAMATAN KOTO BARU	1
31	KECAMATAN KOTO BESAR	1
32	KECAMATAN KOTO SALAK	1
33	KECAMATAN PADANG LAWEH	1
34	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	1
35	KECAMATAN SITIUNG	1
36	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	1
37	KECAMATAN TIMPEH	1
38	KECAMATAN TIUMANG	1
JUMLAH		125

SEKRETARIS DAERAH

 H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19690825 198902 1 002



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi –Payakumbuh KM. 14Baso – 26192 Telp. (0752) 28240

Bukittinggi, 22 November 2022

Nomor : 893.3/1696/PPSDM-BKT
Sifat :
Lampiran :
Hal : Undangan Pembukaan Literasi
Pemerintahan Berbasis Digital

Kepada
Yth. Bapak Kepala BPSDM
KEMENDAGRI
di
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan pelaksanaan kegiatan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENDAGRI Regional Bukittinggi, kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, berkenaan hal tersebut, kami bermaksud untuk mengundang Bapak untuk membuka kegiatan dimaksud secara virtual dengan jadwal sebagai berikut :

Hari / tgl : Rabu, 23 November 2022
Jam : 09.00 WIB
Meeting ID : 961 3445 0225
Passcode : BPSDMPRIMA

Demikian disampaikan kepada Bapak, untuk jadi periksa

Kepala PPSDM Regional Bukittinggi,



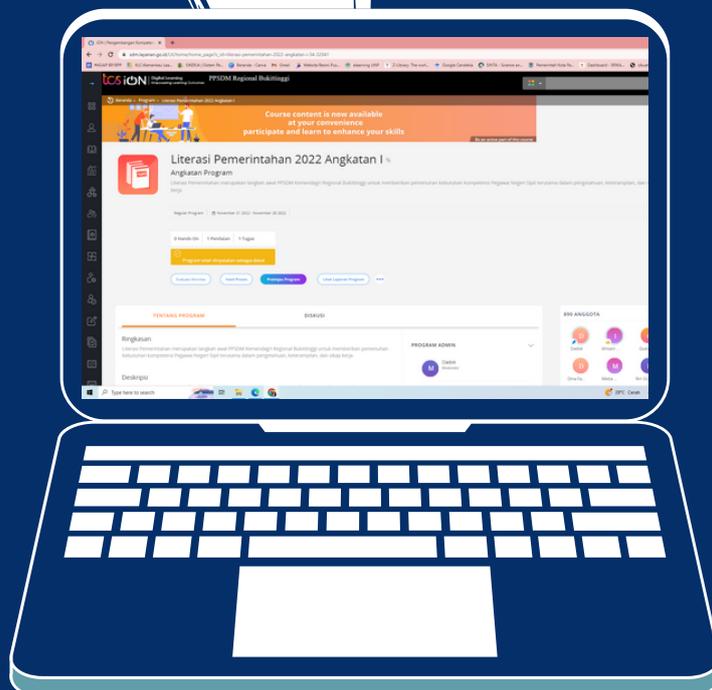
Sarjayadi, SS
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197003041996031001



LAPORAN PELAKSANAAN LITERASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI

2022 LMS



“*Learning Management System (LMS) Literasi Pemerintahan Berbasis Digital*”

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pengembangan kompetensi bagi aparatur negeri sipil dilakukan berdasarkan pada 2 undang-undang. Kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis merupakan amanat yang terdapat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi mandat berupa kompetensi Pemerintahan. Sehingga bagi setiap aparatur negeri sipil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan semua kompetensi tersebut yang distandarkan dengan jam pelajaran.

Jam pelajaran yang merupakan standar pengembangan kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah 20 Jam Pelajaran per tahun bagi masing-masing Pegawai. Upaya memberikan 4 kompetensi diterima oleh setiap pegawai paling sedikit 20 Jam Pelajaran. Hal tersebut merupakan tantangan bagi instansi pengembangan kompetensi untuk menemukan cara yang tepat agar pemenuhan hak pengembangan kompetensi tersebut bisa dilaksanakan.

Upaya menghadirkan kompetensi manajerial telah dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan menghadirkan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) serta kompetensi sosio kultural terus menjadi perhatian LAN dalam pengembangannya. Kompetensi teknis juga secara terus menerus dihadirkan oleh kementerian dan lembaga teknis misalkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan pelatihan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sedangkan kompetensi Pemerintahan telah dimulai pengembangannya dan pelaksanaannya oleh Kementerian Dalam Negeri yang dimulai dengan terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan secara khusus mengenai kompetensi

pemerintahan dijabarkan dengan rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan telah dimulai sejak 2018 melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pim Pemdagri) yang menasar pada kelompok jabatan tertentu di pemerintah daerah. Kendala waktu, pembiayaan dan jarak yang dirasakan oleh calon peserta menjadi salah satu penyebab pengembangan kompetensi pemerintahan melalui Diklat Pim Pemdagri belum menghasilkan banyak keluaran. Kendala tersebut ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi ruang tatap muka yang biasa dilakukan dalam kelas pembelajaran.

Kebijakan pimpinan pemerintah daerah terkait pengembangan kompetensi pemerintahan seakan menambah besar kendala yang dihadapi. Salah satu bukti yang ditemukan adalah tidak adanya jajaran instansi pemerintah daerah yang melakukan perencanaan dan penganggaran terkait pengembangan kompetensi pemerintahan. Upaya mencaritemukan penyebab pemerintah daerah belum merespon secara efektif pengembangan kompetensi pemerintahan dilakukan melalui pertemuan terbatas dan *focus group discussion* (FGD) dengan tema Pengembangan Kompetensi Pemerintahan melalui Literasi Pemerintahan berbasis digital. Hasil kegiatan menunjukkan informasi yang diterima aparatur pemerintah daerah belum menyeluruh terkait urgensi kompetensi pemerintahan sehingga untuk memberikan proporsi anggaran dianggap belum mendesak. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 11 November 2022 juga merumuskan perlunya ada kegiatan literasi yang masif terkait kompetensi pemerintahan yang melibatkan mulai dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga pelaksana pemberi layanan kepada masyarakat.

Pemberian Literasi haru mempertimbangkan kesibukan masing-masing pegawai agar pegawai selain mendapatkan pengetahuan awal mengenai kompetensi pemerintahan juga mendapatkan sebagian hak jam pelajaran. Pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka bisa menjadi memunculkan kendala bagi calon peserta dan juga akan menghabiskan banyak anggaran. Disamping itu, dalam banyak kesempatan Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan amanat terkait adanya transformasi digital dalam seluruh aspek pemerintahan sebab dinilai mampu

memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan. Sehingga pemberian Literasi pemerintahan bisa juga dikembangkan dengan basis digital.

b. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- i. Belum dikembangkannya kompetensi pemerintahan bagi aparatur terutama aparatur pemerintah daerah secara menyeluruh sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.
- ii. Belum dipahaminya urgensi kompetensi pemerintahan oleh aparatur pemerintah daerah.
- iii. Belum dikembangkannya kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan secara digital.

c. Batasan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya maka masalah akan dibatasi pada hal sebagai berikut:

- i. Pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis digital
- ii. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis digital.

d. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Rumusan masalah tersebut dapat diuraikan melalui beberapa pertanyaan laporan sebagai berikut:

- i. Bagaimana proses pengembangan kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan bagi aparatur pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi?

- ii. Bagaimana proses pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi?
- e. Tujuan Pengembangan
- Sesuai dengan rumusan dan pembuatan masalah yang dikemukakan di atas maka laporan bertujuan untuk memaparkan:
- i. Proses pengembangan kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.
 - ii. Proses pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis digital pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi
- f. Spesifikasi Produk
- Spesifikasi produk yang dihasilkan dari laporan ini adalah sebagai berikut:
- i. Pembelajaran Mandiri

Pembelajaran peserta secara mandiri dilakukan oleh setiap peserta dengan mengakses <http://sdm.layanan.go.id> dengan sebelumnya melakukan registrasi pada <http://sikuat.layanan.go.id>. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi hasil kerja sama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pembelajaran pada model ini merupakan pembelajaran dengan umpan balik tertunda atau dikenal istilah *asynchronus*. Secara lebih rinci pembelajaran *online* yang dilaksanakan mencakup hal berikut.

 - a. Pembelajaran *online* berisikan materi Literasi Pemerintahan.
 - b. Model Pembelajaran *online* memiliki layanan *user name* dan *password* individu bagi peserta dan fasilitator untuk menjaga individualisasi pembelajaran.
 - c. Konten (materi). Materi ini berasal dari kegiatan Literasi Pemerintahan yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

Dalam Negeri Regional Bukittinggi. Adapun materi yang diberikan pada dijabarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Materi Literasi Pemerintahan

Kompetensi Dasar	Materi
1	2
Mampu mengetahui kebijakan desentralisasi	Kebijakan Desentralisasi
Mampu mengetahui hubungan pemerintah pusat dan daerah	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Mampu mengetahui pemerintahan umum	Pemerintahan Umum
Mampu mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah
Mampu mengetahui Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Mampu mengetahui Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD
Mampu mengetahui Etika Pemerintahan	Etika Pemerintahan

- d. Navigasi Pembelajaran *online* terdapat pada setiap halaman web yang dimulai dari halaman awal (beranda). Navigasi pada *website* ini tidak hanya berupa tombol perintah akan tetapi terdapat arahan pembelajaran dari admin website.
- e. Halaman Utama. Halaman utama merupakan halaman awal untuk pengguna memilih kegiatan yang akan diikuti dengan bilah navigasi yang ada pada web.
- f. Halaman Materi. Halaman materi berisikan seluruh materi Literasi Pemerintahan berdasarkan urutan materi yang telah dipersiapkan
- g. Halaman Tugas
Berisikan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh fasilitator melalui unggahan pada kewenangan admin bagi peserta untuk memenuhi evaluasi proses pembelajaran.

ii. Pembelajaran Tatap Maya

Pembelajaran tatap maya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi video konferens yang berkapasitas 1000. Tujuannya adalah peserta mendapatkan penguatan dari materi yang telah dipelajari sebelumnya melalui aplikasi LMS yang telah disediakan.

B. Tinjauan Pustaka

a. Literasi Pemerintahan Berbasis Digital.

Literasi digunakan pada banyak konteks pembahasan yang awalnya hanya pada konteks membaca dan menulis kemudian berubah sesuai dengan kebutuhan pembahasannya. Diantara definisi yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah Literasi¹ sebagai kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Dengan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Kemampuan membaca kata dipahami sebagai kemampuan memahami informasi dengan dan dari tulisan, sedangkan memahami dunia artinya kemampuan orang memberi makna terhadap informasi yang penting bagi kehidupannya termasuk kehidupan pekerjaannya. Jika seorang bekerja dalam pemerintahan maka dunianya adalah pemerintahan yang harus dipahami dan didapatkan dengan segenap potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Konteks Literasi dalam laporan ini adalah pemerintahan² yang dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- i. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
- ii. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political);
- iii. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;

¹ <https://sevima.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan-prinsip/>

² <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2018/01/BAB-I.pdf>.

- iv. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Kutipan di atas mengarahkan pada pemerintahan³ dalam arti sempit adalah kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Proses menjalankan layanan kepada masyarakat dan langkah untuk bersinergis dalam melaksanakan tugas juga merupakan bagian dalam pemerintahan.

Tugas Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah punya kewajiban secara konstitusional untuk menjelaskan terkait dengan pemerintahan yang menjadi pembahasan dalam kinerja kementerian. Aparatur menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 dapat diakui memiliki kemampuan atau kompetensi pemerintahan jika menunjukkan kemampuan dan karakteristik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional. Lebih lanjut Permendagri tersebut menguraikan kompetensi pemerintahan berisikan 7 standar yaitu kebijakan Desentralisasi; hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah; pemerintahan umum; pengelolaan keuangan Daerah; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan etika pemerintahan.

Kompetensi pemerintahan yang harus ditunjukkan oleh aparatur sipil yang berada pada pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah dimulai dengan pengetahuan, sikap dan perilaku yang tepat sesuai dengan ketentuan. Pengembangan kompetensi pemerintahan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2017 sebanyak 12 bentuk yaitu pendidikan; pelatihan; pembimbingan; pendampingan; pemagangan; konsultasi dan konseling; seminar dan lokakarya; kursus; penataran; pembelajaran elektronik dan jarak jauh; pembekalan/orientasi tugas; pendalaman tugas; dan pengembangan kompetensi lainnya. Pengembangan kompetensi lainnya menjadi

³ Adnyani, Ni Ketut Sari. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/02000061/perbedaan-pemerintah-daerah-dan-pemerintahan-daerah>

peluang dalam pengembangan dari bentuk yang sudah ada bahkan merupakan bentuk baru dalam pengembangan kompetensi.

Peluang baru dalam pengembangan kompetensi pemerintahan berbasis digital. Definisi digital yang beragam bisa ditemukan dalam beragam media, salah satunya diantaranya merujuk pada penjelasan UNESCO⁴ ketika menjelaskan Literasi digital yaitu sebagai Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Artinya digital adalah mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi. Teknologi yang dipilih adalah pemanfaatan video konferensi dan website.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital adalah bentuk pengembangan kompetensi yang bertujuan memberikan informasi mengenai 7 standar kompetensi pemerintahan dengan memanfaatkan aplikasi video konferensi dan website.

b. Model Pembelajaran

Pembahasan model pembelajaran dapat dimulai dengan pendapat Joyce dan Weil (2003, 7) yaitu:

Models of teaching are really models of learning. As we help students acquire information, ideas, skills, values, ways of thinking, and means of expressing themselves, we are also teaching them how to learn. In fact, the most important long-term outcome of instruction may be the students' increased capabilities to learn more easily and effectively in the future, both because of the knowledge and skill they have acquired and because they have mastered learning processes.

Pemahaman pertama dari pendapat Joyce dan Weil (2003) adalah model pengajaran adalah model pembelajaran. Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa sesungguhnya model pengajaran tersebut mempunyai tujuan yang tidak bisa terlepas

⁴ <https://literasidigital.id/>

dengan kemampuan pembelajar dalam menemukan cara-cara yang memudahkan dalam mendapatkan pengalaman belajar. Ungkapan “*increased capabilities to learn more easily and effectively in the future*” adalah tujuan utama adanya model pengajaran sehingga dengan bahasa yang lebih sederhana, dapat dipahami adalah model pengajaran atau belajar atau pembelajaran merupakan upaya yang terus menerus dengan satu tujuan memudahkan pembelajar mendapatkan pengalaman belajarnya yang ditunjukkan dengan “*both because of the knowledge and skill they have acquired and because they have mastered learning processes*”, pembelajar mendapatkan tujuan belajarnya karena kemampuannya dalam belajar sudah dikembangkan dengan serangkaian cara yang dikenal sebelumnya dengan model pengajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengajaran dan pembelajaran adalah satu tujuan yaitu memudahkan pembelajar dalam melakukan proses pembelajaran.

Suparman (2012, 82) menyatakan bahwa “Model adalah suatu representasi realitas yang menggambarkan struktur dan tatanan dari suatu konsep serta menampilkan salah satu bentuk dari 4 bentuk sebagai berikut: deskripsi verbal atau konseptual, langkah-langkah kegiatan atau prosedur, replika fisik atau visual, persamaan atau rumus”. Suparman memberikan penegasan terhadap apa yang dikemukakan Joyce dan Weil mengenai struktur dan tatanan yang disebutkan oleh Jocyce dan Weil dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Hasil dari model menurut Suparman adalah representasi realitas terstruktur untuk menampilkan deskripsi verbal dan konseptual, langkah kegiatan atau prosedur, replika fisik atau visual maupun persamaan rumus.

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan strategi pembelajaran yang dirancang dan digunakan dalam tahapan atau langkah-langkah jelas dengan tujuan terukur. Tujuan yang dimaksud adalah memudahkan proses pembelajaran pembelajar sehingga mampu menunjukkan kompetensi sesuai tujuan yang ditetapkan. Pencapaian tujuan yang dimaksud tidak dapat terlepas dari efisiensi pelaksanaannya sebab pemborosan penggunaan sumber daya, penyalahgunaan aturan dan kualitas hasil yang telah ditetapkan bisa berdampak buruk pada pelaksanaan kegiatan yang lain. Anggaran dan sumber daya lain masih merupakan faktor penting selain efektifitas pembelajaran karena instansi pemerintah masih menyandarkan akuntabilitasnya pada anggaran dan pelaporan anggaran tersebut.

Perkembangan teknologi sudah tidak dapat dibendung dan setiap harinya menyerang masuk bahkan ke ruang-ruang kelas baik sekolah maupun ruang pengembangan kompetensi. Teknologi yang masuk dalam pembelajaran haruslah dibuat menjawab kebutuhan terhadap ruang kelas yang terkadang membatasi keperluan yang lain. Hofmann (2014, 4-5) dari *InSync Training* menyebutkan asumsi yang terkait bagaimana kelas harus digantikan dalam pembelajaran, yaitu:

- a. *The classroom has been utilized for so long (centuries!) not because it is the most effective means of teaching, but because it was the best “technology” that was available at the time. However, this setting is often the least optimal for delivering a particular piece of content.*
- b. *As the use of various learning technologies becomes commonplace in training departments, a perception has been building that implies that you can force fit any content into any technology.*

Asumsi yang dijelaskan Hoffman menyangkut akan dua hal penting yaitu bahwa kelas bukan berarti tidak tepat sama sekali namun terkadang memberikan dampak

kurang optimal terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan penggunaan teknologi yang lebih beragam dalam pembelajaran mampu secara tepat digunakan dalam beragam konten pengembangan kompetensi. Bila difokuskan pada pengembangan kompetensi maka penggunaan teknologi dalam pembelajaran berarti memberikan kesempatan pada pengurangan hambatan batasan ruang kelas.

c. Definisi *Learning Management System*

Thorne (2003, 84) menjelaskan mengenai LMS sebagai berikut:

“An LMS provides the technology infrastructure for companies to manage human capital development by tracking employee training information and managing, tracking and launching all events and resources associated with corporate learning. A Web-based LMS provides online course and event management, content and resource management, comprehensive assessments, enhanced skills gap analysis, content authoring, email notifications, and real-time integration with human resource, financial, and ERP systems. An LMS manages all training delivery types – third party and internal – including classroom based, e-learning, virtual classroom, technology-based training, books and video. An LMS also provides access to authoring tools, 360-degree assessments, learning content management, and/or virtual classroom functionality.”

Penjelasan Thorne (2003) memberikan informasi bahwa LMS adalah perangkat teknologi yang didesain bagi perusahaan dalam mengembangkan kemampuan pegawainya. Peningkatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah pengembangan kompetensi *on-line* dengan pantauan langsung dari perusahaan. LMS juga menyediakan fitur pengukuran dan fitur lain yang membantu proses pembelajaran. Disamping itu, LMS juga mampu memberikan pengukuran pada semua aspek, pengelolaan pada konten pembelajaran dan kelas virtual. Sejalan dengan Thorne, Jalinus dan Ambiyar (2016:201) menjelaskan bahwa “Konsep LMS merupakan bagaimana sistem pembelajaran dikelola dengan basis web dengan menggunakan berbagai perangkat lunak, sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan efisien”. Berarti, LMS merupakan pengelolaan pembelajaran berbasis *website* dengan menggunakan perangkat lunak tertentu untuk mendukung keefektifan dan keefisienan proses pembelajaran.

Vovide dalam Mtebe (2015:51) menjelaskan bahwa learning management system adalah :

“Learning Management Systems (LMS) These web-based LMS are intended to support teaching and learning activities. They consist of various features that enable faculty members to share learning materials as well as providing interaction with their students both synchronously and asynchronously”.

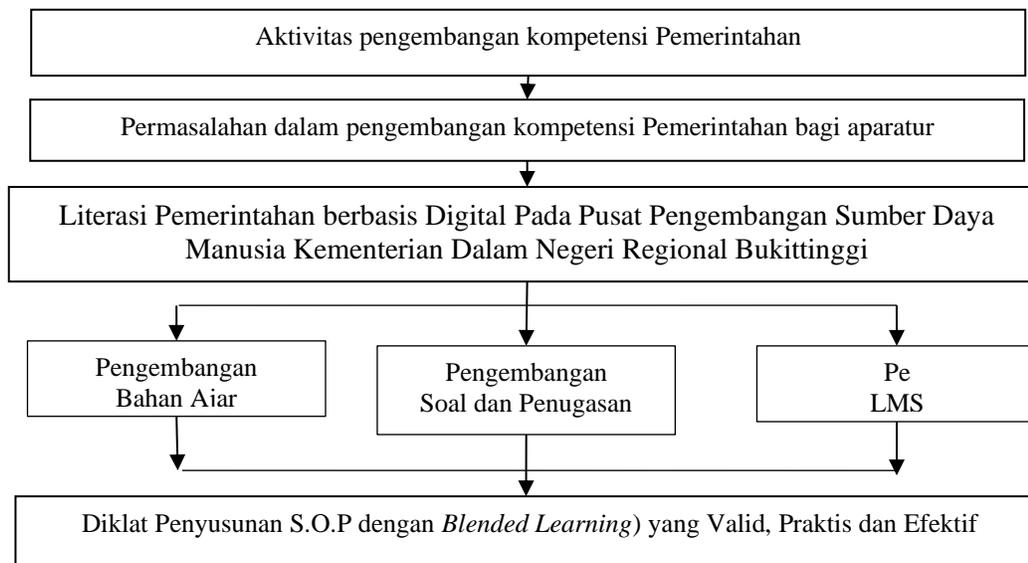
Vovide kembali menegaskan apa yang disampaikan Thorne jika dalam LMS disediakan fitur yang mendukung pembelajaran terutama pada kemampuannya menyediakan fitur komunikasi. LMS terdiri dari berbagai fitur yang memungkinkan anggota kegiatan untuk berbagi pembelajaran materi serta memberikan interaksi dengan synchronus dan asynchronus.

d. Kerangka Berpikir

Kompetensi Pemerintahan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 harus diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil terutama pada lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Disamping itu, pengembangan kompetensi yang merupakan hak setiap aparatur juga harus mampu menyediakan kompetensi pemerintahan. Kendala yang ditemui berupa ketidaktahuan mengenai urgensi kompetensi pemerintahan adalah perhatian penting untuk keberlanjutan pengembangan kompetensi pemerintahan. Perhatian tersebut diwujudkan dengan upaya mengenalkan kompetensi pemerintahan melalui sebuah kegiatan pengembangan kompetensi berbasis digital.

Kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan awal mengenai kompetensi Pemerintahan dikemas dengan memanfaatkan aplikasi video konferensi dan website. Target peserta yang tidak dibatasi pada kelompok jabatan tertentu mampu memperluas jangkauan penerima manfaat terhadap pengenalan kompetensi Pemerintahan. Tujuan lainnya adalah memberikan pemenuhan sebagian hak pengembangan kompetensi terhadap aparatur berupa beberapa jam pelajaran.

Kegiatan yang diberi judul “Literasi Pemerintahan Berbasis Digital” dilaksanakan selama 5 hari dengan 12 jam pelajaran. Pengembangan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan kerangka berikut:



Gambar. Kerangka konseptual pengembangan Literasi Pemerintahan berbasis Digital

C. Pembahasan

a. Tahapan Pengembangan Literasi Pemerintahan

Proses pengembangan kegiatan Literasi Pemerintahan dilakukan melalui beberapa tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

i. Tahapan Pengembangan Bahan Ajar.

Bahan ajar dikembangkan oleh pejabat fungsional widyaiswara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi sebanyak 12 orang. Waktu pengembangan yang digunakan selama 15 hari kerja antara 17 Oktober sampai 3 November 2022. Materi yang dikembangkan diberikan pembobotan jam pelajaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Materi	Jumlah Jam Pelajaran
1.	Kebijakan Desentralisasi	1
2.	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah	1

No	Nama Materi	Jumlah Jam Pelajaran
3.	Pemerintahan Umum	1
4.	Pengelolaan Keuangan Daerah	1
5.	Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	1
6.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD	1
7.	Etika Pemerintahan	1
8.	Diskusi Pendalaman (Sinkronus)	3
Total		12

Dokumen bahan ajar menjadi lampiran 1 dari laporan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital dengan memanfaatkan website dan aplikasi video konferensi.

ii. Tahapan Pengembangan Soal dan Penugasan Peserta.

Tujuan Literasi Pemerintahan adalah mengenalkan kompetensi pemerintahan kepada aparatur se wilayah kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sehingga yang menjadi fokus dari tujuan adanya terjadinya peningkatan pengetahuan pada peserta. Upaya mengukur hal tersebut adalah dengan memberikan tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir dalam beberapa soal.

Soal yang dikembangkan berjumlah 30 butir dengan bentuk pilihan ganda. Soal telah digunakan sebelumnya oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang diberikan pada kegiatan Penguatan Kegiatan Teknis Bidang Tugas. Sedangkan penugasan yang diberikan kepada peserta adalah berupa bukti kehadiran untuk melihat aktivitas peserta dalam mengikuti pembelajaran. Presentasi bobot soal, tugas dan kehadiran dijabarkan sebagai berikut:

No	Jenis Aktivitas Pembelajaran	Bobot Terhadap Ketuntasan Akhir
1.	Penyelesaian Soal	60%
2.	Penyelesaian Tugas	30%

No	Jenis Aktivitas Pembelajaran	Bobot Terhadap Ketuntasan Akhir
3.	Kehadiran dalam sesi video konferensi	10%

Peserta dianggap menyelesaikan pembelajaran apabila bobot akhir adalah 70%. Dokumen soal dan dokumen penugasan terdapat dalam lampiran 2.

iii. Tahapan Pemanfaatan LMS (Upload Bahan Ajar, Soal dan Penugasan Peserta).

Learning Management System (LMS) yang dimanfaatkan dalam Literasi Pemerintahan merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi Informatika. Adapun link yang digunakan adalah <http://sdm.layanan.go.id> dan <http://sikuat.layanan.go.id> dengan proses rincian sebagai berikut:

- a) Pendaftaran admin LMS. Tugas admin LMS adalah melakukan verifikasi pendaftaran, melakukan upload dan penugasan. Admin LMS yang bertugas dalam Literasi Pemerintahan adalah sebanyak 5 orang yaitu, Yuli Fazriyani, S.T, M.T.I, ME (BPSDM Kemendagri), Ikhsani Novella, S.STP (PPSDM Regional Bukittinggi), Silvani Restifa, S.E (PPSDM Regional Bukittinggi), M. Irfan Gustaman (BPSDM Kemendagri) dan Mulya Nanda Hariandja (PPSDM Regional Bukittinggi).
- b) Unggah dokumen materi dan penugasan. Proses unggah dilakukan oleh admin PPSDM secara bertahap dari 3 November sampai dengan 18 November 2022. Upaya bertahap adalah agar materi yang diunggah dapat diakses dengan baik oleh peserta.
- c) Ujicoba menggunakan akun pegawai PPSDM. Tujuannya untuk mendapatkan kepastian tampilan yang baik bagi peserta,

b. Pelaksanaan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital melalui LMS

Pelaksanaan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital dilakukan antara 21 hingga 30 November 2022 melalui rangkaian kegiatan sebagaimana berikut:

i. Kegiatan Pendaftaran.

Pendaftaran peserta dimulai sejak 16 November 2022 melalui aplikasi <http://sikuat.layanan.go.id> dengan mengisi sejumlah data yang diperlukan. Proses pendaftaran secara resmi ditutup tanggal 23 November 2023 yaitu sebelum proses pembelajaran tatap maya melalui aplikasi video konferensi.

Admin BPSDM melaporkan jumlah akun yang mendaftar adalah sebanyak 1224 orang berasal dari beberapa 24 Kabupaten/Kota dengan Rincian sebagai berikut:

**REKAP SEBARAN PESERTA LITERASI PEMERINTAHAN 2022
ANGKATAN I**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Agam	79
2	Bandung	1
3	Bantul	1
4	Kabupaten Dharmasraya	139
5	Gresik	1
6	Kupang	3
7	Langkat	1
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	1
9	Kabupaten Padang Pariaman	134
10	Kabupaten Pasaman	94
11	Kabupaten Sijunjung	2
12	Kabupaten Solok	1
13	Kabupaten Solok Selatan	322
14	Kabupaten Tanah Datar	163
15	Kota Batam	1
16	Kota Bukittinggi	87
17	Kota Padang	49
18	Kota Padang Panjang	101
19	Kota Pariaman	14
20	Kota Payakumbuh	1
21	Kota Pekanbaru	1
22	Kota Semarang	1
23	Kota Solok	2
24	PPSDM Regional Bukittinggi	25
JUMLAH		1224

Data seluruh peserta dimuat dalam lampiran laporan 3.

- ii. Kegiatan Tes Kemampuan Awal

Tes dilakukan sejak 21 hingga 23 November 2022 dengan peserta yang mengakses pre test sejumlah 377 orang dari total 1224 orang akun yang mendaftar. Rata-rata skor yang didapat sebanyak 72,55. Sebagaimana daftar lampiran 4.
- iii. Kegiatan Pembelajaran Mandiri Materi

Aktivitas pemanfaatan LMS oleh peserta ditemukan 881 orang dari 1224 orang yang mendaftar melakukan akses sesuai link yang tersedia. Sebagaimana daftar nama pada lampiran 5.
- iv. Kegiatan Pembelajaran Tatap Maya.

Tatap maya dilakukan pada tanggal 23 November 2022 pukul 09.00 hingga 12.30. Link video konferensi diakses peserta melalui LMS dan dianggap sebagai kehadiran pembelajaran tatap muka. Jumlah peserta yang melakukan akses link melalui LMS sebanyak 467 orang dari 1224 orang yang mendaftar. Sebagaimana daftar nama pada lampiran 6.
- v. Kegiatan Penyelesaian Tugas

Upaya menjamin peserta mengikuti pembelajaran tatap maya dilakukan dengan meminta peserta melakukan tangkapan layar saat mengikuti sesi pembelajaran. Dari total 1224 orang yang mendaftar yang melakukan pemenuhan tugas tangkapan layar sebanyak 444 orang. Sebagaimana daftar nama pada lampiran 7.
- vi. Kegiatan Tes Kemampuan Akhir

Peserta kemudian diberikan tes kemampuan akhir pada 23 November 2022 pukul 15.00. Total peserta yang mengikuti tes kemampuan akhir adalah 569 orang dari 1224 orang yang mendaftar dengan rata-rata nilai 80. Sebagaimana daftar nama pada lampiran 8.
- vii. Kegiatan Unduh Sertifikat

Rangkaian akhir dalam kegiatan Literasi Pemerintahan adalah bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran secara 100% dan memiliki pencapaian kumulatif di atas 70 berhak mendapatkan sertifikat (desain dalam lampiran 9). Jumlah peserta yang berhak mendapatkan sebesar 383 orang

dari 1224 orang yang mendaftar dalam proses pembelajaran. Sebagaimana daftar nama pada lampiran 10.

c. Kendala Pelaksanaan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital Melalui LMS

Pelaksanaan Literasi Pemerintahan dengan memanfaatkan LMS menemui beberapa kendala yang dikelompokkan dan dijelaskan sebagai berikut:

- i. Kendala Peserta. Kompetensi digital terutama dalam melakukan beberapa kegiatan pada aplikasi berbasis web. Secara rinci kendala yang ditemui peserta sebagai berikut:
 - a) Peserta kesulitan melakukan registrasi karena kesulitan menuliskan alamat pendaftaran. Solusi kendala ini adalah admin PPSDM memberikan bantuan terhadap pertanyaan peserta secara personal dan dalam sehari admin bisa mendapatkan 85 sampai 100 pertanyaan dengan tema yang sama.
 - b) Peserta kesulitan mengikuti alur kegiatan terutama jika ditemui adanya perintah pada web. Misal peserta diminta masuk dengan “Course Participant User” namun peserta masuk dengan “Course Guest Participant”. Hal tersebut terjadi dimungkinkan akibat peserta tidak mengakses panduan dan video tutorial yang dikembangkan oleh admin LMS PPSDM. Sama halnya dengan penyelesaian pendaftaran, admin PPSDM memberikan asistensi per masing-masing peserta.
 - c) Peserta kesulitan melakukan pengambilan tangkapan layar guna penyelesaian penugasan. Hal tersebut karena pengambilan tangkapan layar menggunakan perangkat telepon pintar maupun komputer memerlukan keterampilan digital lainnya. Peran admin PPSDM juga menjadi pemandu teknis dengan melakukan panggilan video dengan peserta melalui aplikasi Whats App dan hal tersebut dilakukan pada 59 sampai 75 orang peserta per hari. Jumlah tersebut belum dihitung pesan teks melalui aplikasi Whats App atau pesan singkat yang diperkirakan jumlahnya lebih dari 300 pesan. Tangkapan layar pertanyaan dan keluhan peserta dalam disertakan dalam lampiran 11.
 - d) Peserta kesulitan memahami mekanisme atau alur kerja LMS sehingga beberapa kali mengajukan pertanyaan teknis. Misal waktu penutupan, waktu upload tugas dan waktu mendapatkan sertifikat. Terkait kendala ini admin

PPSDM melakukan komunikasi melalui Whats App Group yang telah disediakan sebelumnya.

ii. Kendala LMS

Peserta yang diasumsikan menemui kendala pemanfaatan LMS salah satunya disebabkan akibat kompetensi digital yang belum mumpuni. Hal tersebut juga makin sulit akibat ditemukan juga sumber masalah dari aplikasi LMS. Berikut beberapa masalah LMS yang ditemukan:

- a) Kewenangan admin masih belum merata. Hal tersebut salah satunya ditemukan pada saat memerlukan tindakan berupa memanggil peserta hanya bisa dilakukan oleh admin pusat.
- b) Alur pendaftaran yang berada di luar aplikasi atau berbeda alamat. Alamat pendaftaran di tempatkan pada alamat <http://sikuat.layanan.go.id> sedangkan alamat kegiatan di <http://sdm.layanan.go.id>. Hal tersebut menimbulkan asumsi peserta jika melakukan pendaftaran maka secara otomatis masuk dalam kegiatan padahal masih ada satu proses yang disebut “Approval Admin Pusat”. Disamping itu pendaftaran peserta dalam jumlah besar dalam waktu bersamaan menyebabkan Admin Pusat kesulitan hal tersebut terjadi pada kegiatan Literasi Pemerintahan pada 21 November 2022 total pendaftar mencapai 800 orang dalam waktu bersamaan.
- c) Bilah pendaftaran pada bagian tahun lahir hanya memuat sampai 1972 menyebabkan beberapa peserta menyimpulkan bahwa aparatur yang berhak mengikuti hanya peserta yang memiliki tahun lahir di atas 1972.
- d) Tampilan LMS yang berisi banyak animasi bergerak menghambat proses “loading page”. Animasi dan gambar gerak lainnya membutuhkan data yang lebih besar dibanding gambar diam. Hal ini dikeluhkan peserta karena terasa lambat ketika mengakses laman.
- e) Feature Test yang memerlukan tahapan saat unggah soal menyulitkan admin kegiatan karena kewenangan unggah butir soal pada bank soal masih berada di admin pusat.

- f) Database yang belum sinkron menyebabkan hasil akhir aplikasi sulit terbaca sesuai jadwal. Sertifikat peserta belum tersedia walaupun peserta sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran. Hal tersebut mampu menurunkan kepercayaan peserta terhadap admin penyelenggara karena dianggap aplikasi tidak sesuai atau tidak mampu berjalan sesuai waktu.

d. Rencana Tindak Lanjut Literasi Pemerintahan Melalui LMS

Pemanfaatan LMS pada kegiatan Literasi Pemerintahan merupakan pembelajaran bagi perkembangan model pembelajaran online ke depan. Beberapa tindak lanjut direncanakan terkait pemanfaatan LMS yaitu:

- i. Melakukan diversifikasi kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan PPSDM dengan memanfaatkan LMS. Beberapa jenis pelatihan bisa dimasukkan dalam LMS seperti Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan, Pelatihan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas dan Pelatihan Teknis Penyusunan SOP Administrasi.
- ii. Melakukan koordinasi dengan Admin BPSDM, Admin Kominfo dan pengguna lainnya terkait pengembangan aplikasi agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan kenyamanan peserta dalam menggunakannya.

D. Penutup

a. Kesimpulan

Pemanfaatan LMS pada Literasi Pemerintahan Berbasis Digital menunjukkan hasil sesuai dengan tujuan awal pengembangan kompetensi Pemerintahan dari ranah pengetahuan. Peserta pelatihan secara pengetahuan menunjukkan peningkatan sebesar 7.45 poin dari skor rata-rata tes kemampuan awal sebesar 72, 55 menjadi 80 pada rata-rata skor tes kemampuan akhir. Disamping itu Literasi Pemerintahan Berbasis Digital menjadi upaya peningkatan kompetensi digital secara langsung terutama bagi peserta yang memiliki usia diatas 50 Tahun.

b. Rekomendasi

i. Bagi PPSDM Regional Bukittinggi

PPSDM Regional Bukittinggi memiliki kesempatan besar dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis web dengan hadirnya LMS di BPSDM Kemendagri. Terkait hal tersebut beberapa hal yang bisa dilakukan oleh PPSDM adalah:

- a) Pengembangan kurikulum tatap muka menjadi kurikulum berbasis online dan melakukan ujicoba dalam waktu dekat.
- b) Pemberian penguatan terhadap pengembangan konten digital dan bisa dimulai dengan pengembangan bahan ajar teks menggunakan format Pdf.

ii. Bagi Tim LMS BPSDM Kemendagri

Peran admin BPSDM sebagai admin pusat dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pada admin kegiatan sehingga mampu mempercepat proses. Disamping itu pengembangan LMS juga diharapkan berasal dari informasi kendala yang ditemui saat pemanfaatan oleh instansi lainnya. Masukkan dari pengguna lainnya akan memperkecil kemungkinan kesalahan yang akan muncul kemudian.

iii. Bagi Tim Pengembangan Aplikasi Kemkominfo

Tim Aplikasi Kemkominfo memiliki peran kunci dalam memberikan layanan terhadap pemanfaatan LMS. Secara umum beberapa hal bisa dilaksanakan oleh Tim Aplikasi Kemkominfo adalah:

a) Aplikasi.

Aplikasi yang dikembangkan untuk pengguna seluruh Indonesia diharapkan mempertimbangkan kemampuan akses internet pada daerah terluar yang belum menjadi terkait kemampuan internet. Aplikasi yang dikembangkan harus nyaman secara tampilan, cepat dalam proses pemuatan laman dan mengurangi konten web yang tidak penting dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya mengenai kemampuan database yang ternyata masih banyak kendala, sebaiknya proses ujicoba aplikasi dibuat bertahap sesuai dengan 10 langkah penelitian pengembangan menurut Sugiyono yaitu potensi dan

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, ujicoba produk, revisi produk, ujicoba pemakaian, revisi produk, dan produksi masal.

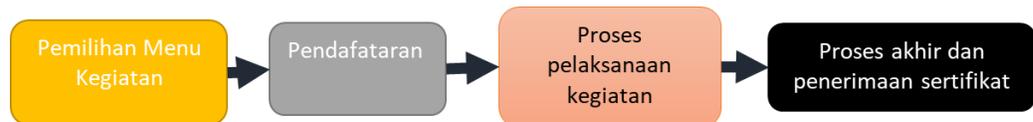
b) Alur kegiatan aplikasi.

Alur pemakaian aplikasi bisa ditelaah sebagai berikut:



Pada diagram di atas, peserta belum mendapatkan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa diasumsikan sebagian pengguna tidak merasa penting untuk melakukan pendaftaran atau seperti pada Literasi Pemerintahan dimana peserta menganggap telah masuk dalam kegiatan karena telah melakukan pendaftaran. Sementara dengan alur ini, proses approval adalah pada admin pusat dan akan menemui banyak kendala jika dalam waktu bersamaan terjadi penumpukan jumlah pendaftar untuk beberapa kegiatan pelatihan.

Pertimbangan lainnya jika alurnya dikembangkan sebagai berikut:



Pendaftaran bisa menjadi tahapan kedua dari pemanfaatan sehingga setelah peserta menemukan kebutuhan pengembangan kompetensi kemudian melakukan pendaftaran. Proses persetujuan peserta pada alur ini bisa dialihkan ke admin kegiatan sehingga lebih mudah memantau proses pendaftaran.

c) Tampilan.

Pertimbangan kemampuan internet di beberapa daerah masih belum memadai maka layaknya tampilan dibuat lebih sederhana agar memudahkan proses “loading page”.

d) Penanganan pengaduan

Pengaduan akibat pengaduan sebaiknya dilakukan berjenjang dan masuk dalam dalam satu feature LMS sehingga baik admin kegiatan, admin pusat dan admin Kemkominfo mendapatkan informasi yang sama. Di sisi lain, alur pengaduan harus dikembangkan secara efisien sehingga tidak terkesan pemanfaatan teknologi informasi namun dikelola secara manual. Misalkan penanganan atas gangguan terukur baik progres dan waktunya serta bisa terinformasikan secara langsung kepada admin pusat, admin kegiatan dan bahkan jika memungkinkan adanya progres aduan juga diketahui sampai peserta.

LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 5

Dokumentasi Rapat Persiapan Literasi Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital



- Agenda : Rapat Persiapan Penyelenggaraan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital
- Lokasi : Ruang Rapat PPSDM Regional Bukittinggi
- Waktu : 22 November 2022

<http://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/>



@ppsdmregbukittinggi



PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

#bangga
#bangga
#bangga
melayani
bangsa

LAMPIRAN TAHAPAN KEGIATAN 5

Dokumentasi Pelaksanaan Literasi Kompetensi Pemerintahan Berbasis Digital



PPSDM
Regional Bukittinggi



Pembukaan oleh Kepala PPSDM Reg. Bukittinggi Sarjayadi, SS



Room 1
Narasumber :Dr. Mudji Estiningsih, SH, M.Hum
Moderator : Ratna Sriwina, M.Si



Room 2
Narasumber : Afri Yendra, SH, MH
Moderator : Andari Dwi Utami, SH, MH

Agenda : Pelaksanaan Literasi Pemerintahan Berbasis Digital

Waktu : 22 November 2022

<http://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/>

[f](https://www.facebook.com/ppsdmbukittinggi) [i](https://www.instagram.com/ppsdmbukittinggi) @ppsdmbukittinggi

[y](https://www.youtube.com/channel/UC...) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi

